



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Lampiran VII: Peraturan Daerah Kabupaten Kampar
Nomor :
Tanggal :

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efisiensi dan efektivitas keuangan pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

Akuntabilitas ~> Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Manajemen ~> Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

Transparansi ~> Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Keseimbangan antargenerasi ~> Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode pelaporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan tidak akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Evaluasi Kinerja ~> Melakukan evaluasi kinerja entitas pelapor, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tujuan spesifik laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk pungutan pajak dan pinjaman; dan
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar TA 2020 berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

- r. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya;
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- z. Peraturan Bupati Kampar Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kampar;
- å. Peraturan Bupati Kampar Nomor 42 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kampar;
- ä. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar;
- ö. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Kabupaten Kampar mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan Kabupaten Kampar disajikan informasi-informasi yang berkaitan dengan aspek keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat strategis, yaitu program dan kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 dan kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kampar.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Sistematika penyajian laporan keuangan daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan
 - 1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan keuangan
 - 2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
 - 3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
- Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 1. Ekonomi makro
 - 2. Kebijakan keuangan
 - 3. Indikator pencapaian target kinerja APBD
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
 - 2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- Bab IV Kebijakan Akuntansi
 - 1. Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan
 - 2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 - 3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 - 4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
 - 1. Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar
 - a. Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - b. Penjelasan pos-pos Laporan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
 - c. Penjelasan pos-pos Neraca
 - d. Penjelasan pos-pos Laporan Operasional (LO)
 - e. Penjelasan pos-pos Laporan Arus Kas (LAK)
 - f. Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)
 - 2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas
- Bab VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan
- Bab VII Penutup



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

1. EKONOMI MAKRO KABUPATEN KAMPAR

Beberapa indikator makro bidang ekonomi yang dicapai Pemerintah Kabupaten Kampar dalam periode sampai dengan data terakhir yang dapat disediakan, yaitu tahun 2021, adalah sebagai berikut :

A. STRUKTUR EKONOMI

Bila dilihat data distribusi persentase PDRB Kabupaten Kampar yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kampar, maka struktur perekonomian di Kabupaten Kampar tidak terjadi pergeseran yang berarti dari tahun 2017 hingga tahun 2021, yang lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kampar
atas dasar harga BERLAKU menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)
Tahun 2017 – Tahun 2021

LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	19 589,82	20 289,02	21 508,32	24 141,40	28 522,17
B. Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	24 678,05	28 297,52	25 027,29	17 914,02	22 983,91
C. Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	16 474,47	17 000,87	18 155,69	18 951,56	22 053,03
D. Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	40,84	44,16	47,81	52,80	55,53
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,87	3,91	4,01	4,05	4,26
F. Konstruksi/ <i>Construction</i>	5 091,36	5 439,62	5 907,26	5 734,65	6 183,68
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	2 433,99	2 605,67	2 871,41	2 548,58	2 960,36
H. Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	218,38	237,61	262,55	255,69	277,10
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	62,24	65,70	70,89	60,57	68,82
J. Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	272,57	287,47	311,15	336,51	361,25
K. Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	19 589,82	20 289,02	21 508,32	24 141,40	28 522,17
L. Real Estate/ <i>Real Estate Activities</i>	298,83	322,67	328,94	340,28	376,53
M,N. Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	675,30	708,73	761,45	779,21	812,03
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	2,51	2,67	2,97	2,43	2,45
P. Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	1 030,10	1 089,34	1 160,87	1 112,76	1 115,60
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	356,47	385,86	425,17	447,55	465,74
R,S,T,U. Jasa Lainnya/ <i>Others Services Activities</i>	129,92	135,77	157,02	182,09	204,83
PDRB	212,29	236,32	264,37	212,15	223,07
PDRB Tanpa Migas					
A Nilai Tambah Bruto Atas Harga Dasar/ <i>Gross Value Added at Basic Price</i> B Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk/ <i>Taxes Less Subsidies on Products</i> C Produk Domestik Bruto/ <i>Gross Domestic Product</i>					

Sumber: BPS Kampar Dalam Angka 2022



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Tabel 2
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kampar
atas dasar harga KONSTAN menurut Lapangan Usaha (Jutaan Rupiah)
Tahun 2017– Tahun 2021

	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	14 596,72	15 433,67	16 318,62	17 165,39	18 166,83
B. Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	13 083,38	12 362,26	11 628,28	10 889,94	10 566,70
C. Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	14 151,23	14 668,08	16 051,38	15 900,07	16 568,64
D. Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	24,39	26,01	26,89	29,18	30,70
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,96	2,96	2,97	2,99	3,14
F. Konstruksi/ <i>Construction</i>	3 236,10	3 348,10	3 522,45	3 406,73	3 527,06
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	1 536,74	1 631,83	1 716,90	1 466,20	1 690,37
H. Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	155,44	162,60	170,63	156,80	165,80
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	40,94	42,64	45,45	38,04	42,80
J. Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	210,45	214,85	227,22	245,93	262,93
K. Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	228,16	238,84	239,42	248,66	261,12
L. Real Estate/Real Estate Activities	470,37	487,88	514,51	524,58	540,93
M,N. Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	1,78	1,87	1,99	1,59	1,61
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	806,55	830,10	870,31	810,96	806,24
P. Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	238,78	252,82	272,27	280,36	289,77
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	85,59	87,62	97,35	110,36	122,84
R,S,T,U. Jasa Lainnya/ <i>Others Services Activities</i>	152,43	166,71	182,20	142,70	148,88
PDRB	49 022,01	49 958,84	51 888,83	51 420,47	53 196,37
PDRB Tanpa Migas	14 596,72	15 433,67	16 318,62	17 165,39	18 166,83
A Nilai Tambah Bruto Atas Harga Dasar/Gross Value Added at Basic Price					
B Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk/Taxes Less Subsidies on Products					
C Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Product					

Sumber: BPS Kampar Dalam Angka 2022

Dari Hasil Perhitungan PDRB Kabupaten Kampar atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha dapat diketahui besarnya laju pertumbuhan dan struktur ekonomi Kabupaten Kampar. Bila dilihat dari angka PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha, maka telah terjadi kenaikan dari 51.420,47 Juta pada tahun 2020 menjadi 53.196,37 Juta pada tahun 2021.

Tabel 3
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Kampar
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2017 – Tahun 2021

LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	27,37	26,30	27,84	33,04	32,91
B. Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	34,48	36,68	32,39	24,51	26,52
C. Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	23,02	22,04	23,50	25,93	25,44



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

D. Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	0,06	0,06	0,06	0,07	0,06
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
F. Konstruksi/Construction	7,11	7,05	7,65	7,85	7,13
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	3,40	3,38	3,72	3,49	3,42
H. Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	0,31	0,31	0,34	0,35	0,32
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08
J. Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	0,38	0,37	0,40	0,46	0,42
K. Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	0,42	0,42	0,43	0,47	0,43
L. Real Estate/Real Estate Activities	0,94	0,92	0,99	1,07	0,94
M,N. Jasa Perusahaan/Business Activities	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	1,44	1,41	1,50	1,52	1,29
P. Jasa Pendidikan/Education	0,50	0,50	0,55	0,61	0,54
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	0,18	0,18	0,20	0,25	0,24
R,S,T,U. Jasa Lainnya/Others Services Activities	0,30	0,31	0,34	0,29	0,26
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

A Nilai Tambah Bruto Atas Harga Dasar/Gross Value Added at Basic Price

B Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk/Taxes Less Subsidies on Products

C Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Product

Sumber: BPS Kampar Dalam Angka 2022

Tabel 4
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kampar
Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 – 2021

LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	6,76	5,73	5,73	5,19	5,83
B. Pertambangan dan Penggalan/ <i>Mining and Quarrying</i>	-5,33	-5,51	-5,94	-6,35	-2,97
C. Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	7,16	3,65	9,43	-0,94	4,20
D. Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	4,81	6,64	3,36	8,55	5,18
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,77	-0,12	0,45	0,69	4,93
F. Konstruksi/ <i>Construction</i>	3,51	3,46	5,21	-3,29	3,53
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	5,74	6,19	5,21	-14,60	15,29
H. Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	5,63	4,61	4,93	-8,10	5,74
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	4,09	4,16	6,57	-16,29	12,51
J. Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	1,98	2,09	5,76	8,24	6,91
K. Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	2,98	4,68	0,24	3,86	5,01
L. Real Estate/ <i>Real Estate Activities</i>	2,97	3,72	5,46	1,96	3,12
M,N. Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	4,24	4,94	6,53	-20,32	1,53
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	3,14	2,92	4,84	-6,82	-0,58
P. Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	5,46	5,88	7,69	2,97	3,36
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	2,99	2,37	11,11	13,36	11,31
R,S,T,U. Jasa Lainnya/ <i>Others Services Activities</i>	7,75	9,37	9,29	-21,68	4,33
PDRB	2,97	1,91	3,86	-0,90	3,45



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

A Nilai Tambah Bruto Atas Harga Dasar/Gross Value Added at Basic Price
B Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk/Taxes Less Subsidies on Products
C Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Product

Sumber: BPS Kampar Dalam Angka 2022

Tabel 5
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran (miliar rupiah), 2017-2021

Jenis Pengeluaran <i>Type of Expenditure</i>	2017	2018	2019	2020	2021
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga / <i>Households Consumption Expenditure</i>	32 526,78	34 370,41	36 330,57	36 684,18	38 777,12
Pengeluaran Konsumsi LNPRT / <i>NPISHs Consumption Expenditure</i>	376,83	419,19	467,54	474,60	488,16
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah / <i>Government Consumption Expenditure</i>	2 636,89	2 780,40	2 979,11	3 041,40	3 042,21
Pembentukan Modal Tetap Bruto / <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	24 276,37	25 999,25	27 736,71	28 074,55	30 512,88
Perubahan Inventori / <i>Changes in Inventories</i>	736,63	917,57	1 601,29	1 830,43	222,74
Net Ekspor Barang dan Jasa/ <i>Net Export of Goods and Services</i>	11 017,52	12 666,12	8 151,93	2 971,14	13 627,21
Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Product	71 571,02	77 152,93	77 267,15	73 076,30	86 670,33

Sumber: BPS Kampar Dalam Angka 2022

Tabel 6
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran (miliar rupiah), 2017-2021

Jenis Pengeluaran <i>Type of Expenditure</i>	2017	2018	2019	2020	2021
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga / <i>Households Consumption Expenditure</i>	20 624,32	21 368,45	22 072,59	21 650,90	22 394,91
Pengeluaran Konsumsi LNPRT / <i>NPISHs Consumption Expenditure</i>	244,53	266,10	290,34	286,77	290,17
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah / <i>Government Consumption Expenditure</i>	1 797,11	1 846,57	1 928,07	1 789,74	1 782,03
Pembentukan Modal Tetap Bruto / <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	14 710,70	15 276,63	15 802,44	15 586,54	16 222,12
Perubahan Inventori / <i>Changes in Inventories</i>	410,24	342,18	399,86	569,43	97,69
Net Ekspor Barang dan Jasa/ <i>Net Export of Goods and Services</i>	11 235,10	10 858,91	11 395,54	11 537,10	12 409,45
Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Product	49 022,01	49 958,84	51 888,83	51 420,47	53 196,37

Sumber: BPS Kampar Dalam Angka 2022

2. KEBIJAKAN KEUANGAN KABUPATEN KAMPAR

A. VISI PEMBANGUNAN KABUPATEN KAMPAR

Visi pembangunan daerah adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Akhir periode perencanaan yang dimaksudkan oleh RPJMD ini adalah tahun 2022. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil dari pemilihan kepada daerah yang telah diselenggarakan dengan lancar pada tahun 2017.

Rumusan visi berguna untuk memberikan panduan sehingga segala sumber daya dapat digunakan secara terarah, guna mewujudkan kondisi akhir yang dicita-citakan melalui serangkaian tahapan kegiatan. Agar dapat mencapai maksud tersebut, maka rumusan visi



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

haruslah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan, termasuk juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua kebijakan pembangunan.

Berdasarkan pada kebutuhan daerah, potensi, permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah, maka visi pembangunan daerah yang ditetapkan untuk periode 2017-2022 adalah sebagai berikut:

”Terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai Wilayah Industri dan Pertanian yang Maju dengan Masyarakat yang Religius, Beradat, Berbudaya dan Sejahtera”

Rumusan visi tersebut mengandung empat kata-kata kunci yang masing-masingnya memiliki pengertian sebagai berikut:

- 1) Wilayah industri yang maju, ialah Kabupaten Kampar dengan pertumbuhan sektor industri yang meningkat dan dukungan infrastruktur yang memadai. Termasuk di dalam sektor industri ini adalah industri pariwisata.

Sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang, industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Kehendak untuk menjadikan Kabupaten Kampar sebagai wilayah industri adalah kehendak untuk tidak hanya bergantung pada kegiatan-kegiatan ekstraksi sumber daya alam saja melainkan juga peningkatan nilai tambah barang. Cita-cita ini didukung oleh data sektor industri pengolahan selalu menempati tiga besar dalam kontribusinya terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dengan pencapaian tersebut, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi kedua setelah sektor pertanian untuk wilayah ini.

Untuk saat ini, karakteristik industri pengolahan di Kabupaten Kampar di dominasi oleh subsektor industri makanan dan minuman dengan kategori pengolahan kelapa sawit. Tentunya pengembangan sektor industri akan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan dapat memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Apalagi terdapat sektor pariwisata sebagai bagian dari pengembangan industri ini yang mutlak membutuhkan lingkungan hidup yang asri.

- 2) Wilayah pertanian yang maju, ialah Kabupaten Kampar dengan produk pertanian yang berkualitas, produktivitas tinggi, dan petani yang sejahtera. Saat ini sebagian besar masyarakat Kabupaten Kampar memang menggeluti sektor pertanian sebagai mata pencahariannya, mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, serta perikanan. Dengan memajukan sektor pertanian berarti mengangkat taraf ekonomi sebagian besar masyarakat.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Selain prioritas terhadap subsektor perkebunan, memajukan pertanian juga dilakukan dengan memberi perhatian tersendiri pada subsektor tanaman pangan. Meskipun kontribusinya jauh lebih kecil dibanding subsektor perkebunan tahunan, namun pertumbuhannya menunjukkan tren positif. Prioritasi pada subsektor ini, selain menunjang ketahanan pangan daerah, juga berkontribusi terhadap prioritas nasional produksi pangan (padi, jagung, kedelai).

- 3) Masyarakat yang religius, ialah masyarakat Kabupaten Kampar yang meletakkan nilai-nilai agama sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Landasan nilai-nilai agama ini tercermin dari sikap dan perilaku masyarakat yang berakhlak mulia, suasana kehidupan yang agamis, dan kehidupan antar umat beragama yang harmonis. Nilai-nilai agama terinternalisasi dalam diri pribadi masing-masing, dan teraktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk etos kerja yang tinggi, disiplin dan jujur sebagaimana agama telah mengajarkan. Dalam hubungan sesama manusia, baik antar suku, ras, agama, maupun antar golongan, terjalin relasi yang rukun dan saling menghormati. Demikian pula halnya dengan relasi terhadap alam, nilai-nilai ramah lingkungan terinternalisasi sehingga dapat menghindarkan diri dari perilaku-perilaku yang merusak alam.
- 4) Masyarakat yang beradat dan berbudaya, ialah masyarakat Kabupaten Kampar yang memegang teguh nilai-nilai adat dan budaya lokal sehingga dapat menjadi bagian dari karakter dan kepribadian sekaligus penciri dan identitas daerah. Adat dan budaya yang mengandung kearifan tradisional ini menjadi tata nilai yang mengatur masyarakat yang menjadi anggotanya sehingga warisan leluhur yang agung ini dapat senantiasa dipraktekkan dan dilestarikan. Masyarakat hukum adat pada berbagai kenegarian diakui keberadaannya berikut hak ulayatnya sehingga dapat menjadi kelembagaan lokal yang kuat untuk mengatur kehidupan masyarakat dan mengelola sumber daya alam setempat. Produk-produk kebudayaan warisan masa silam seperti keberadaan Candi Muara Takus senantiasa dilestarikan sehingga menjadi bagian dari kekayaan sejarah sekaligus pembelajaran untuk generasi saat ini. Dengan kehidupan adat dan budaya yang kental, produk-produk budaya yang hilang atau memudar dapat dihasilkan kembali yang dapat menjadi bagian dari daya tarik daerah sekaligus dinikmati oleh masyarakat lebih luas.
- 5) Masyarakat yang sejahtera, ialah masyarakat Kabupaten Kampar yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang paling manusiawi. Kebutuhan hidup ini merentang mulai dari kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, pangan dan papan. Pemenuhan akan kebutuhan-kebutuhan ini menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah sehingga cita-cita akan masyarakat yang sejahtera sebagaimana dinyatakan dalam visi pembangun daerah dapat terwujud di akhir periode perencanaan.

B. MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN KAMPAR

Guna mewujudkan visi pembangunan daerah periode 2017-2022 tersebut, maka ditetapkan enam misi sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Misi 1 Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional

Penyiapan Sumber Daya Manusia diantaranya dilakukan pada calon angkatan kerja baik saat masih mengenyam dunia pendidikan sampai pada tahap menjadi pencari kerja. Upaya ini dilakukan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang tidak hanya dapat bersaing di dunia usaha, namun juga dapat terintegrasi dengan kebutuhan daerah melalui visi yang diarahkan oleh kepala daerah. Integrasi ini penting terutama dalam mengarahkan segala potensi sumber daya daerah menuju pada arah pembangunan yang sama. Maka selain potensi daerah yang dikuatkan oleh kapasitas sumber daya manusia di level pendidikan dan penyiapan tenaga kerja, aparatur pemerintah daerah pun dituntut memiliki kapasitas yang mengarah pada semangat profesionalisme.

Selanjutnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia harus dijamin pula dengan kondisi kesehatan masyarakat yang baik. Upaya ini perlu dilakukan secara bersamaan dalam kerangka membangun masyarakat yang tidak hanya cerdas namun juga sehat, sehingga target pembangunan dapat dicapai secara maksimal.

Misi 2 Mengembangkan Pertanian yang Modern dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Pengembangan pertanian yang modern adalah mengembangkan seluruh aktivitas pertanian dari hulu sampai hilir, melalui penerapan teknologi yang sesuai kebutuhan dan kondisi daerah. Selain itu, upaya pengembangan pertanian juga berupa kemudahan akses kebutuhan pertanian (modal, sarana, prasarana dll) bagi petani serta memberikan nilai tambah dari proses pengolahan hasil yang diperolehnya. Potensi sumberdaya pertanian di Kabupaten Kampar sebagian telah berkembang sebagai kegiatan industri kecil, seperti pengolahan ikan air tawar, kripik nenas dan lain sebagainya, namun demikian perlu untuk lebih ditingkatkan. Subsektor perkebunan dan perikanan air tawar telah teruji sebagai sub sektor utama yang menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat. Usaha pengembangan pertanian lainnya diarahkan pada tanaman pangan khususnya padi, jagung, dan kedelai, yang merupakan komoditas wajib bagi setiap daerah, termasuk Kabupaten Kampar. Dari sisi luasan budidaya ketiga komoditas ini tidak terlalu luas, namun sebagai bagian dari usaha untuk mempertahankan dan intensifikasi untuk menghasilkan produksi yang mencukupi kebutuhan lokal, maka mempertahankan trend kenaikan produksi perlu untuk ketahanan pangan daerah.

Selaras dengan pengembangan pertanian, juga harus mengedepankan kelestarian lingkungan hidup. Dalam upaya melestarikan fungsi ini, termasuk diantaranya adalah memastikan bahwa semua jenis aktivitas pembangunan, termasuk aktivitas pertanian harus ramah lingkungan dengan dampak yang terkelola. Fungsi lingkungan hidup ini menjadi mutlak untuk dilestarikan mengingat pembangunan tidak akan bisa dilaksanakan secara berkelanjutan tanpanya, ditambah lagi karakteristik Kabupaten Kampar yang sebagian wilayahnya merupakan kawasan konservasi berupa Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Daerah Tangkapan Air (DTA), memiliki kerentanan ekologis dan berpengaruh bagi wilayahnya sendiri maupun wilayah-wilayah di sekitarnya.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Misi 3 Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kampar utamanya diupayakan dalam menjawab permasalahan aksesibilitas dalam menunjang aktivitas dan mobilitas masyarakat, serta dalam mengembangkan kawasan permukiman yang nyaman dan memadai. Kabupaten Kampar memiliki 21 kecamatan dimana dari seluruh kecamatan tersebut belum sepenuhnya memiliki aksesibilitas yang baik dari sisi infrastruktur jalan dan cakupan telekomunikasi. Hal tersebut berpengaruh pada aktivitas dan produktivitas masyarakat sehingga secara tidak langsung mempengaruhi capaian pembangunan daerah secara keseluruhan.

Perkembangan Kabupaten Kampar ditengah kabupaten/kota lain, ditambah berada di dekat ibukota provinsi yaitu Pekanbaru, tidak hanya mendorong pergerakan orang dengan frekuensi yang cukup tinggi namun juga mendorong kebutuhan perumahan yang begitu tinggi pula. Perkembangan yang tidak diikuti penataan yang baik menyebabkan munculnya kawasan-kawasan kumuh yang terus semakin berkembang. Upaya membangun dan menata infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, sanitasi yang layak, dan pengelolaan sampah menjadi penting dalam menjamin kenyamanan dan produktifitas masyarakat.

Misi 4 Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif

Terciptanya iklim usaha yang kondusif menjadi prasyarat dalam pengembangan ekonomi, khususnya dunia usaha. Besarnya peluang untuk melakukan investasi di Kabupaten Kampar akan menjadi kurang bermakna jika tidak ditunjang oleh regulasi dan program yang juga fokus dalam pengembangan investasi. Oleh sebab itu, penciptaan iklim usaha yang kondusif diarahkan untuk memberi kemudahan dan kepastian bagi mereka yang baru memulai usaha. Selain itu, bagi usaha-usaha yang telah berjalan, iklim usaha yang kondusif dapat dimaknai dengan menciptakan iklim ketenagakerjaan yang baik, serta hubungan industrial yang harmonis. Dalam rangka memberikan ruang usaha yang luas pada ekonomi kerakyatan, maka penguatan pada koperasi serta usaha mikro kecil (KUMK) perlu mendapat perhatian khusus. Penguatan KUMK dilakukan mulai dari hulu hingga hilir produksi. Dengan demikian penguatan akses permodalan, peningkatan keterampilan (teknis dan manajerial), kualitas produk hingga pemasaran perlu dilakukan. Untuk efektivitas program, upaya penguatan kapasitas KUMK akan disertai juga dengan kegiatan pendampingan.

Misi 5 Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Industri Pengolahan yang Maju

Saat ini Kabupaten Kampar belum dapat menjadi tujuan wisata bagi tidak hanya para wisatawan domestik namun juga para wisatawan lokal Kabupaten Kampar sendiri. Padahal dari keberadaan objek wisata, Kabupaten Kampar memiliki berbagai objek wisata baik dari wisata alam, wisata budaya maupun wisata buatan lain. Menjadikan Kabupaten Kampar menjadi tujuan wisata bukan hanya menjadi daerah perlintasan, menjadi semangat dalam misi ini.

Mendorong potensi wisata ini, diupayakan dengan tidak menghilangkan potensi lain yang saat ini telah berkembang. Salah satunya adalah pertumbuhan industri



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

pengolahan di Kabupaten Kampar yang dapat menjadi alternatif pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan memanfaatkan hasil perkebunan dan perikanan. Integrasi kegiatan wisata dan munculnya produk-produk industri olahan menjadi upaya yang perlu dilakukan secara bersamaan.

Misi 6 Memperkuat Citra Kampar sebagai Serambi Makkah Riau yang Religius, Beradat, dan Berbudaya

Kabupaten Kampar memiliki sejarah dan budaya yang sangat kuat ditandai dengan peninggalan fisik seperti candi dan masjid yang telah berdiri ratusan tahun yang lalu sampai pada nilai-nilai budaya yang telah menjadi tradisi keseharian. Kebanggaan terhadap kekayaan budaya yang dimiliki seharusnya juga dapat mewujudkan pada kemajuan daerah. Namun perkembangan Kabupaten Kampar yang dipengaruhi juga dengan daerah lain sehingga saat ini membuat budaya asli Kampar semakin terdegradasi.

Selain mengembalikan nilai-nilai budaya yang dimiliki, predikat Kabupaten Kampar sebagai Serambi Makkah Riau perlu kembali dikuatkan dan diaktualisasi baik pada level kehidupan masyarakat dan implementasi pembangunan daerah di level pemerintahan. Kondisi dan upaya-upaya tersebut ke depan akan sangat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kondisi generasi muda saat ini. Sehingga perhatian terhadap generasi muda dalam pembangunan Kabupaten Kampar menjadi upaya yang penting untuk dilakukan.

C. TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI PEMBANGUNAN KABUPATEN KAMPAR

1) TUJUAN DAN SASARAN

Penjabaran seluruh misi ke dalam masing-masing tujuan dan sasaran, selanjutnya ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 12

Penjabaran Misi, Tujuan dan Sasaran

MISI	TUJUAN	SASARAN
1. Menyiapkan SDM yang Handal dan Profesional	Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan pendidikan	Meningkatnya pemerataan dan kualitas tenaga pendidik
		Meningkatnya pemerataan dan kualitas sarana prasarana pendidikan
		Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat
		Berkembangnya pendidikan yang berbasis potensi dan sumber daya lokal
		Meningkatnya minat baca masyarakat
		Meningkatnya partisipasi keluarga dan lingkungan dalam proses pendidikan
		Terintegrasinya pendidikan karakter, kepemimpinan, dan pengembangan diri sebagai bagian dari kurikulum pendidikan maupun aktivitas ekstrakurikuler
	Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan	Meningkatnya pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

MISI	TUJUAN	SASARAN
		Meningkatnya pemerataan dan kualitas tenaga kesehatan
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		Meningkatnya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan
	Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan
	Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang kompeten dan berdayasaing	Tersedianya tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan daerah
	Meningkatkan profesionalis dan kinerja aparatur melalui reformasi birokrasi	Meningkatnya kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik
		Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi
		Berkembangnya sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i> berbasis kinerja
		Meningkatnya kerjasama dan peran swasta dalam pembangunan
		Terwujudnya aparatur yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran daerah
		Meningkatnya kapasitas pemerintah desa
2. Mengembangkan pertanian yang modern dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya kapasitas dan kemampuan SDM petani
		Meningkatnya akses petani terhadap sarana, prasarana, informasi, dan teknologi yang ramah lingkungan
		Meningkatnya akses petani terhadap permodalan
		Meningkatnya akses lahan pertanian terhadap sistem pengairan
		Terjaganya kelestarian bibit unggul lokal
		Meningkatnya minat masyarakat untuk menekuni profesi pada sektor pertanian
	Mengoptimalkan fungsi kawasan sentra-sentra produksi pertanian dan perikanan	Berkembangnya kawasan agropolitan dan minapolitan
	Meningkatkan pemasaran komoditas pertanian unggulan	Meningkatnya penerapan teknologi pasca produksi untuk meningkatkan nilai tambah
		Meningkatnya akses petani terhadap informasi dan teknologi pemasaran
	Melaksanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan	Teralokasikannya lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)
	Meningkatkan perlindungan daerah aliran sungai dan daerah tangkapan air	Terjaganya kelestarian daerah aliran sungai dan daerah tangkapan air
	Meningkatkan perlindungan di daerah rawan bencana	Terdiseminaskannya informasi publik wilayah-wilayah rawan bencana yang mudah diakses
		Terbangunnya fasilitas sarana-prasarana pendukung sistem penanggulangan bencana



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

MISI	TUJUAN	SASARAN
	Meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan-kawasan konservasi secara kolaboratif	Tersedianya forum antar pihak pengelolaan kawasan konservasi Berkurangnya kasus alih fungsi lahan kawasan konservasi
	Meningkatkan kelembagaan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya pengakuan pemerintah daerah terhadap kelembagaan masyarakat hukum adat Meningkatnya keterlibatan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan kawasan
3. Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional	Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur transportasi	Meningkatnya aksesibilitas dalam dan antar wilayah
		Meningkatnya kualitas sistem jaringan jalan
		Meningkatnya kualitas sistem jaringan transportasi air
	Mengembangkan infrastruktur kawasan permukiman yang nyaman dan memadai	Meningkatnya penanganan kawasan permukiman kumuh
		Meningkatnya pembangunan infrastruktur air bersih
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan energi listrik
		Meningkatnya cakupan rumah tangga memiliki sanitasi layak
		Meningkatnya cakupan jaringan telekomunikasi seluler
		Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan
		Tertata dan berkembangnya pasar-pasar tradisional
4. Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif	Meningkatkan kemudahan bekerja dan berusaha	Meningkatnya kemudahan prosedur perizinan investasi dan usaha
		Terwujudnya iklim ketenagakerjaan yang baik
	Meningkatkan daya saing daerah	Meningkatnya daya tarik investasi
		Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis
		Menguatnya kesepahaman antara pemerintah daerah dan pengusaha melalui koordinasi yang intens
	Mengembangkan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)	Meningkatnya keterampilan berusaha bagi KUKM
		Meningkatnya akses dan skema pembiayaan KUKM
		Meningkatnya kualitas produk dan akses pemasaran KUKM
		Meningkatnya kemitraan KUKM dengan dunia usaha
	Mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sehat dan profesional	Meningkatnya profesionalisme manajemen dan sumber daya manusia BUMD
5. Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Industri Pengolahan yang Maju	Mengoptimalkan potensi wisata yang berwawasan lingkungan, kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal	Dimantapkannya destinasi wisata yang kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal dengan infrastruktur yang berkualitas dan memadai.
		Dimantapkannya destinasi wisata di



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

MISI	TUJUAN	SASARAN
		kawasan konservasi
		Terjaganya kelestarian lingkungan pada kawasan destinasi wisata
	Meningkatkan kualitas SDM pelaku wisata dan masyarakat sadar wisata	Terfasilitasi dan terbinanya masyarakat lokal pengelola dalam pengembangan destinasi wisata yang kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal
		Terbentuknya jejaring komunikasi kelompok sadar wisata
	Memperkuat sinergi masyarakat lokal dan pemerintah daerah dalam pengembangan event, dan destinasi wisata yang kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal	Terbangunnya kerjasama antar masyarakat lokal dan pemerintah daerah dalam pengembangan destinasi wisata
		Dikembangkannya event-event pariwisata daerah yang kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal
	Meningkatkan promosi pariwisata daerah	Meningkatnya publikasi dan expos pariwisata daerah
	Meningkatkan kualitas dan pelaku industri pengolahan kecil dan menengah	Terciptanya produk-produk unggulan olahan rumah tangga, kecil dan menengah
		Meningkatnya jumlah pelaku industri pengolahan rumah tangga, kecil dan menengah
	Mengembangkan kawasan industri pengolahan yang berdaya saing	Terjalinnya kemitraan dengan para pihak untuk pengembangan kawasan industri pengolahan
6. Memperkuat Citra Kampar sebagai Serambi Mekkah Riau yang Religius, Beradat, dan Berbudaya	Meningkatkan aksesibilitas pelaku industri kecil dan menengah terhadap permodalan dan pemasaran	Berkembangnya sumber-sumber permodalan baik bank maupun non bank
		Meningkatnya akses pasar produk-produk industri pengolahan
	Meningkatkan kerjasama antara Industri kecil menengah dan industri besar	Terbangunnya keterkaitan usaha antara Industri kecil menengah dan industri besar
	Menguatkan adat dan budaya lokal sebagai sumber nilai, karakter, dan penciri kehidupan masyarakat	Meningkatnya aktivitas dan ekspresi seni dan budaya lokal
		Terdokumentasikannya warisan-warisan adat, seni, dan budaya lokal
		Menguatnya pelaku serta komunitas seni dan budaya lokal
		Terintegrasinya pengetahuan sejarah, kesenian dan budaya lokal dalam kurikulum pendidikan maupun aktivitas ekstrakurikuler
	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat yang madani	Meningkatnya kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah dan tokoh agama serta lembaga sosial keagamaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat
		Meningkatnya aktivitas pengajian dan pengamalan agama yang menumbuhkan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat
		Meningkatnya pengelolaan dana sosial keagamaan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat
		Meningkatnya peran Islamic Center Kampar sebagai pusat pendidikan dan pengembangan dakwah Islam
	Membangun karakter generasi muda yang berakhlak, beradat dan berbudaya	Terjaganya generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA, pergaulan bebas, dan radikalisme



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

MISI	TUJUAN	SASARAN
		Terciptanya lingkungan yang berketeladanan
		Terbangunnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreatifitas generasi muda
		Meningkatnya pemenuhan hak terhadap anak

2) STRATEGI

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas horison waktunya dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut.

Dalam mencapai pembangunan Kabupaten Kampar lima tahun ke depan, maka terdapat strategi-strategi dari setiap sasaran yang disampaikan sebagai berikut

Tabel 13

MISI I. MENYIAPKAN SDM YANG HANDAL DAN PROFESIONAL

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1. Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan pendidikan	Meningkatnya pemerataan dan kualitas tenaga pendidik	Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru
	Meningkatnya pemerataan dan kualitas sarana prasarana pendidikan	Mencukupi kebutuhan sarana prasarana pendidikan pada kecamatan yang memiliki rasio ketersediaan yang rendah
	Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Mendorong kemampuan dan keinginan masyarakat dalam memperoleh pendidikan
	Berkembangnya pendidikan yang berbasis potensi dan sumber daya lokal	Meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja
	Meningkatnya minat baca masyarakat	Mendorong fasilitas dan fungsi perpustakaan dalam menarik minat baca masyarakat
	Meningkatnya partisipasi keluarga dan lingkungan dalam proses pendidikan	Membangun budaya sekolah yang kondusif bagi penciptaan lingkungan belajar yang baik bagi siswa
	Terintegrasinya pendidikan karakter, kepemimpinan, dan pengembangan diri sebagai bagian dari kurikulum pendidikan maupun aktivitas ekstrakurikuler	Meningkatkan kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, watak, dan kepribadian peserta didik
2. Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan	Meningkatnya pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan	Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas
	Meningkatnya pemerataan dan	Meningkatkan ketersediaan,



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	kualitas tenaga kesehatan	penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan pada kecamatan yang memiliki kendala dalam keterjangkauan
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Mempercepat penanganan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan secara bertahap dan berkesinambungan dengan melibatkan peran aktif masyarakat
	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan	Menjamin kepastian kesehatan masyarakat melalui jaminan kesehatan dan kerjasama para pihak
3. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan
4. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang kompeten dan berdayasaing	Tersedianya tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan daerah	Mengarahkan kemampuan teknis para calon pencari kerja kepada kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja di daerah
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur melalui reformasi birokrasi	Meningkatnya kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik	Memperkuat kelembagaan dan manajemen pelayanan yang terintegrasi dengan pemanfaatan teknologi informasi
	Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur	Memperkuat upaya reformasi birokrasi untuk mendorong profesionalisme
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatkan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja
	Berkembangnya sistem reward dan punishment berbasis kinerja	Membangun sistem pengukuran kinerja aparatur yang dapat dinilai dan diawasi secara mudah dan aktual berbasis teknologi informasi
	Meningkatnya kerjasama dan peran swasta dalam pembangunan	Memaksimalkan penggunaan non APBD dalam mendukung pencapaian target pembangunan
	Terwujudnya aparatur yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Menerapkan sistem nilai dan integrasi birokrasi yang efektif
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Menerapkan efisiensi belanja daerah dalam mendukung program pembangunan
	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran daerah	Membangun kualitas partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan
	Meningkatnya kapasitas pemerintah desa	Peningkatan kapasitas pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan kader pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		Peningkatan ketersediaan data dan informasi desa yang digunakan sebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunan desa

Tabel 14
MISI II. MENGEMBANGKAN PERTANIAN YANG MODERN DAN MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1. Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya kapasitas dan kemampuan SDM petani	Meningkatkan kinerja pendampingan dan ketepatan sasaran dukungan produksi
	Meningkatnya akses petani terhadap sarana, prasarana, informasi, dan teknologi yang ramah lingkungan	Meningkatkan sumber informasi dan teknologi pertanian yang dapat diakses petani
		Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana pertanian
	Meningkatnya akses petani terhadap permodalan	Meningkatkan aksesibilitas petani terhadap sumber-sumber pembiayaan
	Meningkatnya akses lahan pertanian terhadap kawasan pengairan	Meningkatkan dukungan kawasan irigasi dan fasilitasi penyediaan sarana prasarana terpadu
	Terjaganya kelestarian bibit unggul lokal	Melaksanakan revitalisasi kawasan perbenihan
	Meningkatnya minat masyarakat untuk menekuni profesi pada kawasan pertanian	Meningkatkan minat masyarakat agar jumlah anggota masyarakat yang berprofesi sebagai petani bisa bertambah dan meningkatkan jumlah generasi muda yang menekuni profesi petani.
2. Mengoptimalkan fungsi kawasan sentra-sentra produksi pertanian dan perikanan	Berkembangnya kawasan agropolitan dan minapolitan	Mengembangkan kawasan industri perdesaan
3. Meningkatkan pemasaran komoditas pertanian unggulan	Meningkatnya penerapan teknologi pasca produksi untuk meningkatkan nilai tambah	Meningkatkan mutu dan mengembangkan standarisasi hasil pertanian
	Meningkatnya akses petani terhadap informasi dan teknologi pemasaran	Menguatkan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran
4. Melaksanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan	Teralokasikannya lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Melakukan pengamanan terhadap lahan pertanian produktif dan pemanfaatan lahan terlantar
5. Meningkatkan perlindungan daerah aliran sungai dan daerah tangkapan air	Terjaganya kelestarian daerah aliran sungai dan daerah tangkapan air	Meningkatkan pengelolaan DAS dan DTA
6. Meningkatkan perlindungan di daerah rawan bencana	Terdiseminasikannya informasi kawasan wilayah-wilayah rawan bencana yang mudah diakses	Melakukan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana
	Terbangunnya fasilitas sarana-prasarana pendukung kawasan penanggulangan bencana	Meningkatkan jumlah fasilitas sarana-prasarana penanggulangan bencana merata di seluruh wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
7. Meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan-kawasan konservasi secara kolaboratif	Tersedianya forum antar pihak pengelolaan kawasan konservasi	Menginisiasi dan mendukung terbentuknya forum antar pihak pengelola kawasan konservasi
	Berkurangnya kasus alih fungsi lahan kawasan konservasi	Membatasi pengembangan prasarana wilayah yang mendorong alih fungsi lahan konservasi
8. Meningkatkan kelembagaan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya pengakuan pemerintah daerah terhadap kelembagaan masyarakat hukum adat	Menguatkan kelembagaan hukum adat
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan kawasan	Meningkatkan masyarakat sadar kawasan konservasi

Tabel 15

MISI III. MEMBANGUN INFRASTRUKTUR KABUPATEN KAMPAR YANG BERKUALITAS DAN PROPORSIONAL

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur transportasi	Meningkatnya aksesibilitas dalam dan antar wilayah	Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di dalam system dan menuju kawasan
		Meningkatkan dan merehabilitasi jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat dan layanan pemerintahan
	Meningkatnya kualitas system jaringan jalan	Meningkatkan perbaikan infrastruktur dan kapasitas jalan
		Memelihara dan membangun prasarana dan sarana umum (infrastruktur) melalui optimalisasi sumber-sumber pembiayaan pemerintah, swasta, dan masyarakat.
	Meningkatnya kualitas system jaringan transportasi air	Mengembangkan transportasi air untuk meningkatkan akses, dan sebagai bagian dari pengembangan daya system wisata sungai.
2. Mengembangkan infrastruktur system permukiman yang nyaman dan memadai	Meningkatnya penanganan system permukiman kumuh	Melakukan penataan system (<i>redesign</i>) permukiman kumuh
	Meningkatnya pembangunan infrastruktur air bersih	Menyediakan layanan air bersih di Kabupaten Kampar dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan sekitar
		Mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan air bersih
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan energi listrik	Memperluas cakupan wilayah penyediaan listrik untuk masyarakat
	Meningkatnya cakupan rumah tangga memiliki sanitasi layak	Menciptakan standar dan pengembangan kualitas permukiman yang sehat melalui perbaikan sanitasi yang layak



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	Meningkatnya cakupan jaringan telekomunikasi seluler	Meningkatkan infrastruktur komunikasi dan informasi secara bertahap
		Mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan telekomunikasi
	Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan	Meningkatkan pelayanan sampah melalui system antar daerah untuk Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang menerapkan system sanitary landfill serta pelayanan pengangkutan sampah
		Menciptakan ruang-ruang ekonomi yang memfasilitasi ekonomi tradisional dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)
	Tertata dan berkembangnya pasar-pasar tradisional	Menguatkan jaringan distribusi dan informasi antar pasar tradisional

Tabel 16
MISI IV. MENCIPTAKAN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1. Meningkatkan kemudahan bekerja dan berusaha	Meningkatnya kemudahan prosedur perizinan investasi dan usaha	Meningkatkan kepastian hukum terkait investasi dan usaha
	Terwujudnya iklim ketenagakerjaan yang baik	Memperkuat daya saing tenaga kerja dalam memasuki pasar tenaga kerja secara global
2. Meningkatkan daya saing daerah	Meningkatnya daya tarik investasi	Mengembangkan investasi yang inklusif melalui peningkatan promosi investasi di daerah yang dapat menciptakan investor <i>awareness and willingness</i> untuk berinvestasi di daerah
	Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis	Mendorong kebebasan berserikat dan hak untuk berorganisasi bagi pekerja untuk menciptakan <i>collective bargaining</i> dengan pemberi kerjanya sehingga terwujudnya keseimbangan antara peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja
	Menguatnya kesepahaman antara pemerintah daerah dan pengusaha melalui koordinasi yang intens	Meningkatkan koordinasi dan system investasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha
3. Mengembangkan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (KUMK)	Meningkatnya keterampilan berusaha bagi KUMK	Mengembangkan dan menguatkan system dan pelatihan keterampilan wirausaha, serta pembinaan dan pendampingan SDM calon maupun pelaku KUMK
	Meningkatnya akses dan skema pembiayaan KUMK	Mengembangkan dan mengoptimalkan system pembiayaan bank maupun non-bank bagi KUMK, serta advokasi pembiayaan bagi



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		KUMK
	Meningkatnya kualitas produk dan akses pemasaran KUMK	Meningkatkan nilai tambah, kualitas, keragaman dan jangkauan pemasaran produk-produk KUMK yang berbasis pada prinsip pengembangan rantai nilai, keunggulan serta sumber daya lokal
	Meningkatnya kemitraan KUMK dengan dunia usaha	Mengembangkan kemitraan investasi berbasis keterkaitan usaha (<i>backward-forward linkages</i>)
4. Mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sehat dan professional	Meningkatnya profesionalisme manajemen dan sumber daya manusia BUMD	Menguatkan tugas pokok dan fungsi serta daya saing BUMD melalui penataan kelembagaan, pengembangan kapasitas SDM dan perbaikan system manajemen usaha BUMD

Tabel 17
MISI V. MENGEMBANGKAN KAWASAN PARIWISATA DAN INDUSTRI PENGOLAHAN YANG MAJU

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1. Mengoptimalkan potensi wisata yang berwawasan lingkungan, kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal	Dimantapkannya destinasi wisata yang kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal dengan infrastruktur yang berkualitas dan memadai.	Menetapkan destinasi wisata potensial yang kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal dalam Rencana Induk Pariwisata Daerah
		Membangun dan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk kawasan wisata baik dengan sumber daya daerah maupun kerjasama dengan swasta
	Dimantapkannya destinasi wisata di kawasan konservasi	Menetapkan destinasi wisata di kawasan konservasi dalam Rencana Induk Pariwisata Daerah
		Mengembangkan peran aktif jejaring kawasan konservasi dalam mendukung promosi wisata, skema pendanaan berkelanjutan, dan sistem keamanan terpadu melibatkan sektor pemerintah pusat dan daerah, perusahaan swasta, dan kelompok masyarakat
		Meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pengawasan implementasi dokumen perencanaan di kawasan konservasi dan RIPDA dalam mendukung kegiatan pariwisata yang berkelanjutan
		Membangun dan menyediakan fasilitas wisata di kawasan konservasi sesuai arahan dokumen perencanaan di kawasan konservasi
	Terjaganya kelestarian lingkungan pada kawasan destinasi wisata	Menyusun dan menetapkan regulasi kawasan-kawasan wisata dalam pengelolaan



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		kebersihan disertai dengan mekanisme insentif dan disinsentif bagi pelaku-pelaku usaha pariwisata yang menjaga kebersihan dan penyediaan infrastruktur yang memadai
		Mengembangkan <i>volunteer tourism</i> sebagai salah satu model wisata
2. Meningkatkan kualitas SDM pelaku wisata dan masyarakat sadar wisata	Terfasilitasi dan terbinanya masyarakat lokal pengelola dalam pengembangan destinasi wisata yang kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal	Mengoptimalkan aktivitas sadar wisata untuk menumbuhkembangkan kelompok sadar wisata (Pokdarwis)
		Mengoptimalkan keberadaan BUMDES untuk mendukung kelompok-kelompok wisata dari masyarakat lokal
	Terbentuknya jejaring komunikasi kelompok sadar wisata	Mendorong munculnya kelompok potensial dan melakukan pembinaan secara intensif dan berkelanjutan
3. Memperkuat sinergi masyarakat lokal dan pemerintah daerah dalam pengembangan event, dan destinasi wisata yang kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal	Terbangunnya kerjasama antar masyarakat lokal dan pemerintah daerah dalam pengembangan destinasi wisata	Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat lokal dalam pengembangan destinasi wisata
		Melestarikan perayaan budaya daerah sebagai salah satu <i>event iconic</i> daerah dan mempublikasikannya
	Dikembangkannya event-event pariwisata daerah yang kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal	Menciptakan <i>event-event</i> wisata dan budaya yang kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal yang dapat menarik pengunjung dan wisatawan sesuai dengan potensi dan identitas daerah.
4. Meningkatkan promosi pariwisata daerah	Meningkatnya publikasi dan ekspos pariwisata daerah	Menyelenggarakan media dan pusat informasi pariwisata, lengkap dengan paket-paket wisata yang ditawarkan yang juga memiliki fungsi sebagai gerai produk
		Menyelenggarakan event wisata yang bekerjasama dengan media-media <i>travelling</i> dan <i>adventure</i> , dan para jurnalis wisata sebagai media publikasi pariwisata
5. Meningkatkan kualitas dan pelaku industri pengolahan kecil dan menengah	Terciptanya produk-produk unggulan olahan rumah tangga, kecil dan menengah	Melakukan pendampingan terhadap pelaku industri pengolahan dan menjamin kualitas proses produksi dari hulu hingga hilir
	Meningkatnya jumlah pelaku industri pengolahan rumah tangga, kecil dan menengah	Meningkatkan kapasitas pelaku industri dan penguatan kelembagaan pelaku industri
6. Mengembangkan kawasan industri pengolahan yang berdaya saing	Terjalinnnya kemitraan dengan para pihak untuk pengembangan kawasan industri pengolahan	Memfasilitasi pengembangan kawasan industri yang berdaya saing
7. Meningkatkan aksesibilitas pelaku industri kecil dan menengah terhadap permodalan dan pemasaran	Berkembangnya sumber-sumber permodalan baik bank maupun non bank	Mengembangkan lembaga pembiayaan/bank UMKM dan koperasi, serta optimalisasi sumber pembiayaan non-bank, serta advokasi pembiayaan bagi



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		umkm maupun koperasi
	Meningkatnya akses pasar produk-produk industri pengolahan	Mengembangkan pemasaran dan promosi produk-produk IKM melalui even-even nasional maupun internasional dan diintegrasikan dengan paket pariwisata serta lokasi-lokasi strategis lainnya
		Mengembangkan industri pengolahan berskala ekspor
8. Meningkatkan kerjasama antara Industri kecil menengah dan industri besar	Terbangunnya keterkaitan usaha antara Industri kecil menengah dan industri besar	Meningkatkan jumlah UMKM lokal yang menjadi bagian dari rantai pasok (<i>supply chain</i>) dan pemasok bahan baku bagi industri besar
		Menjadikan industri besar sebagai mitra pemerintah untuk membina UMKM dalam hal peningkatan produksi maupun penerapan teknologi yang termutakhirkan dalam rangka peningkatan produktivitas UMKM

Tabel 18
MISI VI. MEMPERKUAT CITRA KAMPAR SEBAGAI SERAMBI MEKKAH RIAU YANG RELIGIUS, BERADAT, DAN BERBUDAYA

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1. Memperkuat adat dan budaya lokal sebagai sumber nilai, karakter, dan penciri kehidupan masyarakat	Meningkatnya aktivitas dan ekspresi seni dan budaya lokal	Meningkatkan apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya lokal
	Terdokumentasikannya warisan-warisan adat, seni, dan budaya lokal	Melestarikan warisan budaya baik bersifat benda (<i>tangible</i>) maupun tak benda (<i>intangible</i>)
	Menguatnya pelaku serta komunitas seni dan budaya lokal	Mengembangkan, mengelola dan memberdayakan sumber daya kebudayaan
		Mengembangkan promosi dan diplomasi budaya
	Terintegrasinya pengetahuan sejarah, kesenian dan budaya lokal dalam kurikulum pendidikan maupun aktivitas ekstrakurikuler	Mengintegrasikan pengetahuan sejarah, kesenian dan budaya lokal dalam kurikulum pendidikan maupun aktivitas ekstrakurikuler
2. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat yang madani	Meningkatnya kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah dan tokoh agama serta lembaga sosial keagamaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan umat beragama
	Meningkatnya aktivitas pengajian dan pengamalan agama yang menumbuhkan kerukunan hidup beragama dan kebinekaan dalam bermasyarakat	Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan untuk memperkuat peran dan fungsi agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan kehidupan beragama serta bermasyarakat
	Meningkatnya pengelolaan dana sosial keagamaan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan tata kelola dana sosial keagamaan
	Meningkatnya peran <i>Islamic Center</i>	Meningkatkan tata kelola dan



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	Kampar sebagai pusat pendidikan dan pengembangan dakwah Islam	fungsi <i>Islamic Center</i> sebagai pusat pendidikan dan pengembangan dakwah Islam
3. Membangun karakter generasi muda yang berakhlak, beradab dan berbudaya	Terjaganya generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA, pergaulan bebas, dan radikalisme	Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan
	Terciptanya lingkungan yang berketeladanan	Menyelenggarakan gerakan keteladanan di lingkungan aparat pemerintah daerah dengan penentuan pada aspek-aspek tertentu (revolusi mental)
	Terbangunnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreatifitas generasi muda	Meningkatkan pelayanan kepemudaan yang berkualitas untuk menumbuhkan jiwa patriotisme, budaya olahraga, budaya prestasi, dan profesionalitas, serta untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan
	Meningkatnya pemenuhan hak terhadap anak	Meningkatkan implementasi kebijakan perlindungan anak melalui penguatan kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan perlindungan anak di tingkat daerah

3) ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan Kabupaten Kampar dalam pentahapan strategi lima tahun ke depan ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 19

MISI I MENYIAPKAN SDM YANG HANDAL DAN PROFESIONAL

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru	Penegakan aturan dalam pengangkatan guru oleh pemerintah kabupaten maupun oleh sekolah/madrasah berdasarkan kriteria mutu yang ketat dan kebutuhan aktual di kabupaten;			-	-
	Peningkatan efisiensi pemanfaatan guru dengan memperbaiki rasio guru-murid dan memaksimalkan beban mengajar termasuk melalui <i>multigrade</i> dan/atau <i>multisubject teaching</i> dan pengaturan insentif terhadap guru yang ditempatkan di wilayah dengan akses terbatas;			-	-
	Pelaksanaan Pengembangan Profesional Berkesinambungan (PPB) bagi guru dalam jabatan melalui latihan berkala dan merata, serta penguatan KKG (Kelompok Kerja Guru) dan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran);				
	Peningkatan kualitas yang bertahap, berjenjang dan berkesinambungan; pemerataan melalui rekrutmen berdasarkan kebutuhan aktual dengan kualitas yang merata antara guru di pusat kota dan guru di wilayah yang jauh dari pusat kota.				
Mencukupi kebutuhan sarana prasarana	Penanganan akses pendidikan di daerah yang sulit terjangkau;			-	-



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
pendidikan pada kecamatan yang memiliki rasio ketersediaan yang rendah		Pembukaan SD atau MI Satu Atap di kecamatan-kecamatan yang masih memiliki rasio ketersediaan sekolah yang rendah.		-	-	-
Mendorong kemampuan dan kenginan masyarakat dalam memperoleh pendidikan	-	Pengembangan PAUD berbasis komunitas dengan pembiayaan dari berbagai sumber, termasuk Dana Desa, untuk menjangkau anak miskin, anak kurang beruntung, atau anak berkebutuhan khusus;				-
		Penyediaan bantuan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk dapat bersekolah yang dilaksanakan melalui Kartu Indonesia Pintar;				
	-	Peningkatan pemerataan pendidikan tinggi melalui peningkatan efektivitas <i>affirmative policy</i> : penyediaan beasiswa khususnya untuk masyarakat miskin dan penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh yang berkualitas.				
Meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja	Pemberian ruang lebih besar bagi masyarakat dalam menjalankan model pembelajaran mandiri (informal, non-formal) dalam mengembangkan sekolah berbasis komunitas;					
	Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja.					
Mendorong fasilitas dan fungsi perpustakaan dalam menarik minat baca masyarakat	-	Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai wahana pembelajar sepanjang hayat dan sarana pendukung proses belajar mengajar di sekolah;				
	Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;					
	Peningkatan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi;				-	-
	Peningkatan kualitas layanan perpustakaan, baik kapasitas dan akses, maupun utilitas.				-	-
Membangun budaya sekolah yang kondusif bagi penciptaan lingkungan belajar yang baik bagi siswa	Pelibatan peran orangtua dan masyarakat dalam pengelolaan persekolahan dan proses pembelajaran, untuk mencegah perilaku menyimpang yang tak sesuai dengan norma susila dan nilai moral;					
	-	Pengembangan sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat untuk menemukan permasalahan partisipasi pendidikan;				
	-	Peningkatan pelibatan guru dan pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan umpan balik pelaksanaan kurikulum di tingkat kelas.				
Meningkatkan kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, watak, dan kepribadian peserta didik	Penguatan pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk memperkuat nilai-nilai moral, akhlak, dan kepribadian peserta didik dengan memperkuat pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran;					
	Peningkatan kualitas guru yang bertindak sebagai <i>role model</i> dengan memberi keteladanan sikap dan perilaku baik bagi peserta didik.					
Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas	-	-	Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar sesuai standar mencakup puskesmas dan jaringannya dan peningkatan kerjasama Puskesmas dengan unit transfusi darah dalam rangka penurunan kematian ibu;			
	-	-	Pengembangan dan penerapan sistem akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah dan swasta;			
	-	-	Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan dukungan bantuan operasional kesehatan;			
	Penyusunan, penetapan dan pelaksanaan berbagai <i>standard guideline</i> pelayanan kesehatan diikuti dengan pengembangan		-		-	-



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
	2018	2019	2020	2021	2022
	sistem monitoring dan evaluasinya;				
	Peningkatan pengawasan dan kerjasama pelayanan kesehatan dasar dengan fasilitas swasta;		-	-	-
	Pengembangan kesehatan tradisional dan komplementer.		-	-	-
Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan pada kecamatan yang memiliki kendala dalam keterjangkauan	Pengembangan sistem pendataan tenaga kesehatan dan upaya pengendalian dan pengawasan tenaga kesehatan;		-	-	-
	-	Peningkatan perekrutan; persebaran dan retensi tenaga kesehatan termasuk melalui pengembangan sistem karir dan perjenjangan serta insentif finansial dan non-finansial terutama untuk pemenuhan tenaga kesehatan;		-	-
	-	-	Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan prioritas di daerah yang kurang terjangkau melalui penempatan tenaga kesehatan yang baru lulus (<i>affirmative policy</i>).		
Mempercepat penanganan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan secara bertahap dan berkesinambungan dengan melibatkan peran aktif masyarakat	Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas seperti Peningkatan akses dan mutu <i>continuum of care</i> pelayanan ibu dan anak yang meliputi kunjungan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan; serta Peningkatan peran upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia.;				
	Peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan, gizi, sanitasi, hygiene, dan pengasuhan serta Peningkatan peran masyarakat dalam perbaikan gizi termasuk melalui upaya kesehatan berbasis masyarakat dan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Posyandu dan Pos PAUD);				
	Peningkatan surveilans epidemiologi faktor resiko dan penyakit; Peningkatan upaya preventif dan promotif dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular; Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; Peningkatan kesehatan lingkungan dan akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan perilaku hygiene; Pemberdayaan dan peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.				
Menjamin kepastian kesehatan masyarakat melalui jaminan kesehatan dan kerjasama para pihak	Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai bagian dari SKN untuk mendorong pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional (misalnya penurunan AKI dan AKB, serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular, dan distribusi tenaga kesehatan);			-	-
	Penguatan kembali kebijakan kesehatan publik terutama upaya promotif dan preventif;			-	-
	Peningkatan kerjasama dengan penyedia layanan swasta dan pembayaran/insentif bagi penyedia layanan dan tenaga kesehatan.			-	-
Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan	Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan;		-	-	-
	-	-	Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan;		
	-	-	-	Peningkatan pemahaman masyarakat dan	



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
	2018	2019	2020	2021	2022
				dunia usaha tentang kesetaraan gender.	
Mengarahkan kemampuan teknis para calon pencari kerja kepada kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja di daerah	-	Penerapan revitalisasi BLK dengan memperhitungkan efisiensi dan efektivitas pelatihan yang diberikan;			
	-	Peningkatan kualitas pendidikan non-formal untuk memberikan keterampilan terutama bagi angkatan kerja muda yang berpendidikan rendah, termasuk melalui penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatih;			
	Pengembangan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan lapangan kerja berdasarkan masukan dari dunia usaha/dunia industri;			-	-
	Penyelarasan program keahlian dan pengembangan kurikulum SMK sesuai dengan kegiatan ekonomi utama di kab/kota dan kebutuhan pasar kerja.			-	-
Memperkuat kelembagaan dan manajemen pelayanan yang teritegrasi dengan pemanfaatan teknologi informasi	Peningkatan kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan publik;				
	-	Penguatan integrasi berbagai jenis pelayanan publik (pelayanan satu atap, di pusat dan di daerah); menciptakan layanan satu atap untuk investasi, efisiensi perijinan bisnis menjadi maksimal 15 hari; memberikan kemudahan administrasi yang selama ini menghambat dalam kegiatan investasi;		-	-
	-	-	Penyederhanaan prosedur pelayanan dan percepatan penerapan ICT (e-government);	-	
	-	Peningkatan kualitas SDM pelayanan; kompetensi dan perubahan mentalitas/budaya melayani; dan percepatan penerapan standar pelayanan dalam perencanaan dan penganggaran;		-	-
	-	Penguatan inovasi pelayanan publik; dan perluasan replikasi pelayanan publik terbaik (<i>best practices</i>);		-	-
	Penguatan desa, kelurahan, dan kecamatan, sebagai ujung tombak pelayanan publik, sebagai bagian dari implementasi UU Desa secara sistematis konsistensi dan berkelanjutan.			-	-
Memperkuat upaya reformasi birokrasi untuk mendorong profesionalisme	Penyempurnaan sistem rekrutmen aparatur negara yang transparan dan akuntabel;			-	-
	-	-	Penguatan kelembagaan manajemen aparatur sipil;		
	-	Peningkatan kelembagaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mendukung implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).		-	-
Meningkatkan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja	Percepatan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis <i>akrual</i> (perbaikan sistem dan manajemen informasi keuangan daerah);		-	-	-
	Penyelarasan fungsi perencanaan, penganggaran, pengadaan, monev, dan pelaporan berbasis TIK;				
	Penyempurnaan kebijakan dan peningkatan efektivitas dan kualitas implementasinya;			-	-
	Peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansi Pemerintah Daerah dengan mewajibkan instansi pemerintah daerah untuk membuat laporan kinerja serta membuka akses informasi publik seperti diatur dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2008.				



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Membangun sistem pengukuran kinerja aparatur yang dapat dinilai dan diawasi secara mudah dan aktual berbasis teknologi informasi	-	Pembangunan aplikasi sistem teknologi informasi yang dapat mengukur dan menilai kinerja aparatur;		-	-
	-	-	Pemberian dan pemotongan tunjangan yang diukur dari hasil kinerja.		
Memaksimalkan penggunaan non APBD dalam mendukung pencapaian target pembangunan	Penyediaan payung hukum dan kebijakan yang membuka peluang kerjasama pembangunan;		-	-	-
	-	Pemanfaatan media <i>online</i> dan <i>offline</i> pemerintah daerah dalam sosialisasi dan publikasi program-program pembangunan yang membuka keterlibatan para pihak untuk bekerjasama;			
	-	Penguatan peran aktif Perangkat Daerah dalam menangkap peluang kerjasama pendanaan non APBD dalam pemenuhan target kinerja Perangkat Daerah.			
Menerapkan sistem nilai dan integrasi birokrasi yang efektif	Penerapan internalisasi nilai-nilai integritas dalam birokrasi untuk membentuk karakter dan kultur birokrasi yang bersih;				
	Penegakan kode etik dan kode perilaku penyelenggaraan negara dan pemerintahan;				
	Pengelolaan laporan kekayaan pegawai; penerapan sistem whistleblowing; penerapan penanganan gratifikasi; dan transparansi dalam penerapan sistem;				
	Penerapan penanganan konflik kepentingan dengan efektif.				
Menerapkan efisiensi belanja daerah dalam mendukung program pembangunan	Pengendalian belanja pegawai, yang meliputi penyusunan kebijakan tentang batas maksimum belanja pegawai; review dan assessment proporsi belanja pegawai; dan efisiensi pelaksanaan belanja pegawai di setiap instansi;		-	-	-
	-	Pengendalian belanja operasional kantor, yang mencakup langkah-langkah review dan assessment belanja operasional kantor dan penerapan Reward and punishment untuk efisiensi belanja aparatur;		-	-
	-	-	Pengendalian belanja sarana dan prasarana aparatur, dan pengendalian komponen belanja administrasi dalam kegiatan pembangunan.		-
Membangun kualitas partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan	-	-	Pengembangan mekanisme musrenbang yang berkualitas;		
	Penguatan kapasitas masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;		-	-	-
	Pengembangan sistem komunikasi pembangunan antara pemerintah dan masyarakat;		-	-	-
	-	-	Peningkatan pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.		
Peningkatan kapasitas pemerintah desa, Badan Permasyarakatan Desa, dan kader pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa,			Menyelenggarakan bimbingan teknis dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, studi banding dan pendampingan		



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
	2018	2019	2020	2021	2022
pengelolaan keuangan desa serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan					
Peningkatan ketersediaan data dan informasi desa yang digunakan sebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunan desa			Penguatan data berbasis RT dan RW		
			Pemantapan mekanisme perencanaan partisipatif tingkat desa		

Tabel 20

MISI II MENGEMBANGKAN PERTANIAN YANG MODERN DAN MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan kinerja pendampingan dan ketepatan sasaran dukungan produksi	Perbaikan sasaran petani padi dan penerima subsidi pertanian	-	-	-	-
	Revitalisasi penyuluhan dengan meningkatkan jumlah, kapasitas dan kelembagaan penyuluh	-	-	-	-
	-	Penguatan wawasan dan pelatihan pertanian bagi kawasan pertanian dan petani	-	-	-
Meningkatkan sumber informasi dan teknologi pertanian yang dapat diakses petani	Diseminasi informasi teknologi pertanian ramah lingkungan melalui penyuluhan dan media informasi	-	-	-	-
	-	-	Mengembangkan jaringan pasar, pelayanan informasi pasar, pasar lelang komoditi	-	-
Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana pertanian	Introduksi teknologi pertanian yang sesuai kondisi awal melalui pendampingan	-	-	-	-
	-	Tersedianya sarana prasarana pertanian yang memadai sampai di tingkat desa	-	-	-
Meningkatkan aksesibilitas petani terhadap sumber-sumber pembiayaan	-	-	Menyediakan skim kredit yang mudah diakses oleh petani dan pelaku usaha pertanian	-	-
	-	-	Memberikan kemudahan kawasan keuangan milik pemerintah mendirikan usaha di masing-masing desa	-	-
	-	-	Menyediakan fasilitas asuransi pertanian yang didukung kawasan yang kompeten	-	-
Meningkatkan dukungan kawasan irigasi dan fasilitasi penyediaan sarana prasarana terpadu	-	-	-	Pembangunan tampungan air dan jaringan irigasi, rawa, dan air tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip tata air.	-
	-	-	-	Meningkatkan keterhubungan jaringan irigasi dan sumber air ke lahan usaha tani padi	-
Melaksanakan revitalisasi kawasan perbenihan	Penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan benih-benih tanaman pangan unggul lokal	-	-	-	-
	-	Mengirimkan kesempatan kepada petani terpilih untuk memberikan program magang ke kawasan perbenihan	-	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
	2018	2019	2020	2021	2022
		nasional bersertifikasi			
Meningkatkan minat masyarakat agar jumlah anggota masyarakat yang berprofesi sebagai petani bisa bertambah dan meningkatkan jumlah generasi muda yang menekuni profesi petani.	Penguatan persepsi bahwa profesi petani yang awalnya dianggap profesi yang “rendah” menjadi profesi yang terhormat dan bergengsi.				-
	Pemilihan petani teladan setiap tahun untuk mengubah persepsi sehingga masyarakat secara luas dapat melihat kesuksesan dari para petani teladan tersebut.				
	Penguatan peran kawasan dalam menanamkan persepsi positif tentang petani seiring dengan upaya-upaya lain untuk menjadikan profesi pertanian sebagai profesi yang memberikan penghidupan yang layak bagi orang-orang yang menekuninya.		-	-	-
	-	-	Pembukaan akses lahan-lahan terlantar untuk petani atau calon petani sehingga dapat produktif. Untuk itu, perlu dilakukan identifikasi lahan-lahan terlantar sebelumnya.		
Mengembangkan kawasan industry perdesaan	-	Mengaktifkan kawasan dan sarana penunjang yang telah dibangun		-	-
	-	-	Merestrukturisasi kawasan agropolitan/minapolitan menjadi konsep baru yang sesuai kebutuhan lokal		-
Meningkatkan mutu dan mengembangkan standarisasi hasil pertanian	-	Menguatkan dan memperbaiki teknologi produksi dari hulu sampai hilir			
	-	-	Menerapkan standar penanganan produk segar dan produk olahan pertanian		-
Menguatkan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran	Kemitraan Gapoktan dengan kawasan pengolahan dan eksportir serta memperkuat jaringan dengan asosiasi industri				
Melakukan pengamanan terhadap lahan pertanian produktif dan pemanfaatan lahan terlantar	Mengamankan lahan pertanian padi yang produktif melalui dokumen dan perda untuk mencapai ketahanan pangan daerah		-	-	-
	Pengembangan mekanisme-mekanisme insentif dan disinsentif yang menarik bagi pemilik lahan tetapi di sisi lain juga tidak memberatkan Pemerintah Daerah. Mekanisme-mekanisme seperti pajak, infrastruktur, saprodi, dan jenis-jenis insentif lainnya perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan kondisi fisik, kawasan, dan kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.				
	-	Menginternalisasi dalam dokumen RTRW kabupaten		-	-
Internalisasi rencana pengelolaan DAS terpadu ke dalam RTRW Kabupaten Kampar	Mendorong peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan DAS			-	-
	Internalisasi dokumen RPDAST dalam RTRW kabupaten		-	-	-
Melakukan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana	Meningkatkan kapasitas kelembagaan penyelenggara penanggulangan bencana		-	-	-
Meningkatkan jumlah fasilitas sarana-	-	Tersedianya sarana prasarana mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana di awasan			-



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
	2018	2019	2020	2021	2022
prasarana penanggulangan bencana merata di seluruh wilayah		rawan bencana			
	Meningkatkan partisipasi dan peran serta multi-pihak (pemerintah, non pemerintah, lebaga usaha, internasional, media, dan masyarakat)				
Menginisiasi dan mendukung terbentuknya forum antar pihak pengelola kawasan konservasi	Terumuskannya dokumen pengelolaan kawasan konservasi antar pihak				
Membatasi pengembangan prasarana wilayah yang mendorong alih fungsi lahan konservasi	Memperkuat dan mengembangkan kawasan regional dalam pengelolaan kawasan konservasi				
Menguatkan kelembagaan hukum adat	-	Disahkannya kebijakan kelembagaan hukum adat		-	-
	-	Dilaksanakannya pertemuan-pertemuan kelembagaan hukum adat secara rutin			
Meningkatkan masyarakat sadar kawasan konservasi	-	Terbentuknya komunitas-komunitas masyarakat hukum adat dalam pengelolaan kawasan		-	-

Tabel 21

MISI III MEMBANGUN INFRASTRUKTUR KABUPATEN KAMPAR YANG BERKUALITAS DAN PROPORSIONAL

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di dalam kawasan dan menuju kawasan	-	Penambahan pembangunan jalan-jalan baru terutama di kawasan perdesaan dan wilayah tertinggal	-	-	
	-	Peningkatan pemerataan aksesibilitas ke seluruh wilayah			
Meningkatkan dan merehabilitasi jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat dan layanan pemerintahan	Peningkatan sistem jaringan dan pelayanan transportasi perdesaan yang menghubungkan wilayah-wilayah perdesaan dengan pusat-pusat kegiatan lokal dan wilayah				
	-	Dukungan pembangunan jembatan untuk meningkatkan keterhubungan sentra-sentra produksi dengan pusat pemasaran.	-		
Meningkatkan perbaikan infrastruktur dan kapasitas jalan	-	Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan dengan kapasitas dan kualitas yang baik untuk aksesibilitas pergerakan kegiatan antar wilayah			
Memelihara dan membangun prasarana dan sarana umum (infrastruktur) melalui optimalisasi sumber-sumber pembiayaan pemerintah, swasta, dan masyarakat.	Revitalisasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana umum (infrastruktur) dengan sumber-sumber pembiayaan pemerintah, swasta, dan masyarakat.				
Pengembangan transportasi air dilakukan selain untuk meningkatkan akses, juga dapat menjadi bagian dari daya tarik wisata.	Peningkatan akses, pengembangan transportasi air diprioritaskan pada kawasan-kawasan yang secara fungsional tidak memungkinkan untuk dibangun jalan seperti pada kawasan konservasi.				
Melakukan penataan	Penataan permukiman dan lingkungan yang tertib, sehat dan berkelanjutan sesuai				



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
	2018	2019	2020	2021	2022
kembali (redesign)permukiman kumuh	dengan pola ruang				
	Peningkatan kualitas prasarana dan sarana dasar permukiman				
Menyediakan layanan air bersih di Kabupaten Kampar dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan sekitar	-	Penjaminan ketersediaan air melalui pembangunan prasarana air baku dalam rangka mendukung pencapaian pelayanan air minum			
Mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan air bersih	-	Peningkatan sarana prasarana dan pengelolaan jaringan irigasi dan sumberdaya air untuk menjaga ketersediaan air bagi kehidupan masyarakat			
Memperluas cakupan wilayah penyediaan listrik untuk masyarakat	-	Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan energi listrik yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di seluruh kawasan			
Menciptakan standar dan pengembangan kualitas permukiman yang sehat melalui perbaikan sanitasi yang layak	-	Penyediaan sanitasi layak yang terintegrasi dengan penyediaan dan pengembangan perumahan			
Meningkatkan infrastruktur komunikasi dan informasi secara bertahap	-	-	Peningkatan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat		
Mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan telekomunikasi	-	-	Percepatan pemenuhan SPM untuk pelayanan telekomunikasi yang prima terutama di kawasan perdesaan dan wilayah tertinggal		
Meningkatkan pelayanan sampah melalui kerjasama antardaerah untuk Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang menerapkan sistem sanitary landfill serta pelayanan pengangkutan sampah	-	Peningkatan sarana prasarana pengelolaan persampahan yang menjangkau sebagian besar wilayah			
Menciptakan ruang-ruang ekonomi yang memfasilitasi ekonomi tradisional dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)	-	Penataan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat sehingga dapat menjadi penggerak roda perekonomian daerah			
Menguatkan jaringan distribusi dan informasi antar pasar tradisional	-	-	-	Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat dalam membangun dan menghidupkan peran pasar tradisional	
	-	-	-	Pemanfaatan TIK untuk keperluan pengembangan pasar tradisional dan perlindungan konsumen	



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Tabel 22

MISI IV MENCIPTAKAN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan kepastian hukum terkait investasi dan usaha	Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan pusat dan daerah agar kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kampar dapat selaras dengan kebijakan pemerintah daerah Provinsi Riau dan Pemerintah pusat			-	-
	Penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha melalui modifikasi maupun penghapusan regulasi dan peraturan di daerah yang menghambat dan mempersulit dunia usaha untuk berinvestasi dan berusaha, termasuk modifikasi / penghapusan prosedur regulasi yang memiliki celah untuk disalahgunakan sebagai rente ekonomi yang menyebabkan tingginya biaya perizinan di Kabupaten Kampar			-	-
	-	-	Penyediaan tata ruang wilayah kabupaten Kampar yang telah dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) hingga ke Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kepastian perijinan lokasi usaha dan investasi		
	-	-	Pengembangan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perijinan bagi investor dan pengusaha melalui optimalisasi penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk menyatukan perijinan pada satu tempat layanan perijinan di Kabupaten Kampar		
Memperkuat daya saing tenaga kerja dalam memasuki pasar tenaga kerja secara global	Harmonisasi standardisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja melalui kerjasama lintas sektor, lintas daerah, dan lintas negara mitra bisnis, dalam kerangka keterbukaan pasar			-	-
	Pengembangan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha/industri dan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pengembangan standar kompetensi dan sertifikasi / uji kompetensi oleh pihak pengguna (asosiasi industri / profesi) bersama lembaga sertifikasi profesi berlisensi, serta pengembangan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi yang mengacu kepada standar yang dikembangkan oleh industri			-	-
	-	Pengembangan pola pendanaan pelatihan untuk mendukung peningkatan keahlian tenaga kerja			
	-	Penguatan Balai Latihan Kerja (BLK) melalui revitalisasi sekaligus reorientasi menjadi Balai Latihan Kerja dan Kewirausahaan (BLKK) yang ada di Kabupaten Kampar untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian masyarakat kurang mampu			
Mengembangkan investasi yang inklusif melalui peningkatan promosi investasi di daerah yang dapat menciptakan <i>investor awareness and willingness</i> untuk berinvestasi di daerah	-	Pengembangan mekanisme promosi investasi yang lebih efektif yang antara lain meliputi penyelarasan kegiatan promosi <i>Tourism, Trade and Investment (TTI)</i> serta pengembangan kantor promosi terpadu di negara-negara tertentu, serta optimalisasi peran kantor perwakilan investasi Kabupaten Kampar di luar negeri			-
	Peningkatan keikutsertaan daerah dalam ajang pertemuan bisnis antara pelaku usaha dengan pemerintah pusat/daerah				
Mendorong kebebasan berserikat dan hak	Penguatan infrastruktur hubungan industrial dalam mewujudkan			-	-



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
	2018	2019	2020	2021	2022
untuk berorganisasi bagi pekerja untuk menciptakan <i>collective bargaining</i> dengan pemberi kerjanya sehingga terwujudnya keseimbangan antara peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja	terselenggaranya desentralisasi hubungan industrial serta perbaikan kerangka hubungan industrial untuk meningkatkan perkembangan serikat pekerja berkualitas dan perundingan bersama				
	-	Pemberdayaan dan pembinaan serikat pekerja sehingga serikat pekerja dapat sepenuhnya ikut serta dalam negosiasi-negosiasi bipartit dalam kedudukan yang sejajar dengan pemberi kerja			-
	-	Peningkatan kepatuhan perusahaan/industri terhadap peraturan ketenagakerjaan, serta penegakan hukum bagi pelanggaran peraturan yang merugikan pekerja dan pemberi kerja			-
Meningkatkan koordinasi dan kerjasama investasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha	Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) sebagai salah satu alternatif upaya pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik secara kualitas maupun kuantitas				
	Pendirian forum Investasi yang beranggotakan lintas OPD dan lintas pemangku kepentingan yang secara rutin mengadakan pertemuan untuk memonitor, mengatasi permasalahan investasi, dan mencari solusi terbaik agar dapat terus menjaga iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha dan investor			-	-
Mengembangkan dan menguatkan sistem pendidikan dan pelatihan keterampilan wirausaha, serta pembinaan dan pendampingan SDM calon maupun pelaku KUMK	Penguatan dan perluasan tugas pokok dan fungsi Balai Latihan Kerja dan Kewirausahaan (BLKK) yang ada di Kabupaten Kampar tidak hanya pada skala usaha / industri besar namun juga ke skala KUMK			-	-
	Peningkatan akses ke pelatihan dan layanan usaha terpadu mengenai standarisasi dan sertifikasi produk, serta penerapan teknologi tepat guna dalam proses produksi				
	-	Pendampingan bagi KUMK yang hendak mendapatkan standar (SNI, HaKI) dan sertifikat (halal, keamanan pangan dan obat)			-
	-	Pengembangan kurikulum pendidikan tentang kewirausahaan dan KUMK yang sesuai dengan sumber daya dan kebutuhan lokal dalam pendidikan formal			-
Mengembangkan dan mengoptimalisasi lembaga pembiayaan bank maupun non-bank bagi KUMK, serta advokasi pembiayaan bagi KUMK	-	Peningkatan akses layanan pemberian kredit/pihayaan KUMK oleh bank umum dan BPR, serta lembaga non bank. Perluasan akses layanan keuangan dilakukan pula tanpa melalui kantor bank atau dilakukan melalui cara non konvensional, melalui pemanfaatan teknologi informasi			
	-	Fasilitasi untuk mendukung pembiayaan KUMK di berbagai sektor potensial bekerjasama dengan berbagai lembaga badan usaha seperti BUMD maupun BUMDes di Kabupaten Kampar			-
	-	Pengembangan <i>credit rating</i> bagi KUMK			
Meningkatkan nilai tambah, kualitas, keragaman dan jangkauan pemasaran produk-produk KUMK yang berbasis pada prinsip pengembangan rantai nilai, keunggulan serta sumber daya lokal	-	Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna dalam proses produksi produk-produk KUMK diantaranya melalui bantuan mekanisasi produksi			
	-	Peningkatan penerapan standarisasi produk (SNI , HaKI) dan sertifikasi (halal, keamanan pangan dan obat) produk KUMK			
	Penyediaan fasilitas pemasaran produk-produk KUMK pada pintu masuk kawasan pariwisata dan lokasi-lokasi strategis lainnya			-	-
	Promosi produk-produk KUMK melalui even-even nasional maupun internasional				
	-	-	Fasilitasi pemasaran produk-produk KUMK secara online dengan membangun dan menyediakan situs pemasaran (Pengembangan <i>e-commerce</i> KUMK)		



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Mengembangkan kemitraan investasi berbasis keterkaitan usaha (<i>backward-forward linkages</i>)	-	Pengembangan kemitraan / kerjasama usaha melalui model inkubator bisnis serta program pembinaan dan pendampingan KUMK dengan pihak swasta / industri besar dari proses produksi hingga pemasaran produk			-
	-	-	Peningkatan jumlah KUMK lokal yang menjadi bagian dari rantai pasok (<i>supply chain</i>) dan pemasok bahan baku bagi industri besar		
Menguatkan tugas pokok dan fungsi serta daya saing BUMD melalui penataan kelembagaan, pengembangan kapasitas SDM dan perbaikan sistem manajemen usaha BUMD	Penataan kelembagaan serta pengembangan kapasitas dan mutu sumber daya manusia BUMD secara profesional			-	-
	-	Pengembangan sistem manajemen dan inovasi usaha BUMD yang berdaya saing, terukur, dan transparan			-
	-	-	Evaluasi performa dan kinerja BUMD secara berkala		

Tabel 23
MISI V MENGEMBANGKAN KAWASAN PARIWISATA DAN INDUSTRI PENGOLAHAN
YANG MAJU

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Menetapkan destinasi wisata potensial yang kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal dalam Rencana Induk Pariwisata Daerah dengan memperhatikan aspek kesesuaian lahan, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup, dan melibatkan masyarakat	Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Daerah yang memuat hasil kajian potensi wisata dan rancangan destinasi potensial yang kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal				
Membangun dan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk kawasan wisata baik dengan sumber daya daerah maupun kerjasama dengan swasta	Identifikasi destinasi wisata yang memerlukan perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana wisata	Penggalangan kemitraan dan kerjasama dengan swasta dalam rangka pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk kawasan wisata			
			Pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk kawasan wisata dengan menerapkan prinsip konservasi, memperhatikan kesesuaian lahan serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup		
Menetapkan destinasi wisata di kawasan konservasi dalam Rencana Induk Pariwisata Daerah	Koordinasi antar para pihak terkait pengelolaan kawasan konservasi dalam				



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
	2018	2019	2020	2021	2022
	penetapan destinasi wisata di kawasan konservasi				
	Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Daerah yang memuat rancangan destinasi wisata di kawasan konservasi				
Mengembangkan peran aktif jejaring kawasan konservasi dalam mendukung promosi wisata, pendanaan berkelanjutan, dan sistem keamanan terpadu melibatkan sektor pemerintah pusat dan daerah, perusahaan swasta, dan kelompok masyarakat	Terlibat dalam kegiatan yang terkait jejaring kawasan konservasi serta terlibat aktif dalam kelompok kerja dalam mendukung promosi wisata, skema pendanaan berkelanjutan, dan sistem keamanan terpadu Pengawasan dan implementasikan kerja-kerja dan kesepakatan kelompok kerja jejaring kawasan konservasi				
Meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pengawasan implementasi dokumen perencanaan di kawasan konservasi dan RIPDA dalam mendukung kegiatan pariwisata yang berkelanjutan	Pembentukan kelompok (multistakeholder) dan jejaring pengawasan pengelolaan kawasan konservasi		Pelaksanaan monitoring dan pengawasan implementasi dokumen perencanaan di kawasan konservasi dan RIPDA dalam mendukung kegiatan pariwisata yang berkelanjutan		
Membangun dan menyediakan fasilitas wisata dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan kekhasan kawasan konservasi atau berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang menerapkan prinsip konservasi sehingga keberlanjutan lingkungan hidup kawasan dapat terjaga	Identifikasi destinasi wisata di kawasan konservasi yang memerlukan perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana wisata	Penggalangan kemitraan dan kerjasama dengan swasta dalam rangka pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana pada destinasi wisata di kawasan konservasi			
			Pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana wisata di lahan-lahan yang sesuai dengan menerapkan kaidah-kaidah konservasi, serta mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk keberlanjutan kawasan		
Menyusun dan menetapkan regulasi kawasan-kawasan wisata dalam pengelolaan kebersihan disertai dengan mekanisme insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha pariwisata yang menjaga kebersihan dan	Pembuatan kesepakatan bersama antara pemerintah dan pelaku-pelaku usaha untuk berkomitmen mewujudkan destinasi wisata yang bebas sampah	Penyusunan draft mekanisme insentif dan disinsentif bagi pelaku-pelaku usaha pariwisata yang menjaga kebersihan	Penyusunan dan pengesahan regulasi pengelolaan lingkungan di kawasan-kawasan wisata terkait kebersihan dan ketersediaan infrastruktur		



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
	2018	2019	2020	2021	2022
penyediaan infrastruktur yang memadai	anorganik dan menerapkan sistem keberlanjutan ekosistem				
Mengembangkan <i>volunteer tourism</i> sebagai salah satu model wisata	Sosialisasi kepada pengelola destinasi wisata mengenai pengembangan <i>volunteer tourism</i>	Publikasi dan promosi <i>volunteer tourism</i> sebagai salah satu model wisata			
Mengoptimalkan aktivitas sadar wisata untuk menumbuhkembangkan kelompok sadar wisata (Pokdarwis)	Identifikasi dan inventarisasi komunitas masyarakat yang memiliki minat terhadap industri pariwisata	Penguatan kelembagaan Pokdarwis melalui pengembangan program sadar wisata yang sesuai dengan peluang dan potensi yang ada			
Mengoptimalkan keberadaan BUMDES untuk mendukung kelompok-kelompok wisata dari masyarakat lokal	Penguatan keberadaan kelembagaan keuangan tingkat desa/ BUMDES untuk mendukung kelompok-kelompok wisata dari masyarakat lokal				
Mendorong munculnya kelompok potensial dan melakukan pembinaan secara intensif dan berkelanjutan	Pembentukan dan penguatan kelompok sadar wisata				
Pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek kesesuaian/kemampuan lahan, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup demi keberlanjutan kawasan serta melibatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaannya	Identifikasi potensi kawasan industri harus memperhatikan aspek kesesuaian dan kemampuan lahan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta melibatkan peran serta masyarakat				
		Penetapan kawasan-kawasan industri yang akan dikembangkan dalam dokumen perencanaan			
					Perbaikan dan penambahan fasilitas kawasan industri
Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat lokal dalam pengembangan destinasi wisata	Koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat lokal dalam pengembangan destinasi wisata				
Melestarikan perayaan budaya daerah sebagai salah satu event iconic daerah dan mempublikasikannya	Pelestarian dan publikasi perayaan budaya daerah sebagai salah satu <i>event iconic</i> daerah				
Menciptakan event-event wisata dan budaya yang kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal yang dapat menarik	Penyelenggaraan <i>event-event</i> wisata dan budaya yang dapat menarik pengunjung dan wisatawan sesuai dengan potensi dan identitas daerah, seperti festival sungai kampar				



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
	2018	2019	2020	2021	2022
pengunjung dan wisatawan sesuai dengan potensi dan identitas daerah.					
Menyelenggarakan media dan pusat informasi pariwisata, lengkap dengan paket-paket wisata yang ditawarkan yang juga memiliki fungsi sebagai gerai produk	Pembangunan media dan pusat informasi pariwisata, lengkap dengan paket-paket wisata yang ditawarkan yang juga memiliki fungsi sebagai gerai produk				
Menyelenggarakan event wisata yang bekerjasama dengan media-media <i>travelling</i> dan <i>adventure</i> , dan para jurnalis wisata sebagai media publikasi pariwisata	Pemetaan potensi wisata dan penyusunan paket wisata yang tertuang dalam RIPDA		Penguatan jejaring kerjasama dengan agen perjalanan pariwisata dalam publikasi dan penyelenggaraan pusat informasi pariwisata		
Melakukan pendampingan terhadap pelaku industri pengolahan dan menjamin kualitas proses produksi dari hulu hingga hilir	Penelitian komoditas potensial unggulan				
	Pengembangan diversifikasi produk olahan komoditas potensial berbasis sumber daya setempat				
	Peningkatan keterampilan dan kapasitas SDM dalam proses produksi dan pengetahuan mengenai standarisasi dan sertifikasi produk				
	Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna dalam proses produksi diantaranya melalui bantuan mekanisasi produksi				
Meningkatkan kapasitas pelaku industri dan penguatan kelembagaan pelaku industri	Peningkatan keterampilan dan kapasitas SDM dalam proses produksi dan penerapan teknologi melalui pelatihan dan bantuan teknologi				
	Pendampingan kelompok-kelompok industri melalui peningkatan akses terhadap permodalan, dan jejaring pasar				
Mengembangkan lembaga pembiayaan/bank UMKM dan koperasi, serta optimalisasi sumber pembiayaan non-bank, serta advokasi pembiayaan bagi umkm maupun koperasi	Peningkatan akses layanan pemberian kredit/pembiayaan UMKM oleh bank umum dan BPR, serta lembaga non bank. Perluasan akses layanan keuangan dilakukan pula tanpa melalui kantor bank atau dilakukan melalui cara non konvensional, melalui pemanfaatan teknologi informasi.				
	Fasilitasi intermediasi untuk mendukung pembiayaan di berbagai sektor potensial bekerjasama dengan berbagai instansi-pemerintah seperti UPK PNPM				
	Pengembangan <i>credit rating</i> bagi UMKM dan koperasi				
Mengembangkan pemasaran dan promosi produk-produk IKM melalui even-even nasional maupun internasional dan diintegrasikan dengan paket pariwisata serta lokasi-lokasi strategis lainnya	Peningkatan hub bagi produk-produk UMKM dan gerai-gerai pada pintu masuk kawasan dan lokasi-lokasi strategis				
	Promosi produk-produk UMKM melalui even-even nasional maupun internasional				
	Pemasaran produk-produk UMKM secara online dengan membangun/menyediakan situs pemasaran				
Mengembangkan industri pengolahan berskala ekspor		Menyusun regulasi penjualan dan penentuan harga hasil industri pengolahan, khususnya skala			



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
	2018	2019	2020	2021	2022
		ekspor untuk melindungi petani pekebun rakyat			
	Pendampingan dan fasilitasi para pengusaha berorientasi ekspor terhadap pemasaran produk industri perkebunan dan perikanan skala ekspor				
	Pengembangan jejaring dan akses pasar skala ekspor				
Meningkatkan jumlah UMKM lokal yang menjadi bagian dari rantai pasok (<i>supply chain</i>) dan pemasok bahan baku bagi industri besar	Peningkatan jumlah dan produktivitas UMKM lokal dan bersifat kontinu sebagai rantai pasok dan pemasok bahan baku bagi industri besar				
Menjadikan industri besar sebagai mitra pemerintah untuk membina UMKM dalam hal peningkatan produksi maupun penerapan teknologi yang termutakhirkan dalam rangka peningkatan produktivitas UMKM	Pembinaan dan alih teknologi kepada UMKM mitra oleh industri besar				

Tabel 24

MISI VI MEMPERKUAT CITRA KAMPAR SEBAGAI SERAMBI MEKKAH RIAU YANG RELIGIUS, BERADAT, DAN BERBUDAYA

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya lokal	Peningkatan aktivitas seni dan karya budaya lokal yang diinisiasi oleh masyarakat			-	-
	-	Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni dan karya budaya lokal			
	-	Peningkatan apresiasi dan promosi karya seni dan karya budaya lokal			
Melestarikan warisan budaya baik bersifat benda (<i>tangible</i>) maupun tak benda (<i>intangible</i>)	Penguatan sistem registrasi dan administrasi warisan budaya yang terintegrasi ke dalam satu sistem informasi dan komunikasi serta basis data kebudayaan Kabupaten Kampar			-	-
	-	-	Peningkatan sosialisasi dan advokasi nilai positif warisan budaya lokal		
Mengembangkan, mengelola dan memberdayakan sumber daya kebudayaan	Pengembangan kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lainnya baik masyarakat maupun dunia usaha				
	-	Pemberian insentif kepada para pelaku seni dalam pengembangan kualitas karya budaya, kreativitas, dan produktivitas dalam bentuk fasilitasi, pendukungan dan penghargaan			
	-	Pengembangan aplikasi sistem informasi dan komunikasi, serta basis data seluruh sumber daya kebudayaan Kabupaten Kampar dari warisan budaya, pelaku budaya, lembaga adat dan publikasi hasil riset budaya secara terstruktur, akurat, dan terbuka untuk umum			-
Mengembangkan promosi dan diplomasi budaya	-	Pengembangan rumah budaya lokal serta media promosi dan publikasi budaya lokal lainnya di dalam Kabupaten Kampar			
Mengintegrasikan pengetahuan sejarah,	-	Penyusunan kurikulum muatan lokal tentang sejarah,		-	-



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
	2018	2019	2020	2021	2022
kesenian dan budaya lokal dalam kurikulum pendidikan maupun aktivitas ekstrakurikuler	-	-	kesenian, dan budaya Kabupaten Kampar dalam pendidikan dasar	-	-
Meningkatkan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan umat beragama	-	-	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah, tokoh agama, serta lembaga sosial keagamaan	-	-
Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan untuk memperkuat peran dan fungsi agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan kehidupan beragama serta bermasyarakat	-	-	Peningkatan kapasitas dan kualitas penyuluh agama, tokoh agama, lembaga sosial keagamaan, dan media massa dalam melakukan bimbingan keagamaan dan kesadaran kepada masyarakat untuk hidup rukun, toleran, dan gotong royong dalam kebinekaan	-	-
Meningkatkan tata kelola dana sosial keagamaan	-	-	Penyelenggaraan dialog antarumat beragama untuk memperoleh pemahaman agama berwawasan multikultur melalui pembentukan dan pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten Kampar	-	-
	-	-	Peningkatan kapasitas dan peran lembaga sosial keagamaan dalam rangka pelayanan dan pengelolaan dana sosial keagamaan	-	-
	-	-	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana sosial keagamaan untuk pemberdayaan masyarakat	-	-
	-	-	Penguatan Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS) daerah untuk mengoptimalkan penerimaan potensi ZIS dari muzaki (penerima ZIS) dan pendayagunaannya untuk mustahik (penerima ZIS)	-	-
Meningkatkan tata kelola dan fungsi Islamic Center sebagai pusat pendidikan dan pengembangan dakwah Islam	-	-	Pengembangan program pendidikan dan dakwah Islam yang berkualitas	-	-
Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan	-	-	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana peribadatan, pendidikan serta dakwah Islam	-	-
	-	-	Perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba, minuman keras, pergaulan bebas, dan radikalisme	-	-
	-	-	Perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan	-	-
	-	-	Peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama	-	-
Menyelenggarakan gerakan keteladanan di lingkungan aparatur pemerintah daerah dengan penentuan pada aspek-aspek tertentu (revolusi mental)	-	-	Sosialisasi pentingnya penyelenggaraan gerakan keteladanan pada aspek-aspek tertentu di lingkungan aparatur pemerintah dan masyarakat secara umum, serta perancangan regulasi gerakan keteladanan yang disepakati bersama	-	-
	-	-	Inisiasi serta evaluasi gerakan keteladanan yang telah diatur di lingkungan aparatur pemerintah serta unit pelayanan publik secara berkala	-	-
Meningkatkan pelayanan kependudukan yang berkualitas untuk menumbuhkan jiwa patriotisme, budaya olahraga, budaya prestasi,	-	-	Penyediaan ruang bagi generasi muda untuk bereksresi dan menyalurkan bakat, kreativitas dan aspirasinya	-	-
	-	-	Peningkatan sarana serta prasarana olahraga, kesenian, dan kewirausahaan untuk mendukung pembinaan di bidang olahraga, kesenian, dan kewirausahaan	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
	2018	2019	2020	2021	2022
profesionalitas, serta untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan	-	-	Peningkatan apresiasi dan penghargaan kepada generasi muda di bidang olahraga, kesenian, dan kewirausahaan		
Meningkatkan implementasi kebijakan perlindungan anak melalui penguatan kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan perlindungan anak di tingkat daerah	Penyusunan regulasi terkait dengan kerjasama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, media massa dan lembaga non pemerintah dalam memberikan layanan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, termasuk bagi anak dengan kondisi khusus		-	-	-
	-	-	Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai bentuk jaminan dan perlindungan atas hak anak yang berhadapan dengan hukum di tingkat daerah		

Program-program pembangunan daerah yang ditampilkan pada tabel berikut ini adalah program-program prioritas yang: i) berhubungan dengan pencapaian sasaran pembangunan daerah; dan ii) berhubungan dengan delapan bidang prioritas Kabupaten Kampar 2018-2022 sebagaimana janji politik Bupati terpilih. Penyajian kebijakan umum dan program pembangunan daerah terdapat pada tabel berikut:

2018	2019	2020	2021	2022
Mempercepat Reformasi Birokrasi untuk Pembangunan SDM dan Pengelolaan SDA yang Berkelanjutan.	Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan Pemantapan Pelayanan dalam Menjamin Pemerataan dan Mengurangi Kesenjangan antar Wilayah.	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi dalam Meningkatkan Daya Saing Wilayah.	Memacu Investasi dan Sinergitas antar Sektor serta Dunia Usaha dalam Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.	Memantapkan Produktivitas Daerah Berbasis Sektor Industri dan Pertanian yang Maju dan Berkelanjutan.

D. KEBIJAKAN KEUANGAN KABUPATEN KAMPAR

APBD merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, APBD mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan.

Sebagai dokumen formal pernyataan kebijakan fiskal yang telah disepakati antara eksekutif dan legislatif maka telah ditetapkan APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022, yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Bupati Kampar tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022, yang dalam pelaksanaannya mengalami sembilan kali perubahan (Perubahan APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022).

Dalam penyusunan APBD, Pemerintah Kabupaten Kampar bersama DPRD Kabupaten Kampar menetapkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) sebagai dasar penetapan program



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

prioritas dan target-target umum yang akan dicapai selama tahun anggaran, untuk selanjutnya dijadikan sebagai landasan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan APBD.

1) Kebijakan di bidang Penerimaan

Dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan pembangunan di Kabupaten Kampar, diupayakan pendanaannya secara maksimal, salah satunya melalui upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi serta memperlancar pungutan pajak dan retribusi serta sumber-sumber penerimaan lainnya.

Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

2) Kebijakan di bidang Pengeluaran

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran dimaksud.

Dalam kaitan itu, penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pengalokasian Belanja Daerah dicerminkan dalam komposisi dua kelompok belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Masing-masing kelompok belanja dibagi ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek belanja sesuai *nomenklatur* yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006. Kebijakan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan anggaran belanja. Kebijakan umum belanja daerah mengacu kepada prioritas pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Kampar maupun dokumen perencanaan terkait lainnya.

Meningkatkan pengawasan baik melalui pengawasan fungsional maupun pengawasan melekat sehingga dana yang tersedia dalam APBD dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.

3. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Berdasarkan kebijakan fiskal yang diterapkan serta memperhatikan kondisi ekonomi Kabupaten Kampar secara umum, Indikator pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kampar untuk Tahun Anggaran 2022 terangkum dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022, dengan uraian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Tabel.25
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar
Tahun Anggaran 2022 *(Dalam Rupiah)*

REKENING	URAIAN	ANGGARAN
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.493.942.228.582,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	252.925.053.734,00
4.1.01.	Pajak Daerah	151.227.920.126,00
4.1.01.06.	Pajak Hotel	1.512.100.000,00
4.1.01.06.01.	Pajak Hotel	1.512.100.000,00
4.1.01.06.01.0001.	Pajak Hotel	1.512.100.000,00
4.1.01.07.	Pajak Restoran	6.455.647.500,00
4.1.01.07.01.	Pajak Restoran dan Sejenisnya	6.455.647.500,00
4.1.01.07.01.0001.	Pajak Restoran dan Sejenisnya	6.455.647.500,00
4.1.01.09.	Pajak Reklame	953.090.000,00
4.1.01.09.01.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	953.090.000,00
4.1.01.09.01.0001.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	953.090.000,00
4.1.01.10.	Pajak Penerangan Jalan	73.144.868.351,00
4.1.01.10.01.	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0,00
4.1.01.10.01.0001.	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0,00
4.1.01.10.02.	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	73.144.868.351,00
4.1.01.10.02.0001.	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	73.144.868.351,00
4.1.01.11.	Pajak Parkir	180.500.000,00
4.1.01.11.01.	Pajak Parkir	180.500.000,00
4.1.01.11.01.0001.	Pajak Parkir	180.500.000,00
4.1.01.12.	Pajak Air Tanah	1.649.514.275,00
4.1.01.12.01.	Pajak Air Tanah	1.649.514.275,00
4.1.01.12.01.0001.	Pajak Air Tanah	1.649.514.275,00
4.1.01.13.	Pajak Sarang Burung Walet	82.000.000,00
4.1.01.13.01.	Pajak Sarang Burung Walet	82.000.000,00
4.1.01.13.01.0001.	Pajak Sarang Burung Walet	82.000.000,00
4.1.01.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10.298.555.901,00
4.1.01.14.23.	Pajak Pasir dan Kerikil	0,00
4.1.01.14.23.0001.	Pajak Pasir dan Kerikil	0,00
4.1.01.14.37.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	10.298.555.901,00
4.1.01.14.37.0001.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	10.298.555.901,00
4.1.01.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	19.951.644.099,00
4.1.01.15.01.	PBBP2	19.951.644.099,00
4.1.01.15.01.0001.	PBBP2	19.951.644.099,00
4.1.01.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	37.000.000.000,00
4.1.01.16.01.	BPHTB-Pemindahan Hak	37.000.000.000,00
4.1.01.16.01.0001.	BPHTB-Pemindahan Hak	37.000.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

REKENING	URAIAN	ANGGARAN
4.1.02.	Retribusi Daerah	13.385.050.000,00
4.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	3.603.550.000,00
4.1.02.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00
4.1.02.01.01.0006.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	0,00
4.1.02.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	248.000.000,00
4.1.02.01.02.0001.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	248.000.000,00
4.1.02.01.04.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	285.000.000,00
4.1.02.01.04.0001.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	285.000.000,00
4.1.02.01.05.	Retribusi Pelayanan Pasar	154.000.000,00
4.1.02.01.05.0003.	Retribusi Kios	154.000.000,00
4.1.02.01.06.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	921.600.000,00
4.1.02.01.06.0001.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	921.600.000,00
4.1.02.01.07.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	30.000.000,00
4.1.02.01.07.0001.	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	30.000.000,00
4.1.02.01.09.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	64.000.000,00
4.1.02.01.09.0001.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	64.000.000,00
4.1.02.01.11.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	600.000.000,00
4.1.02.01.11.0001.	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	600.000.000,00
4.1.02.01.13.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.300.950.000,00
4.1.02.01.13.0001.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.300.950.000,00
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	1.781.500.000,00
4.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	927.500.000,00
4.1.02.02.01.0001.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00
4.1.02.02.01.0003.	Retribusi Penyewaan Bangunan	110.000.000,00
4.1.02.02.01.0004.	Retribusi Pemakaian Laboratorium	47.500.000,00
4.1.02.02.01.0006.	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	770.000.000,00
4.1.02.02.05.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,00
4.1.02.02.05.0001.	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	0,00
4.1.02.02.07.	Retribusi Rumah Potong Hewan	64.000.000,00
4.1.02.02.07.0001.	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	64.000.000,00
4.1.02.02.09.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	150.000.000,00
4.1.02.02.09.0001.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	150.000.000,00
4.1.02.02.11.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	640.000.000,00
4.1.02.02.11.0001.	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	225.000.000,00
4.1.02.02.11.0002.	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	65.000.000,00
4.1.02.02.11.0003.	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	350.000.000,00
4.1.02.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	8.000.000.000,00
4.1.02.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	8.000.000.000,00
4.1.02.03.01.0001.	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	8.000.000.000,00
4.1.02.03.07.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

REKENING	URAIAN	ANGGARAN
4.1.02.03.07.0001.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0,00
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.344.989.367,00
4.1.03.02.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	21.344.989.367,00
4.1.03.02.01.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	19.690.256.107,00
4.1.03.02.01.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	19.690.256.107,00
4.1.03.02.02.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.654.733.260,00
4.1.03.02.02.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.654.733.260,00
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	66.967.094.241,00
4.1.04.01.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	519.332.000,00
4.1.04.01.02.	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	519.332.000,00
4.1.04.01.02.0002.	Hasil Penjualan Alat Angkutan	519.332.000,00
4.1.04.04.	Hasil Kerja Sama Daerah	0,00
4.1.04.04.01.	Hasil Kerja Sama Daerah	0,00
4.1.04.04.01.0001.	Hasil Kerja Sama Daerah	0,00
4.1.04.05.	Jasa Giro	2.500.000.000,00
4.1.04.05.01.	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.500.000.000,00
4.1.04.05.01.0001.	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.500.000.000,00
4.1.04.06.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00
4.1.04.06.01.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00
4.1.04.06.01.0001.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00
4.1.04.07.	Pendapatan Bunga	200.000.000,00
4.1.04.07.01.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	200.000.000,00
4.1.04.07.01.0001.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	200.000.000,00
4.1.04.09.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00
4.1.04.09.01.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00
4.1.04.09.01.0001.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00
4.1.04.11.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00
4.1.04.11.01.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00
4.1.04.11.01.0001.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00
4.1.04.12.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00
4.1.04.12.09.	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,00
4.1.04.12.09.0001.	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	0,00
4.1.04.14.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00
4.1.04.14.01.	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	0,00
4.1.04.14.01.0001.	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	0,00
4.1.04.15.	Pendapatan dari Pengembalian	0,00
4.1.04.15.03.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00
4.1.04.15.03.0001.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00
4.1.04.15.04.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

REKENING	URAIAN	ANGGARAN
4.1.04.15.04.0001.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	0,00
4.1.04.15.04.0002.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Tetap	0,00
4.1.04.15.04.0003.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00
4.1.04.15.04.0005.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00
4.1.04.15.05.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan	0,00
4.1.04.15.05.0001.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK	0,00
4.1.04.16.	Pendapatan BLUD	63.447.762.241,00
4.1.04.16.01.	Pendapatan BLUD	63.447.762.241,00
4.1.04.16.01.0001.	Pendapatan BLUD	63.447.762.241,00
4.1.04.18.	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00
4.1.04.18.01.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00
4.1.04.18.01.0001.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00
4.1.04.19.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	300.000.000,00
4.1.04.19.01.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	300.000.000,00
4.1.04.19.01.0001.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	300.000.000,00
4.1.04.21.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00
4.1.04.21.01.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00
4.1.04.21.01.0001.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	2.241.017.174.848,00
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.071.547.655.653,00
4.2.01.01.	Dana Perimbangan	1.850.583.107.653,00
4.2.01.01.01.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	600.650.141.288,00
4.2.01.01.01.0001.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	306.057.524.255,00
4.2.01.01.01.0002.	DBH PPh Pasal 21	16.469.038.191,00
4.2.01.01.01.0003.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	909.311.771,00
4.2.01.01.01.0004.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	280.155,00
4.2.01.01.01.0005.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	227.600.982.548,00
4.2.01.01.01.0006.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	29.267.340.612,00
4.2.01.01.01.0008.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	3.830.000,00
4.2.01.01.01.0009.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	4.236.855.198,00
4.2.01.01.01.0010.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	14.320.140.482,00
4.2.01.01.01.0013.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.784.838.076,00
4.2.01.01.02.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	764.811.348.365,00
4.2.01.01.02.0001.	DAU	764.811.348.365,00
4.2.01.01.03.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	133.836.590.000,00
4.2.01.01.03.0001.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.989.439.000,00
4.2.01.01.03.0002.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	52.274.966.000,00
4.2.01.01.03.0003.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	6.562.819.000,00
4.2.01.01.03.0011.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

REKENING	URAIAN	ANGGARAN
4.2.01.01.03.0013.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB - Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00
4.2.01.01.03.0014.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB - Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00
4.2.01.01.03.0015.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	39.121.215.000,00
4.2.01.01.03.0024.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB - Afirmasi-PenguatanPrasaranaDasar Puskesmas	0,00
4.2.01.01.03.0025.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB - Reguler-KB	0,00
4.2.01.01.03.0026.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	0,00
4.2.01.01.03.0031.	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	4.417.254.000,00
4.2.01.01.03.0032.	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	3.702.382.000,00
4.2.01.01.03.0034.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	15.328.277.000,00
4.2.01.01.03.0037.	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	7.034.757.000,00
4.2.01.01.03.0039.	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00
4.2.01.01.03.0040.	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	3.405.481.000,00
4.2.01.01.03.0042.	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00
4.2.01.01.03.0043.	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00
4.2.01.01.03.0045.	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	0,00
4.2.01.01.04.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	351.285.028.000,00
4.2.01.01.04.0001.	DAK Non Fisik-BOS Reguler	129.128.800.000,00
4.2.01.01.04.0004.	DAK Non Fisik-TPG PNSD	165.527.065.000,00
4.2.01.01.04.0005.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.212.000.000,00
4.2.01.01.04.0006.	DAK Non Fisik-TKG PNSD	4.393.215.000,00
4.2.01.01.04.0007.	DAK Non Fisik-BOP PAUD	10.524.600.000,00
4.2.01.01.04.0008.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesenjangan	2.270.700.000,00
4.2.01.01.04.0011.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	28.383.991.000,00
4.2.01.01.04.0015.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	8.386.163.000,00
4.2.01.01.04.0016.	DAK Non Fisik-PK2UKM	404.200.000,00
4.2.01.01.04.0017.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00
4.2.01.01.04.0019.	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	0,00
4.2.01.01.04.0020.	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	393.394.000,00
4.2.01.01.04.0022.	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	451.800.000,00
4.2.01.01.04.0023.	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	209.100.000,00
4.2.01.02.	Dana Insentif Daerah (DID)	5.205.152.000,00
4.2.01.02.01.	DID	5.205.152.000,00
4.2.01.02.01.0001.	DID	5.205.152.000,00
4.2.01.05.	Dana Desa	215.759.396.000,00
4.2.01.05.01.	Dana Desa	215.759.396.000,00
4.2.01.05.01.0001.	Dana Desa	215.759.396.000,00
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	169.469.519.195,00
4.2.02.01.	Pendapatan Bagi Hasil	141.553.522.595,00
4.2.02.01.01.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	141.553.522.595,00
4.2.02.01.01.0001.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	37.366.306.897,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

REKENING	URAIAN	ANGGARAN
4.2.02.01.01.0002.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	25.237.161.372,00
4.2.02.01.01.0003.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	51.783.212.715,00
4.2.02.01.01.0004.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.630.664.076,00
4.2.02.01.01.0005.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	25.536.177.535,00
4.2.02.02.	Bantuan Keuangan	27.915.996.600,00
4.2.02.02.01.	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00
4.2.02.02.01.0001.	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	0,00
4.2.02.02.02.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	27.915.996.600,00
4.2.02.02.02.0001.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	27.915.996.600,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00
4.3.01.	Pendapatan Hibah	0,00
4.3.01.05.	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00
4.3.01.05.01.	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00
4.3.01.05.01.0001.	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
4.3.03.01.	Lain-lain Pendapatan	0,00
4.3.03.01.01.	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00
4.3.03.01.01.0001.	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00
	Jumlah Pendapatan	2.493.942.228.582,00
5.	BELANJA	2.589.837.610.263,00
5.1.	BELANJA OPERASI	1.889.541.139.841,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	993.986.424.876,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	556.858.529.176,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	424.158.845.181,00
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	412.613.267.593,00
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	11.545.577.588,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	41.148.470.260,00
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	39.917.671.843,00
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.230.798.417,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.965.631.625,00
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.965.631.625,00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	32.026.816.600,00
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	32.026.816.600,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.057.538.900,00
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.867.800.850,00
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.189.738.050,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	23.821.517.372,00
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	22.914.359.105,00
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	907.158.267,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

REKENING	URAIAN	ANGGARAN
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.562.981.636,00
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.562.981.636,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	6.023.656,00
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.899.139,00
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	124.517,00
5.1.01.01.09.	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	17.637.125.529,00
5.1.01.01.09.0001.	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	17.159.075.569,00
5.1.01.01.09.0002.	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	478.049.960,00
5.1.01.01.10.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	867.974.278,00
5.1.01.01.10.0001.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	844.215.600,00
5.1.01.01.10.0002.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	23.758.678,00
5.1.01.01.11.	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	2.605.604.139,00
5.1.01.01.11.0001.	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	2.534.331.369,00
5.1.01.01.11.0002.	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	71.272.770,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	197.194.953.598,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	167.371.003.598,00
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	163.255.528.598,00
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	4.115.475.000,00
5.1.01.02.02.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	180.000.000,00
5.1.01.02.02.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	180.000.000,00
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	23.648.950.000,00
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	23.648.950.000,00
5.1.01.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	5.995.000.000,00
5.1.01.02.04.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	5.995.000.000,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	181.567.633.703,00
5.1.01.03.01.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	8.137.042.759,00
5.1.01.03.01.0006.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	75.605.000,00
5.1.01.03.01.0007.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	322.782.375,00
5.1.01.03.01.0009.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	47.989.053,00
5.1.01.03.01.0010.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	3.831.522.921,00
5.1.01.03.01.0011.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	9.025.000,00
5.1.01.03.01.0012.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	82.475.714,00
5.1.01.03.01.0013.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	4.100.000,00
5.1.01.03.01.0014.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	531.157.147,00
5.1.01.03.01.0015.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	1.028.059.330,00
5.1.01.03.01.0016.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	2.204.326.219,00
5.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	669.252.500,00
5.1.01.03.02.0002.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	15.600.000,00
5.1.01.03.02.0004.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

REKENING	URAIAN	ANGGARAN
5.1.01.03.02.0005.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	40.200.000,00
5.1.01.03.02.0006.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	60.330.000,00
5.1.01.03.02.0007.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.500.000,00
5.1.01.03.02.0011.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00
5.1.01.03.02.0013.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	65.047.500,00
5.1.01.03.02.0014.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	43.875.000,00
5.1.01.03.02.0022.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	7.500.000,00
5.1.01.03.02.0024.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	35.200.000,00
5.1.01.03.02.0025.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	400.000.000,00
5.1.01.03.05.	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	171.386.512.000,00
5.1.01.03.05.0001.	Belanja Tamsil Guru PNSD	171.386.512.000,00
5.1.01.03.06.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	756.849.344,00
5.1.01.03.06.0001.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	756.849.344,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	617.977.100,00
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	135.540.000,00
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	443.437.100,00
5.1.01.03.07.0003.	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	39.000.000,00
5.1.01.04.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	32.726.022.725,00
5.1.01.04.01.	Belanja Uang Representasi DPRD	1.038.878.952,00
5.1.01.04.01.0001.	Belanja Uang Representasi DPRD	1.038.878.952,00
5.1.01.04.02.	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	144.023.775,00
5.1.01.04.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	144.023.775,00
5.1.01.04.03.	Belanja Tunjangan Beras DPRD	109.063.091,00
5.1.01.04.03.0001.	Belanja Tunjangan Beras DPRD	109.063.091,00
5.1.01.04.04.	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00
5.1.01.04.04.0001.	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00
5.1.01.04.05.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.492.209.866,00
5.1.01.04.05.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.492.209.866,00
5.1.01.04.06.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	124.784.100,00
5.1.01.04.06.0001.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	124.784.100,00
5.1.01.04.07.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	64.949.850,00
5.1.01.04.07.0001.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	64.949.850,00
5.1.01.04.08.	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00
5.1.01.04.08.0001.	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00
5.1.01.04.09.	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000,00
5.1.01.04.09.0001.	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000,00
5.1.01.04.10.	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	535.600.009,00
5.1.01.04.10.0001.	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	535.600.009,00
5.1.01.04.12.	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	9.667.955.082,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

REKENING	URAIAN	ANGGARAN
5.1.01.04.12.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	106.316.586,00
5.1.01.04.12.0002.	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.409.624,00
5.1.01.04.12.0003.	Belanja Jaminan Kematian DPRD	7.228.872,00
5.1.01.04.12.0004.	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	9.552.000.000,00
5.1.01.04.13.	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.540.000.000,00
5.1.01.04.13.0001.	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.540.000.000,00
5.1.01.04.14.	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00
5.1.01.04.14.0001.	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00
5.1.01.05.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	174.451.868,00
5.1.01.05.01.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00
5.1.01.05.01.0001.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00
5.1.01.05.02.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.637.700,00
5.1.01.05.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.637.700,00
5.1.01.05.03.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00
5.1.01.05.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00
5.1.01.05.04.	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.082.676,00
5.1.01.05.04.0001.	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.082.676,00
5.1.01.05.05.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.160.692,00
5.1.01.05.05.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.160.692,00
5.1.01.05.06.	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.120,00
5.1.01.05.06.0001.	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.120,00
5.1.01.05.07.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	1.570.320,00
5.1.01.05.07.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	1.570.320,00
5.1.01.05.08.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	115.128,00
5.1.01.05.08.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	115.128,00
5.1.01.05.09.	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	182.232,00
5.1.01.05.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	182.232,00
5.1.01.06.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000,00
5.1.01.06.01.	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00
5.1.01.06.01.0001.	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00
5.1.01.06.02.	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.06.02.0001.	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.99.	Belanja Pegawai BLUD	24.471.713.806,00
5.1.01.99.99.	Belanja Pegawai BLUD	24.471.713.806,00
5.1.01.99.99.9999.	Belanja Pegawai BLUD	24.471.713.806,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	823.156.542.515,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	173.416.434.828,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	129.532.373.502,00
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	22.523.456.384,00
5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.174.478.012,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

REKENING	URAIAN	ANGGARAN
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.961.469.776,00
5.1.02.01.01.0005.	Belanja Bahan-Bahan Baku	138.000.000,00
5.1.02.01.01.0008.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.954.052.911,00
5.1.02.01.01.0010.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	57.408.000,00
5.1.02.01.01.0011.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	724.564.000,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	10.460.550.616,00
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	196.027.518,00
5.1.02.01.01.0014.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	0,00
5.1.02.01.01.0015.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	308.608.500,00
5.1.02.01.01.0016.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	1.557.270,00
5.1.02.01.01.0018.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	78.123.800,00
5.1.02.01.01.0019.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	452.751.800,00
5.1.02.01.01.0020.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	87.748.950,00
5.1.02.01.01.0023.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	27.413.790,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.645.935.326,00
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	317.520.000,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.819.272.368,00
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	532.430.000,00
5.1.02.01.01.0028.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	65.724.298,00
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	934.749.381,00
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.280.673.162,00
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	244.335.484,00
5.1.02.01.01.0034.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	274.450.000,00
5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	206.031.000,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.643.946.872,00
5.1.02.01.01.0037.	Belanja Obat-Obatan-Obat	426.670.225,00
5.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	8.520.082.617,00
5.1.02.01.01.0041.	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	28.877.500,00
5.1.02.01.01.0042.	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	424.567.000,00
5.1.02.01.01.0043.	Belanja Natura dan Pakan-Natura	659.441.940,00
5.1.02.01.01.0045.	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	239.000.000,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.111.398.710,00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	12.944.917.534,00
5.1.02.01.01.0055.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	261.800.560,00
5.1.02.01.01.0056.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	431.746.000,00
5.1.02.01.01.0057.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	20.000.000,00
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.430.539.918,00
5.1.02.01.01.0059.	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	349.965.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

REKENING	URAIAN	ANGGARAN
5.1.02.01.01.0061.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	399.663.000,00
5.1.02.01.01.0062.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	237.195.000,00
5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	539.136.250,00
5.1.02.01.01.0064.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	637.810.750,00
5.1.02.01.01.0065.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	154.764.750,00
5.1.02.01.01.0066.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	213.819.750,00
5.1.02.01.01.0067.	Belanja Pakaian Penyelamatan	32.250.000,00
5.1.02.01.01.0069.	Belanja Pakaian Teknik	2.250.000,00
5.1.02.01.01.0070.	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	162.573.700,00
5.1.02.01.01.0074.	Belanja Pakaian Adat Daerah	1.578.428.000,00
5.1.02.01.01.0075.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	713.120.000,00
5.1.02.01.01.0076.	Belanja Pakaian Olahraga	872.077.600,00
5.1.02.01.01.0077.	Belanja Pakaian Paskibraka	28.998.480,00
5.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	43.884.061.326,00
5.1.02.01.02.0003.	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	60.907.800,00
5.1.02.01.02.0004.	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	786.709.700,00
5.1.02.01.02.0006.	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	43.036.373.826,00
5.1.02.01.02.0013.	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	70.000,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	331.791.984.956,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	286.673.824.610,00
5.1.02.02.01.0001.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	375.000.000,00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.701.825.000,00
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	17.811.730.500,00
5.1.02.02.01.0005.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	169.600.000,00
5.1.02.02.01.0006.	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	4.203.691.310,00
5.1.02.02.01.0007.	Honorarium Rohaniwan	1.916.000.000,00
5.1.02.02.01.0008.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	8.128.521.500,00
5.1.02.02.01.0009.	Honorarium Penyelenggara Ujian	0,00
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	82.100.000,00
5.1.02.02.01.0012.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	42.000.000,00
5.1.02.02.01.0013.	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	59.529.347.578,00
5.1.02.02.01.0014.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	28.729.227.392,00
5.1.02.02.01.0015.	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	181.940.000,00
5.1.02.02.01.0017.	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	9.690.995.604,00
5.1.02.02.01.0018.	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	6.847.112.192,00
5.1.02.02.01.0019.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	588.800.000,00
5.1.02.02.01.0020.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	2.068.400.000,00
5.1.02.02.01.0021.	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	321.000.000,00
5.1.02.02.01.0022.	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	974.785.000,00
5.1.02.02.01.0023.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	280.075.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

REKENING	URAIAN	ANGGARAN
5.1.02.02.01.0024.	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	43.190.000,00
5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	33.750.000,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	66.772.443.000,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	386.810.000,00
5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.407.260.000,00
5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.723.270.000,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.423.800.000,00
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.404.000.000,00
5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	190.944.000,00
5.1.02.02.01.0035.	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	47.000.000,00
5.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	203.500.000,00
5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	3.178.900.000,00
5.1.02.02.01.0041.	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	120.000.000,00
5.1.02.02.01.0042.	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	0,00
5.1.02.02.01.0046.	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	275.000.000,00
5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.370.605.000,00
5.1.02.02.01.0048.	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	452.700.000,00
5.1.02.02.01.0049.	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	155.234.000,00
5.1.02.02.01.0050.	Belanja Jasa Kalibrasi	38.000.000,00
5.1.02.02.01.0051.	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	392.480.000,00
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	605.750.000,00
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	59.940.000,00
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	812.216.020,00
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	33.910.218.296,00
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	720.328.000,00
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.468.171.240,00
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	27.000.000,00
5.1.02.02.01.0066.	Belanja Registrasi/Keanggotaan	2.000.000,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.175.600.000,00
5.1.02.02.01.0068.	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	3.981.978,00
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	492.811.000,00
5.1.02.02.01.0075.	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	10.134.771.000,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	15.125.341.724,00
5.1.02.02.02.0002.	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	8.410.500.000,00
5.1.02.02.02.0004.	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3	4.280.010.000,00
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.424.989.900,00
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	9.841.824,00
5.1.02.02.03.	Belanja Sewa Tanah	60.000.000,00
5.1.02.02.03.0001.	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	60.000.000,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.606.045.656,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

REKENING	URAIAN	ANGGARAN
5.1.02.02.04.0012.	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	0,00
5.1.02.02.04.0018.	Belanja Sewa Alat Besar Apung Lainnya	25.000.000,00
5.1.02.02.04.0027.	Belanja Sewa Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator	14.000.000,00
5.1.02.02.04.0034.	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	119.040.000,00
5.1.02.02.04.0035.	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	226.200.000,00
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.160.280.000,00
5.1.02.02.04.0043.	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00
5.1.02.02.04.0049.	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0,00
5.1.02.02.04.0117.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.591.450.000,00
5.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	77.675.000,00
5.1.02.02.04.0122.	Belanja Sewa Alat Dapur	0,00
5.1.02.02.04.0123.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	145.900.656,00
5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	12.500.000,00
5.1.02.02.04.0137.	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	42.000.000,00
5.1.02.02.04.0202.	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	0,00
5.1.02.02.04.0405.	Belanja Sewa Personal Computer	0,00
5.1.02.02.04.0407.	Belanja Sewa Peralatan Mainframe	192.000.000,00
5.1.02.02.04.0410.	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	0,00
5.1.02.02.04.0494.	Belanja Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.626.525.000,00
5.1.02.02.05.0001.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.073.625.000,00
5.1.02.02.05.0042.	Belanja Sewa Asrama	16.500.000,00
5.1.02.02.05.0043.	Belanja Sewa Hotel	2.129.400.000,00
5.1.02.02.05.0044.	Belanja Sewa Motel	95.000.000,00
5.1.02.02.05.0045.	Belanja Sewa Flat/Rumah Susun	312.000.000,00
5.1.02.02.06.	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	475.000.000,00
5.1.02.02.06.0013.	Belanja Sewa Jembatan pada Jalan Kabupaten	175.000.000,00
5.1.02.02.06.0131.	Belanja Sewa Jaringan Telepon Lainnya	300.000.000,00
5.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	252.400.000,00
5.1.02.02.07.0013.	Belanja Sewa Audio Visual	54.400.000,00
5.1.02.02.07.0028.	Belanja Sewa Alat Musik	192.000.000,00
5.1.02.02.07.0057.	Belanja Sewa Tanaman	6.000.000,00
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	14.884.122.966,00
5.1.02.02.08.0002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	1.792.676.500,00
5.1.02.02.08.0003.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	1.793.000.000,00
5.1.02.02.08.0004.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	141.609.475,00
5.1.02.02.08.0005.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	189.500.000,00
5.1.02.02.08.0007.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	86.000.000,00
5.1.02.02.08.0008.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	925.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

REKENING	URAIAN	ANGGARAN
5.1.02.02.08.0009.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	430.000.000,00
5.1.02.02.08.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	1.731.043.550,00
5.1.02.02.08.0013.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	31.000.000,00
5.1.02.02.08.0014.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	475.000.000,00
5.1.02.02.08.0015.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	200.000.000,00
5.1.02.02.08.0016.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	75.000.000,00
5.1.02.02.08.0017.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	0,00
5.1.02.02.08.0018.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	1.570.559.200,00
5.1.02.02.08.0019.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	2.104.393.436,00
5.1.02.02.08.0020.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	2.584.577.880,00
5.1.02.02.08.0021.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	650.000.000,00
5.1.02.02.08.0023.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	104.762.925,00
5.1.02.02.08.0027.	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	0,00
5.1.02.02.08.0032.	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	0,00
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	587.000.000,00
5.1.02.02.09.0001.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	360.000.000,00
5.1.02.02.09.0003.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	67.000.000,00
5.1.02.02.09.0011.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	110.000.000,00
5.1.02.02.09.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	50.000.000,00
5.1.02.02.10.	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	474.000.000,00
5.1.02.02.10.0008.	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	474.000.000,00
5.1.02.02.11.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	411.000.000,00
5.1.02.02.11.0002.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	411.000.000,00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.616.725.000,00
5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.817.402.000,00
5.1.02.02.12.0002.	Belanja Sosialisasi	293.200.000,00
5.1.02.02.12.0003.	Belanja Bimbingan Teknis	1.326.840.000,00
5.1.02.02.12.0004.	Belanja Diklat Kepemimpinan	179.283.000,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	51.529.044.740,00
5.1.02.03.01.	Belanja Pemeliharaan Tanah	2.215.000.000,00
5.1.02.03.01.0029.	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	615.000.000,00
5.1.02.03.01.0035.	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya	1.600.000.000,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.726.047.878,00
5.1.02.03.02.0002.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	160.000.000,00
5.1.02.03.02.0003.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	204.000.000,00
5.1.02.03.02.0009.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	70.000.000,00
5.1.02.03.02.0011.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	31.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

REKENING	URAIAN	ANGGARAN
5.1.02.03.02.0012.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	325.000.000,00
5.1.02.03.02.0014.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Floating Excavator	20.000.000,00
5.1.02.03.02.0019.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik	107.800.000,00
5.1.02.03.02.0022.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	362.546.500,00
5.1.02.03.02.0023.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	36.000.000,00
5.1.02.03.02.0034.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	150.000.000,00
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.974.541.650,00
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.750.515.469,00
5.1.02.03.02.0037.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	458.900.941,00
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	6.920.025,00
5.1.02.03.02.0039.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	885.350,00
5.1.02.03.02.0040.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	286.807.500,00
5.1.02.03.02.0043.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	157.133.159,00
5.1.02.03.02.0049.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	51.380.000,00
5.1.02.03.02.0096.	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	147.946.000,00
5.1.02.03.02.0103.	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	12.099.625,00
5.1.02.03.02.0113.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	0,00
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.374.246.178,00
5.1.02.03.02.0118.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	340.136.078,00
5.1.02.03.02.0120.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	3.952.150,00
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.601.732.950,00
5.1.02.03.02.0123.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	82.493.775,00
5.1.02.03.02.0134.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	2.000.000,00
5.1.02.03.02.0136.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	5.000.000,00
5.1.02.03.02.0137.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	235.000.000,00
5.1.02.03.02.0237.	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00
5.1.02.03.02.0268.	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi	920.000,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	630.257.028,00
5.1.02.03.02.0406.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	588.606.000,00
5.1.02.03.02.0409.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	22.977.150,00
5.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	59.400.000,00
5.1.02.03.02.0494.	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	465.350.350,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	29.779.605.225,00
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	23.308.011.175,00
5.1.02.03.03.0006.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	2.058.400.000,00
5.1.02.03.03.0010.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-	4.089.194.050,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

REKENING	URAIAN	ANGGARAN
	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	
5.1.02.03.03.0012.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	199.000.000,00
5.1.02.03.03.0025.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	125.000.000,00
5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.800.902.587,00
5.1.02.03.04.0003.	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	2.610.650.000,00
5.1.02.03.04.0010.	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	990.000.000,00
5.1.02.03.04.0024.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- BangunanAirlrigasi-BangunanWaduk Irigasi	0,00
5.1.02.03.04.0026.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	114.908.187,00
5.1.02.03.04.0064.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	171.904.400,00
5.1.02.03.04.0071.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	300.000.000,00
5.1.02.03.04.0087.	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	388.440.000,00
5.1.02.03.04.0119.	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa	0,00
5.1.02.03.04.0126.	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	225.000.000,00
5.1.02.03.05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	7.489.050,00
5.1.02.03.05.0057.	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	7.489.050,00
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	115.115.513.941,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	115.115.513.941,00
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	57.717.411.501,00
5.1.02.04.01.0002.	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	16.207.820.000,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	41.035.032.440,00
5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	155.250.000,00
5.1.02.04.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00
5.1.02.04.02.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	0,00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.037.217.500,00
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.488.217.500,00
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	487.750.000,00
5.1.02.05.01.0002.	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	13.000.000,00
5.1.02.05.01.0004.	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	263.920.000,00
5.1.02.05.01.0005.	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	723.547.500,00
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.549.000.000,00
5.1.02.05.02.0001.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.549.000.000,00
5.1.02.88.	Belanja Barang dan Jasa BOS	103.323.636.060,00
5.1.02.88.88.	Belanja Barang dan Jasa BOS	103.323.636.060,00
5.1.02.88.88.8888.	Belanja Barang dan Jasa BOS	103.323.636.060,00
5.1.02.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	43.942.710.490,00
5.1.02.99.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	43.942.710.490,00
5.1.02.99.99.9999.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	43.942.710.490,00
5.1.04.	Belanja Subsidi	436.500.000,00
5.1.04.01.	Belanja Subsidi kepada BUMN	436.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

REKENING	URAIAN	ANGGARAN
5.1.04.01.01.	Belanja Subsidi kepada BUMN	436.500.000,00
5.1.04.01.01.0001.	Belanja Subsidi kepada BUMN	436.500.000,00
5.1.05.	Belanja Hibah	49.022.363.900,00
5.1.05.01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	100.000.000,00
5.1.05.01.01.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	100.000.000,00
5.1.05.01.01.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	100.000.000,00
5.1.05.01.02.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00
5.1.05.01.02.0001.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00
5.1.05.02.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00
5.1.05.02.01.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00
5.1.05.02.01.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	46.374.111.900,00
5.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	18.577.621.300,00
5.1.05.05.01.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	14.695.300.000,00
5.1.05.05.01.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.882.321.300,00
5.1.05.05.02.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.701.384.000,00
5.1.05.05.02.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	900.000.000,00
5.1.05.05.02.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	801.384.000,00
5.1.05.05.03.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	26.095.106.600,00
5.1.05.05.03.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	13.367.500.000,00
5.1.05.05.03.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	12.727.606.600,00
5.1.05.07.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.548.252.000,00
5.1.05.07.01.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.548.252.000,00
5.1.05.07.01.0001.	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.548.252.000,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	22.939.308.550,00
5.1.06.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	6.649.808.550,00
5.1.06.01.01.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	6.490.008.550,00
5.1.06.01.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	6.490.008.550,00
5.1.06.01.02.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	159.800.000,00
5.1.06.01.02.0001.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	159.800.000,00
5.1.06.02.	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	16.217.500.000,00
5.1.06.02.01.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	16.217.500.000,00
5.1.06.02.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	16.217.500.000,00
5.1.06.03.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	72.000.000,00
5.1.06.03.02.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	72.000.000,00
5.1.06.03.02.0001.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	72.000.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	312.475.438.040,00
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	590.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

REKENING	URAIAN	ANGGARAN
5.2.01.01.	Belanja Modal Tanah	590.000.000,00
5.2.01.01.01.	Belanja Modal Tanah Persil	590.000.000,00
5.2.01.01.01.0004.	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	0,00
5.2.01.01.01.0007.	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	590.000.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	93.530.233.254,00
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	737.470.250,00
5.2.02.01.01.	Belanja Modal Alat Besar Darat	429.493.750,00
5.2.02.01.01.0001.	Belanja Modal Tractor	99.330.000,00
5.2.02.01.01.0010.	Belanja Modal Alat Pengangkat	1.916.250,00
5.2.02.01.01.0011.	Belanja Modal Mesin Proses	328.247.500,00
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	307.976.500,00
5.2.02.01.03.0004.	Belanja Modal Electric Generating Set	0,00
5.2.02.01.03.0005.	Belanja Modal Pompa	35.964.000,00
5.2.02.01.03.0013.	Belanja Modal Peralatan Selam	10.200.000,00
5.2.02.01.03.0016.	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	261.812.500,00
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	17.712.491.250,00
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	17.681.031.250,00
5.2.02.02.01.0001.	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6.235.000.000,00
5.2.02.02.01.0002.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.387.560.000,00
5.2.02.02.01.0003.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.579.090.000,00
5.2.02.02.01.0004.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	757.750.000,00
5.2.02.02.01.0006.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	5.721.631.250,00
5.2.02.02.01.0009.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00
5.2.02.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00
5.2.02.02.02.0004.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	0,00
5.2.02.02.03.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	31.460.000,00
5.2.02.02.03.0002.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0,00
5.2.02.02.03.0003.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	0,00
5.2.02.02.03.0005.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	31.460.000,00
5.2.02.02.04.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	0,00
5.2.02.02.04.0002.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	0,00
5.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	19.554.000,00
5.2.02.03.01.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	489.000,00
5.2.02.03.01.0010.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	489.000,00
5.2.02.03.02.	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	8.890.000,00
5.2.02.03.02.0005.	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	0,00
5.2.02.03.02.0006.	Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools)	0,00
5.2.02.03.02.0013.	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	8.890.000,00
5.2.02.03.03.	Belanja Modal Alat Ukur	10.175.000,00
5.2.02.03.03.0001.	Belanja Modal Alat Ukur Universal	10.175.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

REKENING	URAIAN	ANGGARAN
5.2.02.03.03.0009.	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	0,00
5.2.02.03.03.0021.	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	0,00
5.2.02.04.	Belanja Modal Alat Pertanian	229.901.271,00
5.2.02.04.01.	Belanja Modal Alat Pengolahan	229.901.271,00
5.2.02.04.01.0001.	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	2.172.500,00
5.2.02.04.01.0002.	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	52.746.000,00
5.2.02.04.01.0009.	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	167.360.771,00
5.2.02.04.01.0010.	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	7.622.000,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	16.837.069.360,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	3.675.321.579,00
5.2.02.05.01.0001.	Belanja Modal Mesin Ketik	2.871.490,00
5.2.02.05.01.0003.	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	172.200.000,00
5.2.02.05.01.0004.	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	12.815.000,00
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	3.487.435.089,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	12.655.037.517,00
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	10.897.002.114,00
5.2.02.05.02.0003.	Belanja Modal Alat Pembersih	25.046.360,00
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	587.104.030,00
5.2.02.05.02.0005.	Belanja Modal Alat Dapur	0,00
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.053.353.013,00
5.2.02.05.02.0007.	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	92.532.000,00
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	506.710.264,00
5.2.02.05.03.0001.	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	35.633.170,00
5.2.02.05.03.0002.	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	38.754.780,00
5.2.02.05.03.0003.	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	195.157.250,00
5.2.02.05.03.0004.	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	18.782.400,00
5.2.02.05.03.0005.	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	78.497.500,00
5.2.02.05.03.0006.	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	57.527.164,00
5.2.02.05.03.0007.	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	82.358.000,00
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.267.327.137,00
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	1.644.141.937,00
5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	583.708.328,00
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	404.026.800,00
5.2.02.06.01.0003.	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	0,00
5.2.02.06.01.0006.	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	656.406.809,00
5.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	1.591.685.200,00
5.2.02.06.02.0001.	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	1.065.800.000,00
5.2.02.06.02.0002.	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB	47.502.000,00
5.2.02.06.02.0011.	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	478.383.200,00
5.2.02.06.04.	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	31.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

REKENING	URAIAN	ANGGARAN
5.2.02.06.04.0004.	Belanja Modal Radar	31.500.000,00
5.2.02.07.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	17.669.531.771,00
5.2.02.07.01.	Belanja Modal Alat Kedokteran	9.109.290.590,00
5.2.02.07.01.0001.	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	5.114.490.740,00
5.2.02.07.01.0004.	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	0,00
5.2.02.07.01.0010.	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	2.535.996.600,00
5.2.02.07.01.0029.	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	1.458.803.250,00
5.2.02.07.02.	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	8.560.241.181,00
5.2.02.07.02.0005.	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	8.560.241.181,00
5.2.02.08.	Belanja Modal Alat Laboratorium	5.520.159.611,00
5.2.02.08.01.	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	3.017.519.611,00
5.2.02.08.01.0011.	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	0,00
5.2.02.08.01.0018.	Belanja Modal Alat Laboratorium Makanan	0,00
5.2.02.08.01.0056.	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	1.267.875,00
5.2.02.08.01.0064.	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	3.016.251.736,00
5.2.02.08.03.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	1.784.300.000,00
5.2.02.08.03.0002.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Matematika	0,00
5.2.02.08.03.0005.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	0,00
5.2.02.08.03.0007.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPS	200.000.000,00
5.2.02.08.03.0010.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	209.300.000,00
5.2.02.08.03.0011.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga	200.000.000,00
5.2.02.08.03.0014.	Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan	0,00
5.2.02.08.03.0015.	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	375.000.000,00
5.2.02.08.03.0016.	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	800.000.000,00
5.2.02.08.05.	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	0,00
5.2.02.08.05.0002.	Alat Kesehatan Kerja	0,00
5.2.02.08.07.	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00
5.2.02.08.07.0001.	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	0,00
5.2.02.08.08.	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	718.340.000,00
5.2.02.08.08.0006.	Belanja Modal Peralatan Umum	718.340.000,00
5.2.02.08.09.	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	0,00
5.2.02.08.09.0005.	Belanja Modal Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	0,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	9.246.971.801,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	7.566.624.541,00
5.2.02.10.01.0001.	Belanja Modal Komputer Jaringan	251.000.000,00
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	5.238.937.264,00
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	2.076.687.277,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.680.347.260,00
5.2.02.10.02.0001.	Belanja Modal Peralatan Mainframe	22.000.000,00
5.2.02.10.02.0002.	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

REKENING	URAIAN	ANGGARAN
5.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	145.977.500,00
5.2.02.10.02.0004.	Belanja Modal Peralatan Jaringan	330.199.300,00
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.182.170.460,00
5.2.02.11.	Belanja Modal Alat Eksplorasi	316.478.750,00
5.2.02.11.02.	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	316.478.750,00
5.2.02.11.02.0002.	Belanja Modal Elektronik/Electric	316.478.750,00
5.2.02.15.	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	64.267.207,00
5.2.02.15.02.	Belanja Modal Alat Pelindung	63.132.207,00
5.2.02.15.02.0001.	Belanja Modal Baju Pengaman	4.840.000,00
5.2.02.15.02.0005.	Belanja Modal Sepatu Lapangan	39.260.172,00
5.2.02.15.02.0006.	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	19.032.035,00
5.2.02.15.03.	Belanja Modal Alat SAR	1.135.000,00
5.2.02.15.03.0004.	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	1.135.000,00
5.2.02.18.	Belanja Modal Rambu-Rambu	760.525.150,00
5.2.02.18.01.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	760.525.150,00
5.2.02.18.01.0003.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	760.525.150,00
5.2.02.19.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	296.135.000,00
5.2.02.19.01.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	296.135.000,00
5.2.02.19.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Permainan	82.000.000,00
5.2.02.19.01.0006.	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	214.135.000,00
5.2.02.88.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	19.369.320.000,00
5.2.02.88.88.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	19.369.320.000,00
5.2.02.88.88.8888.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	19.369.320.000,00
5.2.02.99.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.483.030.696,00
5.2.02.99.99.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.483.030.696,00
5.2.02.99.99.9999.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.483.030.696,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67.120.097.320,00
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	62.378.303.320,00
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	62.378.303.320,00
5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	6.807.956.136,00
5.2.03.01.01.0002.	Belanja Modal Bangunan Gudang	0,00
5.2.03.01.01.0005.	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	17.754.158.184,00
5.2.03.01.01.0006.	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	8.352.710.000,00
5.2.03.01.01.0008.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00
5.2.03.01.01.0010.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	26.293.729.000,00
5.2.03.01.01.0011.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.344.000.000,00
5.2.03.01.01.0016.	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	0,00
5.2.03.01.01.0025.	Belanja Modal Bangunan Terbuka	0,00
5.2.03.01.01.0029.	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	237.500.000,00
5.2.03.01.01.0030.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	919.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

REKENING	URAIAN	ANGGARAN
5.2.03.01.01.0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	473.250.000,00
5.2.03.01.01.0037.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	196.000.000,00
5.2.03.03.	Belanja Modal Bangunan Menara	1.763.000.000,00
5.2.03.03.01.	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	1.763.000.000,00
5.2.03.03.01.0005.	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya	1.763.000.000,00
5.2.03.04.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.948.794.000,00
5.2.03.04.01.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	2.948.794.000,00
5.2.03.04.01.0003.	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	0,00
5.2.03.04.01.0004.	Belanja Modal Pagar	2.612.794.000,00
5.2.03.04.01.0005.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	336.000.000,00
5.2.03.99.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	30.000.000,00
5.2.03.99.99.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	30.000.000,00
5.2.03.99.99.9999.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	30.000.000,00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	141.357.438.016,00
5.2.04.01.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	114.748.246.446,00
5.2.04.01.01.	Belanja Modal Jalan	95.897.246.446,00
5.2.04.01.01.0003.	Belanja Modal Jalan Kabupaten	35.394.579.649,00
5.2.04.01.01.0005.	Belanja Modal Jalan Desa	0,00
5.2.04.01.01.0010.	Belanja Modal Jalan Lainnya	60.502.666.797,00
5.2.04.01.02.	Belanja Modal Jembatan	18.851.000.000,00
5.2.04.01.02.0003.	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	18.851.000.000,00
5.2.04.02.	Belanja Modal Bangunan Air	17.923.873.576,00
5.2.04.02.01.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	6.341.187.076,00
5.2.04.02.01.0003.	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	0,00
5.2.04.02.01.0008.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	6.341.187.076,00
5.2.04.02.04.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	195.000.000,00
5.2.04.02.04.0005.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	195.000.000,00
5.2.04.02.06.	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	1.730.000.000,00
5.2.04.02.06.0006.	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.730.000.000,00
5.2.04.02.07.	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	9.657.686.500,00
5.2.04.02.07.0003.	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	1.423.778.000,00
5.2.04.02.07.0006.	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	8.233.908.500,00
5.2.04.03.	Belanja Modal Instalasi	1.840.350.000,00
5.2.04.03.01.	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	40.350.000,00
5.2.04.03.01.0005.	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	40.350.000,00
5.2.04.03.02.	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1.800.000.000,00
5.2.04.03.02.0004.	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	1.800.000.000,00
5.2.04.04.	Belanja Modal Jaringan	6.844.967.994,00
5.2.04.04.01.	Belanja Modal Jaringan Air Minum	6.844.967.994,00
5.2.04.04.01.0005.	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	6.844.967.994,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

REKENING	URAIAN	ANGGARAN
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.877.669.450,00
5.2.05.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	316.510.693,00
5.2.05.01.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	316.510.693,00
5.2.05.01.01.0001.	Belanja Modal Buku Umum	288.297.943,00
5.2.05.01.01.0003.	Belanja Modal Buku Agama	1.995.000,00
5.2.05.01.01.0006.	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	0,00
5.2.05.01.01.0007.	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	1.092.000,00
5.2.05.01.01.0008.	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	1.945.125,00
5.2.05.01.01.0009.	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	8.360.625,00
5.2.05.01.01.0011.	Belanja Modal Buku Laporan	14.820.000,00
5.2.05.01.01.0012.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	0,00
5.2.05.02.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1.198.250.000,00
5.2.05.02.01.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	1.198.250.000,00
5.2.05.02.01.0001.	Belanja Modal Alat Musik	1.198.250.000,00
5.2.05.02.01.0003.	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	0,00
5.2.05.03.	Belanja Modal Hewan	0,00
5.2.05.03.02.	Belanja Modal Ternak	0,00
5.2.05.03.02.0001.	Belanja Modal Ternak Potong	0,00
5.2.05.03.02.0004.	Belanja Modal Ternak Lainnya	0,00
5.2.05.07.	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	555.150.000,00
5.2.05.07.01.	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	555.150.000,00
5.2.05.07.01.0001.	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	555.150.000,00
5.2.05.08.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.068.625.000,00
5.2.05.08.01.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.068.625.000,00
5.2.05.08.01.0005.	Belanja Modal Software	1.068.625.000,00
5.2.05.88.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.456.440.000,00
5.2.05.88.88.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.456.440.000,00
5.2.05.88.88.8888.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.456.440.000,00
5.2.05.99.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	282.693.757,00
5.2.05.99.99.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	282.693.757,00
5.2.05.99.99.9999.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	282.693.757,00
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.500.000.000,00
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00
5.3.01.01.	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00
5.3.01.01.01.	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00
5.3.01.01.01.0001.	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00
5.4.	BELANJA TRANSFER	386.321.032.382,00
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	16.461.297.013,00
5.4.01.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	15.122.792.013,00
5.4.01.01.03.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	15.122.792.013,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

REKENING	URAIAN	ANGGARAN
5.4.01.01.03.0001.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	15.122.792.013,00
5.4.01.02.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.338.505.000,00
5.4.01.02.01.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.338.505.000,00
5.4.01.02.01.0001.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.338.505.000,00
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	369.859.735.369,00
5.4.02.05.	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	369.859.735.369,00
5.4.02.05.01.	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	345.159.735.369,00
5.4.02.05.01.0001.	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	345.159.735.369,00
5.4.02.05.02.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	24.700.000.000,00
5.4.02.05.02.0001.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	24.700.000.000,00
	Jumlah Belanja	2.589.837.610.263,00
	Total Surplus/(Defisit)	(95.895.381.681,00)
6.	PEMBIAYAAN	95.895.381.680,97
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	95.895.381.680,97
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	74.859.762.811,97
6.1.01.01.	Pelampauan Penerimaan PAD	0,00
6.1.01.01.04.	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	0,00
6.1.01.01.04.0017.	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00
6.1.01.05.	Penghematan Belanja	68.037.856.704,00
6.1.01.05.01.	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	68.037.856.704,00
6.1.01.05.01.0007.	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	68.037.856.704,00
6.1.01.08.	Sisa Belanja Lainnya	6.821.906.107,97
6.1.01.08.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	6.801.310.047,97
6.1.01.08.01.0001.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	6.801.310.047,97
6.1.01.08.02.	Sisa Dana BOS	20.596.060,00
6.1.01.08.02.0001.	Sisa Dana BOS	20.596.060,00
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	21.035.618.869,00
6.1.05.06.	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	21.035.618.869,00
6.1.05.06.02.	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	21.035.618.869,00
6.1.05.06.02.0001.	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	21.035.618.869,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	95.895.381.680,97
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	95.895.381.680,97
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00
	Koreksi	0,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Berdasarkan kebijakan fiskal yang diterapkan serta memperhatikan kondisi ekonomi Kabupaten Kampar secara umum, pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kampar untuk Tahun Anggaran 2022 dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

Tabel 1 Pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kampar untuk Tahun Anggaran 2022

REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.493.942.228.582,00	2.427.503.585.552,71	97,34
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	252.925.053.734,00	260.416.048.442,71	102,96
4.1.01.	Pajak Daerah	151.227.920.126,00	142.366.052.600,00	94,14
4.1.01.06.	Pajak Hotel	1.512.100.000,00	1.317.838.134,00	87,15
4.1.01.06.01.	Pajak Hotel	1.512.100.000,00	1.317.838.134,00	87,15
4.1.01.06.01.0001.	Pajak Hotel	1.512.100.000,00	1.317.838.134,00	87,15
4.1.01.07.	Pajak Restoran	6.455.647.500,00	7.547.202.062,00	116,91
4.1.01.07.01.	Pajak Restoran dan Sejenisnya	6.455.647.500,00	7.547.202.062,00	116,91
4.1.01.07.01.0001.	Pajak Restoran dan Sejenisnya	6.455.647.500,00	7.547.202.062,00	116,91
4.1.01.09.	Pajak Reklame	953.090.000,00	928.408.797,00	97,41
4.1.01.09.01.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	953.090.000,00	928.408.797,00	97,41
4.1.01.09.01.0001.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	953.090.000,00	928.408.797,00	97,41
4.1.01.10.	Pajak Penerangan Jalan	73.144.868.351,00	74.031.467.239,00	101,21
4.1.01.10.01.	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0,00	0,00	0,00
4.1.01.10.01.0001.	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0,00	0,00	0,00
4.1.01.10.02.	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	73.144.868.351,00	74.031.467.239,00	101,21
4.1.01.10.02.0001.	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	73.144.868.351,00	74.031.467.239,00	101,21
4.1.01.11.	Pajak Parkir	180.500.000,00	107.066.250,00	59,32
4.1.01.11.01.	Pajak Parkir	180.500.000,00	107.066.250,00	59,32
4.1.01.11.01.0001.	Pajak Parkir	180.500.000,00	107.066.250,00	59,32
4.1.01.12.	Pajak Air Tanah	1.649.514.275,00	1.741.199.635,00	105,56
4.1.01.12.01.	Pajak Air Tanah	1.649.514.275,00	1.741.199.635,00	105,56
4.1.01.12.01.0001.	Pajak Air Tanah	1.649.514.275,00	1.741.199.635,00	105,56
4.1.01.13.	Pajak Sarang Burung Walet	82.000.000,00	22.840.000,00	27,85
4.1.01.13.01.	Pajak Sarang Burung Walet	82.000.000,00	22.840.000,00	27,85
4.1.01.13.01.0001.	Pajak Sarang Burung Walet	82.000.000,00	22.840.000,00	27,85
4.1.01.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10.298.555.901,00	10.716.512.129,00	104,06
4.1.01.14.23.	Pajak Pasir dan Kerikil	0,00	0,00	0,00
4.1.01.14.23.0001.	Pajak Pasir dan Kerikil	0,00	0,00	0,00
4.1.01.14.37.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	10.298.555.901,00	10.716.512.129,00	104,06
4.1.01.14.37.0001.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	10.298.555.901,00	10.716.512.129,00	104,06
4.1.01.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	19.951.644.099,00	15.031.858.569,00	75,34



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4.1.01.15.01.	PBBP2	19.951.644.099,00	15.031.858.569,00	75,34
4.1.01.15.01.0001.	PBBP2	19.951.644.099,00	15.031.858.569,00	75,34
4.1.01.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	37.000.000.000,00	30.921.659.785,00	83,57
4.1.01.16.01.	BPHTB-Pemindahan Hak	37.000.000.000,00	30.921.659.785,00	83,57
4.1.01.16.01.0001.	BPHTB-Pemindahan Hak	37.000.000.000,00	30.921.659.785,00	83,57
4.1.02.	Retribusi Daerah	13.385.050.000,00	8.892.742.152,31	66,44
4.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	3.603.550.000,00	3.920.484.000,00	108,80
4.1.02.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	15.000.000,00	0,00
4.1.02.01.01.0006.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	0,00	15.000.000,00	0,00
4.1.02.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	248.000.000,00	240.300.000,00	96,90
4.1.02.01.02.0001.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	248.000.000,00	240.300.000,00	96,90
4.1.02.01.04.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	285.000.000,00	298.250.000,00	104,65
4.1.02.01.04.0001.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	285.000.000,00	298.250.000,00	104,65
4.1.02.01.05.	Retribusi Pelayanan Pasar	154.000.000,00	76.864.000,00	49,91
4.1.02.01.05.0003.	Retribusi Kios	154.000.000,00	76.864.000,00	49,91
4.1.02.01.06.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	921.600.000,00	712.626.000,00	77,32
4.1.02.01.06.0001.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	921.600.000,00	712.626.000,00	77,32
4.1.02.01.07.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	30.000.000,00	35.051.000,00	116,84
4.1.02.01.07.0001.	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	30.000.000,00	35.051.000,00	116,84
4.1.02.01.09.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	64.000.000,00	63.340.000,00	98,97
4.1.02.01.09.0001.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	64.000.000,00	63.340.000,00	98,97
4.1.02.01.11.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	600.000.000,00	939.035.000,00	156,51
4.1.02.01.11.0001.	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	600.000.000,00	939.035.000,00	156,51
4.1.02.01.13.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.300.950.000,00	1.540.018.000,00	118,38
4.1.02.01.13.0001.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.300.950.000,00	1.540.018.000,00	118,38
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	1.781.500.000,00	1.674.410.940,00	93,99
4.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	927.500.000,00	872.182.940,00	94,04
4.1.02.02.01.0001.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02.01.0003.	Retribusi Penyewaan Bangunan	110.000.000,00	125.988.000,00	114,53
4.1.02.02.01.0004.	Retribusi Pemakaian Laboratorium	47.500.000,00	47.707.440,00	100,44
4.1.02.02.01.0006.	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	770.000.000,00	698.487.500,00	90,71
4.1.02.02.05.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02.05.0001.	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02.07.	Retribusi Rumah Potong Hewan	64.000.000,00	56.650.000,00	88,52
4.1.02.02.07.0001.	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	64.000.000,00	56.650.000,00	88,52
4.1.02.02.09.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	150.000.000,00	167.470.000,00	111,65
4.1.02.02.09.0001.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	150.000.000,00	167.470.000,00	111,65
4.1.02.02.11.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	640.000.000,00	578.108.000,00	90,33
4.1.02.02.11.0001.	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	225.000.000,00	225.000.000,00	100,00
4.1.02.02.11.0002.	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa	65.000.000,00	65.008.000,00	100,01



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	Bibit Ternak			
4.1.02.02.11.0003.	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	350.000.000,00	288.100.000,00	82,31
4.1.02.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	8.000.000.000,00	3.297.847.212,31	41,22
4.1.02.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	8.000.000.000,00	3.297.847.212,31	41,22
4.1.02.03.01.0001.	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	8.000.000.000,00	3.297.847.212,31	41,22
4.1.02.03.07.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00
4.1.02.03.07.0001.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.344.989.367,00	23.550.128.300,00	110,33
4.1.03.02.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	21.344.989.367,00	23.550.128.300,00	110,33
4.1.03.02.01.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	19.690.256.107,00	21.895.395.040,00	111,20
4.1.03.02.01.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	19.690.256.107,00	21.895.395.040,00	111,20
4.1.03.02.02.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.654.733.260,00	1.654.733.260,00	100,00
4.1.03.02.02.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.654.733.260,00	1.654.733.260,00	100,00
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	66.967.094.241,00	85.607.125.390,40	127,83
4.1.04.01.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	519.332.000,00	714.764.500,00	137,63
4.1.04.01.02.	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	519.332.000,00	714.764.500,00	137,63
4.1.04.01.02.0002.	Hasil Penjualan Alat Angkutan	519.332.000,00	714.764.500,00	137,63
4.1.04.04.	Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	25.000.000,00	0,00
4.1.04.04.01.	Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	25.000.000,00	0,00
4.1.04.04.01.0001.	Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	25.000.000,00	0,00
4.1.04.05.	Jasa Giro	2.500.000.000,00	1.159.879.263,00	46,40
4.1.04.05.01.	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.500.000.000,00	1.159.879.263,00	46,40
4.1.04.05.01.0001.	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.500.000.000,00	1.159.879.263,00	46,40
4.1.04.06.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00
4.1.04.06.01.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00
4.1.04.06.01.0001.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00
4.1.04.07.	Pendapatan Bunga	200.000.000,00	328.016.317,00	164,01
4.1.04.07.01.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	200.000.000,00	328.016.317,00	164,01
4.1.04.07.01.0001.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	200.000.000,00	328.016.317,00	164,01
4.1.04.09.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	614.021.956,00	0,00
4.1.04.09.01.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	614.021.956,00	0,00
4.1.04.09.01.0001.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	614.021.956,00	0,00
4.1.04.11.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	153.950.099,55	0,00
4.1.04.11.01.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	153.950.099,55	0,00
4.1.04.11.01.0001.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	153.950.099,55	0,00
4.1.04.12.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	20.987.287,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4.1.04.12.09.	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,00	20.987.287,00	0,00
4.1.04.12.09.0001.	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	0,00	20.987.287,00	0,00
4.1.04.14.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	202.527.700,00	0,00
4.1.04.14.01.	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	0,00	202.527.700,00	0,00
4.1.04.14.01.0001.	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	0,00	202.527.700,00	0,00
4.1.04.15.	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	517.831.580,00	0,00
4.1.04.15.03.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	510.780.780,00	0,00
4.1.04.15.03.0001.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	510.780.780,00	0,00
4.1.04.15.04.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	7.050.800,00	0,00
4.1.04.15.04.0001.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	0,00	7.050.800,00	0,00
4.1.04.15.04.0002.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Tetap	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.04.0003.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.04.0005.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.05.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.05.0001.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK	0,00	0,00	0,00
4.1.04.16.	Pendapatan BLUD	63.447.762.241,00	77.541.444.727,87	122,21
4.1.04.16.01.	Pendapatan BLUD	63.447.762.241,00	77.541.444.727,87	122,21
4.1.04.16.01.0001.	Pendapatan BLUD	63.447.762.241,00	77.541.444.727,87	122,21
4.1.04.18.	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00
4.1.04.18.01.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00
4.1.04.18.01.0001.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00
4.1.04.19.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	300.000.000,00	317.601.572,74	105,87
4.1.04.19.01.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	300.000.000,00	317.601.572,74	105,87
4.1.04.19.01.0001.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	300.000.000,00	317.601.572,74	105,87
4.1.04.21.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	4.011.100.387,24	0,00
4.1.04.21.01.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	4.011.100.387,24	0,00
4.1.04.21.01.0001.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	4.011.100.387,24	0,00
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	2.241.017.174.848,00	2.165.922.257.436,00	96,65
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.071.547.655.653,00	1.985.226.332.189,00	95,83
4.2.01.01.	Dana Perimbangan	1.850.583.107.653,00	1.764.927.661.865,00	95,37
4.2.01.01.01.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	600.650.141.288,00	574.829.219.552,00	95,70
4.2.01.01.01.0001.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	306.057.524.255,00	256.874.819.175,00	83,93
4.2.01.01.01.0002.	DBH PPh Pasal 21	16.469.038.191,00	14.831.185.000,00	90,05
4.2.01.01.01.0003.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	909.311.771,00	456.870.000,00	50,24
4.2.01.01.01.0004.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	280.155,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01.0005.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	227.600.982.548,00	261.951.603.637,00	115,09
4.2.01.01.01.0006.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	29.267.340.612,00	24.297.079.929,00	83,02



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4.2.01.01.01.0008.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	3.830.000,00	6.406.489,00	167,27
4.2.01.01.01.0009.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	4.236.855.198,00	3.799.514.322,00	89,68
4.2.01.01.01.0010.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	14.320.140.482,00	10.653.430.000,00	74,39
4.2.01.01.01.0013.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.784.838.076,00	1.958.311.000,00	109,72
4.2.01.01.02.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	764.811.348.365,00	763.880.955.365,00	99,88
4.2.01.01.02.0001.	DAU	764.811.348.365,00	763.880.955.365,00	99,88
4.2.01.01.03.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	133.836.590.000,00	126.047.411.232,00	94,18
4.2.01.01.03.0001.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.989.439.000,00	1.989.439.000,00	100,00
4.2.01.01.03.0002.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	52.274.966.000,00	51.546.977.534,00	98,61
4.2.01.01.03.0003.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	6.562.819.000,00	6.469.901.200,00	98,58
4.2.01.01.03.0011.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0013.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB - Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	17.670.990.072,00	0,00
4.2.01.01.03.0014.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB - Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0015.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	39.121.215.000,00	16.169.774.201,00	41,33
4.2.01.01.03.0024.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB - Afirmasi-PenguatanPrasaranaDasar Puskesmas	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0025.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB - Reguler-KB	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0026.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0031.	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	4.417.254.000,00	4.101.620.626,00	92,85
4.2.01.01.03.0032.	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	3.702.382.000,00	3.598.442.459,00	97,19
4.2.01.01.03.0034.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	15.328.277.000,00	13.846.304.570,00	90,33
4.2.01.01.03.0037.	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	7.034.757.000,00	8.270.124.870,00	117,56
4.2.01.01.03.0039.	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0040.	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	3.405.481.000,00	2.383.836.700,00	70,00
4.2.01.01.03.0042.	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0043.	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0045.	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	351.285.028.000,00	300.170.075.716,00	85,45
4.2.01.01.04.0001.	DAK Non Fisik-BOS Reguler	129.128.800.000,00	109.685.700.688,00	84,94
4.2.01.01.04.0004.	DAK Non Fisik-TPG PNSD	165.527.065.000,00	143.565.146.290,00	86,73
4.2.01.01.04.0005.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.212.000.000,00	1.469.518.000,00	121,25
4.2.01.01.04.0006.	DAK Non Fisik-TKG PNSD	4.393.215.000,00	4.131.815.760,00	94,05
4.2.01.01.04.0007.	DAK Non Fisik-BOP PAUD	10.524.600.000,00	10.214.710.000,00	97,06
4.2.01.01.04.0008.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.270.700.000,00	2.270.700.000,00	100,00
4.2.01.01.04.0011.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	28.383.991.000,00	27.443.327.388,00	96,69
4.2.01.01.04.0015.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	8.386.163.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0016.	DAK Non Fisik-PK2UKM	404.200.000,00	397.200.000,00	98,27
4.2.01.01.04.0017.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0019.	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4.2.01.01.04.0020.	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	393.394.000,00	366.701.750,00	93,21
4.2.01.01.04.0022.	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	451.800.000,00	444.252.240,00	98,33
4.2.01.01.04.0023.	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	209.100.000,00	181.003.600,00	86,56
4.2.01.02.	Dana Insentif Daerah (DID)	5.205.152.000,00	5.205.152.000,00	100,00
4.2.01.02.01.	DID	5.205.152.000,00	5.205.152.000,00	100,00
4.2.01.02.01.0001.	DID	5.205.152.000,00	5.205.152.000,00	100,00
4.2.01.05.	Dana Desa	215.759.396.000,00	215.093.518.324,00	99,69
4.2.01.05.01.	Dana Desa	215.759.396.000,00	215.093.518.324,00	99,69
4.2.01.05.01.0001.	Dana Desa	215.759.396.000,00	215.093.518.324,00	99,69
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	169.469.519.195,00	180.695.925.247,00	106,62
4.2.02.01.	Pendapatan Bagi Hasil	141.553.522.595,00	153.007.050.247,00	108,09
4.2.02.01.01.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	141.553.522.595,00	153.007.050.247,00	108,09
4.2.02.01.01.0001.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	37.366.306.897,00	35.845.741.405,00	95,93
4.2.02.01.01.0002.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	25.237.161.372,00	27.680.115.009,00	109,68
4.2.02.01.01.0003.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	51.783.212.715,00	50.968.482.383,00	98,43
4.2.02.01.01.0004.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.630.664.076,00	1.850.461.356,00	113,48
4.2.02.01.01.0005.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	25.536.177.535,00	36.662.250.094,00	143,57
4.2.02.02.	Bantuan Keuangan	27.915.996.600,00	27.688.875.000,00	99,19
4.2.02.02.01.	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00	25.322.000.000,00	0,00
4.2.02.02.01.0001.	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	0,00	25.322.000.000,00	0,00
4.2.02.02.02.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	27.915.996.600,00	2.366.875.000,00	8,48
4.2.02.02.02.0001.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	27.915.996.600,00	2.366.875.000,00	8,48
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	1.165.279.674,00	0,00
4.3.01.	Pendapatan Hibah	0,00	1.165.279.674,00	0,00
4.3.01.05.	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	1.165.279.674,00	0,00
4.3.01.05.01.	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	1.165.279.674,00	0,00
4.3.01.05.01.0001.	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	1.165.279.674,00	0,00
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
4.3.03.01.	Lain-lain Pendapatan	0,00	0,00	0,00
4.3.03.01.01.	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00
4.3.03.01.01.0001.	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	2.493.942.228.582,00	2.427.503.585.552,71	97,34
5.	BELANJA	2.589.837.610.263,00	2.480.592.185.573,96	95,78
5.1.	BELANJA OPERASI	1.889.541.139.841,00	1.818.618.607.702,14	96,25
5.1.01.	Belanja Pegawai	993.986.424.876,00	963.391.408.176,00	96,92
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	556.858.529.176,00	553.057.016.950,00	99,32
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	424.158.845.181,00	420.807.487.691,00	99,21
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	412.613.267.593,00	409.282.472.291,00	99,19
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	11.545.577.588,00	11.525.015.400,00	99,82



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	41.148.470.260,00	41.011.198.102,00	99,67
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	39.917.671.843,00	39.782.588.254,00	99,66
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.230.798.417,00	1.228.609.848,00	99,82
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.965.631.625,00	7.885.527.420,00	98,99
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.965.631.625,00	7.885.527.420,00	98,99
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	32.026.816.600,00	31.977.892.823,00	99,85
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	32.026.816.600,00	31.977.892.823,00	99,85
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.057.538.900,00	5.027.770.000,00	99,41
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.867.800.850,00	3.840.405.000,00	99,29
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.189.738.050,00	1.187.365.000,00	99,80
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	23.821.517.372,00	23.744.852.098,00	99,68
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	22.914.359.105,00	22.839.312.418,00	99,67
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	907.158.267,00	905.539.680,00	99,82
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.562.981.636,00	1.560.825.122,00	99,86
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.562.981.636,00	1.560.825.122,00	99,86
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	6.023.656,00	5.712.470,00	94,83
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.899.139,00	5.588.105,00	94,73
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	124.517,00	124.365,00	99,88
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	17.637.125.529,00	17.574.618.163,00	99,65
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	17.159.075.569,00	17.097.572.403,00	99,64
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	478.049.960,00	477.045.760,00	99,79
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	867.974.278,00	864.872.724,00	99,64
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	844.215.600,00	841.163.398,00	99,64
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	23.758.678,00	23.709.326,00	99,79
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.605.604.139,00	2.596.260.337,00	99,64
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.534.331.369,00	2.525.135.617,00	99,64
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	71.272.770,00	71.124.720,00	99,79
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	197.194.953.598,00	188.158.497.061,00	95,42
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	167.371.003.598,00	159.741.222.061,00	95,44
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	163.255.528.598,00	155.642.109.561,00	95,34
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	4.115.475.000,00	4.099.112.500,00	99,60
5.1.01.02.02.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	180.000.000,00	154.500.000,00	85,83
5.1.01.02.02.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	180.000.000,00	154.500.000,00	85,83
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	23.648.950.000,00	22.513.275.000,00	95,20
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	23.648.950.000,00	22.513.275.000,00	95,20
5.1.01.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	5.995.000.000,00	5.749.500.000,00	95,90
5.1.01.02.04.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	5.995.000.000,00	5.749.500.000,00	95,90
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	181.567.633.703,00	167.756.165.283,00	92,39
5.1.01.03.01.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	8.137.042.759,00	7.385.432.333,00	90,76
5.1.01.03.01.0006.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	75.605.000,00	56.703.750,00	75,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
5.1.01.03.01.0007.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	322.782.375,00	322.782.375,00	100,00
5.1.01.03.01.0009.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	47.989.053,00	36.075.428,00	75,17
5.1.01.03.01.0010.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	3.831.522.921,00	3.831.522.921,00	100,00
5.1.01.03.01.0011.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	9.025.000,00	3.610.000,00	40,00
5.1.01.03.01.0012.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	82.475.714,00	82.475.714,00	100,00
5.1.01.03.01.0013.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	4.100.000,00	615.000,00	15,00
5.1.01.03.01.0014.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	531.157.147,00	531.157.147,00	100,00
5.1.01.03.01.0015.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	1.028.059.330,00	778.663.779,00	75,74
5.1.01.03.01.0016.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	2.204.326.219,00	1.741.826.219,00	79,02
5.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	669.252.500,00	388.288.750,00	58,02
5.1.01.03.02.0002.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	15.600.000,00	11.250.000,00	72,12
5.1.01.03.02.0004.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0005.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	40.200.000,00	40.200.000,00	100,00
5.1.01.03.02.0006.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	60.330.000,00	48.810.000,00	80,91
5.1.01.03.02.0007.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
5.1.01.03.02.0011.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0013.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	65.047.500,00	65.047.500,00	100,00
5.1.01.03.02.0014.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	43.875.000,00	30.656.250,00	69,87
5.1.01.03.02.0022.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	7.500.000,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0024.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	35.200.000,00	30.825.000,00	87,57
5.1.01.03.02.0025.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	400.000.000,00	160.000.000,00	40,00
5.1.01.03.05.	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	171.386.512.000,00	159.539.745.500,00	93,09
5.1.01.03.05.0001.	Belanja Tamsil Guru PNSD	171.386.512.000,00	159.539.745.500,00	93,09
5.1.01.03.06.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	756.849.344,00	0,00	0,00
5.1.01.03.06.0001.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	756.849.344,00	0,00	0,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	617.977.100,00	442.698.700,00	71,64
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	135.540.000,00	42.578.700,00	31,41
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	443.437.100,00	364.120.000,00	82,11
5.1.01.03.07.0003.	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	39.000.000,00	36.000.000,00	92,31
5.1.01.04.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	32.726.022.725,00	32.307.505.694,00	98,72
5.1.01.04.01.	Belanja Uang Representasi DPRD	1.038.878.952,00	1.004.010.000,00	96,64
5.1.01.04.01.0001.	Belanja Uang Representasi DPRD	1.038.878.952,00	1.004.010.000,00	96,64
5.1.01.04.02.	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	144.023.775,00	81.100.000,00	56,31
5.1.01.04.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	144.023.775,00	81.100.000,00	56,31
5.1.01.04.03.	Belanja Tunjangan Beras DPRD	109.063.091,00	58.764.000,00	53,88
5.1.01.04.03.0001.	Belanja Tunjangan Beras DPRD	109.063.091,00	58.764.000,00	53,88



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
5.1.01.04.04.	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00	86.058.000,00	100,00
5.1.01.04.04.0001.	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00	86.058.000,00	100,00
5.1.01.04.05.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.492.209.866,00	1.455.814.500,00	97,56
5.1.01.04.05.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.492.209.866,00	1.455.814.500,00	97,56
5.1.01.04.06.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	124.784.100,00	119.029.050,00	95,39
5.1.01.04.06.0001.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	124.784.100,00	119.029.050,00	95,39
5.1.01.04.07.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	64.949.850,00	17.813.250,00	27,43
5.1.01.04.07.0001.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	64.949.850,00	17.813.250,00	27,43
5.1.01.04.08.	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00	7.938.000.000,00	100,00
5.1.01.04.08.0001.	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00	7.938.000.000,00	100,00
5.1.01.04.09.	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000,00	1.984.500.000,00	100,00
5.1.01.04.09.0001.	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000,00	1.984.500.000,00	100,00
5.1.01.04.10.	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	535.600.009,00	364.014.240,00	67,96
5.1.01.04.10.0001.	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	535.600.009,00	364.014.240,00	67,96
5.1.01.04.12.	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	9.667.955.082,00	9.658.402.654,00	99,90
5.1.01.04.12.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	106.316.586,00	98.141.086,00	92,31
5.1.01.04.12.0002.	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.409.624,00	2.065.392,00	85,71
5.1.01.04.12.0003.	Belanja Jaminan Kematian DPRD	7.228.872,00	6.196.176,00	85,71
5.1.01.04.12.0004.	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	9.552.000.000,00	9.552.000.000,00	100,00
5.1.01.04.13.	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.540.000.000,00	9.540.000.000,00	100,00
5.1.01.04.13.0001.	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.540.000.000,00	9.540.000.000,00	100,00
5.1.01.04.14.	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.14.0001.	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	174.451.868,00	34.354.500,00	19,69
5.1.01.05.01.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00	10.800.000,00	19,30
5.1.01.05.01.0001.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00	10.800.000,00	19,30
5.1.01.05.02.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.637.700,00	1.512.000,00	19,80
5.1.01.05.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.637.700,00	1.512.000,00	19,80
5.1.01.05.03.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00	19.440.000,00	19,30
5.1.01.05.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00	19.440.000,00	19,30
5.1.01.05.04.	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.082.676,00	1.448.400,00	20,45
5.1.01.05.04.0001.	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.082.676,00	1.448.400,00	20,45
5.1.01.05.05.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.160.692,00	9.300,00	0,80
5.1.01.05.05.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.160.692,00	9.300,00	0,80
5.1.01.05.06.	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.120,00	0,00	0,00
5.1.01.05.06.0001.	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.120,00	0,00	0,00
5.1.01.05.07.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	1.570.320,00	1.058.400,00	67,40
5.1.01.05.07.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	1.570.320,00	1.058.400,00	67,40
5.1.01.05.08.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	115.128,00	21.600,00	18,76
5.1.01.05.08.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	115.128,00	21.600,00	18,76



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
5.1.01.05.09.	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	182.232,00	64.800,00	35,56
5.1.01.05.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	182.232,00	64.800,00	35,56
5.1.01.06.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000,00	933.120.000,00	93,96
5.1.01.06.01.	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00
5.1.01.06.01.0001.	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00
5.1.01.06.02.	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	540.000.000,00	90,00
5.1.01.06.02.0001.	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	540.000.000,00	90,00
5.1.01.99.	Belanja Pegawai BLUD	24.471.713.806,00	21.144.748.688,00	86,40
5.1.01.99.99.	Belanja Pegawai BLUD	24.471.713.806,00	21.144.748.688,00	86,40
5.1.01.99.99.9999.	Belanja Pegawai BLUD	24.471.713.806,00	21.144.748.688,00	86,40
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	823.156.542.515,00	787.240.777.384,22	95,64
5.1.02.01.	Belanja Barang	173.416.434.828,00	165.492.203.150,89	95,43
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	129.532.373.502,00	123.044.397.513,89	94,99
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	22.523.456.384,00	21.102.700.146,39	93,69
5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.174.478.012,00	1.151.539.017,00	98,05
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.961.469.776,00	7.481.783.975,00	93,97
5.1.02.01.01.0005.	Belanja Bahan-Bahan Baku	138.000.000,00	135.258.000,00	98,01
5.1.02.01.01.0008.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.954.052.911,00	1.855.502.385,00	94,96
5.1.02.01.01.0010.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	57.408.000,00	57.408.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0011.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	724.564.000,00	720.633.600,00	99,46
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	10.460.550.616,00	10.140.432.551,00	96,94
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	196.027.518,00	187.502.936,00	95,65
5.1.02.01.01.0014.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0015.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	308.608.500,00	208.266.250,00	67,49
5.1.02.01.01.0016.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	1.557.270,00	1.557.270,00	100,00
5.1.02.01.01.0018.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	78.123.800,00	77.745.400,00	99,52
5.1.02.01.01.0019.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	452.751.800,00	452.751.800,00	100,00
5.1.02.01.01.0020.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	87.748.950,00	87.082.750,00	99,24
5.1.02.01.01.0023.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	27.413.790,00	24.980.790,00	91,12
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.645.935.326,00	10.416.320.097,00	97,84
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	317.520.000,00	316.750.000,00	99,76
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.819.272.368,00	14.120.945.160,00	95,29
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	532.430.000,00	526.280.000,00	98,84
5.1.02.01.01.0028.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	65.724.298,00	62.329.800,00	94,84
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	934.749.381,00	781.636.406,00	83,62
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.280.673.162,00	3.228.685.255,00	98,42
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	244.335.484,00	240.078.940,00	98,26
5.1.02.01.01.0034.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	274.450.000,00	273.950.700,00	99,82



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	206.031.000,00	198.031.000,00	96,12
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.643.946.872,00	1.573.760.921,00	95,73
5.1.02.01.01.0037.	Belanja Obat-Obatan-Obat	426.670.225,00	282.943.044,00	66,31
5.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	8.520.082.617,00	7.749.613.517,50	90,96
5.1.02.01.01.0041.	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	28.877.500,00	28.877.500,00	100,00
5.1.02.01.01.0042.	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	424.567.000,00	407.963.400,00	96,09
5.1.02.01.01.0043.	Belanja Natura dan Pakan-Natura	659.441.940,00	593.053.300,00	89,93
5.1.02.01.01.0045.	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	239.000.000,00	238.610.000,00	99,84
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.111.398.710,00	16.795.451.973,00	92,73
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	12.944.917.534,00	12.680.894.035,00	97,96
5.1.02.01.01.0055.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	261.800.560,00	239.991.960,00	91,67
5.1.02.01.01.0056.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	431.746.000,00	431.299.300,00	99,90
5.1.02.01.01.0057.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.430.539.918,00	2.352.444.420,00	96,79
5.1.02.01.01.0059.	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	349.965.000,00	346.205.600,00	98,93
5.1.02.01.01.0061.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	399.663.000,00	379.288.000,00	94,90
5.1.02.01.01.0062.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	237.195.000,00	235.299.000,00	99,20
5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	539.136.250,00	532.767.500,00	98,82
5.1.02.01.01.0064.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	637.810.750,00	635.071.890,00	99,57
5.1.02.01.01.0065.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	154.764.750,00	154.506.450,00	99,83
5.1.02.01.01.0066.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	213.819.750,00	213.735.200,00	99,96
5.1.02.01.01.0067.	Belanja Pakaian Penyelamatan	32.250.000,00	32.250.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0069.	Belanja Pakaian Teknik	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0070.	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	162.573.700,00	160.989.000,00	99,03
5.1.02.01.01.0074.	Belanja Pakaian Adat Daerah	1.578.428.000,00	1.559.634.750,00	98,81
5.1.02.01.01.0075.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	713.120.000,00	707.814.300,00	99,26
5.1.02.01.01.0076.	Belanja Pakaian Olahraga	872.077.600,00	810.594.925,00	92,95
5.1.02.01.01.0077.	Belanja Pakaian Paskibraka	28.998.480,00	28.935.300,00	99,78
5.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	43.884.061.326,00	42.447.805.637,00	96,73
5.1.02.01.02.0003.	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	60.907.800,00	56.307.700,00	92,45
5.1.02.01.02.0004.	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	786.709.700,00	748.587.475,00	95,15
5.1.02.01.02.0006.	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	43.036.373.826,00	41.642.840.462,00	96,76
5.1.02.01.02.0013.	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	70.000,00	70.000,00	100,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	331.791.984.956,00	316.296.982.521,50	95,33
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	286.673.824.610,00	273.599.065.140,00	95,44
5.1.02.02.01.0001.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	375.000.000,00	375.000.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.701.825.000,00	6.093.945.000,00	90,93
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	17.811.730.500,00	16.518.834.100,00	92,74
5.1.02.02.01.0005.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	169.600.000,00	161.090.000,00	94,98



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
5.1.02.02.01.0006.	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	4.203.691.310,00	4.138.006.310,00	98,44
5.1.02.02.01.0007.	Honorarium Rohaniwan	1.916.000.000,00	1.891.000.000,00	98,70
5.1.02.02.01.0008.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	8.128.521.500,00	7.843.137.500,00	96,49
5.1.02.02.01.0009.	Honorarium Penyelenggara Ujian	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	82.100.000,00	79.390.000,00	96,70
5.1.02.02.01.0012.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0013.	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	59.529.347.578,00	58.962.209.078,00	99,05
5.1.02.02.01.0014.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	28.729.227.392,00	26.549.072.000,00	92,41
5.1.02.02.01.0015.	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	181.940.000,00	135.810.000,00	74,65
5.1.02.02.01.0017.	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	9.690.995.604,00	9.652.595.145,00	99,60
5.1.02.02.01.0018.	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	6.847.112.192,00	6.836.612.744,00	99,85
5.1.02.02.01.0019.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	588.800.000,00	588.800.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0020.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	2.068.400.000,00	2.046.750.000,00	98,95
5.1.02.02.01.0021.	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	321.000.000,00	318.600.000,00	99,25
5.1.02.02.01.0022.	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	974.785.000,00	963.849.000,00	98,88
5.1.02.02.01.0023.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	280.075.000,00	175.200.000,00	62,55
5.1.02.02.01.0024.	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	43.190.000,00	43.190.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	33.750.000,00	33.300.000,00	98,67
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	66.772.443.000,00	64.600.492.793,00	96,75
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	386.810.000,00	382.730.000,00	98,95
5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.407.260.000,00	1.653.810.000,00	48,54
5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.723.270.000,00	4.289.078.200,00	90,81
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.423.800.000,00	3.102.200.000,00	90,61
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.404.000.000,00	1.404.000.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	190.944.000,00	190.383.000,00	99,71
5.1.02.02.01.0035.	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	47.000.000,00	47.000.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	203.500.000,00	178.300.000,00	87,62
5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	3.178.900.000,00	3.077.521.100,00	96,81
5.1.02.02.01.0041.	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	120.000.000,00	117.889.000,00	98,24
5.1.02.02.01.0042.	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0046.	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	275.000.000,00	273.570.000,00	99,48
5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.370.605.000,00	1.303.730.000,00	95,12
5.1.02.02.01.0048.	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	452.700.000,00	450.900.000,00	99,60
5.1.02.02.01.0049.	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	155.234.000,00	152.969.000,00	98,54
5.1.02.02.01.0050.	Belanja Jasa Kalibrasi	38.000.000,00	36.425.000,00	95,86
5.1.02.02.01.0051.	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	392.480.000,00	388.282.500,00	98,93
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	605.750.000,00	605.378.000,00	99,94
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	59.940.000,00	54.000.000,00	90,09
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	812.216.020,00	743.036.505,00	91,48
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	33.910.218.296,00	33.227.520.750,00	97,99



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	720.328.000,00	673.070.500,00	93,44
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.468.171.240,00	2.771.702.013,00	79,92
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	27.000.000,00	12.000.000,00	44,44
5.1.02.02.01.0066.	Belanja Registrasi/Keanggotaan	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.175.600.000,00	670.275.257,00	57,02
5.1.02.02.01.0068.	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	3.981.978,00	3.981.978,00	100,00
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	492.811.000,00	477.893.000,00	96,97
5.1.02.02.01.0075.	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	10.134.771.000,00	9.260.535.667,00	91,37
5.1.02.02.02.	Belanja luran Jaminan/Asuransi	15.125.341.724,00	14.837.016.460,50	98,09
5.1.02.02.02.0002.	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	8.410.500.000,00	8.410.500.000,00	100,00
5.1.02.02.02.0004.	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPBU dan BP Kelas 3	4.280.010.000,00	4.190.742.460,00	97,91
5.1.02.02.02.0005.	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.424.989.900,00	2.230.966.472,50	92,00
5.1.02.02.02.0006.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	9.841.824,00	4.807.528,00	48,85
5.1.02.02.03.	Belanja Sewa Tanah	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
5.1.02.02.03.0001.	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.606.045.656,00	3.224.904.770,00	89,43
5.1.02.02.04.0012.	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0018.	Belanja Sewa Alat Besar Apung Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
5.1.02.02.04.0027.	Belanja Sewa Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00
5.1.02.02.04.0034.	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	119.040.000,00	119.040.000,00	100,00
5.1.02.02.04.0035.	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	226.200.000,00	214.992.500,00	95,05
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.160.280.000,00	815.952.650,00	70,32
5.1.02.02.04.0043.	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0049.	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0117.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.591.450.000,00	1.577.065.100,00	99,10
5.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	77.675.000,00	68.375.000,00	88,03
5.1.02.02.04.0122.	Belanja Sewa Alat Dapur	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0123.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	145.900.656,00	145.714.720,00	99,87
5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00
5.1.02.02.04.0137.	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00
5.1.02.02.04.0202.	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0405.	Belanja Sewa Personal Computer	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0407.	Belanja Sewa Peralatan Mainframe	192.000.000,00	190.264.800,00	99,10
5.1.02.02.04.0410.	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0494.	Belanja Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.626.525.000,00	3.266.437.939,00	90,07
5.1.02.02.05.0001.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.073.625.000,00	938.590.400,00	87,42
5.1.02.02.05.0042.	Belanja Sewa Asrama	16.500.000,00	15.000.000,00	90,91
5.1.02.02.05.0043.	Belanja Sewa Hotel	2.129.400.000,00	1.997.444.939,00	93,80



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
5.1.02.02.05.0044.	Belanja Sewa Motel	95.000.000,00	92.202.600,00	97,06
5.1.02.02.05.0045.	Belanja Sewa Flat/Rumah Susun	312.000.000,00	223.200.000,00	71,54
5.1.02.02.06.	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	475.000.000,00	372.000.594,00	78,32
5.1.02.02.06.0013.	Belanja Sewa Jembatan pada Jalan Kabupaten	175.000.000,00	173.692.000,00	99,25
5.1.02.02.06.0131.	Belanja Sewa Jaringan Telepon Lainnya	300.000.000,00	198.308.594,00	66,10
5.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	252.400.000,00	246.400.000,00	97,62
5.1.02.02.07.0013.	Belanja Sewa Audio Visual	54.400.000,00	54.400.000,00	100,00
5.1.02.02.07.0028.	Belanja Sewa Alat Musik	192.000.000,00	186.000.000,00	96,88
5.1.02.02.07.0057.	Belanja Sewa Tanaman	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	14.884.122.966,00	14.005.921.531,00	94,10
5.1.02.02.08.0002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	1.792.676.500,00	1.785.649.530,00	99,61
5.1.02.02.08.0003.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	1.793.000.000,00	1.738.033.910,00	96,93
5.1.02.02.08.0004.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	141.609.475,00	140.694.000,00	99,35
5.1.02.02.08.0005.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	189.500.000,00	188.012.000,00	99,21
5.1.02.02.08.0007.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	86.000.000,00	85.836.500,00	99,81
5.1.02.02.08.0008.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	925.000.000,00	906.309.200,00	97,98
5.1.02.02.08.0009.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	430.000.000,00	427.768.000,00	99,48
5.1.02.02.08.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	1.731.043.550,00	1.717.435.650,00	99,21
5.1.02.02.08.0013.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	31.000.000,00	30.824.000,00	99,43
5.1.02.02.08.0014.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	475.000.000,00	474.282.800,00	99,85
5.1.02.02.08.0015.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	200.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08.0016.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	75.000.000,00	74.899.000,00	99,87
5.1.02.02.08.0017.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08.0018.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	1.570.559.200,00	1.563.378.420,00	99,54
5.1.02.02.08.0019.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	2.104.393.436,00	1.848.049.995,00	87,82
5.1.02.02.08.0020.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	2.584.577.880,00	2.354.138.131,00	91,08
5.1.02.02.08.0021.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	650.000.000,00	566.060.795,00	87,09
5.1.02.02.08.0023.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	104.762.925,00	104.549.600,00	99,80
5.1.02.02.08.0027.	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08.0032.	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	587.000.000,00	569.463.751,00	97,01
5.1.02.02.09.0001.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	360.000.000,00	359.924.500,00	99,98
5.1.02.02.09.0003.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	67.000.000,00	50.622.000,00	75,56
5.1.02.02.09.0011.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	110.000.000,00	109.522.251,00	99,57
5.1.02.02.09.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa	50.000.000,00	49.395.000,00	98,79



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	Studi Penelitian dan Bantuan Teknik			
5.1.02.02.10.	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	474.000.000,00	424.000.000,00	89,45
5.1.02.02.10.0008.	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	474.000.000,00	424.000.000,00	89,45
5.1.02.02.11.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	411.000.000,00	398.200.000,00	96,89
5.1.02.02.11.0002.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	411.000.000,00	398.200.000,00	96,89
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.616.725.000,00	5.293.572.336,00	94,25
5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.817.402.000,00	3.617.984.000,00	94,78
5.1.02.02.12.0002.	Belanja Sosialisasi	293.200.000,00	293.200.000,00	100,00
5.1.02.02.12.0003.	Belanja Bimbingan Teknis	1.326.840.000,00	1.268.498.336,00	95,60
5.1.02.02.12.0004.	Belanja Diklat Kepemimpinan	179.283.000,00	113.890.000,00	63,53
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	51.529.044.740,00	50.694.844.927,00	98,38
5.1.02.03.01.	Belanja Pemeliharaan Tanah	2.215.000.000,00	2.210.528.000,00	99,80
5.1.02.03.01.0029.	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	615.000.000,00	612.081.000,00	99,53
5.1.02.03.01.0035.	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya	1.600.000.000,00	1.598.447.000,00	99,90
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.726.047.878,00	14.331.857.285,00	97,32
5.1.02.03.02.0002.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	160.000.000,00	150.316.576,00	93,95
5.1.02.03.02.0003.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	204.000.000,00	196.920.554,00	96,53
5.1.02.03.02.0009.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	70.000.000,00	69.875.000,00	99,82
5.1.02.03.02.0011.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	31.500.000,00	29.757.000,00	94,47
5.1.02.03.02.0012.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	325.000.000,00	307.096.658,00	94,49
5.1.02.03.02.0014.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Floating Excavator	20.000.000,00	19.940.000,00	99,70
5.1.02.03.02.0019.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik	107.800.000,00	107.338.000,00	99,57
5.1.02.03.02.0022.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	362.546.500,00	348.784.400,00	96,20
5.1.02.03.02.0023.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	36.000.000,00	35.500.000,00	98,61
5.1.02.03.02.0034.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	150.000.000,00	149.600.000,00	99,73
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.974.541.650,00	3.852.156.463,00	96,92
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.750.515.469,00	2.602.798.506,00	94,63
5.1.02.03.02.0037.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	458.900.941,00	458.548.878,00	99,92
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	6.920.025,00	6.900.000,00	99,71
5.1.02.03.02.0039.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Tiga	885.350,00	885.350,00	100,00
5.1.02.03.02.0040.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	286.807.500,00	286.807.500,00	100,00
5.1.02.03.02.0043.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	157.133.159,00	154.647.047,00	98,42
5.1.02.03.02.0049.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	51.380.000,00	30.732.000,00	59,81
5.1.02.03.02.0096.	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	147.946.000,00	146.630.000,00	99,11
5.1.02.03.02.0103.	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	12.099.625,00	12.099.625,00	100,00
5.1.02.03.02.0113.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.374.246.178,00	1.346.040.548,00	97,95
5.1.02.03.02.0118.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	340.136.078,00	339.268.114,00	99,74
5.1.02.03.02.0120.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	3.952.150,00	3.952.150,00	100,00
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.601.732.950,00	1.594.086.543,00	99,52
5.1.02.03.02.0123.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	82.493.775,00	81.051.525,00	98,25
5.1.02.03.02.0134.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
5.1.02.03.02.0136.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
5.1.02.03.02.0137.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	235.000.000,00	234.544.420,00	99,81
5.1.02.03.02.0237.	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0268.	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi	920.000,00	920.000,00	100,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	630.257.028,00	629.974.928,00	99,96
5.1.02.03.02.0406.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	588.606.000,00	580.985.000,00	98,71
5.1.02.03.02.0409.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	22.977.150,00	22.683.750,00	98,72
5.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	59.400.000,00	59.259.000,00	99,76
5.1.02.03.02.0494.	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	465.350.350,00	464.757.750,00	99,87
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	29.779.605.225,00	29.478.512.734,00	98,99
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	23.308.011.175,00	23.015.405.684,00	98,74
5.1.02.03.03.0006.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	2.058.400.000,00	2.052.132.000,00	99,70
5.1.02.03.03.0010.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	4.089.194.050,00	4.088.006.050,00	99,97
5.1.02.03.03.0012.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	199.000.000,00	198.000.000,00	99,50
5.1.02.03.03.0025.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	125.000.000,00	124.969.000,00	99,98
5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.800.902.587,00	4.666.460.408,00	97,20
5.1.02.03.04.0003.	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	2.610.650.000,00	2.498.976.900,00	95,72
5.1.02.03.04.0010.	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	990.000.000,00	979.386.400,00	98,93
5.1.02.03.04.0024.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air-Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.04.0026.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	114.908.187,00	114.908.187,00	100,00
5.1.02.03.04.0064.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	171.904.400,00	169.596.100,00	98,66
5.1.02.03.04.0071.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	300.000.000,00	299.201.000,00	99,73
5.1.02.03.04.0087.	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	388.440.000,00	388.440.000,00	100,00
5.1.02.03.04.0119.	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.04.0126.	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	225.000.000,00	215.951.821,00	95,98
5.1.02.03.05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	7.489.050,00	7.486.500,00	99,97



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
5.1.02.03.05.0057.	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	7.489.050,00	7.486.500,00	99,97
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	115.115.513.941,00	99.879.515.220,00	86,76
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	115.115.513.941,00	99.879.515.220,00	86,76
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	57.717.411.501,00	48.715.209.297,00	84,40
5.1.02.04.01.0002.	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	16.207.820.000,00	14.327.213.000,00	88,40
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	41.035.032.440,00	36.681.842.923,00	89,39
5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	155.250.000,00	155.250.000,00	100,00
5.1.02.04.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04.02.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.037.217.500,00	3.476.018.200,00	86,10
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.488.217.500,00	1.214.700.000,00	81,62
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	487.750.000,00	459.800.000,00	94,27
5.1.02.05.01.0002.	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00
5.1.02.05.01.0004.	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	263.920.000,00	248.400.000,00	94,12
5.1.02.05.01.0005.	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	723.547.500,00	493.500.000,00	68,21
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.549.000.000,00	2.261.318.200,00	88,71
5.1.02.05.02.0001.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.549.000.000,00	2.261.318.200,00	88,71
5.1.02.88.	Belanja Barang dan Jasa BOS	103.323.636.060,00	95.631.762.180,20	92,56
5.1.02.88.88.	Belanja Barang dan Jasa BOS	103.323.636.060,00	95.631.762.180,20	92,56
5.1.02.88.88.8888.	Belanja Barang dan Jasa BOS	103.323.636.060,00	95.631.762.180,20	92,56
5.1.02.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	43.942.710.490,00	55.769.451.184,63	126,91
5.1.02.99.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	43.942.710.490,00	55.769.451.184,63	126,91
5.1.02.99.99.9999.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	43.942.710.490,00	55.769.451.184,63	126,91
5.1.04.	Belanja Subsidi	436.500.000,00	436.450.000,00	99,99
5.1.04.01.	Belanja Subsidi kepada BUMN	436.500.000,00	436.450.000,00	99,99
5.1.04.01.01.	Belanja Subsidi kepada BUMN	436.500.000,00	436.450.000,00	99,99
5.1.04.01.01.0001.	Belanja Subsidi kepada BUMN	436.500.000,00	436.450.000,00	99,99
5.1.05.	Belanja Hibah	49.022.363.900,00	47.872.957.141,92	97,66
5.1.05.01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
5.1.05.01.01.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
5.1.05.01.01.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
5.1.05.01.02.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
5.1.05.01.02.0001.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
5.1.05.02.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.1.05.02.01.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.1.05.02.01.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	46.374.111.900,00	45.224.790.141,92	97,52
5.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	18.577.621.300,00	17.802.400.712,00	95,83
5.1.05.05.01.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	14.695.300.000,00	14.363.820.000,00	97,74



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
5.1.05.05.01.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.882.321.300,00	3.438.580.712,00	88,57
5.1.05.05.02.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.701.384.000,00	1.687.902.000,00	99,21
5.1.05.05.02.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	900.000.000,00	900.000.000,00	100,00
5.1.05.05.02.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	801.384.000,00	787.902.000,00	98,32
5.1.05.05.03.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	26.095.106.600,00	25.734.487.429,92	98,62
5.1.05.05.03.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	13.367.500.000,00	13.310.233.703,00	99,57
5.1.05.05.03.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	12.727.606.600,00	12.424.253.726,92	97,62
5.1.05.07.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.548.252.000,00	2.548.167.000,00	100,00
5.1.05.07.01.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.548.252.000,00	2.548.167.000,00	100,00
5.1.05.07.01.0001.	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.548.252.000,00	2.548.167.000,00	100,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	22.939.308.550,00	19.677.015.000,00	85,78
5.1.06.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	6.649.808.550,00	3.405.015.000,00	51,20
5.1.06.01.01.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	6.490.008.550,00	3.245.270.000,00	50,00
5.1.06.01.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	6.490.008.550,00	3.245.270.000,00	50,00
5.1.06.01.02.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	159.800.000,00	159.745.000,00	99,97
5.1.06.01.02.0001.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	159.800.000,00	159.745.000,00	99,97
5.1.06.02.	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	16.217.500.000,00	16.200.000.000,00	99,89
5.1.06.02.01.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	16.217.500.000,00	16.200.000.000,00	99,89
5.1.06.02.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	16.217.500.000,00	16.200.000.000,00	99,89
5.1.06.03.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00
5.1.06.03.02.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00
5.1.06.03.02.0001.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00
5.2.	BELANJA MODAL	312.475.438.040,00	281.509.813.581,82	90,09
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	590.000.000,00	505.118.496,00	85,61
5.2.01.01.	Belanja Modal Tanah	590.000.000,00	505.118.496,00	85,61
5.2.01.01.01.	Belanja Modal Tanah Persil	590.000.000,00	505.118.496,00	85,61
5.2.01.01.01.0004.	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00
5.2.01.01.01.0007.	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	590.000.000,00	505.118.496,00	85,61
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	93.530.233.254,00	80.023.194.214,82	85,56
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	737.470.250,00	459.736.250,00	62,34
5.2.02.01.01.	Belanja Modal Alat Besar Darat	429.493.750,00	320.486.250,00	74,62
5.2.02.01.01.0001.	Belanja Modal Tractor	99.330.000,00	0,00	0,00
5.2.02.01.01.0010.	Belanja Modal Alat Pengangkat	1.916.250,00	1.916.250,00	100,00
5.2.02.01.01.0011.	Belanja Modal Mesin Proses	328.247.500,00	318.570.000,00	97,05
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	307.976.500,00	139.250.000,00	45,21



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
5.2.02.01.03.0004.	Belanja Modal Electric Generating Set	0,00	0,00	0,00
5.2.02.01.03.0005.	Belanja Modal Pompa	35.964.000,00	32.302.000,00	89,82
5.2.02.01.03.0013.	Belanja Modal Peralatan Selam	10.200.000,00	10.200.000,00	100,00
5.2.02.01.03.0016.	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	261.812.500,00	96.748.000,00	36,95
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	17.712.491.250,00	17.316.074.999,00	97,76
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	17.681.031.250,00	17.284.614.999,00	97,76
5.2.02.02.01.0001.	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6.235.000.000,00	6.084.400.000,00	97,58
5.2.02.02.01.0002.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.387.560.000,00	1.333.400.000,00	96,10
5.2.02.02.01.0003.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.579.090.000,00	3.481.080.000,00	97,26
5.2.02.02.01.0004.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	757.750.000,00	727.620.999,00	96,02
5.2.02.02.01.0006.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	5.721.631.250,00	5.658.114.000,00	98,89
5.2.02.02.01.0009.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02.02.0004.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02.03.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	31.460.000,00	31.460.000,00	100,00
5.2.02.02.03.0002.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02.03.0003.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02.03.0005.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	31.460.000,00	31.460.000,00	100,00
5.2.02.02.04.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02.04.0002.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	19.554.000,00	17.772.000,00	90,89
5.2.02.03.01.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	489.000,00	485.000,00	99,18
5.2.02.03.01.0010.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	489.000,00	485.000,00	99,18
5.2.02.03.02.	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	8.890.000,00	7.112.000,00	80,00
5.2.02.03.02.0005.	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.02.0006.	Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools)	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.02.0013.	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	8.890.000,00	7.112.000,00	80,00
5.2.02.03.03.	Belanja Modal Alat Ukur	10.175.000,00	10.175.000,00	100,00
5.2.02.03.03.0001.	Belanja Modal Alat Ukur Universal	10.175.000,00	10.175.000,00	100,00
5.2.02.03.03.0009.	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.03.0021.	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.2.02.04.	Belanja Modal Alat Pertanian	229.901.271,00	226.528.100,00	98,53
5.2.02.04.01.	Belanja Modal Alat Pengolahan	229.901.271,00	226.528.100,00	98,53
5.2.02.04.01.0001.	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	2.172.500,00	2.172.500,00	100,00
5.2.02.04.01.0002.	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	52.746.000,00	52.626.000,00	99,77
5.2.02.04.01.0009.	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	167.360.771,00	166.079.600,00	99,23
5.2.02.04.01.0010.	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	7.622.000,00	5.650.000,00	74,13
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	16.837.069.360,00	16.464.069.927,02	97,78
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	3.675.321.579,00	3.486.411.309,00	94,86
5.2.02.05.01.0001.	Belanja Modal Mesin Ketik	2.871.490,00	2.871.000,00	99,98
5.2.02.05.01.0003.	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	172.200.000,00	169.334.440,00	98,34



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
5.2.02.05.01.0004.	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	12.815.000,00	12.538.400,00	97,84
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	3.487.435.089,00	3.301.667.469,00	94,67
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	12.655.037.517,00	12.477.756.108,02	98,60
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	10.897.002.114,00	10.761.210.863,02	98,75
5.2.02.05.02.0003.	Belanja Modal Alat Pembersih	25.046.360,00	18.087.610,00	72,22
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	587.104.030,00	584.018.215,00	99,47
5.2.02.05.02.0005.	Belanja Modal Alat Dapur	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.053.353.013,00	1.024.749.420,00	97,28
5.2.02.05.02.0007.	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	92.532.000,00	89.690.000,00	96,93
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	506.710.264,00	499.902.510,00	98,66
5.2.02.05.03.0001.	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	35.633.170,00	31.066.900,00	87,19
5.2.02.05.03.0002.	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	38.754.780,00	38.682.000,00	99,81
5.2.02.05.03.0003.	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	195.157.250,00	194.044.250,00	99,43
5.2.02.05.03.0004.	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	18.782.400,00	18.782.400,00	100,00
5.2.02.05.03.0005.	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	78.497.500,00	77.877.600,00	99,21
5.2.02.05.03.0006.	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	57.527.164,00	57.288.480,00	99,59
5.2.02.05.03.0007.	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	82.358.000,00	82.160.880,00	99,76
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.267.327.137,00	3.219.231.506,00	98,53
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	1.644.141.937,00	1.604.620.188,00	97,60
5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	583.708.328,00	576.912.928,00	98,84
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	404.026.800,00	380.260.174,00	94,12
5.2.02.06.01.0003.	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06.01.0006.	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	656.406.809,00	647.447.086,00	98,64
5.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	1.591.685.200,00	1.583.116.118,00	99,46
5.2.02.06.02.0001.	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	1.065.800.000,00	1.058.854.718,00	99,35
5.2.02.06.02.0002.	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB	47.502.000,00	47.255.000,00	99,48
5.2.02.06.02.0011.	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	478.383.200,00	477.006.400,00	99,71
5.2.02.06.04.	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	31.500.000,00	31.495.200,00	99,98
5.2.02.06.04.0004.	Belanja Modal Radar	31.500.000,00	31.495.200,00	99,98
5.2.02.07.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	17.669.531.771,00	16.837.719.262,00	95,29
5.2.02.07.01.	Belanja Modal Alat Kedokteran	9.109.290.590,00	8.482.273.920,00	93,12
5.2.02.07.01.0001.	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	5.114.490.740,00	4.730.906.740,00	92,50
5.2.02.07.01.0004.	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	0,00	0,00	0,00
5.2.02.07.01.0010.	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	2.535.996.600,00	2.366.875.000,00	93,33
5.2.02.07.01.0029.	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	1.458.803.250,00	1.384.492.180,00	94,91
5.2.02.07.02.	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	8.560.241.181,00	8.355.445.342,00	97,61
5.2.02.07.02.0005.	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	8.560.241.181,00	8.355.445.342,00	97,61
5.2.02.08.	Belanja Modal Alat Laboratorium	5.520.159.611,00	5.042.595.155,00	91,35
5.2.02.08.01.	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	3.017.519.611,00	2.603.956.855,00	86,29
5.2.02.08.01.0011.	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.01.0018.	Belanja Modal Alat Laboratorium Makanan	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
5.2.02.08.01.0056.	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	1.267.875,00	1.267.875,00	100,00
5.2.02.08.01.0064.	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	3.016.251.736,00	2.602.688.980,00	86,29
5.2.02.08.03.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	1.784.300.000,00	1.783.603.300,00	99,96
5.2.02.08.03.0002.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Matematika	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.03.0005.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.03.0007.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPS	200.000.000,00	199.848.000,00	99,92
5.2.02.08.03.0010.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	209.300.000,00	209.219.500,00	99,96
5.2.02.08.03.0011.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga	200.000.000,00	199.892.000,00	99,95
5.2.02.08.03.0014.	Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.03.0015.	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	375.000.000,00	374.888.800,00	99,97
5.2.02.08.03.0016.	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	800.000.000,00	799.755.000,00	99,97
5.2.02.08.05.	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.05.0002.	Alat Kesehatan Kerja	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.07.	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.07.0001.	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.08.	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	718.340.000,00	655.035.000,00	91,19
5.2.02.08.08.0006.	Belanja Modal Peralatan Umum	718.340.000,00	655.035.000,00	91,19
5.2.02.08.09.	BelanjaModalAlat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.09.0005.	Belanja Modal Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	9.246.971.801,00	8.974.003.601,00	97,05
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	7.566.624.541,00	7.415.464.781,00	98,00
5.2.02.10.01.0001.	Belanja Modal Komputer Jaringan	251.000.000,00	250.878.000,00	99,95
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	5.238.937.264,00	5.113.253.354,00	97,60
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	2.076.687.277,00	2.051.333.427,00	98,78
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.680.347.260,00	1.558.538.820,00	92,75
5.2.02.10.02.0001.	Belanja Modal Peralatan Mainframe	22.000.000,00	16.860.000,00	76,64
5.2.02.10.02.0002.	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	145.977.500,00	122.676.342,00	84,04
5.2.02.10.02.0004.	Belanja Modal Peralatan Jaringan	330.199.300,00	327.686.140,00	99,24
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.182.170.460,00	1.091.316.338,00	92,31
5.2.02.11.	Belanja Modal Alat Eksplorasi	316.478.750,00	287.373.000,00	90,80
5.2.02.11.02.	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	316.478.750,00	287.373.000,00	90,80
5.2.02.11.02.0002.	Belanja Modal Elektronik/Electric	316.478.750,00	287.373.000,00	90,80
5.2.02.15.	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	64.267.207,00	63.220.700,00	98,37
5.2.02.15.02.	Belanja Modal Alat Pelindung	63.132.207,00	62.090.700,00	98,35
5.2.02.15.02.0001.	Belanja Modal Baju Pengaman	4.840.000,00	4.800.000,00	99,17
5.2.02.15.02.0005.	Belanja Modal Sepatu Lapangan	39.260.172,00	39.043.200,00	99,45
5.2.02.15.02.0006.	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	19.032.035,00	18.247.500,00	95,88
5.2.02.15.03.	Belanja Modal Alat SAR	1.135.000,00	1.130.000,00	99,56
5.2.02.15.03.0004.	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	1.135.000,00	1.130.000,00	99,56



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
5.2.02.18.	Belanja Modal Rambu-Rambu	760.525.150,00	758.331.000,00	99,71
5.2.02.18.01.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	760.525.150,00	758.331.000,00	99,71
5.2.02.18.01.0003.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	760.525.150,00	758.331.000,00	99,71
5.2.02.19.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	296.135.000,00	296.020.600,00	99,96
5.2.02.19.01.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	296.135.000,00	296.020.600,00	99,96
5.2.02.19.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Permainan	82.000.000,00	82.000.000,00	100,00
5.2.02.19.01.0006.	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	214.135.000,00	214.020.600,00	99,95
5.2.02.88.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	19.369.320.000,00	8.875.712.393,80	45,82
5.2.02.88.88.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	19.369.320.000,00	8.875.712.393,80	45,82
5.2.02.88.88.8888.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	19.369.320.000,00	8.875.712.393,80	45,82
5.2.02.99.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.483.030.696,00	1.184.805.721,00	79,89
5.2.02.99.99.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.483.030.696,00	1.184.805.721,00	79,89
5.2.02.99.99.9999.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.483.030.696,00	1.184.805.721,00	79,89
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67.120.097.320,00	64.626.802.305,00	96,29
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	62.378.303.320,00	59.917.006.935,00	96,05
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	62.378.303.320,00	59.917.006.935,00	96,05
5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	6.807.956.136,00	6.479.169.641,00	95,17
5.2.03.01.01.0002.	Belanja Modal Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0005.	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	17.754.158.184,00	16.919.323.201,00	95,30
5.2.03.01.01.0006.	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	8.352.710.000,00	7.273.662.733,00	87,08
5.2.03.01.01.0008.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0010.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	26.293.729.000,00	26.131.584.515,00	99,38
5.2.03.01.01.0011.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.344.000.000,00	1.343.017.000,00	99,93
5.2.03.01.01.0016.	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0025.	Belanja Modal Bangunan Terbuka	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0029.	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	237.500.000,00	186.367.945,00	78,47
5.2.03.01.01.0030.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	919.000.000,00	916.784.900,00	99,76
5.2.03.01.01.0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	473.250.000,00	472.445.000,00	99,83
5.2.03.01.01.0037.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	196.000.000,00	194.652.000,00	99,31
5.2.03.03.	Belanja Modal Bangunan Menara	1.763.000.000,00	1.760.477.000,00	99,86
5.2.03.03.01.	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	1.763.000.000,00	1.760.477.000,00	99,86
5.2.03.03.01.0005.	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya	1.763.000.000,00	1.760.477.000,00	99,86
5.2.03.04.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.948.794.000,00	2.941.318.370,00	99,75
5.2.03.04.01.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	2.948.794.000,00	2.941.318.370,00	99,75
5.2.03.04.01.0003.	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.2.03.04.01.0004.	Belanja Modal Pagar	2.612.794.000,00	2.605.790.000,00	99,73
5.2.03.04.01.0005.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	336.000.000,00	335.528.370,00	99,86
5.2.03.99.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	30.000.000,00	8.000.000,00	26,67
5.2.03.99.99.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	30.000.000,00	8.000.000,00	26,67
5.2.03.99.99.9999.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	30.000.000,00	8.000.000,00	26,67
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	141.357.438.016,00	127.694.277.285,00	90,33



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
5.2.04.01.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	114.748.246.446,00	103.965.771.445,00	90,60
5.2.04.01.01.	Belanja Modal Jalan	95.897.246.446,00	89.845.052.895,00	93,69
5.2.04.01.01.0003.	Belanja Modal Jalan Kabupaten	35.394.579.649,00	33.675.764.195,00	95,14
5.2.04.01.01.0005.	Belanja Modal Jalan Desa	0,00	0,00	0,00
5.2.04.01.01.0010.	Belanja Modal Jalan Lainnya	60.502.666.797,00	56.169.288.700,00	92,84
5.2.04.01.02.	Belanja Modal Jembatan	18.851.000.000,00	14.120.718.550,00	74,91
5.2.04.01.02.0003.	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	18.851.000.000,00	14.120.718.550,00	74,91
5.2.04.02.	Belanja Modal Bangunan Air	17.923.873.576,00	17.194.409.840,00	95,93
5.2.04.02.01.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	6.341.187.076,00	6.330.744.086,00	99,84
5.2.04.02.01.0003.	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	0,00	0,00	0,00
5.2.04.02.01.0008.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	6.341.187.076,00	6.330.744.086,00	99,84
5.2.04.02.04.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	195.000.000,00	194.628.601,00	99,81
5.2.04.02.04.0005.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	195.000.000,00	194.628.601,00	99,81
5.2.04.02.06.	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	1.730.000.000,00	1.726.732.000,00	99,81
5.2.04.02.06.0006.	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.730.000.000,00	1.726.732.000,00	99,81
5.2.04.02.07.	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	9.657.686.500,00	8.942.305.153,00	92,59
5.2.04.02.07.0003.	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	1.423.778.000,00	1.423.778.000,00	100,00
5.2.04.02.07.0006.	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	8.233.908.500,00	7.518.527.153,00	91,31
5.2.04.03.	Belanja Modal Instalasi	1.840.350.000,00	38.489.000,00	2,09
5.2.04.03.01.	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	40.350.000,00	38.489.000,00	95,39
5.2.04.03.01.0005.	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	40.350.000,00	38.489.000,00	95,39
5.2.04.03.02.	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1.800.000.000,00	0,00	0,00
5.2.04.03.02.0004.	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	1.800.000.000,00	0,00	0,00
5.2.04.04.	Belanja Modal Jaringan	6.844.967.994,00	6.495.607.000,00	94,90
5.2.04.04.01.	Belanja Modal Jaringan Air Minum	6.844.967.994,00	6.495.607.000,00	94,90
5.2.04.04.01.0005.	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	6.844.967.994,00	6.495.607.000,00	94,90
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.877.669.450,00	8.660.421.281,00	87,68
5.2.05.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	316.510.693,00	297.533.238,00	94,00
5.2.05.01.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	316.510.693,00	297.533.238,00	94,00
5.2.05.01.01.0001.	Belanja Modal Buku Umum	288.297.943,00	273.443.181,00	94,85
5.2.05.01.01.0003.	Belanja Modal Buku Agama	1.995.000,00	1.995.000,00	100,00
5.2.05.01.01.0006.	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	0,00	0,00	0,00
5.2.05.01.01.0007.	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	1.092.000,00	1.092.000,00	100,00
5.2.05.01.01.0008.	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	1.945.125,00	1.945.125,00	100,00
5.2.05.01.01.0009.	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	8.360.625,00	7.987.932,00	95,54
5.2.05.01.01.0011.	Belanja Modal Buku Laporan	14.820.000,00	11.070.000,00	74,70
5.2.05.01.01.0012.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.2.05.02.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1.198.250.000,00	1.197.758.500,00	99,96
5.2.05.02.01.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	1.198.250.000,00	1.197.758.500,00	99,96
5.2.05.02.01.0001.	Belanja Modal Alat Musik	1.198.250.000,00	1.197.758.500,00	99,96
5.2.05.02.01.0003.	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
5.2.05.03.	Belanja Modal Hewan	0,00	0,00	0,00
5.2.05.03.02.	Belanja Modal Ternak	0,00	0,00	0,00
5.2.05.03.02.0001.	Belanja Modal Ternak Potong	0,00	0,00	0,00
5.2.05.03.02.0004.	Belanja Modal Ternak Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.2.05.07.	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	555.150.000,00	543.963.300,00	97,98
5.2.05.07.01.	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	555.150.000,00	543.963.300,00	97,98
5.2.05.07.01.0001.	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	555.150.000,00	543.963.300,00	97,98
5.2.05.08.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.068.625.000,00	1.065.187.000,00	99,68
5.2.05.08.01.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.068.625.000,00	1.065.187.000,00	99,68
5.2.05.08.01.0005.	Belanja Modal Software	1.068.625.000,00	1.065.187.000,00	99,68
5.2.05.88.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.456.440.000,00	5.188.972.605,00	80,37
5.2.05.88.88.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.456.440.000,00	5.188.972.605,00	80,37
5.2.05.88.88.8888.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.456.440.000,00	5.188.972.605,00	80,37
5.2.05.99.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	282.693.757,00	367.006.638,00	129,82
5.2.05.99.99.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	282.693.757,00	367.006.638,00	129,82
5.2.05.99.99.9999.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	282.693.757,00	367.006.638,00	129,82
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.500.000.000,00	846.120.950,00	56,41
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	846.120.950,00	56,41
5.3.01.01.	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	846.120.950,00	56,41
5.3.01.01.01.	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	846.120.950,00	56,41
5.3.01.01.01.0001.	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	846.120.950,00	56,41
5.4.	BELANJA TRANSFER	386.321.032.382,00	379.617.643.340,00	98,26
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	16.461.297.013,00	10.423.785.747,00	63,32
5.4.01.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	15.122.792.013,00	9.190.269.495,00	60,77
5.4.01.01.03.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	15.122.792.013,00	9.190.269.495,00	60,77
5.4.01.01.03.0001.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	15.122.792.013,00	9.190.269.495,00	60,77
5.4.01.02.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.338.505.000,00	1.233.516.252,00	92,16
5.4.01.02.01.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.338.505.000,00	1.233.516.252,00	92,16
5.4.01.02.01.0001.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.338.505.000,00	1.233.516.252,00	92,16
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	369.859.735.369,00	369.193.857.593,00	99,82
5.4.02.05.	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	369.859.735.369,00	369.193.857.593,00	99,82
5.4.02.05.01.	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	345.159.735.369,00	344.493.857.593,00	99,81
5.4.02.05.01.0001.	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	345.159.735.369,00	344.493.857.593,00	99,81
5.4.02.05.02.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	24.700.000.000,00	24.700.000.000,00	100,00
5.4.02.05.02.0001.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	24.700.000.000,00	24.700.000.000,00	100,00
	Jumlah Belanja	2.589.837.610.263,00	2.480.592.185.573,96	95,78
	Total Surplus/(Defisit)	(95.895.381.681,00)	(53.088.600.021,25)	55,36
6.	PEMBIAYAAN	95.895.381.680,97	74.859.762.812,21	78,06
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	95.895.381.680,97	74.859.762.812,21	78,06



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	74.859.762.811,97	74.859.762.812,21	100,00
6.1.01.01.	Pelampauan Penerimaan PAD	0,00	0,00	0,00
6.1.01.01.04.	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00
6.1.01.01.04.0017.	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00
6.1.01.05.	Penghematan Belanja	68.037.856.704,00	68.037.856.704,24	100,00
6.1.01.05.01.	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	68.037.856.704,00	68.037.856.704,24	100,00
6.1.01.05.01.0007.	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	68.037.856.704,00	68.037.856.704,24	100,00
6.1.01.08.	Sisa Belanja Lainnya	6.821.906.107,97	6.821.906.107,97	100,00
6.1.01.08.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	6.801.310.047,97	6.801.310.047,97	100,00
6.1.01.08.01.0001.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	6.801.310.047,97	6.801.310.047,97	100,00
6.1.01.08.02.	Sisa Dana BOS	20.596.060,00	20.596.060,00	100,00
6.1.01.08.02.0001.	Sisa Dana BOS	20.596.060,00	20.596.060,00	100,00
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	21.035.618.869,00	0,00	0,00
6.1.05.06.	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	21.035.618.869,00	0,00	0,00
6.1.05.06.02.	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	21.035.618.869,00	0,00	0,00
6.1.05.06.02.0001.	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	21.035.618.869,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	95.895.381.680,97	74.859.762.812,21	78,06
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	95.895.381.680,97	74.859.762.812,21	78,06
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	21.771.162.790,96	0,00
	Koreksi	0,00	0,00	0,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	21.771.162.790,96	0,00

Dari tabel 1 di atas dapat disimpulkan bahwa selama Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Kampar mengalami Defisit sebesar **(Rp53.088.600.021,25)** karena realisasi pendapatan sebesar **Rp2.427.503.585.552,71** lebih kecil dibandingkan dengan realisasi belanja yang mencapai **Rp2.480.592.185.573,96**.

Defisit tersebut diatas ditambah dengan Pembiayaan bersih Pemerintah Kabupaten Kampar sebesar **Rp74.859.762.812,21** Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah sebesar **Rp21.771.162.790,96**.

A. Pendapatan

Dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan pembangunan di Kabupaten Kampar, telah diupayakan dana secara maksimal lewat usaha peningkatan pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), berupa pajak dan retribusi daerah yang menjadi tanggung jawab pengelolaan masing-masing OPD Kabupaten Kampar, dan pendapatan transfer sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kampar Tahun 2022. Pada akhir Tahun Anggaran 2022 realisasi pendapatan Kabupaten Kampar sebesar **Rp2.427.503.585.552,71**.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

B. Belanja

Sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan di bidang pengeluaran, pengendalian pengeluaran yang dilakukan selain melaksanakan efisiensi juga mencegah terjadinya kebocoran-kebocoran serta pemborosan-pemborosan dalam segala sektor pengeluaran melalui pengawasan preventif secara proaktif sehingga seluruh pengeluaran akan mempunyai arti dan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kampar serta dapat dipertanggungjawabkan secara nyata baik secara fisik maupun non-fisik. Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun anggaran 2022 secara keseluruhan adalah sebesar **Rp2.480.592.185.573,96**

C. Surplus/Defisit

Untuk Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Kampar mengalami Defisit sebesar **(Rp53.088.600.021,25)** dari jumlah yang dianggarkan sebesar Defisit **(Rp95.895.381.681,00)** kondisi ini membawa dampak adanya selisih anggaran dan realisasi keuangan daerah sebesar **Rp42.806.781.659,75**.

D. Pembiayaan dan Koreksi

Untuk surplus/defisit sebesar **(Rp53.088.600.021,25)** Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan Pembiayaan Netto sebesar **Rp74.859.762.812,21** sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2022 menjadi sebesar **Rp21.771.162.790,96**.

2. HAMBATAN/KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Hambatan / kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan : 1). Lemahnya Sumber daya Manusia yang berhubungan dengan penatausahaan keuangan OPD terutama Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD pada umumnya tidak menguasai peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah, 2). Kurangnya Bimbingan teknis/pelatihan/sosialisasi peraturan tentang pengelolaan keuangan terhadap pegawai yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah, 3). Perubahan peraturan tentang pengelolaan keuangan yang selalu berubah-ubah.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas akuntansi/pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangannya.

Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022 ini mengacu kepada: (1). Kebijakan akuntansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mencakup tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Kampar Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.1 sampai dengan No.12 termasuk Pengantar SAP dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan; Interpretasi PSAP dan Buletin Teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SAP, dan (2) Kebijakan akuntansi yang diatur dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 22 Tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Kampar.

1. ENTITAS PELAPORAN PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) adalah merupakan PPKD yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar. Sebagai salah satu entitas pelaporan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, BPKAD Kabupaten Kampar menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022 yang mencakup: (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih, (3) Laporan Operasional, (4) Laporan Perubahan ekuitas, (5) Neraca, (6) Laporan Arus Kas, dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan.

Adapun periode pelaporan meliputi seluruh transaksi keuangan yang terjadi selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Penyusunan laporan keuangan ini ditujukan dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar untuk Tahun Anggaran 2021.

2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset kewajiban dan ekuitas, dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan demikian,

Basis Akrual Untuk LO berarti bahwa **pendapatan** diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan **beban** diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan, pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum Negara/Daerah. namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3. BASIS PENGAKUAN DAN PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

a. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat dalam laporan keuangan entitas yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk dapat diakui yakni (a) terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas yang bersangkutan; (b) kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan dipergunakan pertimbangan aspek materialitas.

b. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis (*historical cost*). Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Akuntansi Pendapatan

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah.

Pendapatan yang dikelola oleh OPD di lingkungan Kabupaten Kampar pada umumnya meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan pendapatan yang benar-benar



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

diperoleh dan digali dari potensi yang ada di daerah. Pendapatan Asli Daerah ini meliputi: (1) Pendapatan Pajak Daerah, (2) Pendapatan Retribusi Daerah, serta (3) Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

PAD dinyatakan sebesar nilai realisasi yaitu sejumlah uang kas yang diterima oleh Kas Daerah pada tahun pelaporan.

Akuntansi Pendapatan menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam evaluasi keputusan mengenai sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan dengan :

- 1) Menyediakan informasi sumber daya ekonomi; dan
- 2) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas perolehan pendapatan

Akuntansi pendapatan menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode berkenaan. Akuntansi pendapatan dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan sumber daya ekonomi :

- 1) Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
- 2) Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

b. Akuntansi Belanja

Akuntansi belanja menyediakan informasi mengenai realisasi belanja dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai penggunaan sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan dengan :

- 1) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh; dan
- 2) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas pengelolaan belanja dan penggunaan sumber daya.

Akuntansi belanja menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi penggunaan sumber daya ekonomi atau pengelolaan belanja yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pemerintah daerah dalam periode berkenaan. Akuntansi belanja dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi penggunaan sumber daya ekonomi atau pengelolaan belanja:

- 1) Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
- 2) Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas Daerah untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan *definitive* oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh BUD/Kuasa BUD/Pengguna Anggaran.

Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Koreksi atas belanja (penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja) dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama, apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam lain-lain PAD yang sah.

Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut.

Dalam pelaporan keuangan, klasifikasi jenis belanja menurut PP No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan khususnya PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, mengklasifikasikan belanja menurut ekonomi, yaitu pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bansos dan belanja tidak terduga, PSAP 02 juga mengklasifikasikan jenis belanja pada 4 hal, yaitu:

1) Belanja Operasi

Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

2) Belanja Modal

Merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.

3) Belanja Lain-lain/ tidak terduga

Adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

4) Transfer Keluar

Pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini dari transfer keluar kota atau kabupaten.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Pengakuan Akuntansi atas belanja barang pakai habis dan belanja modal suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

- 1) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual; dan
- 3) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan

Perlakuan Akuntansi belanja pemeliharaan, belanja modal/kapitalisasi aset tetap atau bukan suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

- 1) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara :
 - a) Bertambah ekonomis/efisien, dan /atau
 - b) Bertambah umur ekonomis,dan/atau
 - c) Bertambah volume, dan/atau
 - d) Bertambah kapasitas produksi, dan/atau
- 2) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan.

c. Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan diklasifikasi menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

- 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
- 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Akuntansi Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan Negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan

- 1) Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya;
- 2) Pencairan Dana Cadangan;
- 3) Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- 4) Penerimaan Pinjaman Daerah;
- 5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; dan
- 6) Penerimaan Piutang Daerah

Pengakuan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah kecuali untuk SiLPA.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Pengukuran

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya.

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar pada tanggal transaksi pembiayaan.

Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum Negara/daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Transaksi Pengeluaran Pembiayaan Berasal dari:

- 1) Pembentukan dana cadangan;
- 2) Penyertaan modal pemerintah daerah;
- 3) Pembayaran pokok pinjaman (utang); dan
- 4) Pemberian pinjaman daerah.

Pengakuan

Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah

Pengukuran

Akuntansi Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan **tidak** mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar pada tanggal transaksi pembiayaan.

d. Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Pengakuan Aset

- 1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

- 2) Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Aset diklasifikasikan kedalam:

1) ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan

Aset lancar terdiri dari :

- a) Kas dan Setara Kas
- b) Investasi Jangka Pendek
- c) Piutang
- d) Piutang lain-lain
- e) Persediaan

a) KAS

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah, yang terdiri dari:

- (1) Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan.
- (2) Kas di Bendahara Pengeluaran adalah merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) yang sebelumnya diterima dari Bendahara Umum Daerah setelah dipergunakan untuk pengeluaran belanja dan atas sisa tersebut per tanggal neraca belum disetor kembali ke Kas Daerah.

Setara kas

- (1) Simpanan di Bank dalam Bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan; dan
- (2) Investasi Jangka Pendek lainnya sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

b) INVESTASI JANGKA PENDEK

Investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah serta dimiliki selama kurang 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka pendek terdiri dari :

- (1) Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan;
- (2) Surat Utang Negara (SUN);
- (3) Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan
- (4) Surat Perbendaharaan Negara.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Pengakuan Investasi Jangka Pendek

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria:

- (1) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi tersebut diperoleh pemerintah daerah; dan
- (2) Nilai perolehan atau nilai ajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka pendek merupakan reklasifikasi aset lancar dan tidak dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.

Pengukuran investasi jangka pendek

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Pengakuan hasil investasi

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

Penilaian Investasi Jangka Pendek

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya.

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

c) PIUTANG

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang antara lain terdiri dari :



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

- (1) Piutang Pajak;
- (2) Piutang Retribusi;
- (3) Piutang Dana Bagi Hasil;
- (4) Piutang Dana Alokasi Umum; dan
- (5) Piutang Dana Alokasi Khusus.

Pengakuan Piutang

Secara garis besar, pengakuan piutang terjadi pada akhir periode ketika akan disusun Neraca dan diakui sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang.

Untuk periode berikutnya, perlakuan untuk piutang pajak/retribusi bisa melalui mekanisme pembiayaan atau mekanisme pengakuan pendapatan tunggakan. Perlakuan untuk piutang dari pemberian pinjaman kepada Pemda/institusi lain diakui pada saat terjadinya, untuk periode berikutnya melalui mekanisme pembiayaan.

Pengukuran Piutang

Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

Piutang Lain-lain

Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan definisi antara piutang dengan piutang lain-lain, hanya klasifikasinya saja yang berbeda.

- (1) Piutang lain-lain terdiri dari :
- (2) Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran;
- (3) Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah;
- (4) Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah;
- (5) Piutang Dividen;
- (6) Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah; dan
- (7) Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum.

d) PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud :

- (1) barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- (2) bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- (3) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

diserahkan kepada masyarakat; dan

- (4) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Dalam hal pemerintah daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.

Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

Dalam hal pemerintah daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.

Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Persediaan antara lain terdiri dari :

- (1) Persediaan alat tulis kantor;
- (2) Persediaan alat listrik;
- (3) Persediaan material/bahan;
- (4) Persediaan benda pos;
- (5) Persediaan bahan bakar; dan
- (6) Persediaan bahan makanan pokok.

Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Pengukuran Persediaan

Persediaan disajikan sebesar :

- (1) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- (2) biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- (3) nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

Pengungkapan Persediaan

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan persediaan adalah sebagai berikut :

- (1) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- (2) penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- (3) kondisi persediaan.

2) ASET NON LANCAR

a) INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang terdiri dari :

- (1) Investasi Non Permanen; dan
- (2) Investasi Permanen.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Pengakuan Investasi Jangka Panjang

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria :

- (1) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- (2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Pengukuran Investasi Jangka Panjang

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

(1) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi non permanen terdiri dari :

- (a) Pembelian Surat Utang Negara;
- (b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- (c) Dana Bergulir; dan
- (d) Investasi non permanen lainnya.

Pengukuran Investasi Non Permanen

Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

Pengukuran Investasi Non Permanen Dana Bergulir

Kualitas Dana Bergulir dalam bentuk piutang dengan angsuran ditetapkan dengan 4 (empat) golongan yaitu: piutang lancar, piutang kurang lancar, piutang diragukan dan piutang macet.

Kualitas Dana Bergulir dengan masa angsuran 1 (satu) bulan atau lebih ditetapkan sebagai berikut:

- (a) Piutang lancar

- (1)) Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga, atau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(2)) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga tidak lebih dari (tiga) kali angsuran dan belum jatuh tempo.

(b) Piutang Kurang Lancar

(1)) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 3 (tiga) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 6 (enam) kali angsuran dan/atau,

(2)) Umur piutang telah jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) bulan.

(c) Piutang Diragukan

(1)) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 6 (enam) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran dan/atau

(2)) Umur piutang telah jatuh tempo lebih dari 1 (satu) bulan tetapi tidak lebih dari 2 (dua) bulan.

(d) Piutang Macet

(1)) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran dan/atau,

(2)) Umur piutang telah jatuh tempo lebih dari 2 (dua) bulan.

Berdasarkan kualitasnya, penyisihan piutang tidak tertagih untuk Investasi Jangka Panjang Non Permanen-Dana Bergulir ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	% Penyisihan
1	Piutang Lancar	0,5 %
2	Piutang Kurang Lancar	10 %
3	Piutang diragukan	50 %
3	Piutang Macet	100 %

Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

(2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi permanen terdiri dari :

(a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan Negara, badan hukum milik Negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik Negara; dan

(b) Investasi permanen lainnya.

Pengukuran Investasi Permanen

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Pengakuan hasil Investasi

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah daerah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah daerah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

b) ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap terdiri dari :

- (1) Tanah;
- (2) Peralatan dan Mesin;
- (3) Gedung dan Bangunan;
- (4) Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- (5) Aset Tetap Lainnya;
- (6) Konstruksi Dalam Pengerjaan; dan
- (7) Akumulasi Penyusutan.

Aset Tetap Bernilai Kecil

Salah satu kriteria untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap adalah nilainya yang besar. Aset tetap yang nilai per unitnya kecil dapat langsung dibebankan sebagai belanja pada saat perolehan.

Pemerintah daerah perlu menetapkan batas untuk pengeluaran yang harus dikapitalisir sebagai aset tetap dan pengeluaran yang harus dibebankan sebagai belanja.

Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut. Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap. Misalnya biaya pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).

Belanja modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisir). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini. Demikian juga halnya dengan pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi, memperpanjang



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi.

Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian aset tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya.

Pengeluaran yang dikapitalisasikan dirinci sebagai berikut :

- (1) Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurangan;
- (2) Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba;
- (3) Pembuatan peralatan, mesin dan bangunan meliputi:
 - (a) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan; dan
 - (b) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
- (4) Pembangunan gedung dan bangunan meliputi :
 - (a) Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama; dan
 - (b) Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
- (5) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi :
 - (a) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan; dan
 - (b) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.

- (6) Pembelian aset tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.
- (7) Pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya:
 - (a) Pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan; dan
 - (b) Pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
- (8) Nilai penerimaan hibah dari pihak ketiga meliputi nilai yang dinyatakan oleh pemberi hibah atau nilai taksir, ditambah dengan biaya pengurusan.
- (9) Nilai penerimaan aset tetap dari rampasan meliputi nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan atau nilai taksiran harga pasar pada saat aset diperoleh ditambah dengan biaya pengurusan kecuali untuk tanah, gedung dan bangunan meliputi nilai taksiran atau harga pasar yang berlaku.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap meliputi:

- (1) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan di atas 10% dari nilai perolehan gedung dan bangunan tersebut.
- (2) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:
 - (a) Alat-alat besar yang sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - (b) Alat angkutan yang sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - (c) Alat bengkel dan alat ukur yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - (d) Alat pertanian yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - (e) Alat kantor dan rumah tangga yang sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - (f) Alat studio dan komunikasi yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

- (g) Alat kedokteran yang sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- (h) Alat laboratorium yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pengeluaran untuk per satuan aset tetap lainnya berupa hewan ternak dan tanaman yang sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagaimana dimaksud paragraf di atas **dikecualikan** terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Pengakuan Aset Tetap

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :

- (1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- (3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- (4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- (1) Biaya persiapan tempat;
- (2) Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
- (3) Biaya pemasangan (*instalation cost*);
- (4) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
- (5) Biaya konstruksi; dan
- (6) Biaya kepanitiaan.

(1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah daerah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat dibentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

Pengakuan Tanah

Pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap hanya dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada mengindikasikan adanya penguasaan yang bersifat permanen.

Pengukuran Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Pengungkapan Tanah

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan tanah yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi tanah bila ada.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain : alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi, dan pemancar, alat kedokteran dan Kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, computer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi, pengolahan, dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.

Pengukuran Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Pengungkapan Peralatan dan Mesin

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan peralatan dan mesin yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi peralatan dan mesin apabila ada.

(3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan Gedung, monument, bangunan Menara, dan rambu-rambu.

Pengukuran Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Pengungkapan Gedung dan Bangunan

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan gedung dan bangunan yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi gedung dan bangunan apabila ada.

(4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.

(5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.

Pengukuran Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Pengungkapan Aset Tetap Lainnya

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan aset tetap lainnya yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap lainnya apabila ada.

(6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan jika:

- (a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- (b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- (c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi :

- (a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- (b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Pengukuran Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain :

- (a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- (b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- (c) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- (a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- (b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
- (c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Pengungkapan Konstruksi dalam Pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi :

- (a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- (b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- (c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- (d) Uang muka kerja yang diberikan; dan
- (e) Retensi.

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan untuk masing-masing konstruksi dalam pengerjaan yang tercantum di neraca antara lain dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*), kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi, dan jumlah pengeluaran pada setiap pos aset tetap dalam konstruksi.

(7) Akumulasi Penyusutan

Penyusutan didefinisikan sebagai penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Pencatatan penyusutan ini merupakan salah satu penanda pemberlakuan basis akrual dalam SAP.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun beban penyusutan.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Metode penyusutan yang dipergunakan metode garis lurus (*straight line method*).

Pencatatan penyusutan menghadapi berbagai permasalahan. Masalah dalam akuntansi penyusutan suatu aset tetap adalah penentuan jenis aset yang disusutkan, jumlah yang dapat disusutkan, metode penyusutan dan penentuan masa manfaat keekonomian.

Dengan menyadari permasalahan tersebut, dalam mencatat dan menyajikan penyusutan, prasyarat yang harus dipenuhi adalah adanya:

- (a) Harus dapat diidentifikasi aset yang kapasitas dan manfaatnya menurun;
- (b) Harus ditetapkan nilai yang dapat disusutkan; dan
- (c) Harus ditetapkan masa manfaat dan kapasitas aset tetap.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Penyusutan aset tetap bukan merupakan metode alokasi biaya untuk periode yang menerima manfaat aset tetap tersebut sebagaimana diberlakukan di sektor komersial. Penyesuaian nilai ini lebih merupakan upaya untuk menunjukkan pengurangan nilai karena pengkonsumsian potensi manfaat aset oleh karena pemakaian dan atau pengurangan nilai karena keusangan dan lain-lain. Penerapan penyusutan aset tetap dilakukan sebagaimana dinyatakan dalam kebijakan akuntansi di atas, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

Prasyarat Penyusutan

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.

Tujuan utama dari penyusutan bukan untuk menumpuk sumber daya bagi pembayaran hutang atau penggantian aset tetap yang disusutkan. Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya. Di samping itu penyusutan juga dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.

Untuk menerapkan penyusutan, prasyarat yang perlu dipenuhi adalah:

(a) Identitas Aset yang Kapasitasnya Menurun:

Aset tetap harus dapat diidentifikasi sehingga dapat dibedakan antara aset tetap yang dapat menurun kapasitas dan manfaatnya dengan aset yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya. Aset yang kapasitas dan manfaatnya menurun adalah peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan sebagainya. Sedangkan aset yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya atau bahkan bertambah nilainya adalah tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap yang dapat menurun kapasitas dan manfaatnya akan memerlukan penyesuaian nilai, sehingga perlu disusutkan. Sebaliknya, aset tetap yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya tidak perlu disusutkan.

(b) Nilai yang Dapat Disusutkan

Nilai aset tetap menjadi prasyarat dalam penyusutan. PSAP menganut nilai historis, sehingga kecuali karena kondisi yang tidak memungkinkan perolehan nilai historis, nilai aset tetap yang diakui secara umum adalah nilai perolehannya. Tanpa mengetahui nilai perolehan aset tetap, maka nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak dapat dihitung. Selain itu, nilai perolehan pun menjadi faktor penentu besarnya nilai buku. Nilai buku diperoleh dari pengurangan nilai perolehan dengan nilai akumulasi penyusutan.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Sebelum penerapan SAP, entitas pemerintah mencatat nilai aset tetap dengan pengukuran yang berbeda dengan berbagai acuan. Dengan berlakunya SAP maka penilaian aset tetap harus disesuaikan dengan pedoman yang diatur dalam Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal. Nilai wajar yang sesuai dengan SAP akan menjadi dasar dalam menentukan nilai aset tetap yang dapat disusutkan.

Di lingkungan pemerintah, aset tetap diniatkan untuk digunakan dalam operasi pemerintahan dan tidak dimaksudkan untuk dijual pada akhir masa manfaatnya. Selain itu, penyusutan aset tetap tidak dimaksudkan dalam rangka penandingan antara biaya dengan pendapatan. Meskipun terhadap suatu aset tetap dapat ditentukan nilai residunya, dengan kedua alasan ini maka nilai sisa/residu tersebut diabaikan dalam menghitung penyusutan. Aset tetap masih memiliki nilai selama masih dapat dimanfaatkan, sehingga pada prinsipnya tidak dikenal nilai residu. Dengan demikian, nilai perolehan atau nilai wajar aset tetap menjadi nilai yang dapat disusutkan (*depreciable cost*).

(c) Masa Manfaat dan Kapasitas Aset Tetap

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi. Ukuran manfaat itu sendiri berbeda-beda. Ada yang dapat diukur dengan indikator yang terkuantifikasi dan ada yang tidak. Suatu kendaraan atau mesin, misalnya, secara teknis dapat dilengkapi dengan keterangan dari produsen tentang potensi total jarak yang dapat ditempuh atau potensi total jam kerja penggunaan. Akan tetapi, unit manfaat dari aset tetap seperti komputer, gedung, atau jalan, misalnya relatif lebih tidak dapat dikuantifikasi. Akibatnya, untuk aset yang tidak mempunyai unit manfaat yang tidak terkuantifikasi dengan spesifik, dipakailah indikator pengganti seperti prakiraan potensi masa manfaat.

Kebijakan akuntansi memilih Metode Garis Lurus sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Identifikasi Aset Tetap yang Dapat Disusutkan

Langkah ini untuk meyakinkan bahwa entitas akuntansi yang akan melaksanakan pencatatan penyusutan tidak akan memasukkan aset tetap berupa tanah dan konstruksi dalam pengerjaan sebagai aset tetap yang akan disusutkan. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:

- (a) Dapatkan daftar aset tetap yang disajikan dalam neraca;
- (b) Identifikasi apakah neraca menyajikan pos tanah dan konstruksi pengerjaan; dan
- (c) Jika neraca menyajikan pos tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, keluarkan dari daftar aset tetap yang akan disusutkan.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Ilustrasi Perhitungan dan Pencatatan Penyusutan Menurut Metode Penyusutan Garis Lurus

Berdasarkan metode garis lurus, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai secara merata selama masa manfaatnya. Persentase penyusutan yang dipakai dalam metode ini dipergunakan sebagai pengali nilai yang dapat disusutkan untuk mendapat nilai penyusutan per tahun.

Contoh perhitungan:

(a) Dari Kartu Inventaris Barang (KIB) diketahui:

- (1) Nilai peralatan berupa mesin fotokopi menurut sub buku besar yang telah sesuai dengan KIB adalah sebesar Rp10.000.000,00.
- (2) Mesin fotokopi tersebut pertama kali dihitung penyusutannya.

(b) Kondisi aset tetap dalam keadaan baik. Kebijakan Akuntansi mengenai masa manfaat peralatan dan mesin menetapkan mesin fotokopi tersebut mempunyai masa manfaat 4 tahun dan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus.

Dari informasi tersebut di atas, perhitungan dan pencatatan penyusutan tahun pertama hingga keempat adalah sebagai berikut:

(a) Nilai aset tetap yang dapat disusutkan sebesar Rp10.000.000,00.

(b) Penyusutan tahun pertama adalah $\text{Rp10.000.000,00} : 4 = \text{Rp2.500.000,00}$.

(c) Catatan tahun pertama adalah:

Jurnal untuk mencatat penyusutan

Beban penyusutan Rp 2.500.000,00

Akumulasi penyusutan Rp 2.500.000,00

(d) Catatan tahun kedua hingga keempat adalah:

Jurnal untuk mencatat penyusutan

Beban penyusutan Rp 2.500.000,00

Akumulasi penyusutan Rp 2.500.000,00

Penyajian Penyusutan

Dari informasi tersebut di atas, perhitungan dan pencatatan penyusutan tahun pertama hingga keempat adalah sebagai berikut:

Besarnya penyusutan setiap tahun dicatat dalam neraca dengan menambah nilai akumulasi penyusutan dan mengurangi ekuitas dana dalam akun beban penyusutan. Neraca menyajikan akumulasi penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat di ketahui.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Ilustrasi penyajian nilai perolehan aset, akumulasi penyusutan dan nilai buku aset tetap dalam neraca (dalam rupiah) sebagian adalah sebagai berikut:

Tanah		120.000.000.000,00
Peralatan dan Mesin	4.000.000.000,00	
Gedung dan Bangunan	35.000.000.000,00	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	12.758.500.000,00	
Aset tetap lainnya	1.656.000.000,00	
Akumulasi Penyusutan	<u>(2.430.000.000,00)</u>	
Nilai Buku Aset Tetap		50.984.500.000,00
Konstruksi dalam Pengerjaan		<u>4.300.000.000,00</u>
Jumlah Aset Tetap		175.284.500.000,00

Walaupun aset tetap terdiri atas berbagai jenis aset yang menunjukkan nilai perolehan masing-masing, penyusutannya disajikan hanya dalam satu akun akumulasi penyusutan. Nilai buku yang tersajikan dalam neraca juga merupakan nilai buku keseluruhan aset tetap. Nilai perolehan aset tetap, jumlah penyusutan dan akumulasinya serta nilai buku per jenis aset tetap disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Perbaikan Aset Tetap yang Menambah Masa Manfaat atau Kapasitas Manfaat

Perbaikan yang dilakukan atas suatu aset tetap dapat menambah masa manfaat atau menambah kapasitas aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran yang dilakukan untuk perbaikan semacam ini disebut pengeluaran modal (*capital expenditure*). Pengeluaran seperti ini akan mempengaruhi nilai yang dapat disusutkan, perkiraan *output* dan bahkan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Menurut paragraf 50 PSAP 07 pengeluaran seperti ini ditambahkan ke nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan. Artinya, pengeluaran modal seperti ini ditambahkan pada nilai buku aset tetap yang bersangkutan. Nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan.

Misalkan suatu aset yang memiliki harga perolehan sebesar Rp50.000.000,00 dengan masa manfaat 10 tahun telah disusutkan selama 6 tahun. Pada awal tahun ketujuh dilakukan perbaikan dengan pengeluaran modal sebesar Rp12.200.000,00. Pengeluaran tersebut akan menambah masa manfaat aset tetap 3 tahun. Akumulasi penyusutan sampai dengan tahun ke-6 adalah sebesar Rp30.000.000,00 sehingga nilai bukunya adalah sebesar Rp20.000.000,00. Perbaikan sebesar Rp12.200.000,00 ditambahkan ke nilai buku sehingga nilai yang disusutkan yang baru adalah sebesar Rp32.200.000,00 dan akan disusutkan selama 7 tahun. Dengan demikian penyusutan per tahun selama 7 tahun berikutnya adalah sebesar Rp4.600.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Jika aset tetap yang bersangkutan tidak bertambah masa manfaatnya akan tetapi bertambah efisiensi dan kapasitasnya maka masa manfaat untuk menghitung besarnya penyusutan pertahun adalah 4 tahun. Dengan demikian penyusutan selama sisa umur aset 4 tahun adalah sebesar Rp8.050.000,00 per tahun.

Penyusutan atas Aset Tetap secara Berkelompok

Aset tetap bervariasi dalam bentuk dan nilai. Ada aset tetap yang nilai per jenis sangat besar. Misalnya, gedung berupa rumah atau kantor dengan nilai yang relatif besar. Jalan berupa jalan negara atau jalan provinsi misalnya juga memiliki nilai yang signifikan. Akan tetapi ada juga aset tetap yang jenisnya banyak tetapi nilainya relatif kecil. Misalnya, mesin-mesin kecil seperti kalkulator dan peralatan kantor lainnya.

Menghitung besarnya penyusutan untuk aset tetap yang nilai per unitnya besar dapat dilakukan dengan menghitung penyusutan setiap jenis aset tetap yang bersangkutan. Menghitung besarnya penyusutan setiap aset tetap yang jumlahnya banyak tetapi nilainya relatif kecil sangat merepotkan. Bahkan mungkin biaya yang dikeluarkan lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Untuk itu diperlukan cara yang lebih praktis untuk menghitung besarnya penyusutan jenis aset yang nilainya relatif kecil.

Penghitungan penyusutan untuk aset yang nilainya relatif kecil dapat dilakukan dengan mengelompokkan aset-aset tersebut kemudian menghitung besarnya penyusutan dari kelompok aset tersebut. Kelompok aset tersebut harus memiliki persamaan atribut misalnya masa manfaat yang sama. Dengan adanya persamaan atribut dan maka penyusutan dihitung dengan menerapkan persentase penyusutan dengan metode garis lurus terhadap rata-rata aset tetap yang bersangkutan.

Misalnya saldo awal perlengkapan kantor awal tahun Rp200.000.000,00 dan saldo akhir tahun Rp300.000.000,00. Maka rata-rata nilai perlengkapan kantor adalah Rp250.000.000,00. Dengan persamaan masa manfaat perlengkapan kantor misalnya 4 tahun maka besarnya persentase penyusutan 25%. Dengan demikian besarnya penyusutan untuk tahun yang bersangkutan adalah sebesar Rp62.500.000,00.

Perhitungan Penyusutan Aset Tetap yang Diperoleh Tengah Tahun

Aset tetap diperoleh pada waktu tertentu di sepanjang tahun. Ada kalanya aset tetap diperoleh awal tahun, pertengahan tahun atau akhir tahun. Agar tidak menimbulkan permasalahan dalam penghitungan penyusutan, untuk menentukan waktu yang akan digunakan dalam perhitungan penyusutan aset yang diperoleh di tengah tahun digunakan pendekatan tahunan. Penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan satu hari. Pendekatan ini disebut pendekatan tahunan.

Entitas pemerintah yang akan memperoleh aset tetap di tengah tahun memilih pendekatan-pendekatan tahunan dalam menghitung besarnya penyusutan sesuai yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi ini.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Perubahan Estimasi dan Konsekuensinya Umur aset sesungguhnya lebih dari estimasi

Ada kalanya masa manfaat aset tetap lebih lama dari perkiraan dalam menentukan penyusutan. Setelah perkiraan masa manfaat dilalui dan akumulasi penyusutan telah sama dengan nilai perolehannya kadang-kadang aset tetap masih dapat digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa aset tetap yang bersangkutan masih memiliki nilai wajar.

Oleh karena nilai yang dapat disusutkan (*depreciable cost*) tidak ada lagi maka atas aset ini tidak dapat dilakukan penyusutan. Mengingat bahwa nilai sisa aset tetap tidak diakui maka nilai perolehan aset tetap dan akumulasi penyusutannya tetap dicantumkan dalam neraca.

c) DANA CADANGAN

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.

Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.

Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

d) ASET LAINNYA

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset Lainnya terdiri dari:

- (1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- (2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- (3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- (4) Aset Tidak Berwujud; dan
- (5) Aset Lain-lain.

Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Penilaian Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Penilaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :

- (1) Bangun, Kelola, Serah (BKS); dan
- (2) Bangun, Serah, Kelola (BSK).

Bangun, Kelola, Serah (BKS)

Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagukannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Pengukuran BKS

Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Bangun, Serah, Kelola (BSK)

Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Pengukuran BSK

Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Aset tidak berwujud meliputi :

Software komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

Lisensi dan *franchise*

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud.

Aset Lain-Lain

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tidak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah.

Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)

Kebijakan ini tidak mengharuskan pemerintah daerah untuk aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah:

- (1) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- (2) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasan nya untuk dijual;
- (3) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun; dan
- (4) Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah daerah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (*ruins*).

Aset Infrastruktur (*Infrastructure Assets*)

Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal yang digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- (1) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
- (2) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
- (3) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
- (4) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh pemerintah daerah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset pemerintah daerah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.

e. Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena:

- (1) Penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional;
- (2) Perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah;
- (3) Kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya; dan
- (4) Kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu: Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(1) KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), terdiri dari :

- (a) Utang Taspen;
- (b) Utang Askes;
- (c) Utang PPh Pusat;
- (d) Utang PPN Pusat;
- (e) Utang Taperum; dan
- (f) Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Utang Bunga, terdiri dari :

- (a) Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat;
- (b) Utang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya;
- (c) Utang Bunga kepada BUMN/BUMD;
- (d) Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan;
- (e) Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya; dan
- (f) Utang Bunga Luar Negeri.

Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Pengukuran dan penyajian utang bunga di atas juga berlaku untuk sekuritas pemerintah yang diterbitkan pemerintah pusat dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) dan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah (provinsi, kota, dan kabupaten) dalam bentuk dan substansi yang sama dengan SUN.

Utang Pajak, terdiri dari :

- (a) Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21;
- (b) Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22; dan
- (c) Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, terdiri dari :

- (a) Utang Bank;
- (b) Utang Obligasi;
- (c) Utang Pemerintah Pusat;
- (d) Utang Pemerintah Provinsi; dan
- (e) Utang Pemerintah Kabupaten / Kota.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pendapatan Diterima Dimuka, terdiri dari :

- (a) Setoran Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak III;
- (b) Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III; dan
- (c) Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah.

Utang Jangka Pendek Lainnya

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.

Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Pengakuan

Pengakuan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (*Account Payable*) pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.

Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

(2) KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menutup defisit anggarannya.

Secara umum, kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari :

- (a) Utang Dalam Negeri; dan
- (b) Utang Luar Negeri.

Utang Dalam Negeri, terdiri dari :

- (a) Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan;
- (b) Utang Dalam Negeri – Obligasi;
- (c) Utang Pemerintah Pusat;
- (d) Utang Pemerintah Provinsi; dan
- (e) Utang Pemerintah Kabupaten/Kota.

Utang Luar Negeri, terdiri atas Utang Luar Negeri Sektor Perbankan

Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dapat timbul dari:

- (a) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
- (b) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- (c) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan
- (d) Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Penilaian

Penilaian utang pemerintah disesuaikan dengan karakteristik utang tersebut yang dapat berbentuk :

- (a) Utang Pemerintah yang tidak diperjualbelikan (*Non-traded Debt*); dan
- (b) Utang Pemerintah yang diperjualbelikan (*Traded Debt*).

f. Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa

KOREKSI KESALAHAN

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan dalam penetapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian.

Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun Saldo Ekuitas Dana. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :

- 1) Kesalahan yang tidak berulang; dan
- 2) Kesalahan yang berulang dan sistemik.

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :

- 1) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
- 2) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan kembali penerimaan belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain- LRA, akun aset, dan akun ekuitas yang terkait.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar.

Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO/ekuitas. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun beban lain-lain-LO/ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan daerah. Koreksi kesalahan tidak dengan sendirinya berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

Koreksi kesalahan belanja dapat dibagi dua, yaitu yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas, yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain. Contoh koreksi kesalahan belanja yang mengurangi saldo kas, yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi mengurangi akun ekuitas dana lancar dan mengurangi saldo kas. Terhadap koreksi kesalahan yang berkaitan dengan belanja yang menghasilkan aset, di samping mengoreksi saldo kas dan pendapatan lain-lain juga perlu dilakukan koreksi terhadap aset dan pos ekuitas yang bersangkutan. Sebagai contoh, belanja aset tetap yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, maka koreksi yang harus dilakukan adalah dengan menambah kas dan pendapatan lain-lain, serta mengurangi pos aset tetap dan pos ekuitas dana diinvestasikan.

Koreksi kesalahan pendapatan dapat dibagi dua, yaitu yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan pendapatan yang menambah saldo kas, yaitu terdapat transaksi penyetoran bagian laba perusahaan negara yang belum dilaporkan. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah menambah saldo kas dan ekuitas. Contoh koreksi kesalahan pendapatan yang mengurangi saldo kas, yaitu kesalahan pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah mengurangi saldo kas dan ekuitas.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contoh kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas adalah belanja untuk membeli perabot kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja perjalanan dinas. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebet pos aset tetap dan mengkredit pos ekuitas pada aset tetap.

Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

Akibat kumulatif dari koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam baris tersendiri pada Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
- 2) Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PERISTIWA LUAR BIASA

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas pemerintah daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah daerah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah daerah yang lain.

Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak tersangka atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.

Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal harus menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.

Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut :

- 1) Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
- 2) Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
- 3) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas; dan
- 4) Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa harus diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan untuk tujuan umum dari unit pemerintahan yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi menurut kebijakan ini agar mencerminkan satu kesatuan entitas.

Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk laporan keuangan badan layanan umum daerah.

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

- 1) Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- 2) Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
- 3) Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 4) Contoh akun timbal balik (*reciprocal accounts*) antara lain sisa Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan akhir periode akuntansi.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

ENTITAS PELAPORAN

Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang umumnya bercirikan :

- 1) Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- 2) Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah daerah yang diangkat atau pejabat yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- 4) Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

ENTITAS AKUNTANSI

Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Dengan penetapan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku suatu entitas akuntansi tertentu yang dianggap mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah dapat ditetapkan sebagai entitas pelaporan.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah badan yang dibentuk pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan daerah yang dipisahkan. Contoh BLUD adalah rumah sakit.

PROSEDUR KONSOLIDASI

Konsolidasi yang dimaksud oleh kebijakan ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik.

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

Konsolidasi dapat dilaksanakan baik dengan mengeliminasi akun-akun yang timbal balik (*reciprocal*) maupun tanpa mengeliminasinya.

Dalam hal konsolidasi dilakukan tanpa mengeliminasi akun-akun yang timbal balik, maka nama-nama akun yang timbal balik dicantumkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) digabungkan pada lembaga teknis pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahnya dengan ketentuan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

- 1) Laporan Realisasi Anggaran BLUD digabungkan secara bruto kepada Laporan Realisasi Anggaran lembaga teknis pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahnya; dan
- 2) Neraca BLUD digabungkan kepada neraca lembaga teknis pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahnya.

h. Laporan Operasioal

RUANG LINGKUP

Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Operasional yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual untuk tingkat OPD, PPKD, dan Pemda.

Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemda, sedangkan entitas akuntansi yaitu OPD dan PPKD. Tidak termasuk perusahaan daerah.

MANFAAT INFORMASI LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan, beban, surplus/defisit-operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, karena Laporan Operasional menyediakan informasi:

- 1) Mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 2) Mengenai operasional keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya;
- 3) Memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan menyajikan laporan secara komparatif;
- 4) Kepada para pengguna laporan tentang indikasi efisiensi, efektifitas dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya; dan
- 5) Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Operasional disusun guna melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga antara Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Operasional mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan penyusunannya.

PERIODE PELAPORAN

Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Operasional tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informasi sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

- 1) Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun; dan
- 2) Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Manfaat suatu Laporan Operasional berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah daerah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu.

STUKTUR LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan, beban, surplus/defisit dari operasi, pos luar biasa, untung/rugi penjualan aset, dan surplus/defisit bersih, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasi secara jelas, dan jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:

- 1) Nama OPD/PPKD/Pemda;
- 2) Cakupan entitas pelaporan;
- 3) Periode yang dicakup;
- 4) Mata uang pelaporan yaitu Rupiah; dan
- 5) Satuan angka yang digunakan.

Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LO;
- 2) Beban;
- 3) Penjualan aset non lancar;
- 4) Pos luar biasa; dan
- 5) Surplus/defisit-LO.

Dalam Laporan Operasional ditambahkan pos, judul, dan sub jumlah lainnya apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Operasional secara wajar.

INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Entitas pelaporan menyajikan pendapatan yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Entitas akuntansi/entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan fungsi serta klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Catatan atas Laporan Keuangan.

Klasifikasi pendapatan menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama, yaitu berdasarkan jenis.

Entitas pelaporan dapat menyajikan rekonsiliasi antara Surplus/defisit dari Operasi menurut Laporan Operasional dengan Surplus/defisit-Anggaran menurut Laporan Realisasi Anggaran, beserta penyebab terjadinya perbedaan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

AKUNTANSI PENDAPATAN - LO

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- 1) Pendapatan diperoleh; dan
- 2) Pendapatan direalisasi atau dapat direalisasi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbul hak untuk menagih.

Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbul hak untuk menagih.

Pendapatan-LO diakui pada saat direalisasi jika kas telah diterima oleh pemerintah di rekening kas umum daerah.

Pendapatan-LO diakui pada saat dapat direalisasi jika kemungkinan besar kas akan diterima oleh pemerintah, dapat diukur secara andal, dan kemungkinan besar potensi ekonomi akan mengalir masuk ke rekening kas umum daerah.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.

Klasifikasi menurut sumber pendapatan dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

AKUNTANSI BEBAN - LO

Beban diakui pada saat:

- 1) Timbulnya kewajiban;
- 2) Terjadinya konsumsi aset; dan
- 3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.

Konsumsi aset adalah saat pengeluaran dari Kas Umum Daerah kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau penggunaan aset dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya pada saat pemerintah membayar gaji pegawai dan pemeliharaan gedung kantor.

Pengeluaran uang dapat dilakukan melalui bendahara umum daerah atau melalui bendahara pengeluaran. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran diakui sebagai beban pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh bendahara umum daerah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa adalah penyusutan dan amortisasi.

Dalam hal layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.

Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban bunga, beban subsidi, beban bantuan sosial, dan beban tak terduga.

Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*).

Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Sulus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Sulus/Défisit dari Kegiatan Operasional.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

POS LUAR BIASA

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah surplus/defisit dari Kegiatan Operasional.

Pos luar biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 1) Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
- 2) Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
- 3) Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

SURPLUS/DEFISIT -LO

Surplus/Defisit-LO adalah selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

TRANSAKSI PENDAPATAN-LO DAN BEBAN BERBENTUK BARANG/JASA

Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang dan jasa dapat dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban.

Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

i. Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Kampar dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang lancar merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam 1 (satu) periode akuntansi.

Piutang tidak lancar merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat direalisasikan menjadi kas dalam kurun lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

KLASIFIKASI

1) Piutang diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a) Piutang lancar, yaitu piutang yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan; dan
- b) Piutang tidak lancar (piutang jangka panjang), yaitu piutang yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan.

2) Piutang antara lain terdiri dari :

- a) Piutang Pajak;
- b) Piutang Retribusi;
- c) Piutang PAD Lainnya;
- d) Piutang Dana Bagi Hasil;
- e) Piutang Dana Alokasi Umum;
- f) Piutang Dana Alokasi Khusus;
- g) Piutang Dana Penyesuaian; dan
- h) Piutang Lain-Lain.

Pengakuan Piutang

Secara garis besar, pengakuan piutang terjadi pada akhir periode ketika akan disusun Neraca dan diakui sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang.

Untuk periode berikutnya, perlakuan untuk piutang pajak/retribusi bisa melalui mekanisme pembiayaan atau mekanisme pengakuan pendapatan tunggakan.

Perlakuan untuk piutang dari pemberian pinjaman kepada pemda/institusi lain diakui pada saat terjadinya, untuk periode berikutnya melalui mekanisme pembiayaan.

Pengukuran Piutang

Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG PAJAK

Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak kabupaten sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Piutang atas pajak kabupaten timbul karena tunggakan pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak. Tunggakan tersebut terjadi karena perbedaan penetapan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dengan jumlah yang telah dilunasi oleh wajib pajak. Perbedaan yang terjadi antara OPD dengan jumlah yang dilunasi oleh wajib pajak secara keseluruhan.

Masa pajak yaitu jangka waktu yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang melewati akhir periode pelaporan.

Kekurangan pembayaran pajak oleh wajib pajak yang sampai dengan akhir tahun belum dilunasi oleh wajib pajak. Dalam hal Kepala Badan Pendapatan Daerah telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), besarnya Piutang Pajak yang diakui adalah sebesar kekurangan pembayaran pokok pajak, sedangkan pendapatan dari sanksi administratif masuk dalam Pendapatan Denda Pajak.

KOMPONEN PIUTANG PAJAK

Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Jenis pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari:

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
- 7) Pajak Parkir; dan
- 8) Pajak lain-lain.

PENGAKUAN

Pada dasarnya Piutang Pajak diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih Piutang Pajak, atau pada saat terbit surat keputusan tentang Piutang Pajak.

- 1) Piutang Pajak diakui ketika wajib pajak belum membayar pajak yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kampar sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan.
- 2) Nilai piutang pajak yang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam SKP yang hingga akhir periode belum dibayar/dilunasi. Hal ini bisa didapat dengan melakukan inventarisasi SKP yang hingga akhir periode belum dibayar oleh WP.
- 3) Piutang Pajak diakui pada akhir periode pelaporan keuangan (tanggal 31 Desember) ketika akan disusun neraca dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Pendapatan Daerah mencatat Piutang Pajak sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

- 4) Perhitungan Piutang Pajak dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) pada akhir tahun yang belum dibayar/dilunasi.
- 5) Pada awal periode akuntansi berikutnya dilakukan jurnal balik untuk mengembalikan akun-akun Piutang Pajak menjadi nol.

PENGUKURAN

Piutang Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah dan/atau SKPDKB serta dokumen lain sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Piutang Pajak disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai nominal dari Pajak yang belum dilunasi sampai dengan tanggal 31 Desember dikurangi dengan penyisihan piutang tidak tertagih.

Pemberhentian pengakuan piutang atau penghapusan piutang dilakukan ketika terjadi pelunasan atau penghapusbukuan (*write down*). Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*. Penghapusbukuan Piutang Pajak dapat dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar tentang penghapusan Piutang Pajak. Administrasi tentang penghapusbukuan yang tidak menghapus penagihan dilakukan secara *ekstra comptabel*, bukan dalam pencatatan akuntansi.

Untuk menjaga prinsip *net realizable value* dalam pengakuan Piutang Pajak, mekanisme penghapusbukuan menggunakan 2 (dua) metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung.

PENGHAPUSBUKUAN (WRITE DOWN) PIUTANG PAJAK

Penghapusbukuan Piutang Pajak ditujukan untuk menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat, dan kemungkinan berdampak pula pada potensi besaran pendapatan yang akan diterima dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Penghapusbukuan ini tidak berarti menghapus hak tagih atas Piutang Pajak. Atas penghapusbukuan Piutang Pajak ini perlu dicatat secara *ekstra comptable* untuk mengadministrasikan Piutang Pajak yang masih harus ditagih. Sebaliknya, penghapustagihan atas Piutang Pajak secara otomatis akan terjadi penghapusbukuan.

Penghapusbukuan dilakukan pada pencatatan *ekstra comptable*, bukan pada neraca mengingat pengakuan piutang hanya dilakukan pada saat penyusunan neraca dan dilakukan jurnal balik (*reversing entry*) pada awal periode berikutnya.

Terdapat dua (2) metode untuk menghapus buku Piutang Pajak, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung.

Metode Langsung

Untuk metode penghapusan langsung, kerugian piutang baru diakui pada saat piutang dihapuskan, dan penghapusan piutang baru dilakukan bila terdapat bukti-bukti yang jelas. Metode ini digunakan jika kerugian sebagai akibat tidak tertagihnya piutang tidak material, atau probabilitas terjadinya piutang tidak tertagih sangat kecil.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung adalah metode penghapusan piutang dengan cara membentuk penyisihan piutang tidak tertagih. Metode tidak langsung ini digunakan ketika jumlah kerugian piutang yang biasa terjadi memiliki nilai yang cukup besar dan material. Piutang PKB diakui sebesar *net realizable value*-nya. Agar nilai piutang PKB menyajikan nilai yang sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka penyajian piutang dalam neraca harus disesuaikan dengan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang.

Penetapan periode piutang yang menunggak didasarkan atas tanggal penetapan, dengan kata lain tanggal diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Akuntansi Piutang Pajak

Pencatatan Piutang Pajak dalam neraca masuk dalam kategori jurnal penyesuaian dengan menggunakan format jurnal umum. Dasar pencatatan piutang ke dalam jurnal adalah bukti memorial yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang valid. bukti memorial dibuat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar tentang penetapan piutang pajak beserta perhitungan penyisihan piutang tak tertagih.

Pencatatan atas Timbulnya Piutang Pajak.

Berikut ini diberikan *ilustrasi* pencatatan timbulnya piutang pajak berdasarkan karakteristik pemungutannya.

1) Pencatatan Timbulnya Piutang berdasarkan SKPD

Pada tanggal 31 Desember 2021 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar telah melakukan pendataan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) mengenai jumlah pajak hotel yang belum membayar pajak hingga jatuh tempo pembayaran. Total pajak hotel terutang adalah sebesar Rp22.500.000,00. Berdasarkan Surat Ketetapan Piutang Pajak yang diterbitkan, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar menerbitkan bukti memorial untuk mengakui besaran piutang pajak hotel.

2) Pencatatan Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Pajak Hotel dan Penghapusan Piutang.

Melanjutkan contoh pada nomor 1) diatas, pada neraca per 31 Desember 201 diketahui saldo penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp3.500.000,00. Pada bulan November 201 telah terbit Keputusan Bupati Kampar tentang Penghapusan Piutang sebesar Rp 1.500.000,00. Jurnal untuk mencatat pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada 31 Desember 201 adalah:

3) Pencatatan Timbulnya Piutang berdasarkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

Pada tanggal 31 Desember 2021 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atas pajak restoran sebesar Rp 18.500.000,00. Berdasarkan Surat Ketetapan Piutang Pajak yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar telah menerbitkan bukti memorial untuk mengakui besaran piutang pajak restoran.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Pengungkapan di CaLK

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

1) Pengungkapan di CaLK Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

Informasi mengenai Piutang Pajak yang dituangkan dalam CaLK Badan Daerah Kabupaten Kampar minimal sebagai berikut:

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang pajak;
- b) Rincian jenis piutang pajak hotel dan piutang pajak restoran berdasarkan jenis/golongan beserta saldo masing-masing piutang selama 2 tahun terakhir; dan
- c) Piutang pajak yang telah dihapuskan beserta nilainya.

2) Pengungkapan di CaLK Pemerintah Kabupaten Kampar

Informasi mengenai Piutang Pajak yang dituangkan dalam CaLK Pemerintah Kabupaten Kampar minimal sebagai berikut:

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang pajak;
- b) Rincian jenis piutang pajak beserta saldo masing-masing piutang pajak selama 2 tahun terakhir;
- c) Kebijakan penyisihan piutang pajak beserta nilainya; dan
- d) Piutang pajak yang telah dihapuskan beserta nilainya.

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Piutang Pajak dihapuskan bila telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati Kampar tentang Penghapusan Piutang Pajak. Piutang Pajak dihapuskan ketika hak untuk menagih telah kedaluwarsa. Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, hak menagih piutang pajak dinyatakan kedaluwarsa bila telah melampaui waktu 5 tahun sejak terutangnya pajak atau sejak terbitnya Surat Teguran dan Surat Paksa. Ketentuan lebih lanjut tentang sistem dan prosedur penghapusan piutang pajak daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang sistem dan prosedur penghapusan piutang daerah.

Setiap tahun, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar menginventarisir Piutang Pajak yang telah melampaui 5 tahun. Berdasarkan jumlah tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar menyusun pengajuan penghapusan piutang pajak yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Kampar. Setelah terbit Surat Keputusan tentang Penghapusan Piutang Pajak, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar mencatat penghapusan tersebut dalam *ekstra comptabel* untuk mengurangi saldo piutang pajak.

Penghapusan piutang pajak yang dilakukan sebelum masa kedaluwarsa ditetapkan dengan mengacu pada kriteria yang telah digariskan dalam Peraturan Bupati Kampar tentang penghapusan piutang pajak. Lebih lanjut Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar membuat Keputusan tentang kriteria penghapusan piutang sebelum batas kedaluwarsa.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG RETRIBUSI

Retribusi dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Kampar timbul karena pemberian ijin atau jasa kepada orang pribadi atau badan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

KOMPONEN PIUTANG RETRIBUSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, retribusi dikelompokkan berdasarkan obyeknya, yaitu:

- 1) Retribusi Jasa Umum;
- 2) Retribusi Jasa Usaha; dan
- 3) Retribusi Perijinan Tertentu.

Piutang retribusi timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi. SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Selanjutnya jika sampai tanggal laporan keuangan ada jumlah retribusi yang belum dilunasi, maka akan diterbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan penagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Nilai yang dilaporkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam STRD.

DEFINISI RETRIBUSI

Berikut ini disajikan definisi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu. Definisi tentang jenis-jenis retribusi secara lebih spesifik dijelaskan dalam peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah.

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dikenakan atas jasa umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Kabupaten Kampar untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi yang dikenakan atas jasa usaha yaitu pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- 1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- 2) Pelayanan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Retribusi Perijinan Tertentu adalah retribusi atas pelayanan perizinan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

PENGAKUAN

Pada dasarnya piutang retribusi diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih pendapatan retribusi, atau pada saat terbit surat keputusan tentang piutang retribusi.

Piutang retribusi diakui ketika wajib pajak belum membayar retribusi yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kampar sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan.

Piutang retribusi diakui berdasarkan hasil inventarisasi Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang disetarakan dengan SKRD yang belum dilunasi hingga tanggal 31 Desember.

Piutang retribusi diakui pada akhir periode pelaporan keuangan ketika akan disusun neraca dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) mencatat piutang retribusi sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang yang diterbitkan oleh Kepala OPD.

Pada awal periode akuntansi berikutnya dilakukan jurnal balik untuk mengembalikan akun-akun Piutang retribusi menjadi nol.

PENGUKURAN

Piutang retribusi diakui sebesar nilai nominal dari obyek retribusi yang belum dilunasi pada tanggal 31 Desember.

Piutang retribusi dalam valuta asing disajikan dalam neraca berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember.

Pemberhentian pengakuan piutang retribusi atau penghapusan piutang retribusi dilakukan ketika terjadi pelunasan atau penghapusbukuan (*write down*). Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Penghapusbukuan piutang pajak dapat dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar tentang penghapusan piutang retribusi. Mekanisme pencatatan penghapusbukuan dilakukan dalam *ekstra comptabel*, bukan dalam pencatatan akuntansi.

Penghapusan piutang retribusi menggunakan metode langsung.

PENGHAPUSBUKUAN

Penghapusbukuan Piutang Retribusi ditujukan untuk menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat, dan kemungkinan berdampak pula pada potensi besaran pendapatan yang akan diterima dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Penghapusbukuan ini tidak berarti menghapus hak tagih atas piutang retribusi. Atas penghapusbukuan piutang retribusi ini perlu dicatat secara *ekstra comptabel* untuk mengadministrasikan piutang retribusi yang masih harus ditagih. Sebaliknya, penghapustagihan atas piutang retribusi secara otomatis akan terjadi penghapusbukuan.

Penghapusbukuan dilakukan pada pencatatan *ekstra comptabel*, bukan pada neraca mengingat pengakuan piutang hanya dilakukan pada saat penyusunan neraca dan dilakukan jurnal balik (*reversing entry*) pada awal periode berikutnya. Untuk piutang retribusi, metode yang digunakan untuk menghapus buku piutang menggunakan metode langsung, yaitu kerugian piutang retribusi baru diakui pada saat piutang dihapuskan dan penghapusan



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

piutang baru dilakukan bila terdapat bukti-bukti yang jelas. Metode ini digunakan jika kerugian sebagai akibat tidak tertagihnya piutang tidak material, atau probabilitas terjadinya piutang tidak tertagih sangat kecil.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Akuntansi Piutang Retribusi

Pencatatan piutang retribusi dalam neraca masuk dalam kategori jurnal penyesuaian dengan menggunakan format jurnal umum. Dasar pencatatan piutang retribusi ke dalam jurnal adalah bukti memorial yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang valid. Berikut ini diilustrasikan pencatatan piutang retribusi.

Pencatatan atas Timbulnya Piutang Retribusi

Pada tanggal 31 Desember 2021 Dinas Tenaga Kerja telah menginventarisasi Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) dan menemukan bahwa terdapat retribusi ijin peRpanjangan kerja sebesar Rp25.500.000,00 yang belum dilunasi. Berdasarkan Surat Ketetapan Piutang Retribusi yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas Tenaga Kerja menerbitkan bukti memorial sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal.

Penyajian Piutang Retribusi di Neraca

Mayoritas piutang retribusi memiliki jangka waktu pembayaran maksimal 12 bulan, oleh karena itu piutang retribusi yang timbul akibat penunggakan pembayaran oleh wajib bayar diklasifikasikan ke dalam aset lancar. Piutang retribusi yang ditampilkan dalam neraca adalah tagihan retribusi yang harus dibayar oleh wajib bayar pada periode berikutnya. Penyajian piutang retribusi di neraca disajikan secara bruto TANPA diikuti dengan penyisihan piutang tidak tertagih mengingat penghapusan piutang retribusi menggunakan metode langsung.

Pengungkapan di CaLK

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

1) Pengungkapan di CaLK OPD

Informasi mengenai piutang retribusi yang dituangkan dalam CaLK OPD minimal sebagai berikut:

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang retribusi;
- b) Rincian jenis piutang retribusi berdasarkan obyek retribusinya beserta saldo masing-masing obyek retribusi selama 2 tahun terakhir; dan
- c) Piutang retribusi yang telah dihapuskan beserta nilainya.

2) Pengungkapan di CaLK Pemerintah Kabupaten Kampar

Informasi mengenai piutang retribusi yang dituangkan dalam CaLK Pemerintah Kabupaten Kampar minimal sebagai berikut:

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang retribusi;



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

- b) Rincian jenis piutang retribusi beserta saldo masing-masing Piutang Pajak selama 2 tahun terakhir; dan
- c) Piutang retribusi yang telah dihapuskan beserta nilainya.

Penghapusan Piutang Retribusi

Piutang retribusi dihapuskan bila telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang retribusi. Piutang retribusi dihapuskan ketika hak untuk menagih telah kedaluwarsa. Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, hak menagih piutang retribusi dinyatakan kedaluwarsa bila telah melampaui waktu 3 tahun sejak terutangnya retribusi atau sejak terbitnya Surat teguran. Ketentuan lebih lanjut tentang sistem dan prosedur penghapusan piutang retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang sistem dan prosedur penghapusan piutang daerah.

Setiap tahun, OPD menginventarisir Piutang Retribusi yang telah melampaui 3 tahun. Berdasarkan jumlah tersebut, Kepala OPD mengajukan penghapusan piutang retribusi yang ditujukan kepada Bupati Kampar. Setelah terbit Surat Keputusan tentang Penghapusan Piutang Retribusi, maka PPK-SKPD mencatat penghapusan tersebut dalam *ekstra comptabel* untuk mengurangi saldo piutang retribusi.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG PENDAPATAN ASLI DAERAH LAINNYA

Piutang Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar juga bersumber dari pendapatan asli daerah selain pajak dan retribusi. Pendapatan asli daerah selain pajak dan retribusi bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dasar hukum atas pemungutan pendapatan ini adalah Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar. Pada umumnya piutang ini timbul karena perikatan antara Pemerintah Kabupaten Kampar dengan pihak ketiga.

KOMPONEN PIUTANG PENDAPATAN ASLI DAERAH LAINNYA

Piutang pendapatan asli daerah lainnya bersumber dari 2 kategori pendapatan asli daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, yaitu:

- 1) Piutang dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Piutang yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah piutang dividen.
- 2) Piutang dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, terdiri dari:
 - a) Piutang Hasil Penjualan Aset Milik Daerah;
 - b) Piutang Tuntutan Ganti Rugi;
 - c) Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - d) Piutang Pendapatan Denda Pajak;
 - e) Piutang Pendapatan Denda Retribusi;
 - f) Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan;
 - g) Piutang Fasilitas Sosial dan Umum;
 - h) Piutang dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

- i) Piutang Sewa;
- j) Piutang dari Angsuran/Cicilan Penjualan;
- k) dll.

DEFINISI

Piutang dividen adalah tagihan atas bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD, BUMN ataupun perusahaan swasta/*joint venture* yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kampar.

Piutang Hasil Penjualan Aset Milik Daerah adalah piutang yang timbul dari penjualan barang milik daerah yang diharapkan dapat diterima pembayarannya dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

Piutang denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan merupakan tagihan atas denda yang dikenakan akibat keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar kepada pihak ketiga. Denda ini dikenakan karena pihak ketiga tidak memenuhi jadwal penyelesaian pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dengan pemberi kerja (Pemerintah Kabupaten Kampar). Termasuk dalam piutang ini adalah keterlambatan atas pembayaran sewa.

Piutang Tuntutan Ganti Rugi adalah piutang yang timbul karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputuskan/ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena adanya kerugian negara/daerah.

Secara umum piutang karena tuntutan ganti rugi dapat dikelompokkan menurut sumber timbulnya tuntutan ganti rugi menurut ketentuan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Piutang yang berasal dari akibat Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Tagihan Ganti Rugi merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya.

- 2) Piutang yang timbul akibat dari Tuntutan Perbendaharaan (TP)

Tuntutan Perbendaharaan dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah. Tuntutan Perbendaharaan ini dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Piutang pendapatan denda pajak merupakan sanksi administratif yang timbul akibat pembayaran pajak oleh wajib pajak melampaui batas waktu yang telah ditetapkan. Ketentuan denda pajak ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Piutang pendapatan denda retribusi merupakan piutang yang timbul akibat keterlambatan pembayaran retribusi oleh wajib bayar. Besarnya denda retribusi ini maksimal sebesar 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Piutang hasil eksekusi atas jaminan merupakan piutang yang timbul akibat tidak diselesaikannya pekerjaan seperti yang telah disepakati dalam kontrak perjanjian pelaksanaan pekerjaan. Pekerjaan fisik umumnya mensyaratkan adanya uang jaminan baik



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

untuk pelaksanaan pekerjaan maupun untuk pemeliharaan. Bila pihak ketiga tidak bisa memenuhi perjanjian yang telah disepakati maka berdasarkan Surat Keputusan Eksekusi yang diterbitkan oleh kepala dinas uang jaminan tersebut disetorkan ke kas daerah dan diakui sebagai pendapatan dari hasil eksekusi atas jaminan.

Piutang fasilitas sosial dan umum merupakan piutang yang timbul akibat penggunaan dan pemanfaatan fasilitas sosial dan umum oleh pihak ketiga atau kelompok masyarakat untuk kegiatan usaha atau pribadi.

Piutang dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan merupakan piutang yang bersumber dari pemberian jasa pendidikan dan pelatihan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar kepada pihak ketiga yang mensyaratkan adanya pembayaran dari pihak ketiga kepada penyelenggara. Pendapatan yang timbul dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ini bisa berasal dari uang pendaftaran/uang masuk, biaya pendidikan dan pelatihan maupun ujian kenaikan tingkat/kelas.

Piutang pendapatan sewa merupakan piutang yang timbul sebagai kontra prestasi atas pemberian fasilitas/jasa yang dilakukan oleh OPD yang ditujukan untuk memanfaatkan barang milik daerah dengan cara menyewakan. Bentuk pemberian fasilitas/jasa ini umumnya berupa penyewaan gedung kantor, rumah dinas maupun alat-alat berat milik Pemerintah Kabupaten Kampar.

Piutang dari angsuran/cicilan penjualan merupakan piutang yang timbul dari penjualan aset milik Pemerintah Kabupaten Kampar yang pembayarannya/penyelesaiannya dilakukan secara mengangsur dalam kurun waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Piutang ini timbul dari penjualan yang pada umumnya berasal dari peristiwa pemindahtanganan barang milik daerah.

PENGAKUAN

Piutang dividen diakui bila telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memutuskan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham namun sampai dengan tanggal 31 Desember belum dividen atau terdapat kekurangan pembayaran dividen. Jadi, piutang dividen diakui berdasarkan hasil keputusan RUPS tentang pembagian laba perusahaan BUMD, BUMN maupun swasta/*joint venture*.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari penjualan, kerjasama dan pemberian fasilitas/jasa dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- 2) Jumlah piutang dapat diukur;
- 3) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- 4) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Pengakuan ini sesuai untuk jenis piutang hasil penjualan aset milik daerah, piutang denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, piutang pendapatan denda retribusi, piutang hasil eksekusi atas jaminan, piutang dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, piutang sewa dan piutang dari angsuran / cicilan penjualan.

Piutang yang diharapkan akan dilunasi dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

diakui sebagai aset lancar, sedangkan piutang yang pelunasannya lebih dari 1 (satu) tahun diakui dan disajikan dalam aset tidak lancar.

Piutang pendapatan denda pajak ditetapkan berdasarkan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak. Wajib pajak dikenakan pajak pada $H + n$ sejak ditetapkan sebagai pajak terutang dan diakui sebesar nominal tarif yang dikenakan pada wajib pajak yang menunggak. Periode penetapan munculnya denda pajak ini mengacu pada peraturan daerah tentang pajak daerah.

Piutang tuntutan ganti rugi diakui bila telah diterbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang menunjukkan bahwa penyelesaian TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TGR dilakukan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

PENGUKURAN

Pada dasarnya, semua piutang pendapatan asli daerah lainnya ini disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Piutang dividen diakui sebesar jumlah lembar saham yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dikalikan dengan nilai dividen per lembar saham yang belum diterima pembayarannya atau kurang pembayarannya hingga tanggal 31 Desember.

Piutang yang timbul karena transaksi penjualan diakui sebesar nilai nominal sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Piutang yang timbul karena pemberian fasilitas/jasa diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran Piutang TGR disesuaikan dengan masa jatuh temponya:

- 1) TGR yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan diakui sebagai aset lancar berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan dan diukur berdasarkan nilai nominal yang harus dilunasi dalam 12 (dua belas) bulan ke depan.
- 2) Piutang TGR yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan dalam aset lainnya dan dinilai sebesar sisa TGR yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Piutang dari angsuran/cicilan penjualan diukur sesuai dengan masa jatuh temponya:

- 1) Angsuran/cicilan penjualan yang jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan ke depan diakui sebagai aset lancar dan dinilai sebesar angsuran/cicilan yang akan dibayarkan dalam satu periode akuntansi berikutnya.
- 2) Angsuran/cicilan penjualan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan kedepan diakui sebagai aset lainnya dan dinilai sebesar saldo angsuran/cicilan penjualan yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

PENGHAPUSBUKUAN

Penghapusbukuan piutang pendapatan asli daerah lainnya ini ditujukan untuk menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat, dan kemungkinan berdampak pula pada potensi besaran pendapatan yang akan diterima dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Penghapusbukuan ini tidak berarti menghapus hak tagih atas piutang. Atas penghapusbukuan piutang ini perlu dicatat secara *ekstra comptabel* untuk mencatat piutang yang masih harus ditagih. Sebaliknya, penghapusan tagihan atas piutang secara otomatis akan terjadi penghapusbukuan.

Penghapusbukuan dilakukan pada pencatatan *ekstra comptabel*, bukan pada neraca mengingat pengakuan piutang hanya dilakukan pada saat penyusunan neraca dan dilakukan jurnal balik (*reversing entry*) pada awal periode berikutnya.

Metode untuk menghapus buku piutang pendapatan asli daerah lainnya ini menggunakan metode langsung tanpa membentuk penyisihan piutang tidak tertagih jika probabilitas tidak tertagihnya piutang sangat kecil dan/atau tidak material. Artinya bahwa kemungkinan tidak tertagihnya piutang tidak dicadangkan terlebih dahulu melainkan langsung dihapuskan berdasarkan Keputusan Bupati Kampar.

Khusus untuk piutang pendapatan denda pajak khususnya untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pengukurannya menggunakan konsep nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Pertimbangannya adalah probabilitas tidak terbayarnya denda pajak ini cukup besar sehingga perlu dilakukan penyisihan piutang tak tertagih agar menghasilkan nilai piutang yang lebih realistis. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Akuntansi Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah

Pencatatan piutang pendapatan asli daerah lainnya yang sah dalam neraca masuk dalam kategori jurnal penyesuaian dengan menggunakan format jurnal umum. Dasar pencatatan piutang ke dalam jurnal adalah bukti memorial yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang valid.

1) Pencatatan atas Timbulnya Piutang

Berikut ini diberikan ilustrasi pencatatan timbulnya piutang dividen yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kampar:

Pada tanggal 25 Juni 2021 telah dilakukan RUPS PT. Bank Riau Kepri. Hasil RUPS memutuskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar berhak mendapatkan dividen tunai sebesar Rp 30.000.000,00. Dividen tersebut dibagikan secara bertahap, tahap pertama dividen akan dibayarkan pada tanggal 15 November 2021 sebesar Rp14.000.000,00 dan sisanya akan dibayarkan pada tanggal 20 Pebruari 2022. Berdasarkan transaksi tersebut, dividen yang menjadi piutang adalah sebesar Rp16.000.000,00.

2) Reklasifikasi Piutang yang Jatuh Tempo dalam 1 (satu) Tahun

Untuk Piutang TGR dan piutang angsuran/cicilan penjualan, setiap akhir periode akuntansi dilakukan reklasifikasi atas piutang yang jatuh tempo dalam kurun waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. Berikut ini diberikan contoh: Pada tanggal 30 Agustus 2021 Pemerintah Kabupaten Kampar telah menjual rumah beserta tanah yang



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

telah dibangun dalam bentuk perumahan. Seluruh unit rumah yang dibangun telah terjual dengan sistem angsuran selama 8 tahun.

- 3) Pencatatan Piutang Pendapatan Denda Pajak dilakukan sebagaimana pencatatan untuk Piutang Pajak. Artinya bahwa penyajian piutang pendapatan denda PKB sebesar *net realizable value*-nya yaitu piutang bruto dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih, sedangkan piutang pendapatan denda BBNKB, PBBKB, air permukaan dan pajak ABT disajikan secara bruto tanpa ada penyisihan piutang tak tertagih.

- 4) Jurnal Balik atas Piutang

Pada awal tahun periode berikutnya dilakukan jurnal balik atas piutang yang telah diakui pada akhir periode sebelumnya. Jurnal balik ini hanya dilakukan pada piutang lancar (piutang yang jatuh tempo kurang dari satu tahun, atau dengan kata lain piutang yang masuk dalam kategori aset lancar). Piutang yang bersifat jangka panjang tidak dilakukan jurnal balik

Penyajian Piutang di Neraca

Piutang pendapatan asli daerah lain yang sah yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan disajikan dalam kelompok aset lancar, sedangkan piutang yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan dalam aset lainnya. Penyajian piutang pendapatan asli daerah lain yang sah di neraca disajikan secara bruto dan diikuti dengan penyisihan piutang tidak tertagih agar menghasilkan *net realizable value*.

Pengungkapan di CaLK

Pengungkapan yang perlu dituangkan dalam CaLK agar memberikan informasi yang memadai adalah:

- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran masing-masing jenis piutang;
- 2) Piutang dividen dirinci sesuai dengan perusahaan yang membagikan dividen;
- 3) Piutang denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, TGR, piutang hasil eksekusi atas jaminan, piutang dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, piutang sewa dan piutang dari angsuran / cicilan penjualan dirinci berdasarkan nama debiturnya;
- 4) Menjelaskan tindakan yang telah dilakukan dalam rangka melakukan penagihan piutang; dan
- 5) Piutang yang telah dihapuskan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG TRANSFER

PSAP Nomor 1 menyebutkan bahwa piutang transfer adalah "hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan". Berdasarkan pengertian tersebut, piutang transfer dapat timbul sebagai akibat perbedaan waktu antara timbulnya hak tagih dan saat dilaksanakannya pembayaran melalui transfer. Jika pada saat penyusunan laporan keuangan suatu transfer yang seharusnya sudah dibayarkan kepada suatu entitas pelaporan oleh entitas pelaporan yang lain, maka entitas pelaporan tersebut akan mencatat timbulnya hak untuk menagih atau piutang transfer. Dalam taksonomi pemerintah daerah, piutang transfer ini utamanya bersumber dari dana perimbangan.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

KOMPONEN PIUTANG TRANSFER

Sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, transfer oleh pemerintah pusat ke Pemerintah Kabupaten Kampar terdiri dari:

- 1) Piutang Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;
- 2) Piutang Bagi Hasil Pajak;
- 3) Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak;
- 4) Piutang Dana Alokasi Umum;
- 5) Piutang Dana Alokasi Khusus; dan
- 6) Piutang Dana Penyesuaian.

DEFINISI

Dana bagi hasil pajak/bukan pajak adalah dana perimbangan yang merupakan alokasi yang diterima Pemerintah Kabupaten Kampar dari bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.

PENGAKUAN

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) pajak/bukan pajak utamanya bersumber dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Kabupaten Kampar. Dalam pelaksanaannya, DBH ditransfer berdasarkan realisasi penerimaan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

Piutang DBH dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak Pemerintah Kabupaten Kampar yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH.

Piutang DAU merupakan dana dengan kepastian penerimaan Pemerintah Kabupaten Kampar yang paling tinggi. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menetapkan bahwa jumlah keseluruhan DAU sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN yang kemudian dialokasikan untuk masing-masing pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan pencairan alokasi DAU tersebut, Pemerintah Kabupaten Kampar menerima 1/12 (satu per dua belas) setiap bulan dari total alokasi DAU untuk Pemerintah Kabupaten Kampar.

Pada akhir tahun anggaran apabila masih ada jumlah DAU yang belum ditransfer ke rekening kas daerah, yaitu sebesar perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran, maka jumlah perbedaan tersebut dicatat sebagai piutang DAU apabila pemerintah pusat mengakuinya



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

dan menerbitkan dokumen keputusan DAU yang terutang.

Piutang DAK timbul ketika Pemerintah Kabupaten Kampar telah mengirimkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh pemerintah pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya namun Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Kampar adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh pemerintah pusat.

Pengakuan piutang dana penyesuaian disesuaikan dengan mekanisme penyaluran dana tersebut dari pemerintah pusat. Bila pencairannya dilakukan secara bertahap tanpa ada persyaratan tertentu, maka sisa dana yang belum ditransfer akan diakui sebagai piutang dana penyesuaian. Apabila dalam pencairan dana diperlukan persyaratan tertentu, maka piutang dana penyesuaian diakui jika persyaratan sudah dipenuhi namun belum dilaksanakan pembayarannya oleh pemerintah pusat.

PENGUKURAN

Piutang dana bagi hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.

- 1) Piutang DAU dan dana penyesuaian dinilai sebesar jumlah yang belum diterima dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari pemerintah pusat.
- 2) Piutang DAK disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh pemerintah pusat.

PENGHAPUS BUKUAN

Penghapus bukuan piutang transfer ini ditujukan untuk menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat, dan kemungkinan berdampak pula pada potensi besaran pendapatan yang akan diterima dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Penghapus bukuan ini tidak berarti menghapus hak tagih atas piutang. Atas penghapus bukuan piutang ini perlu dicatat secara *ekstra comptabel* untuk mencatat piutang yang masih harus ditagih. Sebaliknya, penghapus tagihan atas piutang secara otomatis akan terjadi penghapus bukuan.

Penghapus bukuan dilakukan pada pencatatan *ekstra comptabel*, bukan pada neraca mengingat pengakuan piutang hanya dilakukan pada saat penyusunan neraca dan dilakukan jurnal balik (*reversing entry*) pada awal periode berikutnya.

Metode untuk menghapus buku piutang transfer ini menggunakan metode langsung. Untuk metode penghapusan langsung, kerugian piutang baru diakui pada waktu piutang dihapuskan dan penghapusan piutang baru dilakukan bila terdapat bukti-bukti yang jelas. Metode ini digunakan jika kerugian sebagai akibat tidak tertagihnya piutang tidak material, atau probabilitas terjadinya piutang tidak tertagih sangat kecil.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Akuntansi Piutang Transfer

Dasar pencatatan ke dalam jurnal adalah bukti memorial yang diterbitkan oleh PPKD.

Penyajian di Neraca

Penyajian dalam neraca untuk piutang transfer tidak memasukkan penyisihan piutang tidak tertagih karena metode penghapusan piutang yang dilakukan adalah metode langsung.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Pengungkapan di CaLK

Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang transfer harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi yang dimaksudkan adalah :

- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- 2) Rincian jenis piutang dan saldonya selama 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
- 3) Penjelasan atas penyelesaian piutang.

PROSEDUR PENGHAPUSAN PIUTANG

Dalam pengelolaan piutang dimungkinkan adanya penghapusan, penghapusan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Tujuan penghapusan piutang adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat.

Piutang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak. Penghapusan bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih. Karena upaya penagihan masih tetap dilakukan, maka atas piutang yang telah dihapus secara bersyarat ini masih dicatat secara *ekstra comptable*. Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih.

Prosedur penghapusan piutang merupakan uraian pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari :

- 1) Fungsi/pihak yang terkait;
- 2) Dokumen yang digunakan;
- 3) Catatan yang digunakan; dan
- 4) Deskripsi Prosedur.

FUNGSI/PIHAK YANG TERKAIT

Fungsi/pihak yang terkait dalam prosedur penghapusan piutang adalah :

- 1) Fungsi Pengelola Piutang pada OPD terkait
 - a) Membuat daftar umur piutang untuk piutang umum;
 - b) Membuat taksiran kerugian piutang sesuai dengan kebijakan akuntansi piutang;
 - c) Mengusulkan piutang untuk ditetapkan menjadi piutang tak tertagih; dan
 - d) Mengadministrasikan dokumen piutang.
- 2) PPK-SKPD
 - a) Memverifikasi usulan penghapusan piutang; dan
 - b) Bertugas membuat draft Surat Usulan Penghapusan Piutang.
- 3) Kepala OPD
 - a) Menetapkan piutang tak tertagih; dan
 - b) Mengusulkan piutang tak tertagih untuk dihapus.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

- 4) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - a) Membentuk Tim Penghapusan Piutang yang terdiri dari:
 - (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - (2) Biro Keuangan;
 - (3) Inspektorat Kabupaten Kampar; dan
 - (4) Biro Hukum Sekretariat Daerah .
 - b) Melakukan analisa piutang tak tertagih untuk dihapus; dan
 - c) Menyampaikan hasil analisa kepada Bupati untuk ditetapkan.

DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen yang digunakan dalam prosedur penghapusan piutang adalah :

- 1) Surat usulan penghapusan piutang; dan
- 2) Surat keputusan Bupati tentang penghapusan piutang.

CATATAN YANG DIGUNAKAN

Catatan yang digunakan dalam prosedur penghapusan piutang adalah :

- 1) Daftar Umur Piutang
Merupakan daftar yang menunjukkan pengelompokan piutang yang menunggak berdasarkan jangka waktu tertentu.
- 2) Daftar piutang tak tertagih
Merupakan daftar yang menunjukkan jumlah piutang yang tak tertagih.
- 3) Daftar Piutang yang dihapus
Merupakan daftar yang menunjukkan jumlah piutang yang dihapus.

DESKRIPSI PROSEDUR

Deskripsi Prosedur Penghapusan Secara Bersyarat.

Prosedur penghapusan piutang secara bersyarat adalah sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan data terkait dengan penanggung utang, fungsi pengelola piutang menentukan besarnya piutang tak tertagih dengan membuat daftar piutang tak tertagih yang disertai dengan Berita Acara Penagihan.
- 2) Daftar Piutang Tak Tertagih disampaikan kepada Kepala OPD melalui PPK-SKPD. Sebelum disampaikan kepada Kepala OPD, Daftar Piutang Tak Tertagih terlebih dahulu diverifikasi oleh fungsi akuntansi di PPK-SKPD.
- 3) Berdasarkan hasil verifikasi, PPK-SKPD menyusun Surat Usulan Penghapusan Piutang dan menyerahkannya kepada Kepala OPD dengan dilampiri Daftar Piutang Tak Tertagih.
- 4) Kepala OPD mengesahkan Daftar Piutang Tak Tertagih dan menandatangani Surat Usulan Penghapusan Piutang.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

- 5) Setelah disahkan, Daftar Piutang Tak Tertagih dilampiri dengan dokumen pendukung beserta alasan penghapusan piutang disampaikan kepada Tim Penghapusan Piutang untuk dianalisis dan diberikan pertimbangan.
- 6) Tim Penghapusan Piutang menganalisis daftar piutang tak tertagih dan membuat draft Surat Keputusan Penghapusan Piutang sebagai dasar penghapusan secara bersyarat.
- 7) Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar menyampaikan draft Surat Keputusan Penghapusan Piutang kepada Bupati untuk disahkan.
- 8) Penghapusan secara bersyarat ditetapkan oleh Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sedangkan untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 9) Dalam hal piutang dinyatakan dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- 10) Berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang, fungsi akuntansi di PPK-SKPD melakukan penjurnalan untuk mengurangi jumlah piutang yang ada di neraca.

Deskripsi Prosedur Penghapusan Secara Mutlak

Prosedur penghapusan piutang secara mutlak adalah sebagai berikut :

- 1) Piutang yang telah dihapus secara bersyarat dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan secara mutlak jika:
 - a) Setelah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau sejak diterbitkannya surat teguran dan/atau surat paksa terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindakan pidana di bidang Pajak Daerah;
 - b) Obyek pajak mengalami rusak berat sehingga tidak mungkin difungsikan lagi;
 - c) Obyek pajak hilang dan telah dilaporkan kepada instansi berwenang;
 - d) Subyek pajak menutup usaha dan/atau subyek pajak meninggal dunia dan tidak diketahui ahli waris/penanggung jawabnya;
 - e) Obyek pajak dilaporkan telah dijual oleh pemilik lama;
 - f) Obyek pajak dengan alamat tidak jelas berdasarkan hasil penelitian setempat/lapangan;
 - g) Obyek pajak yang nomor registrasinya telah dicabut oleh pihak instansi berwenang;
 - h) Setelah lewat waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi atau sejak diterbitkannya surat teguran;
 - i) Obyek retribusi secara nyata tidak lagi dimanfaatkan atau difungsikan oleh subyek retribusi berdasarkan hasil penelitian setempat/lapangan; dan



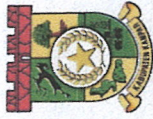
PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

- j) Penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya.
- 2) PPK-SKPD melakukan analisa piutang yang diusulkan untuk dihapuskan, jika memenuhi salah satu persyaratan diatas maka PPK-SKPD akan membuat daftar usulan penghapusan piutang secara mutlak.
 - 3) Daftar usulan penghapusan piutang secara mutlak disampaikan kepada Tim Penghapusan Piutang setelah ditandatangani oleh Kepala OPD.
 - 4) Tim Penghapusan Piutang akan memverifikasi daftar usulan penghapusan piutang secara mutlak. Berdasarkan hasil verifikasi, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar menyampaikan Surat Keputusan Penghapusan Piutang secara mutlak kepada Bupati untuk disahkan.
 - 5) Penghapusan secara mutlak ditetapkan oleh Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sedangkan untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - 6) Dalam hal piutang dinyatakan dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara mutlak adalah nilai yang setara dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
 - 7) Berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang secara mutlak, fungsi piutang di OPD mencatatnya secara *ekstra comptabel* untuk menghapusstaghikan piutang pajak/retribusi/pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

PENUTUP

Kebijakan akuntansi piutang yang dibahas dalam peraturan ini adalah kebijakan akuntansi piutang non BLUD. Penyusunan kebijakan akuntansi piutang ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan yang akuntanbel sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Buletin Teknis SAP Nomor 6 tentang Akuntansi Piutang.

Demikian Kebijakan Akuntansi Piutang Pemerintah Kabupaten Kampar disusun untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sehingga tercipta efisiensi, efektifitas serta tertib administrasi.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

5.1.

PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

5.1.1 Pendapatan

Pendapatan adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022 sebesar Rp2.427.503.585.552,71 atau 97,34% dari target pendapatan sebesar Rp2.493.942.228.582,00 dan mengalami penurunan sebesar -Rp53.389.022.268,05 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp2.480.892.607.820,76 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1 Pendapatan

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Daerah	2.427.503.585.552,71	2.480.892.607.820,76	(53.389.022.268,05)	102,20
Jumlah	2.427.503.585.552,71	2.480.892.607.820,76	(53.389.022.268,05)	102,20

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Pendapatan Asli Daerah	252.925.053.734,00	260.416.048.442,71	102,96	267.671.965.076,34
Pendapatan Transfer	2.241.017.174.848,00	2.165.922.257.436,00	96,65	2.099.315.082.744,42
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	0,00	1.165.279.674,00	100,00	113.905.560.000,00
Jumlah	2.493.942.228.582,00	2.427.503.585.552,71	97,34	2.480.892.607.820,76

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

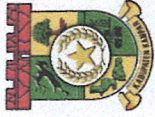
Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2022 sebesar Rp260.416.048.442,71 atau 102,96% dari target pendapatan sebesar Rp252.925.053.734,00 dan mengalami penurunan sebesar -Rp7.255.916.633,63 dibandingkan realisasi Tahun 2021 Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp267.671.965.076,34 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Asli Daerah	260.416.048.442,71	267.671.965.076,34	(7.255.916.633,63)	102,79
Jumlah	260.416.048.442,71	267.671.965.076,34	(7.255.916.633,63)	102,79

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Pajak Daerah	151.227.920.126,00	142.366.052.600,00	94,14	146.101.632.400,00
Retribusi Daerah	13.385.050.000,00	8.892.742.152,31	66,44	12.847.571.260,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.344.989.367,00	23.550.128.300,00	110,33	27.916.502.794,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	66.967.094.241,00	85.607.125.390,40	127,83	80.806.258.622,34
Jumlah	252.925.053.734,00	260.416.048.442,71	102,96	267.671.965.076,34

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah berdasarkan undang-undang. Pajak Daerah Tahun 2022 sebesar Rp142.366.052.600,00 atau 94,14% dari target pendapatan sebesar Rp151.227.920.126,00 dan mengalami penurunan sebesar - Rp3.735.579.800,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp146.101.632.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.1 Pajak Daerah

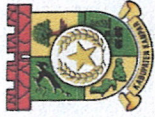
Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenalkan/(Penurunan)	%
Pajak Daerah	142.366.052.600,00	146.101.632.400,00	(3.735.579.800,00)	102,62
Jumlah	142.366.052.600,00	146.101.632.400,00	(3.735.579.800,00)	102,62

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Pajak Hotel	1.512.100.000,00	1.317.838.134,00	87,15	981.625.442,00
Pajak Restoran dan Sejenisnya	6.455.647.500,00	7.547.202.062,00	116,91	5.379.706.122,00
Reklame Papan/Billboard/Videootron/Megatron	953.090.000,00	928.408.797,00	97,41	794.241.798,00
Pajak Penerangan Jalan PLN	73.144.868.351,00	74.031.467.239,00	101,21	68.971.866.938,00
Pajak Parkir	180.500.000,00	107.066.250,00	59,32	91.434.750,00
Pajak Air Tanah	1.649.514.275,00	1.741.199.635,00	105,56	1.302.576.310,00
Pajak Sarang Burung Walet	82.000.000,00	22.840.000,00	27,85	21.183.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10.298.555.901,00	10.716.512.129,00	104,06	4.881.432.469,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	19.951.644.099,00	15.031.858.569,00	75,34	14.891.829.397,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.	37.000.000.000,00	30.921.659.785,00	83,57	48.785.736.174,00
Jumlah	151.227.920.126,00	142.366.052.600,00	94,14	146.101.632.400,00

Pemungutan Pajak Daerah berdasarkan:

- Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;
- Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
- Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 06 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
- Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan;
- Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan;
- Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet;
- Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;
- Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

- Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame; dan
- Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

5.1.1.1.1.1 Pajak Hotel

Realisasi Pajak Hotel Tahun 2022 sebesar Rp1.317.838.134,00 atau 87,15% dari target pendapatan sebesar Rp1.512.100.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp336.212.692,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp981.625.442,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.1.1.1 Pajak Hotel

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pajak Hotel	1.317.838.134,00	981.625.442,00	336.212.692,00	74,49
Jumlah	1.317.838.134,00	981.625.442,00	336.212.692,00	74,49

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Pajak Hotel	1.512.100.000,00	1.317.838.134,00	87,15	981.625.442,00
Jumlah	1.512.100.000,00	1.317.838.134,00	87,15	981.625.442,00

Kenaikan Realisasi Pajak Hotel pada Tahun 2022 disebabkan karena Bapenda aktif turun langsung melakukan *monitoring* dan evaluasi penerimaan daerah kepada wajib pajak melalui pembentukan tim percepatan PAD secara terpadu (lintas sektor).

5.1.1.1.1.2 Pajak Restoran

Realisasi Pajak Restoran Tahun 2022 sebesar Rp7.547.202.062,00 atau 116,91% dari target pendapatan sebesar Rp6.455.647.500,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp2.167.495.940,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp5.379.706.122,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.1.1.2 Pajak Restoran

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pajak Restoran dan Sejenisnya	7.547.202.062,00	5.379.706.122,00	2.167.495.940,00	71,28
Jumlah	7.547.202.062,00	5.379.706.122,00	2.167.495.940,00	71,28

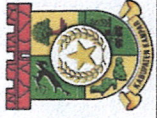
Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Pajak Restoran dan Sejenisnya	6.455.647.500,00	7.547.202.062,00	116,91	5.379.706.122,00
Jumlah	6.455.647.500,00	7.547.202.062,00	116,91	5.379.706.122,00

Kenaikan Realisasi Pajak Restoran pada Tahun 2022 disebabkan karena Bapenda aktif turun langsung melakukan *monitoring* dan evaluasi penerimaan daerah kepada wajib pajak melalui pembentukan tim percepatan PAD secara terpadu (lintas sektor).

5.1.1.1.1.3 Pajak Reklame

Realisasi Pajak Reklame Tahun 2022 sebesar Rp928.408.797,00 atau 97,41% dari target pendapatan sebesar Rp953.090.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp134.166.999,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp794.241.798,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Tabel 5.1.1.1.1.3 Pajak Reklame

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pajak Reklame	928.408.797,00	794.241.798,00	134.166.999,00	85,55
Jumlah	928.408.797,00	794.241.798,00	134.166.999,00	85,55

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	953.090.000,00	928.408.797,00	97,41	794.241.798,00
Jumlah	953.090.000,00	928.408.797,00	97,41	794.241.798,00

Kenaikan Realisasi Pajak Reklame disebabkan karena adanya beberapa objek reklame yang merupakan objek baru serta optimalisasi pengawasan dan penagihan terhadap reklame-reklame yang bersifat insidental.

5.1.1.1.1.4 Pajak Penerangan Jalan

Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2022 sebesar Rp74.031.467.239,00 atau 101,21% dari target pendapatan sebesar Rp73.144.868.351,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp5.059.600.301,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp68.971.866.938,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.1.4 Pajak Penerangan Jalan

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pajak Penerangan Jalan	74.031.467.239,00	68.971.866.938,00	5.059.600.301,00	93,17
Jumlah	74.031.467.239,00	68.971.866.938,00	5.059.600.301,00	93,17

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0,00	0,00	0,00	68.971.866.938,00
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	73.144.868.351,00	74.031.467.239,00	101,21	0,00
Jumlah	73.144.868.351,00	74.031.467.239,00	101,21	68.971.866.938,00

Kenaikan Realisasi Pajak Penerangan Jalan disebabkan karena Tim Percepatan PAD terus melakukan sosialisasi dan pendataan terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Kampar yang menggunakan listrik sebagai sumber tenaga dalam melakukan produksi serta dengan melakukan pendataan terhadap wajib pajak yang berada pada sub urban (perumahan-perumahan yang berada di wilayah perbatasan dengan Kota Pekanbaru).

5.1.1.1.1.5 Pajak Parkir

Realisasi Pajak Parkir Tahun 2022 sebesar Rp107.066.250,00 atau 59,32% dari target pendapatan sebesar Rp180.500.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp15.631.500,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp91.434.750,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.1.5 Pajak Parkir

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pajak Parkir	107.066.250,00	91.434.750,00	15.631.500,00	85,40
Jumlah	107.066.250,00	91.434.750,00	15.631.500,00	85,40



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Pajak Parkir	180.500.000,00	107.066.250,00	59,32	91.434.750,00
Jumlah	180.500.000,00	107.066.250,00	59,32	91.434.750,00

Realisasi Pajak Parkir pada tahun 2022 hanya sebesar 59,32% dari anggaran disebabkan karena terbatasnya objek parkir yang berada di wilayah Kabupaten Kampar, yaitu hanya (Labersa, Boombara dan Ramayana Bangkinang).

5.1.1.1.1.6 Pajak Air Tanah

Realisasi Pajak Air Tanah Tahun 2022 sebesar Rp1.741.199.635,00 atau 105,56% dari target pendapatan sebesar Rp1.649.514.275,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp438.623.325,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp1.302.576.310,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.1.6 Pajak Air Tanah

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pajak Air Tanah	1.741.199.635,00	1.302.576.310,00	438.623.325,00	74,81
Jumlah	1.741.199.635,00	1.302.576.310,00	438.623.325,00	74,81

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Pajak Air Tanah	1.649.514.275,00	1.741.199.635,00	105,56	1.302.576.310,00
Jumlah	1.649.514.275,00	1.741.199.635,00	105,56	1.302.576.310,00

5.1.1.1.1.7 Pajak Sarang Burung Walet

Realisasi Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2022 sebesar Rp22.840.000,00 atau 27,85% dari target pendapatan sebesar Rp82.000.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp1.657.000,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp21.183.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

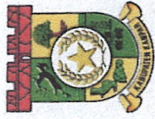
Tabel 5.1.1.1.1.7 Pajak Sarang Burung Walet

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pajak Sarang Burung Walet	22.840.000,00	21.183.000,00	1.657.000,00	92,75
Jumlah	22.840.000,00	21.183.000,00	1.657.000,00	92,75

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Pajak Sarang Burung Walet	82.000.000,00	22.840.000,00	27,85	21.183.000,00
Jumlah	82.000.000,00	22.840.000,00	27,85	21.183.000,00

Realisasi Pajak Sarang Burung Walet tahun 2022 hanya sebesar 27,85% dari target pendapatan disebabkan karena rendahnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam melaporkan omzet, serta masih banyak pengusaha walet yang belum memproduksi sehingga tidak dapat dikenakan pajak. Saat ini, Pemerintah Daerah masih melakukan pola pendekatan secara persuasif. Namun, sehubungan dengan telah dilakukannya penandatanganan MOU antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dengan Kejaksaan Negeri Bangkinang, Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar akan melakukan langkah tegas agar wajib pajak Sarang Burung Walet mau membayar pajak sesuai dengan penghasilan yang sebenarnya dalam rangka optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah termasuk Pajak Sarang Burung Walet.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

5.1.1.1.1.8 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2022 sebesar Rp10.716.512.129,00 atau 104,06% dari target pendapatan sebesar Rp10.298.555.901,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp5.835.079.660,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp4.881.432.469,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.1.8 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10.716.512.129,00	4.881.432.469,00	5.835.079.660,00	45,55
Jumlah	10.716.512.129,00	4.881.432.469,00	5.835.079.660,00	45,55

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Pajak Pasir dan Kerikil	0,00	0,00	0,00	4.881.432.469,00
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	10.298.555.901,00	10.716.512.129,00	104,06	0,00
Jumlah	10.298.555.901,00	10.716.512.129,00	104,06	4.881.432.469,00

5.1.1.1.1.9 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Tahun 2022 sebesar Rp15.031.858.569,00 atau 75,34% dari target pendapatan sebesar Rp19.951.644.099,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp140.029.172,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp14.891.829.397,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.1.9 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	15.031.858.569,00	14.891.829.397,00	140.029.172,00	99,07
Jumlah	15.031.858.569,00	14.891.829.397,00	140.029.172,00	99,07

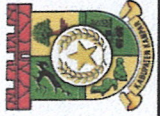
Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Pajak Bumi dan Bangunan	19.951.644.099,00	15.031.858.569,00	75,34	14.891.829.397,00
Jumlah	19.951.644.099,00	15.031.858.569,00	75,34	14.891.829.397,00

Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) terdiri dari: Pelunasan pokok diketahui berjalan sebesar Rp13.135.659.707,00 dan penerimaan Piutang PBBP2 di tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp1.622.714.275,00 serta denda yang diterima pada tahun berjalan sebesar Rp273.484.587,00.

5.1.1.1.1.10 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun 2022 sebesar Rp30.921.659.785,00 atau 83,57% dari target pendapatan sebesar Rp37.000.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar -Rp17.864.076.389,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp48.785.736.174,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Tabel 5.1.1.1.1.10 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenakan/(Penurunan)	%
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	30.921.659.785,00	48.785.736.174,00	(17.864.076.389,00)	157,77
Jumlah	30.921.659.785,00	48.785.736.174,00	(17.864.076.389,00)	157,77

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
BPHTB-Pemindahtan Hak	37.000.000.000,00	30.921.659.785,00	83,57	48.785.736.174,00
Jumlah	37.000.000.000,00	30.921.659.785,00	83,57	48.785.736.174,00

Terjadi penurunan realisasi BPHTB karena ditengah lesunya daya beli masyarakat akan properti, ada beberapa perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan melakukan pengurusan Hak Guna Usaha baru maupun perpanjangan HGU, sehingga terjadi penurunan realisasi BPHTB.

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dasar pungutan retribusi daerah tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum, Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Bupati Kampar Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Perda Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Perbup Kampar Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan Tarif Retribusi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Perda Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum.

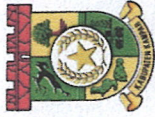
Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2022 sebesar Rp8.892.742.152,31 atau 66,44% dari target pendapatan sebesar Rp13.385.050.000,00 dan mengalami penurunan sebesar - Rp3.954.829.107,69 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp12.847.571.260,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenakan/(Penurunan)	%
Retribusi Daerah	8.892.742.152,31	12.847.571.260,00	(3.954.829.107,69)	144,47
Jumlah	8.892.742.152,31	12.847.571.260,00	(3.954.829.107,69)	144,47

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Retribusi Jasa Umum	3.603.550.000,00	3.920.484.000,00	108,80	3.152.039.933,00
Retribusi Jasa Usaha	1.781.500.000,00	1.674.410.940,00	93,99	1.486.769.327,00
Retribusi Perizinan Tertentu	8.000.000.000,00	3.297.847.212,31	41,22	8.208.762.000,00
Jumlah	13.385.050.000,00	8.892.742.152,31	66,44	12.847.571.260,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum

Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2022 sebesar Rp3.920.484.000,00 atau 108,80% dari target pendapatan sebesar Rp3.603.550.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp768.444.067,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp3.152.039.933,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Retribusi Jasa Umum	3.920.484.000,00	3.152.039.933,00	768.444.067,00	80,40
Jumlah	3.920.484.000,00	3.152.039.933,00	768.444.067,00	80,40

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	248.000.000,00	240.300.000,00	96,90	189.900.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	285.000.000,00	298.250.000,00	104,65	246.585.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	154.000.000,00	76.864.000,00	49,91	126.370.333,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	921.600.000,00	712.626.000,00	77,32	830.598.500,00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	30.000.000,00	35.051.000,00	116,84	10.989.000,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	64.000.000,00	63.340.000,00	98,97	48.575.000,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	600.000.000,00	939.035.000,00	156,51	734.395.000,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.300.950.000,00	1.540.018.000,00	118,38	964.647.100,00
Jumlah	3.603.550.000,00	3.920.484.000,00	108,80	3.152.039.933,00

5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

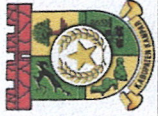
Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2022 sebesar Rp1.674.410.940,00 atau 93,99% dari target pendapatan sebesar Rp1.781.500.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp187.641.613,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp1.486.769.327,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Retribusi Jasa Usaha	1.674.410.940,00	1.486.769.327,00	187.641.613,00	88,79
Jumlah	1.674.410.940,00	1.486.769.327,00	187.641.613,00	88,79

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	927.500.000,00	872.182.940,00	94,04	848.077.327,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,00	0,00	0,00	23.500.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	64.000.000,00	56.650.000,00	88,52	64.500.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	150.000.000,00	167.470.000,00	111,65	96.387.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	640.000.000,00	578.108.000,00	90,33	454.305.000,00
Jumlah	1.781.500.000,00	1.674.410.940,00	93,99	1.486.769.327,00

5.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2022 sebesar Rp3.297.847.212,31 atau 41,22% dari target pendapatan sebesar Rp8.000.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar -Rp4.910.914.787,69 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp8.208.762.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Retribusi Perizinan Tertentu	3.297.847.212,31	8.208.762.000,00	(4.910.914.787,69)	248,91
Jumlah	3.297.847.212,31	8.208.762.000,00	(4.910.914.787,69)	248,91

Dengan rincian sebagai berikut:

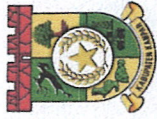
Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	8.000.000.000,00	3.297.847.212,31	41,22	8.208.762.000,00
Jumlah	8.000.000.000,00	3.297.847.212,31	41,22	8.208.762.000,00

Rendahnya Realisasi Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan disebabkan oleh: 1) Kurangnya pengawasan atas bangunan yang tak berizin ; 2) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus izin mendirikan bangunan; 3) Sosialisasi yg dilaksanakan tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat; 4) Kurang pahamiya pelaku usaha/pemohon seperti apa proses permohonan SIMBG, mengingat SIMBG baru diterapkan di Tahun 2022; 5) Proses SIMBG belum selesai pada tahapan di SKPD Teknis; 6) Kelengkapan Dokumen Administrasi dan Teknis yg di Upload pelaku usaha belum lengkap pada Aplikasi SIMBG sehingga permohonan yang terkirim ke PUPR dikembalikan lagi statusnya ke Pemohon; 7) Aplikasi SIMBG merupakan aplikasi yang baru, jadi masih butuh pembelajaran di tingkat SKPD Teknis dan DPMP/TSP, terlebih lagi bagi pelaku usaha atau pemohon; dan 8) Pembayaran Retribusi melalui rekening kas daerah baru bisa dibayarkan setelah melalui perhitungan volume dan nilai retribusi dari Dinas Teknis. Kondisi yang ada saat ini, pemohon tidak langsung membayarkan ketika penetapan rincian perhitungan sudah keluar dari PUPR.

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah yang menjadi deviden bagi pemerintah daerah.

Realisasi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2022 sebesar Rp23.550.128.300,00 atau 110,33% dari target pendapatan sebesar Rp21.344.989.367,00 dan mengalami penurunan sebesar -Rp4.366.374.494,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp27.916.502.794,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Tabel 5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenalkan/(Penurunan)	%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.550.128.300,00	27.916.502.794,00	(4.366.374.494,00)	118,54
Jumlah	23.550.128.300,00	27.916.502.794,00	(4.366.374.494,00)	118,54

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	19.690.256.107,00	21.895.395.040,00	111,20	26.607.519.974,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bumi Siak Pusako)	1.654.733.260,00	1.654.733.260,00	100,00	1.308.982.820,00
Jumlah	21.344.989.367,00	23.550.128.300,00	110,33	27.916.502.794,00

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp23.550.128.300,00 terdiri dari:

- BRK Syariah sebesar Rp21.827.902.698,00 dengan RUPS Tanggal 23 April 2022.
- BPR Syariah Fadhilah, Air Tiris sebesar Rp67.492.342,00 dengan RUPS Tanggal 12 Mei 2022.
- PT Bumi Siak Pusako sebesar Rp1.654.733.260,00 dengan RUPS Tanggal 1 April 2022.

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

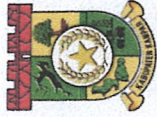
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2022 sebesar Rp85.607.125.390,40 atau 127,83% dari target pendapatan sebesar Rp66.967.094.241,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp4.800.866.768,06 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp80.806.258.622,34 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenalkan/(Penurunan)	%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	85.607.125.390,40	80.806.258.622,34	4.800.866.768,06	94,39
Jumlah	85.607.125.390,40	80.806.258.622,34	4.800.866.768,06	94,39

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	519.332.000,00	714.764.500,00	137,63	0,00
Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	25.000.000,00	100,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Jasa Giro	2.500.000.000,00	1.159.879.263,00	46,40	3.515.032.115,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	298.425.534,81
Pendapatan Bunga	200.000.000,00	328.016.317,00	164,01	550.883.968,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	614.021.956,00	100,00	508.672.917,88
Pendapatan Denda atasKeterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	153.950.099,55	100,00	354.658.215,56
Pendapatan Denda Pajak	0,00	20.987.287,00	100,00	11.381.185,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	202.527.700,00	100,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian	0,00	517.831.580,00	100,00	687.366.424,00
Pendapatan BLUD	63.447.762.241,00	77.541.444.727,87	122,21	71.885.542.611,50
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (EKTP)	0,00	0,00	0,00	175.076.100,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	300.000.000,00	317.601.572,74	105,87	0,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	4.011.100.387,24	100,00	2.821.219.550,79
Jumlah	66.967.094.241,00	85.607.125.390,40	127,83	80.806.258.622,34

5.1.1.1.4.1 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari hasil penjualan tanah, hasil penjualan peralatan dan mesin, hasil penjualan gedung dan bangunan, hasil penjualan jalan, jaringan, dan irigasi, hasil penjualan aset tetap lainnya, hasil penjualan aset lainnya-tagihan jangka panjang, serta hasil penjualan aset lainnya-aset tidak berwujud.

Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2022 sebesar Rp714.764.500,00 atau 137,63% dari target pendapatan sebesar Rp519.332.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp714.764.500,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.4.1 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

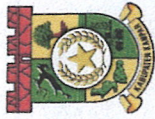
Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	714.764.500,00	0,00	714.764.500,00	0,00
Jumlah	714.764.500,00	0,00	714.764.500,00	0,00

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Hasil Penjualan Alat Angkutan	519.332.000,00	714.764.500,00	137,63	0,00
Jumlah	519.332.000,00	714.764.500,00	137,63	0,00

5.1.1.1.4.2 Hasil Kerja Sama Daerah

Hasil Kerja Sama Daerah digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari hasil kerja sama daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Realisasi Hasil Kerja Sama Daerah Tahun 2022 sebesar Rp25.000.000,00 atau 100,00% dari target pendapatan sebesar Rp0,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp25.000.000,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.4.2 Hasil Kerja Sama Daerah

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Hasil Kerja Sama Daerah	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
Jumlah	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	25.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	0,00	25.000.000,00	100,00	0,00

Pendapatan Hasil Kerja Sama Daerah sebesar Rp25.000.000,00 merupakan pendapatan dari kontribusi PT Makmur Permata Putra atas kerja sama BGS Plaza Bangkinang. Untuk tahun 2021 pendapatan dari kontribusi tersebut dicatat pada Retribusi Pelayanan Pasar.

5.1.1.1.4.3 Jasa Giro

Realisasi Jasa Giro Tahun 2022 sebesar Rp1.159.879.263,00 atau 46,40% dari target pendapatan sebesar Rp2.500.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar -Rp2.355.152.852,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp3.515.032.115,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.4.3 Jasa Giro

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Jasa Giro	1.159.879.263,00	3.515.032.115,00	(2.355.152.852,00)	303,05
Jumlah	1.159.879.263,00	3.515.032.115,00	(2.355.152.852,00)	303,05

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Jasa Giro pada Kas Daerah	2.500.000.000,00	1.159.879.263,00	46,40	3.515.032.115,00
Jumlah	2.500.000.000,00	1.159.879.263,00	46,40	3.515.032.115,00

5.1.1.1.4.4 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Realisasi Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Tahun 2022 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target pendapatan sebesar Rp0,00 dan mengalami penurunan sebesar -Rp296.425.534,61 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp296.425.534,61 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.4.4 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	296.425.534,61	(296.425.534,61)	0,00
Jumlah	0,00	296.425.534,61	(296.425.534,61)	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	296.425.534,61
Jumlah	0,00	0,00	0,00	296.425.534,61

Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Sebesar Rp0,00 dikarenakan adanya reklaas penerimaan pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir pada Tahun 2022.

5.1.1.1.4.5 Pendapatan Bunga

Realisasi Pendapatan Bunga Tahun 2022 sebesar Rp328.016.317,00 atau 164,01% dari target pendapatan sebesar Rp200.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar - Rp222.867.651,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp550.883.968,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.4.5 Pendapatan Bunga

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Bunga	328.016.317,00	550.883.968,00	(222.867.651,00)	167,94
Jumlah	328.016.317,00	550.883.968,00	(222.867.651,00)	167,94

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	200.000.000,00	328.016.317,00	164,01	550.883.968,00
Jumlah	200.000.000,00	328.016.317,00	164,01	550.883.968,00

5.1.1.1.4.6 Penerimaan Komisi , Potongan, atau Bentuk Lain

Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Tahun 2022 sebesar Rp614.021.956,00 atau 100,00% dari target pendapatan sebesar Rp0,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp105.349.038,12 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp508.672.917,88 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.4.6 Penerimaan Komisi , Potongan, atau Bentuk Lain

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	614.021.956,00	508.672.917,88	105.349.038,12	82,84
Jumlah	614.021.956,00	508.672.917,88	105.349.038,12	82,84

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	614.021.956,00	100,00	508.672.917,88
Jumlah	0,00	614.021.956,00	100,00	508.672.917,88



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

5.1.1.1.4.7 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2022 sebesar Rp153.950.099,55 atau 100,00% dari target pendapatan sebesar Rp0,00 dan mengalami penurunan sebesar -Rp200.708.116,01 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp354.658.215,56 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.4.7 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Denda atasKeterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	153.950.099,55	354.658.215,56	(200.708.116,01)	230,37
Jumlah	153.950.099,55	354.658.215,56	(200.708.116,01)	230,37

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Pendapatan Denda atasKeterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	153.950.099,55	100,00	354.658.215,56
Jumlah	0,00	153.950.099,55	100,00	354.658.215,56

5.1.1.1.4.8 Pendapatan Denda Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun 2022 sebesar Rp20.987.287,00 atau 100,00% dari target pendapatan sebesar Rp0,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp9.606.102,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp11.381.185,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.4.8 Pendapatan Denda Pajak Daerah

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Denda Pajak	20.987.287,00	11.381.185,00	9.606.102,00	54,23
Jumlah	20.987.287,00	11.381.185,00	9.606.102,00	54,23

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videootron/Megatron	0,00	20.987.287,00	100,00	11.381.185,00
Jumlah	0,00	20.987.287,00	100,00	11.381.185,00

5.1.1.1.4.9 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan

Realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Tahun 2022 sebesar Rp202.527.700,00 atau 100,00% dari target pendapatan sebesar Rp0,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp202.527.700,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.4.9 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	202.527.700,00	0,00	202.527.700,00	0,00
Jumlah	202.527.700,00	0,00	202.527.700,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	0,00	202.527.700,00	100,00	0,00
Jumlah	0,00	202.527.700,00	100,00	0,00

5.1.1.1.4.10 Pendapatan dari Pengembalian

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2022 sebesar Rp517.831.580,00 atau 100,00% dari target pendapatan sebesar Rp0,00 dan mengalami penurunan sebesar - Rp169.534.844,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp687.366.424,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.4.10 Pendapatan dari Pengembalian

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan dari Pengembalian	517.831.580,00	687.366.424,00	(169.534.844,00)	132,74
Jumlah	517.831.580,00	687.366.424,00	(169.534.844,00)	132,74

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	510.780.780,00	100,00	649.976.537,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	7.050.800,00	100,00	36.425.700,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan	0,00	0,00	0,00	964.187,00
Jumlah	0,00	517.831.580,00	100,00	687.366.424,00

5.1.1.1.4.11 Pendapatan BLUD

Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2022 sebesar Rp77.541.444.727,87 atau 122,21% dari target pendapatan sebesar Rp63.447.762.241,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp5.655.902.116,37 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp71.885.542.611,50 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.4.11 Pendapatan BLUD

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan BLUD	77.541.444.727,87	71.885.542.611,50	5.655.902.116,37	92,71
Jumlah	77.541.444.727,87	71.885.542.611,50	5.655.902.116,37	92,71

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Pendapatan BLUD	63.447.762.241,00	77.541.444.727,87	122,21	71.885.542.611,50
Jumlah	63.447.762.241,00	77.541.444.727,87	122,21	71.885.542.611,50



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

5.1.1.1.4.12 Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Tahun 2022 sebesar Rp0,00 atau ,00% dari target pendapatan sebesar Rp0,00 dan mengalami penurunan sebesar -Rp175.076.100,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp175.076.100,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.4.12 Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	175.076.100,00	(175.076.100,00)	0,00
Jumlah	0,00	175.076.100,00	(175.076.100,00)	0,00

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00	175.076.100,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	175.076.100,00

Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Tahun 2022 sebesar Rp0,00 dikarenakan adanya perubahan status Puskesmas menjadi BLUD sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 060-417/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

5.1.1.1.4.13 Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Tahun 2022 sebesar Rp317.601.572,74 atau 105,87% dari target pendapatan sebesar Rp300.000.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp17.601.572,74 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.4.13 Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

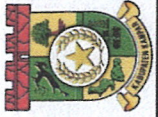
Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	317.601.572,74	0,00	317.601.572,74	0,00
Jumlah	317.601.572,74	2.821.219.550,79	317.601.572,74	888,29

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	300.000.000,00	317.601.572,74	105,87	0,00
Jumlah	300.000.000,00	317.601.572,74	105,87	0,00

5.1.1.1.4.14 Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah

Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun 2022 sebesar Rp4.011.100.387,24 atau 100,00% dari target pendapatan sebesar Rp0,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp1.189.880.836,45 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp2.821.219.550,79 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Tabel 5.1.1.1.4.14 Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah	4.011.100.387,24	2.821.219.550,79	1.189.880.836,45	70,34
Jumlah	4.011.100.387,24	2.821.219.550,79	1.189.880.836,45	70,34

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	4.011.100.387,24	100,00	2.821.219.550,79
Jumlah	0,00	4.011.100.387,24	100,00	2.821.219.550,79

5.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer atau Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN & APBD dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dasar dalam perhitungan pendapatan transfer tersebut berdasarkan Pepres No. 104 Tahun 2021 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022, Pepres No. 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Pepres No. 104 Tahun 2021, dan PMK No. 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022.

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2022 sebesar Rp2.165.922.257.436,00 atau 96,65% dari target pendapatan sebesar Rp2.241.017.174.848,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp66.607.174.691,58 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp2.099.315.082.744,42 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.2. Pendapatan Transfer

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Transfer	2.165.922.257.436,00	2.099.315.082.744,42	66.607.174.691,58	96,92
Jumlah	2.165.922.257.436,00	2.099.315.082.744,42	66.607.174.691,58	96,92

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.071.547.655.653,00	1.985.226.332.189,00	95,83	1.927.277.914.811,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	169.469.519.195,00	180.695.925.247,00	0,00	172.037.167.933,42
Jumlah	2.241.017.174.848,00	2.165.922.257.436,00	96,65	2.099.315.082.744,42

5.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -Dana Perimbangan Tahun 2022 sebesar Rp1.985.226.332.189,00 atau 95,83% dari target pendapatan sebesar Rp2.071.547.655.653,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp57.948.417.378,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp1.927.277.914.811,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Tabel 5.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.985.226.332.189,00	1.927.277.914.811,00	57.948.417.378,00	97,08
Jumlah	1.985.226.332.189,00	1.927.277.914.811,00	57.948.417.378,00	97,08

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Dana Perimbangan	1.850.583.107.653,00	1.764.927.661.865,00	95,37	1.660.245.230.211,00
Dana Insentif Daerah (DID)	5.205.152.000,00	5.205.152.000,00	100,00	50.290.844.000,00
Dana Desa	215.759.396.000,00	215.093.518.324,00	99,69	216.741.840.600,00
Jumlah	2.071.547.655.653,00	1.985.226.332.189,00	95,83	1.927.277.914.811,00

5.1.2.1.1 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Pasal 1 angka 19 Undang-Undang No.33 Tahun 2004). Dana Perimbangan ini menjadi salah satu sumber pendapatan daerah, selain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Lain-Lain, dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, Dana Perimbangan juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-daerah.

Realisasi Dana Bagi Hasil Tahun 2022 sebesar Rp1.764.927.661.865,00 atau 95,37% dari target pendapatan sebesar Rp1.850.583.107.653,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp104.682.431.654,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp1.660.245.230.211,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.1 Dana Perimbangan

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dana Perimbangan	1.764.927.661.865,00	1.660.245.230.211,00	104.682.431.654,00	94,07
Jumlah	1.764.927.661.865,00	1.660.245.230.211,00	104.682.431.654,00	94,07

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	600.650.141.288,00	574.829.219.552,00	95,70	549.759.820.633,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	764.811.348.365,00	763.880.955.365,00	99,88	761.740.206.903,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	133.836.590.000,00	126.047.411.232,00	94,18	126.136.423.620,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	351.285.028.000,00	300.170.075.716,00	85,45	222.609.079.055,00
Jumlah	1.850.583.107.653,00	1.764.927.661.865,00	95,37	1.660.245.230.211,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

5.1.2.1.1.1 Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil yang disingkat DBH merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Realisasi Dana Bagi Hasil Tahun 2022 sebesar Rp574.829.219.552,00 atau 95,70% dari target pendapatan sebesar Rp600.650.141.288,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp25.069.698.919,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp126.136.423.620,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.1.1.1 Dana Bagi Hasil (DBH)

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dana Bagi Hasil (DBH)	574.829.219.552,00	549.759.520.633,00	25.069.698.919,00	95,64
Jumlah	574.829.219.552,00	549.759.520.633,00	25.069.698.919,00	95,64

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	600.650.141.288,00	574.829.219.552,00	95,70	549.759.520.633,00
Jumlah	600.650.141.288,00	574.829.219.552,00	95,70	126.136.423.620,00

5.1.2.1.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Tahun 2022 sebesar Rp763.880.955.365,00 atau 99,88% dari target pendapatan sebesar Rp764.811.348.365,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp2.140.748.462,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp761.740.206.903,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

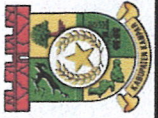
Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dana Alokasi Umum (DAU)	763.880.955.365,00	761.740.206.903,00	2.140.748.462,00	99,72
Jumlah	763.880.955.365,00	126.136.423.620,00	2.140.748.462,00	16,51

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
DAU	764.811.348.365,00	763.880.955.365,00	99,88	761.740.206.903,00
Jumlah	764.811.348.365,00	763.880.955.365,00	99,88	761.740.206.903,00

5.1.2.1.1.3 Dana Alokasi Khusus -Fisik

Dana Alokasi Khusus - Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

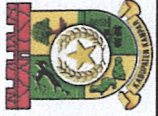
Realisasi Dana Alokasi Khusus - Fisik Tahun 2022 sebesar Rp126.047.411.232,00 atau 94,18% dari target pendapatan sebesar Rp133.836.590.000,00 dan mengalami penurunan sebesar -Rp89.012.388,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp126.136.423.620,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.1.3 Dana Alokasi Khusus - Fisik

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dana Alokasi Khusus - Fisik	126.047.411.232,00	126.136.423.620,00	(89.012.388,00)	100,07
Jumlah	126.047.411.232,00	126.136.423.620,00	(89.012.388,00)	100,07

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.989.439.000,00	1.989.439.000,00	100,00	341.051.500,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	52.274.966.000,00	51.546.977.534,00	98,61	22.815.653.378,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	6.562.819.000,00	6.469.901.200,00	98,58	19.702.577.074,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	396.563.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB - Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	17.670.990.072,00	0,00	17.766.220.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB - Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	0,00	0,00	11.643.777.584,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	39.121.215.000,00	16.169.774.201,00	41,33	3.486.562.755,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB - Afirmasi-PenguatanPrasaranaDasar Puskesmas	0,00	0,00	0,00	2.233.786.226,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB - Reguler-KB	0,00	0,00	0,00	2.798.558.181,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	0,00	0,00	0,00	2.885.771.225,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar	4.417.254.000,00	4.101.620.626,00	92,85	8.147.678.418,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	3.702.382.000,00	3.598.442.459,00	97,19	1.418.987.100,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	15.328.277.000,00	13.846.304.570,00	90,33	15.903.477.600,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	7.034.757.000,00	8.270.124.870,00	117,56	0,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	0,00	0,00	5.510.999.829,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	3.405.481.000,00	2.383.836.700,00	70,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	6.070.460.750,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

DAK Fisik-Bidang Irigasi-Pengusasan	0,00	0,00	0,00	0,00	3.816.419.000,00
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Pengusasan-Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.900.000,00
Jumlah	133.836.590.000,00	126.047.411.232,00	94,18		126.136.423.620,00

5.1.2.1.1.4 Dana Alokasi Khusus -Non Fisik

Dana Alokasi Khusus - Non Fisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.

Realisasi Dana Alokasi Khusus - Non Fisik Tahun 2022 sebesar Rp300.170.075.716,00 atau 85,45% dari target pendapatan sebesar Rp351.285.028.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp77.560.996.661,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp222.609.079.055,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.1.4 Dana Alokasi Khusus -Non Fisik

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	300.170.075.716,00	222.609.079.055,00	77.560.996.661,00	74,16
Jumlah	300.170.075.716,00	222.609.079.055,00	77.560.996.661,00	74,16

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	%
DAK Non Fisik-BOS Reguler	129.128.800.000,00	109.685.700.888,00	84,94	0,00	0,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	165.527.065.000,00	143.565.146.290,00	86,73	175.673.027.000,00	100,00
DAK Non Fisik-Tamtil Guru PNSD	1.212.000.000,00	1.469.518.000,00	121,25	887.232.000,00	73,25
DAK Non Fisik-TKG PNSD	4.393.215.000,00	4.131.815.760,00	94,05	5.820.237.000,00	93,85
DAK Non Fisik-BOP PAUD	10.524.600.000,00	10.214.710.000,00	97,06	9.696.300.000,00	91,25
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.270.700.000,00	2.270.700.000,00	100,00	1.267.979.000,00	55,84
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	28.383.991.000,00	27.443.327.388,00	96,69	26.082.531.305,00	93,29
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	8.386.163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-PK2UKM	404.200.000,00	397.200.000,00	98,27	387.161.750,00	95,78
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	1.750.812.000,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	0,00	0,00	0,00	1.043.799.000,00	0,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	393.394.000,00	366.701.750,00	93,21	0,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	451.800.000,00	444.252.240,00	98,33	0,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	209.100.000,00	181.003.600,00	86,56	0,00	0,00
Jumlah	351.285.028.000,00	300.170.075.716,00	85,45	222.609.079.055,00	74,16



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

5.1.2.2.1 Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria atau kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Realisasi Dana Insentif Daerah Tahun 2022 sebesar Rp5.205.152.000,00 atau 100,00% dari target pendapatan sebesar Rp5.205.152.000,00 dan mengalami penurunan sebesar - Rp45.085.692.000,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp50.290.844.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.2.1 Dana Insentif Daerah

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dana Insentif Daerah	5.205.152.000,00	50.290.844.000,00	(45.085.692.000,00)	966,17
Jumlah	5.205.152.000,00	50.290.844.000,00	(45.085.692.000,00)	966,17

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
DID	5.205.152.000,00	5.205.152.000,00	100,00	50.290.844.000,00
Jumlah	5.205.152.000,00	5.205.152.000,00	100,00	50.290.844.000,00

5.1.2.2.2 Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Realisasi Dana Desa Tahun 2022 sebesar Rp215.093.518.324,00 atau 99,69% dari target pendapatan sebesar Rp215.759.396.000,00 dan mengalami penurunan sebesar - Rp1.648.322.276,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp216.741.840.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.2.2 Dana Desa

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dana Desa	215.093.518.324,00	216.741.840.600,00	(1.648.322.276,00)	100,77
Jumlah	215.093.518.324,00	216.741.840.600,00	(1.648.322.276,00)	100,77

Dengan rincian sebagai berikut:

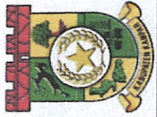
Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Dana Desa	215.759.396.000,00	215.093.518.324,00	99,69	216.741.840.600,00
Jumlah	215.759.396.000,00	215.093.518.324,00	99,69	216.741.840.600,00

5.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2022 sebesar Rp180.695.925.247,00 atau 106,62% dari target pendapatan sebesar Rp169.469.519.195,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp8.658.757.313,58 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp172.037.167.933,42 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	180.695.925.247,00	172.037.167.933,42	8.658.757.313,58	95,21
Jumlah	180.695.925.247,00	172.037.167.933,42	8.658.757.313,58	95,21



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Pendapatan Bagi Hasil	141.553.522.595,00	153.007.050.247,00	108,09	141.209.168.186,42
Bantuan Keuangan	27.915.996.600,00	27.688.875.000,00	99,19	30.827.999.747,00
Jumlah	169.469.519.195,00	180.695.925.247,00	106,62	172.037.167.933,42

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah ditahun berjalan terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp136.772.088.824,00 dan Bantuan Keuangan sebesar Rp27.688.875.000,00. Realisasi atas Piutang ditahun sebelumnya yang kurang bayar sebesar Rp16.234.961.423,00 dengan rincian sebagai berikut: Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW IV (Desember 2021) Rp4.566.007.591,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Rp3.440.433.198,00 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp3.017.639.793,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp5.044.863.334,00 dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Rp166.017.507,00.

5.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Tahun 2022 sebesar Rp153.007.050.247,00 atau 108,09% dari target pendapatan sebesar Rp141.553.522.595,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp11.797.882.060,58 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp141.209.168.186,42 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Bagi Hasil	153.007.050.247,00	141.209.168.186,42	11.797.882.060,58	92,29
Jumlah	153.007.050.247,00	141.209.168.186,42	11.797.882.060,58	92,29

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	141.553.522.595,00	153.007.050.247,00	108,09	141.209.168.186,42
Jumlah	141.553.522.595,00	153.007.050.247,00	108,09	141.209.168.186,42

5.1.2.3.2 Bantuan Keuangan

Realisasi Bantuan Keuangan Tahun 2022 sebesar Rp27.688.875.000,00 atau 99,19% dari target pendapatan sebesar Rp27.915.996.600,00 dan mengalami penurunan sebesar - Rp3.139.124.747,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp30.827.999.747,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.3.2 Bantuan Keuangan

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Bantuan Keuangan	27.688.875.000,00	30.827.999.747,00	(3.139.124.747,00)	111,34
Jumlah	27.688.875.000,00	30.827.999.747,00	(3.139.124.747,00)	111,34



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00	25.322.000.000,00	100,00	23.352.000.000,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	27.915.996.600,00	2.366.875.000,00	8,48	7.475.999.747,00
Jumlah	27.915.996.600,00	27.688.875.000,00	99,19	30.827.999.747,00

5.1.3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Realisasi lain-lain pendapatan yang sah Tahun 2022 sebesar Rp1.165.279.674,00 atau 100,00% dari target pendapatan sebesar Rp0,00 dan mengalami penurunan sebesar - Rp112.740.280.326,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp113.905.560.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenalkan/(Penurunan)	%
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	1.165.279.674,00	113.905.560.000,00	(112.740.280.326,00)	9.774,95
Jumlah	1.165.279.674,00	113.905.560.000,00	(112.740.280.326,00)	9.774,95

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Pendapatan Hibah	0,00	1.165.279.674,00	100,00	1.034.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	112.871.560.000,00
Jumlah	0,00	1.165.279.674,00	100,00	113.905.560.000,00

5.1.4 Belanja Daerah

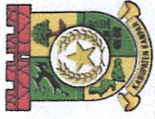
Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 sebesar Rp2.480.592.185.573,96 atau 95,78% dari target anggaran sebesar Rp2.589.837.610.263,00 dan mengalami penurunan sebesar -Rp21.412.233.902,18 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp2.502.004.419.476,14 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4 Belanja Daerah

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenalkan/(Penurunan)	%
Belanja Daerah	2.480.592.185.573,96	2.502.004.419.476,14	(21.412.233.902,18)	100,86
Jumlah	2.480.592.185.573,96	2.502.004.419.476,14	(21.412.233.902,18)	100,86

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Belanja Operasi	1.889.541.139.841,00	1.818.618.607.702,14	96,25	1.826.640.478.109,14
Belanja Modal	312.475.438.040,00	281.509.813.581,82	90,09	320.291.159.917,00
Belanja Tak Terduga	1.500.000.000,00	846.120.950,00	56,41	3.392.283.032,00
Transfer	386.321.032.382,00	379.617.643.340,00	98,26	351.680.498.418,00
Jumlah	2.589.837.610.263,00	2.480.592.185.573,96	95,78	2.502.004.419.476,14



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

5.1.4.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 sebesar Rp1.818.618.607.702,14 atau 96,25% dari target anggaran sebesar Rp1.889.541.139.841,00 dan mengalami penurunan sebesar -Rp8.021.870.407,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp1.826.640.478.109,14 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.1 Belanja Operasi

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Operasi	1.818.618.607.702,14	1.826.640.478.109,14	(8.021.870.407,00)	100,44
Jumlah	1.818.618.607.702,14	1.826.640.478.109,14	(8.021.870.407,00)	100,44

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Belanja Pegawai	983.986.424.876,00	963.391.408.176,00	96,92	980.252.571.587,00
Belanja Barang dan Jasa	823.156.542.515,00	787.240.777.384,22	95,64	753.565.154.437,14
Belanja Subsidi	436.500.000,00	436.450.000,00	99,99	0,00
Belanja Hibah	49.022.363.900,00	47.872.957.141,92	97,66	74.248.252.085,00
Belanja Bantuan Sosial	22.939.308.550,00	19.677.015.000,00	85,78	18.574.500.000,00
Jumlah	1.889.541.139.841,00	1.818.618.607.702,14	96,25	1.826.640.478.109,14

5.1.4.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 sebesar Rp963.391.408.176,00 atau 96,92% dari target anggaran sebesar Rp993.986.424.876,00 dan mengalami Penurunan sebesar -Rp16.861.163.411,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp980.252.571.587,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.1.1 Belanja Pegawai

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Pegawai	963.391.408.176,00	980.252.571.587,00	(16.861.163.411,00)	101,75
Jumlah	963.391.408.176,00	980.252.571.587,00	(16.861.163.411,00)	101,75

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga	581.406.453.394,00	568.463.246.667,00	97,77	598.328.532.891,00
Dinas Kesehatan	125.535.457.815,00	120.397.723.140,00	95,91	104.711.858.117,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	46.149.808.321,00	44.196.364.591,00	95,77	44.260.619.633,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.229.002.339,00	9.922.691.485,00	97,01	10.127.028.400,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	4.840.899.026,00	3.831.563.513,00	79,15	3.965.569.365,00
Satuan Polisi Pamong Praja	3.770.361.051,00	3.634.623.213,00	96,40	3.793.140.136,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.014.333.502,00	3.697.058.548,00	92,10	3.509.097.913,00
Dinas Penadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.183.204.883,00	3.027.561.598,00	95,11	2.367.739.208,00
Dinas Sosial	3.463.805.578,00	3.409.721.284,00	98,44	3.615.532.404,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perlindungan	4.035.510.279,00	3.951.676.156,00	97,92	3.754.350.497,00
Dinas Ketahanan Pangan	2.718.020.880,00	2.656.681.470,00	97,74	2.884.479.908,00
Dinas Lingkungan Hidup	4.652.509.340,00	4.590.343.586,00	98,66	4.590.396.996,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.255.744.823,00	2.884.679.205,00	88,60	3.520.669.215,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.375.871.171,00	3.282.546.570,00	97,24	3.676.744.095,00
Dinas Perhubungan	4.842.096.057,00	4.291.232.945,00	88,62	4.486.922.343,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	4.097.057.412,00	3.959.013.239,00	96,63	3.807.136.557,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.732.299.377,00	5.338.909.060,00	93,14	5.652.828.774,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.478.874.179,00	3.311.001.622,00	95,17	3.086.363.230,00
Dinas Perikanan	4.015.515.543,00	3.985.690.826,00	99,26	3.868.753.222,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.006.439.134,00	2.982.144.565,00	98,53	2.959.709.047,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	16.238.150.534,00	15.265.031.577,00	94,01	16.468.833.366,00
Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	6.749.676.801,00	6.702.007.926,00	99,29	7.105.474.266,00
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	3.856.734.086,00	3.838.665.112,00	99,53	3.975.127.401,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	3.687.392.844,00	3.533.488.026,00	95,83	3.658.981.889,00
Sekretariat Daerah	21.007.324.940,00	20.320.526.960,00	96,73	21.206.365.476,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	37.729.834.927,00	37.023.329.950,00	98,13	37.215.409.601,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.747.556.168,00	6.485.872.700,00	96,12	6.435.344.795,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8.447.159.577,00	7.905.775.570,00	93,59	7.225.799.690,00
Badan Pendapatan Daerah	12.420.859.372,00	11.621.672.469,00	93,57	11.084.801.277,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	4.248.751.123,00	4.088.019.726,00	96,22	4.082.582.276,00
Inspektorat Kabupaten	12.534.161.832,00	11.939.004.767,00	95,25	11.445.414.444,00
Kecamatan Kampar Kiri	1.884.306.843,00	1.765.549.923,00	93,70	1.932.974.117,00
Kecamatan Tapung Hilir	1.598.150.063,00	1.553.218.477,00	97,19	1.603.356.449,00
Kecamatan Tapung Hulu	1.117.234.070,00	1.026.982.759,00	91,92	987.143.879,00
Kecamatan Tapung	1.479.076.159,00	1.440.619.261,00	97,40	1.663.695.662,00
Kecamatan Tambang	2.024.247.140,00	1.980.529.281,00	97,84	2.012.814.604,00
Kecamatan Kampar	2.366.205.449,00	2.309.146.121,00	97,59	2.290.815.030,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	1.543.352.635,00	1.502.972.232,00	97,38	1.455.313.952,00
Kecamatan Siak Hulu	2.328.406.875,00	2.317.412.118,00	99,53	2.148.311.163,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	1.687.548.376,00	1.564.910.436,00	92,73	1.509.356.441,00
Kecamatan Rumbio Jaya	1.071.307.545,00	1.015.962.985,00	94,83	1.112.353.873,00
Kecamatan Kampar Utara	741.069.717,00	639.805.599,00	86,34	949.990.827,00
Kecamatan Kampa	1.194.599.278,00	1.148.426.979,00	96,13	1.148.360.923,00
Kecamatan Salo	926.227.782,00	839.157.909,00	90,60	989.455.836,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Kecamatan Bangkinang	1.917.235.495,00	1.805.751.747,00	94,19	1.768.305.524,00
Kecamatan Kuok	1.263.717.116,00	1.177.809.853,00	93,20	1.164.208.476,00
Kecamatan Bangkinang Kota	2.198.586.153,00	2.047.202.709,00	93,11	2.082.682.998,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	1.634.046.724,00	1.588.772.470,00	97,23	1.608.530.108,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	1.467.031.522,00	1.393.627.146,00	95,00	1.497.035.547,00
Kecamatan Gunung Sahilan	1.051.532.715,00	943.416.145,00	89,72	947.285.481,00
Kecamatan Perhentian Raja	1.390.962.068,00	1.301.867.215,00	93,59	1.397.551.226,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	1.143.549.928,00	1.078.499.995,00	94,31	916.167.011,00
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	2.487.164.915,00	2.431.898.750,00	97,78	2.195.256.028,00
Jumlah	993.986.424.876,00	963.391.408.176,00	96,92	980.252.571.587,00

5.1.4.1.2 Belanja Barang dan Jasa

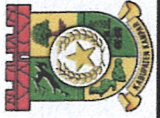
Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan yang bernilai manfaat kurang dari dua belas bulan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 sebesar Rp787.240.777.384,22 atau 95,64% dari target anggaran sebesar Rp823.156.542.515,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp33.675.622.947,08 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp753.565.154.437,14 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Barang dan Jasa	787.240.777.384,22	753.565.154.437,14	33.675.622.947,08	95,72
Jumlah	787.240.777.384,22	753.565.154.437,14	33.675.622.947,08	95,72

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	231.603.614.991,00	221.316.642.088,20	95,56	204.094.735.079,00
Dinas Kesehatan	101.187.074.551,00	91.513.454.367,90	90,44	117.721.990.931,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	69.103.801.082,00	80.006.749.204,73	115,78	90.416.107.464,14
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	38.428.513.510,00	35.170.138.785,00	91,52	24.189.832.750,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	5.991.528.383,00	5.768.957.760,00	96,29	5.016.634.218,00
Satuan Polisi Pamong Praja	11.582.946.349,00	11.500.997.048,00	99,29	11.649.782.187,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.608.521.415,00	5.205.447.308,00	92,81	7.226.679.714,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	9.358.059.475,00	9.284.153.752,00	99,21	4.705.623.449,00
Dinas Sosial	6.266.690.512,00	5.975.323.891,00	95,35	5.828.414.916,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perlindungan Anak	18.805.784.453,00	14.906.431.865,00	79,27	13.144.184.395,00
Dinas Ketahanan Pangan	4.979.480.928,00	4.499.042.837,39	90,35	8.266.754.057,00
Dinas Lingkungan Hidup	20.864.745.960,00	20.654.193.810,00	98,99	20.288.832.194,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.636.035.287,00	5.458.328.799,00	96,85	3.764.420.993,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.738.095.990,00	3.332.545.759,00	89,15	2.868.199.534,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Dinas Perhubungan	37.960.590.787,00	37.544.665.341,00	98,90	46.978.325.441,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	8.412.163.131,00	8.245.501.064,00	98,02	6.999.714.950,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.753.163.409,00	5.188.768.919,00	90,19	5.328.231.581,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.580.552.936,00	2.538.438.677,00	98,37	1.961.044.769,00
Dinas Perikanan	6.022.983.932,00	5.637.304.384,00	93,60	3.380.966.284,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6.715.647.361,00	6.574.700.982,00	97,90	5.470.852.948,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	9.958.324.375,00	9.295.682.502,00	93,35	6.185.973.536,00
Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	6.444.184.691,00	6.254.939.960,50	97,06	6.516.681.660,00
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	7.254.959.953,00	6.959.387.607,00	95,93	3.165.378.640,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	7.806.497.006,00	7.016.955.010,00	89,89	4.400.549.473,00
Sekretariat Daerah	74.873.943.503,00	71.739.297.497,00	95,81	57.677.745.910,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	55.845.205.995,00	48.913.096.919,00	87,59	37.298.506.622,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.644.799.710,00	12.314.565.065,00	97,39	6.815.329.133,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8.107.791.841,00	7.106.149.088,00	87,65	5.250.806.794,00
Badan Pendapatan Daerah	9.492.937.880,00	8.581.849.924,00	90,40	6.829.876.364,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	4.331.872.595,00	3.819.165.560,00	88,16	5.276.046.100,00
Inspektorat Kabupaten	5.178.351.543,00	4.691.486.703,50	90,60	4.718.340.014,00
Kecamatan Kampar Kiri	853.162.935,00	850.813.135,00	99,72	711.377.615,00
Kecamatan Tapung Hilir	455.832.265,00	445.093.092,00	97,64	501.839.320,00
Kecamatan Tapung Hulu	532.479.021,00	523.330.400,00	98,28	511.484.000,00
Kecamatan Tapung	676.188.521,00	632.466.153,00	93,53	581.125.768,00
Kecamatan Tambang	558.000.200,00	555.961.250,00	99,63	498.598.513,00
Kecamatan Kampar	825.660.687,00	817.453.701,00	99,01	898.576.635,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	605.125.341,00	601.987.414,00	99,48	505.769.942,00
Kecamatan Siak Hulu	470.761.994,00	468.428.209,00	99,50	411.914.067,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	765.212.779,00	763.661.474,00	99,80	665.468.746,00
Kecamatan Rumbio Jaya	471.953.457,00	456.377.342,00	96,70	413.498.680,00
Kecamatan Kampar Utara	474.802.015,00	469.731.287,00	98,93	454.567.169,00
Kecamatan Kampa	447.116.877,00	443.334.377,00	99,15	429.090.109,00
Kecamatan Salo	477.308.294,00	457.045.264,00	95,75	395.286.853,00
Kecamatan Bangkinang	957.360.169,00	946.292.674,00	98,84	901.232.395,00
Kecamatan Kuok	466.849.768,00	452.312.080,00	96,89	437.336.001,00
Kecamatan Bangkinang Kota	1.296.360.329,00	1.273.803.285,00	98,26	997.627.304,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	414.988.177,00	401.073.426,00	96,65	380.538.644,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	581.812.128,00	577.744.297,00	99,30	520.535.373,00
Kecamatan Gunung Sahilan	505.598.021,00	482.689.220,00	95,47	358.945.650,00
Kecamatan Perhentian Raja	447.220.565,00	443.143.211,00	99,09	419.507.990,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	459.801.866,00	459.564.306,00	99,95	411.220.339,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	7.874.083.572,00	7.704.109.309,00	97,84	8.723.051.234,00
Jumlah	823.156.542.515,00	787.240.777.384,22	95,64	753.565.154.437,14

5.1.4.1.3 Belanja Subsidi

Belanja Subsidi adalah pengeluaran pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.

Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2022 sebesar Rp436.450.000,00 atau 99,99% dari target belanja sebesar Rp436.500.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp436.450.000,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.1.3 Belanja Subsidi

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Subsidi	436.450.000,00	0,00	436.450.000	0,00
Jumlah	436.450.000,00	0,00	436.450.000	0,00

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Belanja Subsidi kepada BUMN	436.500.000,00	436.450.000,00	99,99	0,00
Jumlah	436.500.000,00	436.450.000,00	99,99	0,00

Pada Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Kampar melaksanakan Kegiatan pasar murah pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK bekerja sama dengan Perum Bulog Kantor Cabang Pembantu Kampar dalam hal penanganan implanasi sesuai dengan surat Nomor 032/DISPERDAGKOP-DAGPAS/101 dan 002/I/03G00/HK.03/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022.

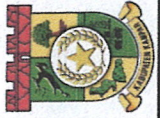
5.1.4.1.4 Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, BUMN/D, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2022 sebesar Rp47.872.957.141,92 atau 97,66% dari target belanja sebesar Rp49.022.363.900,00 dan mengalami penurunan sebesar - Rp26.375.294.943,08 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp74.248.252.085,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.1.4 Belanja Hibah

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Hibah	47.872.957.141,92	74.248.252.085,00	(26.375.294.943,08)	0,00
Jumlah	47.872.957.141,92	74.248.252.085,00	(26.375.294.943,08)	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	369.069.000,00
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	369.069.000,00
Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan	46.374.111.900,00	45.224.790.141,92	97,52	72.547.311.251,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	18.577.621.300,00	17.802.400.712,00	95,83	21.787.846.333,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.701.384.000,00	1.687.902.000,00	99,21	2.615.766.000,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Bersifat Sosial Kemasyarakatan	26.095.106.600,00	25.734.487.429,92	98,62	48.143.698.918,00
Belanja Hibah Kepada Partai Politik	2.548.252.000,00	2.548.167.000,00	100,00	1.331.871.834,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.548.252.000,00	2.548.167.000,00	100,00	1.331.871.834,00
Jumlah	49.022.363.900,00	47.872.957.141,92	97,66	74.248.252.085,00

5.1.4.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk pengeluaran pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

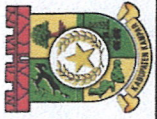
Realisasi Belanja Sosial Tahun 2022 sebesar Rp19.677.015.000,00 atau 85,78% dari target anggaran sebesar Rp22.939.308.550,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp1.102.515.000,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp18.574.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Bantuan Sosial	19.677.015.000,00	18.574.500.000,00	1.102.515.000,00	0,00
Jumlah	19.677.015.000,00	18.574.500.000,00	1.102.515.000,00	0,00

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	6.649.808.550,00	3.405.015.000,00	51,20	0,00
Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga	16.217.500.000,00	16.200.000.000,00	99,89	18.574.500.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	22.939.308.550,00	19.677.015.000,00	85,78	18.574.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

5.1.4.2 Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp281.509.813.581,82 atau 90,09% dari target anggaran sebesar Rp312.475.438.040,00 dan mengalami penurunan sebesar - Rp38.781.346.335,18 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp320.291.159.917,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.2 Belanja Modal

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Modal	281.509.813.581,82	320.291.159.917,00	(38.781.346.335,18)	113,78
Jumlah	281.509.813.581,82	320.291.159.917,00	(38.781.346.335,18)	113,78

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Belanja Modal Tanah	590.000.000,00	505.118.496,00	85,61	1.125.952.960,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	93.530.233.254,00	80.023.194.214,82	85,56	106.004.696.908,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67.120.097.320,00	64.626.802.305,00	96,29	51.494.311.363,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	141.357.438.016,00	127.694.277.285,00	90,33	145.332.172.309,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.877.669.450,00	8.660.421.281,00	87,68	16.334.026.377,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	312.475.438.040,00	281.509.813.581,82	90,09	320.291.159.917,00

5.1.4.2.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2022 sebesar Rp505.118.496,00 atau 85,61% dari target anggaran sebesar Rp590.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar - Rp620.834.464,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp1.125.952.960,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.2.1 Belanja Modal Tanah

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Modal Tanah	505.118.496,00	1.125.952.960,00	(620.834.464,00)	222,91
Jumlah	505.118.496,00	1.125.952.960,00	(620.834.464,00)	222,91

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	1.119.014.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	590.000.000,00	505.118.496,00	85,61	6.938.960,00
Jumlah	590.000.000,00	505.118.496,00	85,61	1.125.952.960,00



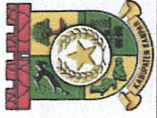
PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

5.1.4.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 sebesar Rp80.023.194.214,82 atau 85,56% dari target anggaran sebesar Rp93.530.233.254,00 dan mengalami penurunan sebesar -Rp25.981.502.693,18 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp106.004.696.908,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.023.194.214,82	106.004.696.908,00	(25.981.502.693,18)	132,47
Jumlah	80.023.194.214,82	106.004.696.908,00	(25.981.502.693,18)	132,47
Dengan rincian sebagai berikut:				
Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	31.900.700.172,00	21.215.487.278,82	66,50	19.828.036.907,00
Dinas Kesehatan	11.014.725.927,00	9.965.305.702,00	90,47	14.941.023.210,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	13.976.208.986,00	13.362.620.361,00	95,61	40.852.540.578,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.016.440.000,00	953.312.900,00	93,79	316.880.300,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	318.504.000,00	298.304.000,00	93,66	512.937.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	340.825.540,00	316.337.500,00	92,82	264.500.144,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.103.146.309,00	1.035.039.169,00	93,83	638.747.664,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	140.123.000,00	136.373.000,00	97,32	662.720.000,00
Dinas Sosial	992.385.050,00	938.052.650,00	94,53	170.598.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perlindungan Anak	1.281.888.700,00	1.083.152.600,00	84,50	984.467.107,00
Dinas Ketahanan Pangan	224.135.480,00	122.624.500,00	54,71	316.750.910,00
Dinas Lingkungan Hidup	316.680.000,00	316.070.000,00	99,81	3.092.450.500,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	607.110.000,00	551.565.000,00	90,85	253.485.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	556.528.250,00	540.999.000,00	97,21	978.825.000,00
Dinas Perhubungan	1.422.440.435,00	1.416.248.500,00	99,56	4.592.664.355,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	510.105.360,00	505.262.650,00	99,05	1.071.822.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.060.568.000,00	1.017.394.500,00	95,93	508.381.500,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	144.046.550,00	143.937.550,00	99,92	575.829.750,00
Dinas Perikanan	344.239.310,00	342.928.800,00	99,62	264.043.400,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	211.510.105,00	145.261.700,00	68,68	364.328.800,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	235.594.428,00	228.980.428,00	97,19	74.056.464,00
Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	836.478.791,00	809.036.800,00	96,72	647.773.057,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	1.739.138.503,00	1.659.410.018,00	95,42	186.353.216,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	678.466.681,00	673.082.150,00	99,21	280.053.000,00
Sekretariat Daerah	14.398.940.360,00	14.239.900.794,00	98,90	4.988.609.902,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2.569.008.450,00	2.493.375.000,00	97,06	5.216.384.500,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.721.313.956,00	1.708.577.124,00	99,26	1.007.114.213,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	851.321.049,00	830.957.722,00	97,61	134.972.084,00
Badan Pendapatan Daerah	1.488.052.800,00	1.458.639.500,00	98,02	1.003.988.500,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	81.000.000,00	73.800.000,00	91,11	253.103.500,00
Inspektorat Kabupaten	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	110.570.000,00
Kecamatan Kampar Kiri	63.184.570,00	63.182.300,00	100,00	112.850.421,00
Kecamatan Tapung Hilir	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Tapung Hulu	76.873.000,00	76.873.000,00	100,00	17.474.000,00
Kecamatan Tapung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Tambang	44.477.198,00	44.474.000,00	99,99	38.640.080,00
Kecamatan Kampar	0,00	0,00	0,00	63.793.090,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	40.833.450,00	40.833.450,00	100,00	6.825.000,00
Kecamatan Siak Hulu	31.411.544,00	31.411.544,00	100,00	25.200.000,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	91.017.504,00	91.017.504,00	100,00	54.809.558,00
Kecamatan Rumbio Jaya	36.615.100,00	36.615.100,00	100,00	29.975.979,00
Kecamatan Kampar Utara	4.095.000,00	4.095.000,00	100,00	0,00
Kecamatan Kampa	7.245.000,00	7.245.000,00	100,00	2.737.350,00
Kecamatan Salo	53.861.820,00	53.861.820,00	100,00	0,00
Kecamatan Bangkinang	80.933.400,00	80.933.400,00	100,00	16.695.000,00
Kecamatan Kuok	22.940.000,00	22.940.000,00	100,00	0,00
Kecamatan Bangkinang Kota	33.760.800,00	33.760.800,00	100,00	7.103.800,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	19.121.490,00	19.121.000,00	100,00	16.010.000,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	48.332.800,00	48.332.800,00	100,00	0,00
Kecamatan Gunung Sahilan	89.116.086,00	88.240.000,00	99,02	5.800.000,00
Kecamatan Perhentian Raja	13.545.000,00	13.500.000,00	99,67	0,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	11.443.300,00	11.060.600,00	96,83	5.487.735,00
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	676.800.000,00	670.650.000,00	99,09	527.274.334,00
Jumlah	93.530.233.254,00	80.023.194.214,82	85,56	106.004.696.908,00

5.1.4.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

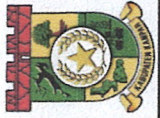
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022 sebesar Rp64.626.802.305,00 atau 96,29% dari target anggaran sebesar Rp67.120.097.320,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp13.132.490.942,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp51.494.311.363,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.626.802.305,00	51.494.311.363,00	13.132.490.942,00	79,68
Jumlah	64.626.802.305,00	51.494.311.363,00	13.132.490.942,00	79,68

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga	30.569.344.000,00	30.406.380.615,00	99,47	21.481.668.150,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Dinas Kesehatan	8.771.729.000,00	7.669.230.733,00	87,43	14.666.757.229,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	15.100.373.184,00	14.265.538.201,00	94,47	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.712.366.136,00	4.387.749.591,00	93,11	1.753.275.513,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	240.000.000,00	239.671.000,00	99,86	6.949.702.950,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	211.358.000,00	211.058.000,00	99,86	7.600.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	43.560.000,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	231.140.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perlindungan Anak	25.450.000,00	24.818.000,00	97,52	152.456.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	680.000.000,00	679.211.000,00	99,88	1.009.137.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	50.000.000,00	49.327.000,00	98,65	5.000.000,00
Dinas Perhubungan	1.970.450.000,00	1.966.032.000,00	99,78	1.344.942.500,00
Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	199.485.000,00	199.305.500,00	99,91	197.685.400,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	349.420.000,00	349.100.050,00	99,91	393.450.000,00
Dinas Perikanan	440.800.000,00	389.344.945,00	88,33	0,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	493.000.000,00	492.695.000,00	99,94	925.957.000,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	841.020.000,00	838.955.000,00	99,75	0,00
Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	635.320.000,00	632.670.900,00	99,58	696.818.000,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.143.704.000,00	1.141.448.000,00	99,80	762.180.900,00
Sekretariat Daerah	25.000.000,00	24.938.370,00	99,75	0,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00	0,00	199.462.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	99.963.000,00
Badan Pendapatan Daerah	466.398.000,00	464.612.500,00	99,62	339.076.000,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00
Kecamatan Bangkinang Kota	174.880.000,00	174.715.900,00	99,91	212.479.721,00
Jumlah	67.120.097.320,00	64.626.802.305,00	96,29	51.494.311.363,00

5.1.4.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 sebesar Rp127.694.277.285,00 atau 90,33% dari target anggaran sebesar Rp141.357.438.016,00 dan mengalami penurunan sebesar -Rp17.637.895.024,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp145.332.172.309,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Tabel 5.1.4.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenalkan/(Penurunan)	%
Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan	127.694.277.285,00	145.332.172.309,00	(17.637.895.024,00)	113,81
Jumlah	127.694.277.285,00	145.332.172.309,00	(17.637.895.024,00)	113,81

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	1.938.339.604,00	1.937.808.000,00	99,97	272.464.000,00
Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	4.266.900.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	25.392.000,00	25.122.000,00	98,94	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	111.490.456.143,00	97.857.668.201,00	87,77	110.684.136.359,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	25.491.184.885,00	25.465.957.000,00	99,90	25.446.638.829,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	267.000.000,00	266.700.000,00	99,89	876.416.000,00
Dinas Sosial	195.000.000,00	194.628.601,00	99,81	1.271.780.680,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	32.120.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	76.100.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13.750.000,00	12.000.000,00	87,27	0,00
Dinas Perikanan	26.600.000,00	26.489.000,00	99,58	0,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	101.833.200,00	101.755.000,00	99,92	227.187.000,00
Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	177.000.000,00	175.866.500,00	99,36	0,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	198.065.574,00	197.518.000,00	99,72	552.271.300,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	129.895.000,00
Kecamatan Kampar Kiri	87.200.000,00	87.200.000,00	100,00	181.263.096,00
Kecamatan Kampar	206.721.396,00	206.721.396,00	100,00	220.429.400,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	167.963.680,00	167.963.680,00	100,00	170.799.178,00
Kecamatan Bangkinang	544.356.558,00	544.356.558,00	100,00	499.697.305,00
Kecamatan Bangkinang Kota	183.920.576,00	183.868.949,00	99,97	154.999.162,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	242.654.400,00	242.654.400,00	100,00	269.085.000,00
Jumlah	141.357.438.016,00	127.694.277.285,00	90,33	145.332.172.309,00

5.1.4.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 sebesar Rp8.660.421.281,00 atau 87,68% dari target anggaran sebesar Rp9.877.669.450,00 dan mengalami penurunan sebesar -Rp7.673.605.096,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp16.334.026.377,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Tabel 5.1.4.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.660.421.281,00	16.334.026.377,00	(7.673.605.096,00)	188,61
Jumlah	8.660.421.281,00	16.334.026.377,00	(7.673.605.096,00)	188,61

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	8.879.540.000,00	7.608.408.105,00	85,68	12.749.450.527,00
Dinas Kesehatan	362.693.757,00	390.407.688,00	107,64	144.789.100,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	143.625.000,00	199.808.950,00	139,12	838.609.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	78.618.700,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	311.830.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	0,00	0,00	0,00	14.945.800,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	180.000.000,00	179.413.300,00	99,67	389.804.700,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	71.840.693,00	71.468.000,00	99,48	411.096.550,00
Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	0,00	0,00	577.390.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	0,00	0,00	0,00	92.856.500,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	11.070.000,00	11.070.000,00	100,00	8.599.500,00
Sekretariat Daerah	30.000.000,00	15.145.238,00	50,48	126.940.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	419.696.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	180.000.000,00	169.550.000,00	94,19	0,00
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	169.400.000,00
Kecamatan Kampar Kiri	15.150.000,00	15.150.000,00	100,00	0,00
Jumlah	9.877.669.450,00	8.660.421.281,00	87,68	16.334.026.377,00

5.1.4.3 Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun sebelumnya yang telah ditutup. Belanja Tak Terduga digunakan dalam penanganan bencana COVID-19.

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2022 sebesar Rp846.120.950,00 atau 56,41% dari target pendapatan sebesar Rp1.500.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar - Rp2.546.162.082,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp3.392.283.032,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Tabel 5.1.4.3 Belanja Tak Terduga

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Tak Terduga	846.120.950,00	3.392.283.032,00	(2.546.162.082,00)	(75,06)
Jumlah	846.120.950,00	3.392.283.032,00	(2.546.162.082,00)	(75,06)

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Belanja Tak Terduga	1.500.000.000,00	846.120.950,00	56,41	3.392.283.032,00
Jumlah	1.500.000.000,00	846.120.950,00	56,41	3.392.283.032,00

5.1.4.4 Belanja Transfer

Belanja Transfer atau Belanja Bagi Hasil digunakan untuk penganggaran yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya.

Realisasi Belanja Transfer Tahun 2022 sebesar Rp379.617.643.340,00 atau 98,26% dari target anggaran sebesar Rp386.321.032.382,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp27.937.144.922,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp351.680.498.418,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.4 Belanja Transfer

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Transfer	379.617.643.340,00	351.680.498.418,00	27.937.144.922,00	7,94
Jumlah	379.617.643.340,00	351.680.498.418,00	27.937.144.922,00	7,94

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	15.122.792.013,00	9.190.269.495,00	60,77	13.935.415.056,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.338.505.000,00	1.233.516.252,00	92,16	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	369.859.735.369,00	369.193.857.593,00	99,82	337.745.083.362,00
- Dana Desa	215.759.396.000,00	215.093.518.324,00	99,69	216.741.840.600,00
- Alokasi Dana Desa	129.400.339.369,00	129.400.339.269,00	100,00	112.328.242.762,00
- PiliKades Serentak	0,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00
- Bantuan Ambulan	24.700.000.000,00	24.700.000.000,00	100,00	6.175.000.000,00
Jumlah	386.321.032.382,00	379.617.643.340,00	98,26	351.680.498.418,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

5.1.4.5 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2022 sebesar Rp74.859.762.812,21 atau 78,06% dari target anggaran sebesar Rp95.895.381.680,97 dan mengalami penurunan sebesar -Rp21.383.284.365,38 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp96.243.047.177,59 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Pembiayaan Daerah 5.1.4.5

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pembiayaan Daerah	74.859.762.812,21	96.243.047.177,59	(21.383.284.365,38)	(22,22)
Jumlah	74.859.762.812,21	96.243.047.177,59	(21.383.284.365,38)	(22,22)

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Penerimaan Pembiayaan	95.895.381.680,97	74.859.762.812,21	78,06	96.243.047.177,59
Jumlah	95.895.381.680,97	74.859.762.812,21	78,06	96.243.047.177,59

5.1.4.5.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Realisasi penerimaan pembiayaan Tahun 2022 sebesar Rp74.859.762.812,21 atau 78,06% dari target pendapatan sebesar Rp95.895.381.680,97 dan mengalami penurunan sebesar -Rp21.383.284.365,38 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp96.243.047.177,59 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.5.1 Penerimaan Pembiayaan

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Penerimaan Pembiayaan	74.859.762.812,21	96.243.047.177,59	(21.383.284.365,38)	(22,22)
Jumlah	74.859.762.812,21	96.243.047.177,59	(21.383.284.365,38)	(22,22)

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	74.859.762.811,97	74.859.762.812,21	100,00	96.243.047.177,59
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	21.035.618.869,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	95.895.381.680,97	74.859.762.812,21	78,06	96.243.047.177,59

5.1.4.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) mencakup pelampauan penerimaan, penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp21.771.162.790,96 dan mengalami penurunan sebesar -Rp53.088.600.021,25 dibandingkan SILPA Tahun 2021 sebesar Rp74.859.762.812,21 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	21.771.162.790,96	74.859.762.812,21	(53.088.600.021,25)	(70,92)
Jumlah	21.771.162.790,96	74.859.762.812,21	(53.088.600.021,25)	(70,92)

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	21.771.162.790,96	75.131.235.522,21
Koreksi SILPA	0,00	(271.472.710,00)
Jumlah	21.771.162.790,96	74.859.762.812,21



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

5.2 PENJELASAN POS - POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan hanya oleh PPKD yang menyusun laporan keuangan konsolidasi.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp74.859.762.812,21. Sedangkan Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2021 sebesar Rp96.243.047.177,59 dan terjadi penurunan sebesar -Rp21.383.284.365,38 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenakan/(Penurunan)	%
Saldo Anggaran Lebih Awal	74.859.762.812,21	96.243.047.177,59	(21.383.284.365,38)	(22,22)
Jumlah	74.859.762.812,21	96.243.047.177,59	(21.383.284.365,38)	(22,22)

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2021 yang telah digunakan sebagai penerimaan pembiayaan Tahun 2022 yaitu sebesar Rp74.859.762.812,21. Sedangkan Tahun 2021 sebesar Rp96.243.047.177,59 dan terjadi penurunan sebesar -Rp21.383.284.365,38 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenakan/(Penurunan)	%
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	74.859.762.812,21	96.243.047.177,59	(21.383.284.365,38)	(22,22)
Jumlah	74.859.762.812,21	96.243.047.177,59	(21.383.284.365,38)	(22,22)

5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Akhir Tahun Berjalan

Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) akhir Tahun berjalan Pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp21.771.162.790,96. Sedangkan Tahun 2021 sebesar Rp75.131.235.522,21 dan terjadi penurunan sebesar -Rp53.360.072.731,25 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Akhir Tahun Berjalan

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenakan/(Penurunan)	%
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)	21.771.162.790,96	75.131.235.522,21	(53.360.072.731,25)	(71,02)
Jumlah	21.771.162.790,96	75.131.235.522,21	(53.360.072.731,25)	(71,02)

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp0,00 sedangkan pada Tahun 2021 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Tabel 5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2.5 Lain-lain

Lain-lain merupakan koreksi SILPA pada Tahun 2022 yaitu sebesar (Rp0,00) Sedangkan pada Tahun 2021 sebesar -Rp271.472.710,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.5 Lain-lain

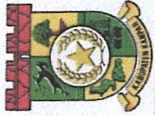
Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Lain-lain	0,00	(271.472.710,00)	271.472.710,00	(100,00)
Jumlah	0,00	(271.472.710,00)	271.472.710,00	(100,00)

5.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp21.771.162.790,96 sedangkan pada Tahun 2021 sebesar Rp74.859.762.812,21 dan terjadi penurunan sebesar - Rp53.088.600.021,25 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Saldo Anggaran Lebih Akhir	21.771.162.790,96	74.859.762.812,21	(53.088.600.021,25)	(70,92)
Jumlah	21.771.162.790,96	74.859.762.812,21	(53.088.600.021,25)	(70,92)



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

5.3 PENJELASAN POS - POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah Ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Transfer dan Pos-pos Luar Biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1 Pendapatan LO

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Transaksi Pendapatan LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/jasa. Selain itu transaksi pendapatan LO tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD tetapi juga mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD.

Pendapatan LO pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp2.499.767.165.654,55. Sedangkan pada Tahun 2021 Pendapatan LO sebesar Rp2.398.136.640.245,14 dan terjadi kenaikan sebesar Rp101.630.525.409,41 atau 4,24% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1 Pendapatan LO

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan LO	2.499.767.165.654,55	2.398.136.640.245,14	101.630.525.409,41	4,24
Jumlah	2.499.767.165.654,55	2.398.136.640.245,14	101.630.525.409,41	4,24

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Pendapatan Asli Daerah	276.334.891.411,05	295.979.537.101,30
Pendapatan Transfer	2.218.905.397.994,00	1.980.533.749.139,84
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	4.526.876.249,50	121.623.354.004,00
Jumlah	2.499.767.165.654,55	2.398.136.640.245,14

5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Pendapatan Asli Daerah - LO pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp276.334.891.411,05 sedangkan pada Tahun 2021 Pendapatan Asli Daerah - LO sebesar Rp295.979.537.101,30 dan terjadi penurunan sebesar -Rp19.644.645.690,25 atau -6,64% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Asli Daerah - LO	276.334.891.411,05	295.979.537.101,30	(19.644.645.690,25)	(6,64)
Jumlah	276.334.891.411,05	295.979.537.101,30	(19.644.645.690,25)	(6,64)

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Pendapatan Pajak Daerah	157.857.684.352,08	162.856.493.424,00
Pendapatan Retribusi Daerah	8.761.742.152,31	13.204.374.160,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.550.128.300,00	27.916.502.794,00
Lain-lain PAD Yang Sah	86.165.336.606,66	92.002.166.723,30
Jumlah	276.334.891.411,05	295.979.537.101,30



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

5.3.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp157.857.684.352,08 sedangkan pada Tahun 2021 Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp162.856.493.424,00 dan terjadi penurunan sebesar -Rp4.998.809.071,92 atau -3,07% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Pajak Daerah	157.857.684.352,08	162.856.493.424,00	(4.998.809.071,92)	(3,07)
Jumlah	157.857.684.352,08	162.856.493.424,00	(4.998.809.071,92)	(3,07)

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Pajak Hotel - LO	1.317.838.134,00	981.625.442,00
Pajak Restoran - LO	7.285.011.763,00	5.382.159.622,00
Pajak Reklame - LO	719.444.248,08	973.900.315,00
Pajak Penerangan Jalan - LO	74.031.467.239,00	68.971.886.938,00
Pajak Parkir - LO	107.066.250,00	91.434.750,00
Pajak Air Tanah - LO	1.741.199.635,00	1.302.576.310,00
Pajak Sarang Burung Walet - LO	22.840.000,00	21.183.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	10.716.512.129,00	4.881.432.469,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	30.994.645.169,00	31.464.578.504,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	30.921.659.785,00	48.785.736.174,00
Jumlah	157.857.684.352,08	162.856.493.424,00

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Pajak LRA Pajak LO dan NERACA dengan penjelasan sebagai berikut:

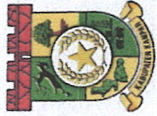
a. Pendapatan Pajak Tahun Berjalan (LO)	157.857.684.352,08
b. Pendapatan Pajak Tahun Berjalan (LRA)	142.366.052.600,00
c. Piutang Pajak Tahun Berjalan (Neraca)	191.638.594.152,00
d. Piutang Pajak Tahun 2021 (Neraca)	192.464.771.827,00
e. Pendapatan Pajak Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	419.465.803,92
f. Pendapatan Pajak Diterima Dimuka Tahun 2021 (Neraca)	210.501.255,00
Selisih (a-b)-(c-d)+(e-f)	16.526.773.976,00

Penjelasan selisih antara Pajak LRA, Pajak LO dan Neraca Tahun 2022 sebesar -Rp16.526.773.976,00 dapat dijelaskan sebagai berikut terdiri dari:

a. Validasi dan Pembayaran Piutang PBB Tahun Sebelumnya	(16.788.984.275,00)
b. Kas lainnya PHR dari Bos disdik tahun 2021 yang di setor	2.453.400,00
c. Kas lainnya PHR Kec. Kampar Utara tahun 2022	271.347.800,00
d. Mutasi Piutang TGR dari BPBD yang telah disetor ke Kasda berupa PHR	(4.674.501,00)
e. Kas lainnya Bos Disdik berupa PHR yang belum disetor 31 Desember 2022	(6.936.400,00)
Jumlah	(16.526.773.976,00)

5.3.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp8.761.742.152,31 sedangkan pada Tahun 2021 Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp13.204.374.160,00 dan terjadi penurunan sebesar -Rp4.442.632.007,69 atau -33,65% dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Tabel 5.3.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Retribusi Daerah	8.761.742.152,31	13.204.374.160,00	(4.442.632.007,69)	(33,65)
Jumlah	8.761.742.152,31	13.204.374.160,00	(4.442.632.007,69)	(33,65)

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	15.000.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO	240.300.000,00	189.900.000,00
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	397.700.000,00	246.585.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar-LO	76.864.000,00	291.370.333,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	712.625.000,00	830.598.500,00
Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran-LO	35.051.000,00	10.969.000,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	63.340.000,00	48.575.000,00
Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO	939.035.000,00	734.395.000,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian	1.315.818.000,00	1.156.450.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	865.932.940,00	0,00
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	0,00	60.000.000,00
Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	0,00	41.520.667,00
Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO	0,00	48.228.660,00
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO	0,00	698.328.000,00
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO	0,00	23.500.000,00
Retribusi Pelayanan Rumah Polong Hewan-LO	56.650.000,00	64.500.000,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	167.470.000,00	96.387.000,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman-LO	578.108.000,00	72.500.000,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit Ternak-LO	0,00	68.370.000,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO	0,00	313.435.000,00
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan-LO	3.297.847.212,31	8.208.762.000,00
Jumlah	8.761.742.152,31	13.204.374.160,00

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Retribusi LRA, Retribusi LO dan NERACA dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Pendapatan Retribusi Tahun Berjalan (LO)	8.761.742.152,31
b. Pendapatan Retribusi Tahun Berjalan (LRA)	8.892.742.152,31
c. Piutang Retribusi Tahun Berjalan (Neraca)	408.612.900,00
d. Piutang Retribusi Tahun 2021 (Neraca)	1.595.912.900,00
e. Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
f. Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka Tahun 2021 (Neraca)	0,00
Selisih (a-b)-(c-d)+(e-f)	1.056.300.000,00

Perbedaan Retribusi LRA, Retribusi LO dan Neraca sebesar Rp1.056.300.000 terdiri dari Rp50.000,00 merupakan koreksi kelebihan penetapan pendapatan Tahun 2021 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, rekas Piutang retribusi kios pasar pada piutang lain-lain PAD yang sah dinas koperasi sebesar Rp1.062.500.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

5.3.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp23.550.128.300,00 sedangkan pada Tahun 2021 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp27.916.502.794,00 dan terjadi penurunan sebesar -Rp4.366.374.494,00 atau -15,64% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenalkan/(Penurunan)	%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.550.128.300,00	27.916.502.794,00	(4.366.374.494,00)	(15,64)
Jumlah	23.550.128.300,00	27.916.502.794,00	(4.366.374.494,00)	(15,64)

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD Bank Riau - LO	21.827.902.698,00	0,00
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD PT. Bumi Siak Pusako - LO	1.654.733.260,00	0,00
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD BPR Syariah Fadiah Air Tiris - LO	67.492.342,00	0,00
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO	0,00	27.916.502.794,00
Jumlah	23.550.128.300,00	27.916.502.794,00

Perbedaan jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LRA, LO dan NERACA dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Berjalan (LO)	23.550.128.300,00
b. Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Berjalan (LRA)	23.550.128.300,00
c. Piutang Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
d. Piutang Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2021 (Neraca)	0,00
e. Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
f. Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Diterima Dimuka Tahun 2021 (Neraca)	0,00
Selisih (a-b)-(c-d)+(e-f)	0,00

5.3.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp86.165.336.606,66 sedangkan pada Tahun 2021 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp92.002.166.723,30 dan terjadi penurunan sebesar -Rp5.836.830.116,64 atau -6,34%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenalkan/(Penurunan)	%
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	86.165.336.606,66	92.002.166.723,30	(5.836.830.116,64)	(6,34)
Jumlah	86.165.336.606,66	92.002.166.723,30	(5.836.830.116,64)	(6,34)

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	714.764.500,00	0,00
Hasil Kerja Sama Daerah-LO	100.000.000,00	0,00
Jasa Giro - LO	1.159.879.263,00	3.515.032.115,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Jasa Dana Bergulir - LO	3.595.807.442,92	5.224.656.392,57
Pendapatan Bunga Deposito - LO	319.889.119,34	578.037.288,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	614.021.956,00	508.672.917,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame - LO	0,00	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	153.950.099,55	354.658.215,56
Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO	20.987.287,00	11.381.185,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	202.527.700,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian-LO	517.831.580,00	687.366.424,00
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO	76.141.049.231,87	78.216.066.534,50
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO.	0,00	0,00
Dana Kapitasi JKN FKTP - LO	0,00	175.076.100,00
Dana Non Kapitasi - LO	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	317.601.572,74	0,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	2.307.026.854,24	2.731.219.550,79
Jumlah	86.165.336.606,66	92.002.166.722,42

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah LRA, Retribusi LO dan NERACA dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Berjalan (LO)	86.165.336.606,66
b. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Berjalan (LRA)	85.607.125.390,40
c. Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Berjalan (Neraca)	24.801.231.040,34
d. Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 20NN-1 (Neraca)	18.189.157.807,00
e. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
f. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	0,00
Selisih (a-b)-(c-d)+(e-f)	(6.053.862.017,08)

Perbedaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah LRA, Retribusi LO dan Neraca sebesar Rp-6.053.862.017,08 terdiri dari:

a. (Mutasi Piutang Tgr Dari Bencena Yang Telah Disetor Ke Kasda)	(1.704.073.533,00)
b. Pembayaran Ansuran Tgr Dana BTT	1.975.421.333,00
c. Penyesuaian Dana Bergulir	3.595.807.442,92
d. Penyesuaian Piutnag BPJS Tahun 2020-2021 dari KAP	(3.203.896.534,00)
e. Penyesuaian Piutnag Jamkesda Tahun 2020-2021 dari KAP	(494.233.500,00)
f. Koreksi Piutang Covid 19 Tahunm 2020-2021 dari KAP	(5.138.219.950,00)
g. Kas lainnya Bos Disdik berupa BUNGA yang belum disetor 31 Desember 2022	4.986.044,00
h. Kas Lainnya yang telah disetor bunga Bos dari Disdik tahun 2021	(27.153.320,00)
i. Reklas piutang retribusi kios pasar pada piutang lain-lain PAD yang sah dinas Koperasi	(1.062.500.000,00)
Jumlah	(6.053.862.017,08)

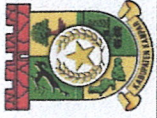
5.3.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan Transfer - LO adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Transfer - LO pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp2.218.905.397.994,00 sedangkan pada Tahun 2021 Pendapatan Transfer - LO sebesar Rp1.980.533.749.139,84 dan terjadi kenaikan sebesar Rp238.371.648.854,16 atau 12,04% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Transfer - LO	2.218.905.397.994,00	1.980.533.749.139,84	238.371.648.854,16	12,04
Jumlah	2.218.905.397.994,00	1.980.533.749.139,84	238.371.648.854,16	12,04



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2.043.116.302.678,00	1.527.586.933.089,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0,00	267.032.684.600,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	175.789.095.316,00	185.914.131.450,84
Jumlah	2.218.905.397.994,00	1.980.533.749.139,84

5.3.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

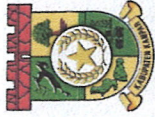
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp1.822.817.632.354,00 sedangkan pada Tahun 2021 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan sebesar Rp1.527.586.933.089,00 dan terjadi kenaikan sebesar Rp295.230.699.265,00 atau 19,33% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.822.817.632.354,00	1.527.586.933.089,00	295.230.699.265,00	19,33
Jumlah	1.822.817.632.354,00	1.527.586.933.089,00	295.230.699.265,00	19,33

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Dana Bagi Hasil	632.719.190.041,00	417.101.223.511,00
DBH PBB-LO	285.439.079.617,00	330.666.392.226,00
DBH PPh Pasal 21-LO	16.665.801.375,00	13.895.754.100,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	513.384.781,00	469.234.900,00
DBH CHT-LO	32.285,00	7.105,00
DBH SDA Minyak Bumi-LO	286.137.604.991,00	54.445.701.079,00
DBH SDA Gas Bumi-LO	25.868.706.286,00	3.968.206.145,00
DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	319.611.116,00	619.402,00
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	3.799.514.322,00	2.070.615.336,00
DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	11.805.391.057,00	10.456.374.218,00
DBH SDA Perikanan-LO	2.170.064.211,00	1.128.319.000,00
Dana Alokasi Umum	763.880.955.365,00	761.740.206.903,00
DAU-LO	763.880.955.365,00	761.740.206.903,00
Dana Alokasi Khusus - Fisik	126.047.411.232,00	126.136.423.620,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD- LO	1.989.439.000,00	341.051.500,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	51.546.977.534,00	22.815.653.378,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	6.469.901.200,00	19.702.577.074,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perustakaan Daerah-LO	0,00	396.563.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar-LO	17.670.990.072,00	17.766.220.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Rujukan-LO	0,00	11.643.777.584,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kefarmasian-LO	16.169.774.201,00	3.486.562.755,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas-LO	0,00	2.233.786.226,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- KB-LO	0,00	2.798.558.181,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan Stunting (KB)-LO	0,00	2.885.771.225,00
DAK Fisik-Bidang Penataan-Penugasan- Pemertanangan/renovasi sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	4.101.620.626,00	8.147.678.418,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan-LO	3.598.442.459,00	1.418.967.100,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	13.846.304.570,00	15.903.477.600,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan-LO	8.270.124.870,00	5.510.999.829,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan-LO	2.383.836.700,00	6.070.460.750,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	0,00	3.816.419.000,00
DAK Fisik-Bidang Lingkungan hidup dan Ketahanan-Penguatan-Lingkungan Hidup-LO	0,00	1.197.900.000,00
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	300.170.075.716,00	222.609.079.055,00
DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	109.685.700.688,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	143.565.146.290,00	175.673.027.000,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	1.469.518.000,00	887.232.000,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	4.131.815.760,00	5.820.237.000,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	10.214.710.000,00	9.696.300.000,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Keselaraan-LO	2.270.700.000,00	1.267.979.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	27.443.327.388,00	26.082.531.305,00
DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	397.200.000,00	387.161.750,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan-LO	0,00	1.750.812.000,00
DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS-LO	0,00	1.043.799.000,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	366.701.750,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	444.252.240,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	181.003.600,00	0,00
Jumlah	1.822.817.632.354,00	1.527.586.933.089,00

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan LRA, LO dan NERACA dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun Berjalan (LO)	1.822.817.632.354,00
b. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun Berjalan (LRA)	1.764.927.661.865,00
c. Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
d. Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 20NN-1 (Neraca)	0,00
e. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
f. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	0,00
Selisih (a-b)-(c-d)+(e-f)	57.889.970.489,00

Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan LRA, LO dan Neraca sebesar Rp57.889.970.489,00 merupakan koreksi kurang catat penyaluran pokok DBH melalui TDF.

5.3.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp220.298.670.324,00 sedangkan pada Tahun 2021 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya sebesar Rp267.032.684.600,00 dan terjadi penurunan sebesar -Rp46.734.014.276,00 atau -17,50% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

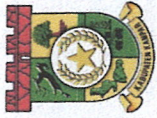
Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	220.298.670.324,00	267.032.684.600,00	(46.734.014.276,00)	(17,50)
Jumlah	220.298.670.324,00	267.032.684.600,00	(46.734.014.276,00)	(17,50)

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
DID-LO	5.205.152.000,00	50.290.844.000,00
Dana Desa-LO	215.093.518.324,00	216.741.840.600,00
Jumlah	220.298.670.324,00	267.032.684.600,00

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya LRA, LO dan NERACA dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Tahun Berjalan (LO)	220.298.670.324,00
b. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Tahun Berjalan (LRA)	220.298.670.324,00
c. Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Tahun Berjalan (Neraca)	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

d.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Tahun 20NN-1 (Neraca)	0,00
e.	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
f.	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	0,00
Selisih (a-b)-(c-d)+(e-f)		0,00

5.3.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp175.789.095.316,00 sedangkan pada Tahun 2021 Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp185.914.131.450,84 dan terjadi penurunan sebesar -Rp10.125.036.134,84 atau -5,45% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	175.789.095.316,00	185.914.131.450,84	(10.125.036.134,84)	(5,45)
Jumlah	175.789.095.316,00	185.914.131.450,84	(10.125.036.134,84)	(5,45)

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	0,00	36.485.322.909,84
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	0,00	27.327.031.571,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	148.100.220.316,00	51.912.501.844,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	0,00	2.238.872.260,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	0,00	37.122.403.119,00
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	25.322.000.000,00	23.352.000.000,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	2.366.875.000,00	7.475.999.747,00
Jumlah	175.789.095.316,00	185.914.131.450,84

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah LRA, Retribusi LO dan NERACA dengan penjelasan sebagai berikut:

a.	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Berjalan (LO)	175.789.095.316,00
b.	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Berjalan (LRA)	180.695.925.247,00
c.	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Berjalan (Neraca)	18.748.141.653,99
d.	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 20NN-1 (Neraca)	23.654.971.584,99
e.	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
f.	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	0,00
Selisih (a-b)-(c-d)+(e-f)		0,00

5.3.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

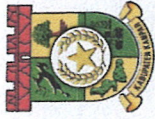
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp4.526.876.249,50 sedangkan pada Tahun 2021 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp121.623.354.004,00 dan terjadi penurunan sebesar -Rp117.096.477.754,50 atau -96,28% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	4.526.876.249,50	121.623.354.004,00	(117.096.477.754,50)	(96,28)
Jumlah	4.526.876.249,50	121.623.354.004,00	(117.096.477.754,50)	(96,28)

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	0,00	0,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	1.548.414.079,50	50.930.002,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LC	0,00	815.512.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Lain-lain Pendapatan-LO	0,00	112.871.560.000,00
Sumbangan Phak Ketiga/Sejenis-LO	0,00	1.034.000.000,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	1.773.182.496,00	6.851.352.002,00
Sumbangan Phak Ketiga/Sejenis-LO	1.205.279.674,00	0,00
Jumlah	4.526.876.249,50	121.623.354.004,00

Adapun perbedaan jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LRA, Retribusi LO dan NERACA dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Lain - Lain Pendapatan yang Sah Tahun Berjalan (LO)	4.526.876.249,50
b. Lain - Lain Pendapatan yang Sah Tahun Berjalan (LRA)	1.165.279.674,00
c. Piutang Lain - Lain Pendapatan yang Sah Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
d. Piutang Lain - Lain Pendapatan yang Sah Tahun 20NN-1 (Neraca)	0,00
e. Lain - Lain Pendapatan yang Sah Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
f. Lain - Lain Pendapatan yang Sah Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	0,00
Selisih (a-b)-(c-d)+(e-f)	3.361.596.575,50

Perbedaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah LRA, Retribusi LO dan Neraca sebesar Rp3.361.596.575,50 terdiri dari:

a. Pendapatan Hibah berupa Barang yang menjadi Aset Tetap Disdik	1.454.280.000,00
b. Pendapatan Hibah berupa Barang yang menjadi Aset Tetap Satpol PP	16.320.000,00
c. Pendapatan Hibah berupa Barang yang menjadi Aset Tetap BPBD	190.000.000,00
d. Pendapatan Hibah berupa Barang yang menjadi Aset Tetap Dinsos	40.000.000,00
e. Pendapatan Hibah berupa Barang yang menjadi Aset Tetap Damkar	272.139.998,00
f. Pendapatan Hibah berupa Barang yang menjadi Aset Tetap Pariwisata	46.762.498,00
g. Koreksi Kurang Saji Persediaan Terkait Penerimaan Hibah Dari Pusat pada Dinkes	1.058.750.540,50
h. Koreksi Kurang Saji Persediaan Terkait Penerimaan Hibah Dari Pusat pada RSUD	283.343.539,00
Jumlah	3.361.596.575,50

5.3.2 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

5.3.2.1 Beban - LO

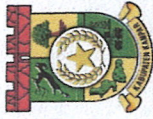
Beban - LO pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp2.528.880.828.016,03 sedangkan pada Tahun 2021 Beban Operasi - LO sebesar Rp2.491.147.706.032,83 dan terjadi kenaikan sebesar Rp37.733.121.983,20 atau 1,51% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.1 Beban - LO

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban - LO	2.528.880.828.016,03	2.491.147.706.032,83	37.733.121.983,20	1,51
Jumlah	2.528.880.828.016,03	2.491.147.706.032,83	37.733.121.983,20	1,51

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Beban Pegawai	987.316.514.741,80	979.127.480.204,20
Beban Persediaan	158.898.962.925,77	175.974.229.846,08
Beban Jasa	428.458.779.424,70	398.986.145.146,63
Beban Pemeliharaan	52.017.726.716,00	62.988.454.682,80
Beban Perjalanan Dinas	103.902.057.516,00	81.774.822.424,00
Beban Bunga	0,00	0,00
Beban Subsidi	436.450.000,00	0,00
Beban Hibah	47.790.625.141,92	74.131.252.083,00
Beban Bantuan Sosial	19.677.015.000,00	30.876.460.779,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Beban Penyisihan Piutang	13.347.270.253,93	13.835.751.918,07
Beban Penyusutan dan Amortisasi	336.590.923.282,91	319.053.766.222,05
Beban Transfer	379.598.382.063,00	351.699.759.695,00
Beban Lain-lain	846.120.950,00	2.699.583.032,00
Jumlah	2.528.880.828.016,03	2.491.147.706.032,83

5.3.2.1.1 Beban Pegawai

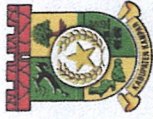
Beban Pegawai pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp987.316.514.741,80 sedangkan pada Tahun 2021 Beban Pegawai sebesar Rp979.127.480.204,20 dan terjadi kenaikan sebesar Rp8.189.034.537,60 atau 0,84% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.1.1 Beban Pegawai

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Pegawai	987.316.514.741,80	979.127.480.204,20	8.189.034.537,60	0,84
Jumlah	987.316.514.741,80	979.127.480.204,20	8.189.034.537,60	0,84

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	568.463.246.667,00	598.328.532.891,00
Dinas Kesehatan	120.397.723.140,00	104.693.662.349,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	68.121.471.156,80	43.153.724.018,20
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	9.922.691.485,00	10.127.028.400,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	3.831.563.513,00	3.965.569.365,00
Satuan Polisi Pamong Praja	3.634.623.213,00	3.793.140.136,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.697.058.548,00	3.509.097.913,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	3.027.561.598,00	2.367.739.208,00
Dinas Sosial	3.409.721.284,00	3.615.532.404,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3.951.676.156,00	3.754.350.497,00
Dinas Kelahanan Pangan	2.656.681.470,00	2.884.479.908,00
Dinas Lingkungan Hidup	4.590.343.586,00	4.590.396.996,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.884.679.205,00	3.520.669.215,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	3.282.546.570,00	3.676.744.095,00
Dinas Perhubungan	4.291.232.945,00	4.486.922.343,00
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	3.959.013.239,00	3.807.136.557,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.338.909.060,00	5.652.828.774,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	3.311.001.622,00	3.086.363.230,00
Dinas Perikanan	3.985.690.826,00	3.868.753.222,00
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	2.962.144.565,00	2.959.709.047,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	15.265.031.577,00	16.468.833.366,00
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	6.702.007.926,00	7.105.474.266,00
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	3.838.695.112,00	3.975.127.401,00
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	3.533.488.026,00	3.658.981.889,00
Sekretariat Daerah	20.320.526.960,00	21.206.365.476,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	37.023.329.950,00	37.215.409.601,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.485.872.700,00	6.435.344.795,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	7.905.775.570,00	7.225.799.690,00
Badan Pendapatan Daerah	11.621.672.469,00	11.084.801.277,00
Badan Kepegawainan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.088.019.726,00	4.082.582.276,00
Inspektorat Kabupaten	11.939.004.767,00	11.445.414.444,00
Kecamatan Kampar Kiri	1.765.549.923,00	1.932.974.117,00
Kecamatan Tapung Hilir	1.553.218.477,00	1.603.356.449,00
Kecamatan Tapung Hulu	1.026.982.759,00	987.143.879,00
Kecamatan Tapung	1.440.619.261,00	1.663.695.662,00
Kecamatan Tambang	1.980.529.281,00	2.012.814.604,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Kecamatan Kampar	2.309.146.121,00	2.290.815.030,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	1.502.972.232,00	1.455.313.952,00
Kecamatan Siak Hulu	2.317.412.118,00	2.148.311.163,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	1.564.910.436,00	1.509.355.441,00
Kecamatan Rumbio Jaya	1.015.962.985,00	1.112.353.873,00
Kecamatan Kampar Ujara	639.805.599,00	949.990.827,00
Kecamatan Kampa	1.148.426.979,00	1.148.360.923,00
Kecamatan Salo	839.157.909,00	989.455.836,00
Kecamatan Bangkinang	1.805.751.747,00	1.768.305.524,00
Kecamatan Kuok	1.177.809.853,00	1.164.208.476,00
Kecamatan Bangkinang Kota	2.047.202.709,00	2.082.682.998,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	1.588.772.470,00	1.608.530.108,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	1.393.627.146,00	1.497.035.547,00
Kecamatan Gunung Sahilan	943.416.145,00	947.285.481,00
Kecamatan Perhentian Raja	1.301.867.215,00	1.397.551.226,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	1.078.499.995,00	916.167.011,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.431.898.750,00	2.195.256.028,00
Jumlah	987.316.514.741,80	979.127.480.204,20

5.3.2.1.2 Beban Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

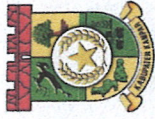
Beban Persediaan pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp158.898.962.925,77 sedangkan pada Tahun 2021 Beban Persediaan sebesar Rp175.974.229.846,08 dan terjadi penurunan sebesar -Rp17.075.266.920,31 atau -9,70% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.1.2 Beban Persediaan

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Persediaan	158.898.962.925,77	175.974.229.846,08	(17.075.266.920,31)	(9,70)
Jumlah	158.898.962.925,77	175.974.229.846,08	(17.075.266.920,31)	(9,70)

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	34.868.130.476,00	40.314.407.169,00
Dinas Kesehatan	17.965.812.719,90	18.379.007.948,06
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	29.900.237.222,30	37.815.523.874,51
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	28.779.200.265,01	3.941.554.785,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	432.046.133,00	976.239.447,51
Satuan Polisi Pamong Praja	448.343.415,00	730.846.315,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	553.379.376,00	823.986.479,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	686.325.600,00	1.007.817.635,00
Dinas Sosial	494.068.042,00	981.145.824,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.776.407.212,00	3.846.653.975,00
Dinas Ketahanan Pangan	2.295.836.824,39	6.886.636.954,00
Dinas Lingkungan Hidup	3.380.719.534,00	4.421.538.071,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.051.642.100,67	1.930.651.175,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	439.114.250,00	622.631.073,00
Dinas Perhubungan	2.290.466.916,00	3.984.267.035,00
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	1.386.613.658,00	1.419.073.666,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	699.113.470,00	1.089.964.813,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	283.569.226,00	326.335.106,00
Dinas Perikanan	768.508.621,00	575.005.534,00
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	896.320.388,00	2.175.486.057,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	3.152.124.769,00	3.496.871.372,00
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	1.620.022.935,50	2.098.698.428,00
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	1.236.337.201,00	696.751.735,00
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	816.110.135,00	971.543.309,00
Sekretariat Daerah	7.878.965.951,00	17.012.663.510,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.794.685.023,00	6.147.668.028,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.921.957.037,00	1.964.257.173,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	1.412.620.071,00	1.691.740.912,00
Badan Pendapatan Daerah	2.115.305.969,00	1.837.913.065,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	236.489.265,00	1.367.508.565,00
Inspektorat Kabupaten	377.973.824,00	525.068.255,00
Kecamatan Kampar Kiri	145.597.238,00	293.919.302,00
Kecamatan Tapung Hilir	78.756.802,00	221.537.220,00
Kecamatan Tapung Hulu	130.843.100,00	286.607.020,00
Kecamatan Tapung	120.281.481,00	246.464.400,00
Kecamatan Tambang	89.690.600,00	195.119.613,00
Kecamatan Kampar	151.901.716,00	286.610.402,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	199.720.172,00	244.211.141,00
Kecamatan Siak Hulu	100.273.058,00	181.484.779,00
Kecamatan XIII Kolo Kampar	85.906.205,00	210.500.629,00
Kecamatan Rumbio Jaya	89.864.279,00	199.023.708,00
Kecamatan Kampar Uluara	101.931.498,00	176.138.209,00
Kecamatan Kampa	82.955.677,00	178.802.188,00
Kecamatan Salo	80.189.071,00	181.121.570,00
Kecamatan Bangkinang	133.849.978,00	288.702.628,00
Kecamatan Kuok	97.663.580,00	170.848.551,00
Kecamatan Bangkinang Kota	185.658.839,00	502.814.516,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	130.038.400,00	193.353.900,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	120.229.539,00	169.744.958,00
Kecamatan Gunung Sahilan	78.536.050,00	157.633.950,00
Kecamatan Perhentian Raja	76.551.150,00	208.242.515,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	73.268.364,00	156.149.335,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	586.808.499,00	1.165.742.024,00
Jumlah	158.898.962.925,77	175.974.229.846,08

5.3.2.1.3 Beban Jasa

Beban Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang bernilai manfaat kurang dari dua belas bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Beban operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintahan pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Beban Jasa pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp428.458.779.424,70 sedangkan pada Tahun 2021 Beban Jasa sebesar Rp398.986.145.146,63 dan terjadi kenaikan sebesar Rp29.472.634.278,07 atau 7,39% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.1.3 Beban Jasa

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Jasa	428.458.779.424,70	398.986.145.146,63	29.472.634.278,07	7,39
Jumlah	428.458.779.424,70	398.986.145.146,63	29.472.634.278,07	7,39

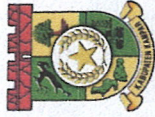
Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	137.423.989.169,20	123.557.274.430,00
Dinas Kesehatan	53.791.985.173,00	76.230.048.608,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	28.081.367.578,00	46.581.087.222,63
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	12.090.870.931,00	12.279.170.868,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	3.465.858.020,00	2.849.043.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	10.174.786.621,00	10.195.438.020,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.857.828.768,00	3.007.534.475,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	7.896.663.484,00	2.634.693.901,00
Dinas Sosial	4.023.784.351,00	3.680.440.451,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	8.986.433.658,00	6.701.928.761,00
Dinas Keluhan Pangan	1.502.447.820,00	682.698.500,00
Dinas Lingkungan Hidup	11.432.175.776,00	11.306.342.652,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.947.914.902,00	1.657.555.816,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.870.505.683,00	1.343.035.355,00
Dinas Perhubungan	32.582.115.484,00	23.273.547.392,00
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	5.031.423.190,00	4.484.127.828,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.005.794.460,00	2.472.610.613,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1.417.325.309,00	1.081.161.884,00
Dinas Perikanan	2.110.045.635,00	1.731.461.426,00
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	4.130.302.447,00	2.564.021.108,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	3.822.853.038,00	1.824.775.613,00
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	3.346.787.480,00	2.889.597.852,00
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	3.340.732.423,00	1.218.888.187,00
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	3.471.572.388,00	2.209.582.195,00
Sekretariat Daerah	38.572.947.374,00	20.801.595.760,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12.768.216.979,00	8.940.546.262,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.443.976.715,00	2.392.669.156,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	3.743.876.517,00	2.461.408.477,00
Badan Pendapatan Daerah	3.380.320.212,00	2.299.981.080,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.750.016.839,00	3.320.133.190,00
Inspektorat Kabupaten	1.734.416.201,50	1.509.632.057,00
Kecamatan Kampar Kiri	542.291.312,00	366.590.583,00
Kecamatan Tapung Hilir	306.807.642,00	211.861.158,00
Kecamatan Tapung Hulu	247.754.080,00	127.934.617,00
Kecamatan Tapung	398.583.818,00	283.388.421,00
Kecamatan Tambang	316.563.866,00	236.152.475,00
Kecamatan Kampar	522.825.474,00	461.392.976,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	249.439.074,00	130.413.000,00
Kecamatan Siak Hulu	324.273.685,00	183.892.500,00
Kecamatan XII Koto Kampar	618.731.745,00	416.493.825,00
Kecamatan Rumbio Jaya	239.436.943,00	141.807.119,00
Kecamatan Kampar Utara	281.326.578,00	218.393.060,00
Kecamatan Kampa	265.327.000,00	171.649.558,00
Kecamatan Salo	255.187.179,00	158.363.320,00
Kecamatan Bangkinang	688.054.313,00	583.704.200,00
Kecamatan Kuok	304.213.007,00	217.437.786,00
Kecamatan Bangkinang Kota	914.178.986,00	650.110.764,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	195.159.586,00	142.519.236,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	362.018.680,00	249.158.020,00
Kecamatan Gunung Sahilan	284.498.794,00	152.749.114,00
Kecamatan Perhentian Raja	301.801.593,00	165.687.491,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	286.456.479,00	193.773.676,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	5.354.514.955,00	5.340.640.108,00
Jumlah	428.458.779.424,70	398.986.145.146,63



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

5.3.2.1.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang atau memperbaikinya sampai kondisi yang bisa diterima.

Beban Pemeliharaan pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp52.017.726.716,00 sedangkan pada Tahun 2021 Beban Pemeliharaan sebesar Rp62.988.454.682,80 dan terjadi penurunan sebesar - Rp10.970.727.966,80 atau -17,42% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.1.4 Beban Pemeliharaan

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenalkan/(Penurunan)	%
Beban Pemeliharaan	52.017.726.716,00	62.988.454.682,80	(10.970.727.966,80)	(17,42)
Jumlah	52.017.726.716,00	62.988.454.682,80	(10.970.727.966,80)	(17,42)

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	7.426.873.593,00	10.576.831.479,80
Dinas Kesehatan	880.707.544,00	3.415.379.738,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	3.620.806.710,00	9.427.183.410,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	6.167.648.347,00	9.390.474.194,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	459.533.251,00	260.778.107,00
Satuan Polisi Pamong Praja	352.594.972,00	270.062.952,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.033.999.675,00	2.782.303.660,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	359.970.500,00	560.321.050,00
Dinas Sosial	288.316.337,00	298.403.466,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	518.641.770,00	407.759.240,00
Dinas Kelahanan Pangan	39.187.438,00	85.419.188,00
Dinas Lingkungan Hidup	2.606.471.740,00	3.747.920.864,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	339.888.210,00	136.735.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	245.115.057,00	266.468.656,00
Dinas Perhubungan	1.669.179.750,00	2.307.092.571,00
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	524.837.789,00	517.936.467,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	591.213.812,00	674.960.251,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	243.484.515,00	67.727.226,00
Dinas Perikanan	1.321.091.238,00	419.027.226,00
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	192.489.400,00	706.381.837,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	289.785.000,00	1.890.000,00
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	363.599.365,00	428.734.404,00
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	990.899.200,00	234.963.628,00
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	873.001.612,00	290.536.600,00
Sekretariat Daerah	14.123.373.378,00	11.831.960.613,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2.359.169.624,00	1.676.690.594,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.752.060.894,00	240.748.915,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	567.990.612,00	320.910.936,00
Badan Pendapatan Daerah	922.546.748,00	815.989.412,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	23.530.116,00	22.037.300,00
Inspektorat Kabupaten	293.528.038,00	197.342.145,00
Kecamatan Kampar Kiri	21.691.795,00	14.995.420,00
Kecamatan Tapung Hilir	8.742.500,00	9.372.400,00
Kecamatan Tapung Hulu	17.627.500,00	14.544.500,00
Kecamatan Tapung	8.320.200,00	13.620.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Kecamatan Tambang	39.658.300,00	4.376.400,00
Kecamatan Kampar	31.368.511,00	47.517.347,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	11.863.435,00	13.923.690,00
Kecamatan Siak Hulu	7.032.466,00	32.886.788,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	14.496.724,00	3.558.817,00
Kecamatan Rumbio Jaya	15.043.200,00	10.818.400,00
Kecamatan Kampar Utara	25.424.742,00	10.745.900,00
Kecamatan Kampa	12.845.700,00	9.496.463,00
Kecamatan Salo	19.876.213,00	10.446.963,00
Kecamatan Bangkinang	6.665.663,00	5.577.491,00
Kecamatan Kuok	10.789.900,00	8.826.900,00
Kecamatan Bangkinang Kota	48.401.563,00	21.186.745,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	5.300.000,00	3.200.000,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	16.926.078,00	10.616.395,00
Kecamatan Gunung Sahilan	19.951.600,00	7.532.500,00
Kecamatan Perhentian Raja	10.964.100,00	13.396.000,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	35.518.070,00	13.346.604,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	187.712.221,00	327.497.830,00
Jumlah	52.017.726.716,00	62.988.454.682,80

5.3.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah kegiatan operasional dalam bepergian ke suatu tempat tertentu dalam rangka melaksanakan tugas kewajiban kantor.

Beban Perjalanan Dinas pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp103.902.057.516,00 sedangkan pada Tahun 2021 Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp81.774.822.424,00 dan terjadi kenaikan sebesar Rp22.127.235.092,00 atau 27,06% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Perjalanan Dinas	103.902.057.516,00	81.774.822.424,00	22.127.235.092,00	27,06
Jumlah	103.902.057.516,00	81.774.822.424,00	22.127.235.092,00	27,06

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	2.357.212.205,00	2.871.960.792,00
Dinas Kesehatan	20.913.164.571,00	18.046.369.218,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	938.812.729,00	600.991.574,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2.227.946.667,00	1.961.906.863,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	1.411.379.236,00	1.253.462.510,00
Satuan Polisi Pamong Praja	552.887.040,00	425.849.900,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	760.239.489,00	614.492.200,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	341.194.168,00	502.790.863,00
Dinas Sosial	1.111.144.864,00	877.894.786,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3.626.217.100,00	2.549.255.144,00
Dinas Keluhan Pangan	716.998.870,00	691.314.800,00
Dinas Lingkungan Hidup	898.736.154,00	1.243.641.148,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	350.719.463,00	480.851.164,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	780.158.000,00	647.740.754,00
Dinas Perhubungan	1.128.731.009,00	1.266.808.645,00
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	1.356.859.958,00	721.116.666,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	893.129.073,00	1.096.730.707,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	597.458.030,00	486.863.069,00
Dinas Perikanan	1.446.509.265,00	681.052.300,00
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	813.270.245,00	800.605.900,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	2.030.919.895,00	890.896.551,00
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	820.919.963,00	1.145.975.502,00
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	1.391.418.783,00	1.009.530.500,00
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	1.856.270.875,00	1.090.095.869,00
Sekretariat Daerah	11.291.724.427,00	8.143.339.298,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	28.991.025.293,00	20.539.911.738,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.196.570.419,00	2.219.080.639,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	1.379.017.181,00	776.312.309,00
Badan Pendapatan Daerah	2.171.769.182,00	1.949.046.245,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	819.324.159,00	640.441.475,00
Inspektorat Kabupaten	2.279.721.070,00	2.488.295.995,00
Kecamatan Kampar Kiri	141.232.790,00	97.850.000,00
Kecamatan Tapung Hilir	50.515.290,00	59.356.400,00
Kecamatan Tapung Hulu	127.787.200,00	82.650.000,00
Kecamatan Tapung	104.308.000,00	37.840.000,00
Kecamatan Tambang	110.450.000,00	62.480.000,00
Kecamatan Kampar	111.358.000,00	103.578.000,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	146.474.772,00	117.433.000,00
Kecamatan Siak Hulu	33.750.000,00	13.650.000,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	36.810.000,00	35.250.000,00
Kecamatan Rumbio Jaya	112.052.000,00	61.982.000,00
Kecamatan Kampar Utara	65.143.469,00	49.290.000,00
Kecamatan Kampa	82.206.000,00	69.141.900,00
Kecamatan Salo	105.579.411,00	45.355.000,00
Kecamatan Bangkinang	117.483.000,00	22.440.000,00
Kecamatan Kuok	39.610.000,00	40.810.000,00
Kecamatan Bangkinang Kota	125.563.887,00	14.995.000,00
Kecamatan Kampar Kin Tengah	70.640.000,00	41.700.000,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	78.570.000,00	91.016.000,00
Kecamatan Gunung Sahilan	99.930.880,00	41.400.000,00
Kecamatan Perhentian Raja	53.220.000,00	32.400.000,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	62.850.000,00	48.600.000,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.575.073.634,00	1.890.980.000,00
Jumlah	103.902.057.516,00	81.774.822.424,00

5.3.2.1.6 Beban Subsidi

Beban Subsidi pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp436.450.000,00 sedangkan pada Tahun 2021 Beban Subsidi sebesar Rp0,00 dan terjadi kenaikan sebesar Rp436.450.000,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.1.6 Beban Subsidi

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Subsidi	436.450.000,00	0,00	436.450.000,00	100,00
Jumlah	436.450.000,00	0,00	436.450.000,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	436.450.000,00	0,00
Jumlah	436.450.000,00	0,00

5.3.2.1.7 Beban Hibah

Beban Hibah pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp47.790.625.141,92 sedangkan pada Tahun 2021 Beban Hibah sebesar Rp74.131.252.083,00 dan terjadi penurunan sebesar -Rp26.340.626.941,08 atau -35,53% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.1.7 Beban Hibah

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenalkan/(Penurunan)	%
Beban Hibah	47.790.625.141,92	74.131.252.083,00	(26.340.626.941,08)	(35,53)
Jumlah	47.790.625.141,92	74.131.252.083,00	(26.340.626.941,08)	(35,53)

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	21.985.409.900,00	27.873.072.342,00
Dinas Kesehatan	1.300.000.000,00	1.450.000.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.901.370.403,00	8.957.833.591,00
Dinas Sosial	2.475.133.803,00	1.804.288.784,00
Dinas Keluhan Pangan	12.500.000,00	158.400.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	0,00	14.500.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	100.000.000,00	100.000.000,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	916.312.000,00	1.465.766.000,00
Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	4.519.856.985,92	14.309.415.700,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	4.316.797.290,00
Dinas Perikanan	6.379.120.650,00	5.639.337.800,00
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	797.754.400,00	200.000.000,00
Sekretariat Daerah	2.405.000.000,00	5.314.089.000,00
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	2.998.167.000,00	2.456.871.576,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	0,00	70.900.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset	0,00	0,00
Jumlah	47.790.625.141,92	74.131.252.083,00

5.3.2.1.8 Beban Bantuan Sosial

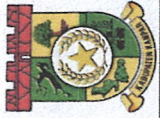
Beban Bantuan Sosial pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp19.677.015.000,00 sedangkan pada Tahun 2021 Beban Bantuan Sosial sebesar Rp30.876.460.779,00 dan terjadi penurunan sebesar -Rp11.199.445.779,00 atau -36,27% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.1.8 Beban Bantuan Sosial

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenalkan/(Penurunan)	%
Beban Bantuan Sosial	19.677.015.000,00	30.876.460.779,00	(11.199.445.779,00)	(36)
Jumlah	19.677.015.000,00	30.876.460.779,00	(11.199.445.779,00)	(36)

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	16.200.000.000,00	30.875.510.779,00
Dinas Sosial	865.220.000,00	950.000,00
Dinas Perhubungan	1.209.600.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Dinas Perikanan	243.000.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	703.800.000,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	455.395.000,00
Jumlah	19.677.015.000,00
	30.876.460.779,00

5.3.2.1.9 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp13.347.270.253,93 sedangkan pada Tahun 2021 Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp13.835.751.918,07 dan terjadi penurunan sebesar - Rp488.481.664,14 atau -3,53% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.1.9 Beban Penyisihan Piutang

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Penyisihan Piutang	13.347.270.253,93	13.835.751.918,07	(488.481.664,14)	(3,53)
Jumlah	13.347.270.253,93	13.835.751.918,07	(488.481.664,14)	(3,53)

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Beban Penyisihan Piutang Pajak Badan Pendapatan Daerah	13.116.908.978,43	13.619.943.903,57
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	89.311.275,50	53.233.014,50
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	141.050.000,00	162.575.000,00
Jumlah	13.347.270.253,93	13.835.751.918,07

5.3.2.1.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp336.590.923.282,91 sedangkan pada Tahun 2021 Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp319.053.766.222,05 dan terjadi kenaikan sebesar Rp17.537.157.060,86 atau 05,50%.

Tabel 5.3.2.1.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

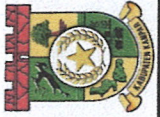
Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	336.590.923.282,91	319.053.766.222,05	17.537.157.060,86	5,50
Jumlah	336.590.923.282,91	319.053.766.222,05	17.537.157.060,86	5,50

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	112.558.707.632,95	97.789.639.663,01
Beban penyusutan Gedung dan Bangunan	37.985.683.159,70	35.392.485.012,74
Beban penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	185.851.893.990,26	185.633.458.705,30
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	194.638.500,00	238.182.841,00
Jumlah	336.590.923.282,91	319.053.766.222,05

5.3.2.1.11 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp112.558.707.632,95 sedangkan pada Tahun 2021 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp97.789.639.663,01 dan terjadi kenaikan sebesar Rp14.769.067.969,94 atau 15,10% dengan rincian sebagai berikut:



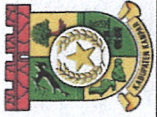
PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Tabel 5.3.2.1.11 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	112.558.707.632,95	97.789.639.663,01	14.769.067.969,94	15,10
Jumlah	112.558.707.632,95	97.789.639.663,01	14.769.067.969,94	15,10

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	43.493.685.779,04	30.672.574.291,19
Dinas Kesehatan	13.048.631.346,54	13.818.375.329,76
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	22.192.224.683,23	20.826.871.400,10
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.993.308.974,66	1.939.543.623,24
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	249.997.195,48	263.633.561,99
Satuan Polisi Pamong Praja	471.351.172,35	478.115.247,11
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	707.687.868,56	571.341.856,18
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	163.305.792,86	135.693.857,14
Dinas Sosial	528.609.029,17	500.215.985,52
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	861.001.845,16	741.779.585,89
Dinas Kelahiran Pangan	187.524.240,00	265.934.432,86
Dinas Lingkungan Hidup	1.557.911.633,98	1.536.268.177,48
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	445.378.901,00	326.125.001,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	282.535.547,22	156.185.142,20
Dinas Perhubungan	3.404.298.381,44	3.538.065.772,56
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	1.085.672.026,15	1.237.097.765,74
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.080.032.426,00	1.085.399.984,99
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	345.205.622,67	374.227.822,67
Dinas Perikanan	1.403.197.317,03	1.676.954.978,30
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	234.675.591,43	282.872.299,49
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	129.400.058,40	237.359.269,23
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	394.722.462,24	447.653.059,90
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	543.072.572,30	381.768.371,53
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	378.181.836,19	334.737.361,19
Sekretariat Daerah	10.604.536.027,24	9.558.689.665,41
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2.537.609.882,43	2.376.678.872,13
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	995.750.473,51	913.897.778,72
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	1.066.194.029,47	633.032.529,23
Badan Pendapatan Daerah	708.102.802,25	1.230.507.616,68
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	191.305.358,58	204.418.483,57
Inspektorat Kabupaten	279.086.502,85	284.158.328,91
Kecamatan Kampar Kiri	65.796.220,55	50.129.760,55
Kecamatan Tapung Hilir	1.450.000,00	1.450.000,00
Kecamatan Tapung Hulu	35.608.918,40	18.170.568,40
Kecamatan Tapung	1.644.500,00	1.644.500,00
Kecamatan Tambang	27.477.405,05	19.921.230,05
Kecamatan Kampar	27.560.250,00	26.560.250,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	52.749.800,00	46.316.330,00
Kecamatan Siak Hulu	15.804.930,23	8.696.250,00
Kecamatan XII Koto Kampar	52.432.400,05	37.967.924,05
Kecamatan Rumbio Jaya	18.381.131,42	10.558.111,41
Kecamatan Kampar Utara	3.202.000,00	3.202.000,00
Kecamatan Kampa	14.238.087,50	12.426.837,50
Kecamatan Salo	24.683.042,00	13.648.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Kecamatan Bangkinang	38.767.228,57	21.645.262,57
Kecamatan Kuok	6.870.000,00	1.135.000,00
Kecamatan Bangkinang Kofa	46.289.088,00	38.871.828,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	20.782.450,00	13.899.500,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	45.700.560,00	44.034.000,00
Kecamatan Gunung Sahilan	24.021.750,00	6.949.285,71
Kecamatan Perhentian Raja	5.772.916,67	5.647.916,66
Kecamatan Koto Kampar Hulu	16.671.727,15	22.443.342,15
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	448.605.847,93	354.144.314,05
Jumlah	112.558.707.632,95	97.789.639.663,01

5.3.2.1.12 Beban penyusutan Gedung dan Bangunan

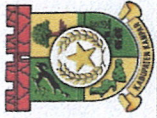
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp37.985.683.159,70 sedangkan pada Tahun 2021 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp35.392.485.012,74 dan terjadi kenaikan sebesar Rp2.593.198.146,96 atau 7,33% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.1.12 Beban penyusutan Gedung dan Bangunan

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Penyusutan Gedung dan	37.985.683.159,70	35.392.485.012,74	2.593.198.146,96	7,33
Jumlah	37.985.683.159,70	35.392.485.012,74	2.593.198.146,96	7,33

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	14.463.571.414,85	13.815.961.291,41
Dinas Kesehatan	2.573.440.232,07	1.141.359.738,25
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	1.701.160.070,34	1.415.849.306,32
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	650.484.425,22	602.511.775,06
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	11.020.330.055,67	11.015.536.635,68
Satuan Polisi Pamong Praja	15.728.100,00	15.728.100,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24.884.333,25	20.663.173,24
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	871.200,00	871.200,00
Dinas Sosial	147.838.880,67	143.946.308,65
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	40.400.215,00	40.400.215,00
Dinas Kelahanan Pangan	162.393.991,06	162.393.991,05
Dinas Lingkungan Hidup	1.001.799.196,00	872.419.026,39
Dinas Keperdukutan Dan Pencatatan Sipil	4.412.849,60	4.412.849,60
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	11.531.143,40	10.544.603,40
Dinas Perhubungan	465.619.680,99	463.285.021,00
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu	53.818.866,12	46.469.486,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	89.211.010,60	82.229.009,60
Dinas Perikanan	686.706.895,67	683.007.076,26
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	474.768.261,09	460.502.192,28
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	138.228.544,02	121.449.444,01
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	393.308.036,87	380.654.618,88
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	296.965.716,07	296.965.716,07
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	738.665.658,00	715.836.698,00
Sekretariat Daerah	1.833.306.924,44	1.832.808.157,03
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	120.312.235,65	120.312.235,64
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	116.943.275,25
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	27.947.085,00	27.547.085,00
Badan Pendapatan Daerah	102.221.593,52	97.095.493,53
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	53.689.934,40	53.689.934,40



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Inspektorat Kabupaten	8.449.258,54	8.449.258,54
Kecamatan Kampar Kiri	122.281.257,16	122.281.257,15
Kecamatan Tapung Hilir	11.182.600,00	11.182.600,00
Kecamatan Tapung Hulu	49.760.620,00	49.760.620,00
Kecamatan Tapung	13.111.760,00	13.111.760,00
Kecamatan Tambang	21.946.000,00	21.946.000,00
Kecamatan Kampar	110.110.161,43	55.793.503,35
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	23.210.658,00	20.778.658,00
Kecamatan Siak Hulu	33.962.996,13	33.962.995,18
Kecamatan XII Koto Kampar	36.412.755,96	36.412.755,97
Kecamatan Rumbio Jaya	39.649.891,90	39.649.891,89
Kecamatan Kampar Utara	5.610.560,00	5.610.560,00
Kecamatan Kampa	22.037.035,87	22.037.035,88
Kecamatan Salo	10.151.073,17	10.151.073,17
Kecamatan Bangkinang	8.581.740,00	8.581.740,00
Kecamatan Kuok	44.740.497,78	44.740.497,77
Kecamatan Bangkinang Kota	37.966.475,35	34.472.157,35
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	11.105.750,79	11.105.750,79
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	20.379.504,00	20.379.504,00
Kecamatan Gunung Sahilan	40.990.908,52	40.258.631,16
Kecamatan Perhentian Raja	18.425.105,53	18.425.105,54
Kecamatan Koto Kampar Hulu	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.000.000,00	2.000.000,00
Jumlah	37.985.683.159,70	35.392.485.012,74

5.3.2.1.13 Beban penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

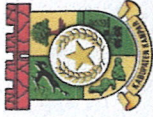
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp185.851.893.990,26 sedangkan pada Tahun 2021 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp185.633.458.705,30 dan terjadi kenaikan sebesar Rp218.435.284,96 atau 0,12% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.1.13 Beban penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	185.851.893.990,26	185.633.458.705,30	218.435.284,96	0,12
Jumlah	185.851.893.990,26	185.633.458.705,30	218.435.284,96	0,12

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	186.330.665,10	78.687.265,10
Dinas Kesehatan	210.538.083,50	210.538.083,50
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	12.034.475,00	12.034.475,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	159.946.827.495,86	161.437.869.463,80
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	19.071.322.101,53	17.064.584.227,75
Satuan Polisi Pamong Praja	1.663.334,00	1.663.332,67
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.197.776.318,36	1.190.692.595,55
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	0,00
Dinas Sosial	3.502.159,00	3.502.159,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	6.255.786,08	3.577.036,07
Dinas Ketahanan Pangan	2.768.238,12	2.768.238,12
Dinas Lingkungan Hidup	885.799.383,83	937.071.883,84
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.182.378,00	2.182.378,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	617.713.063,33	812.854.963,32



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	1.250.000,00	8.750.000,00
Dinas Peranaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	646.530,15	646.530,15
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	75.255,00	75.255,00
Dinas Perikanan	1.553.224.313,05	1.669.077.223,75
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	239.051.225,00	244.878.605,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	460.191.808,57	601.544.983,56
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	197.573.620,75	214.490.168,14
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	471.474.427,50	471.474.427,50
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	263.599.024,00	259.648.664,00
Sekretariat Daerah	63.051.608,76	61.950.690,03
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	17.943.066,66	17.943.066,67
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	13.718.223,12	13.718.223,13
Badan Pendapatan Daerah	5.341.020,83	133.333,33
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.210.375,00	3.210.375,00
Inspektorat Kabupaten	4.955.000,00	4.955.000,00
Kecamatan Kampar Kiri	33.595.209,60	24.875.209,60
Kecamatan Tapung Hilir	231.666,66	231.666,67
Kecamatan Tapung Hulu	0,00	0,00
Kecamatan Tapung	0,00	0,00
Kecamatan Tambang	500.000,00	500.000,00
Kecamatan Kampar	61.162.284,90	55.994.250,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	0,00	0,00
Kecamatan Siak Hulu	0,00	0,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	108.220.049,80	104.020.967,80
Kecamatan Rumbio Jaya	112.500,00	112.500,00
Kecamatan Kampar Utara	450.000,00	450.000,00
Kecamatan Kampa	165.750,00	165.750,00
Kecamatan Salo	155.000,00	155.000,00
Kecamatan Bangkinang	102.044.861,30	47.609.205,50
Kecamatan Kuok	825.000,00	825.000,00
Kecamatan Bangkinang Kola	33.962.158,19	21.811.439,04
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	492.916,67	492.916,66
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	69.486.779,71	45.221.339,71
Kecamatan Gunung Sahilan	283.333,33	283.333,34
Kecamatan Perhentian Raja	0,00	0,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	187.500,00	187.500,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00
Jumlah	185.851.893.990,26	185.633.458.705,30

5.3.2.1.14 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud

Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp194.638.500,00 sedangkan pada Tahun 2021 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp238.182.841,00 dan terjadi penurunan sebesar -Rp43.544.341,00 atau -18,28% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.1.14 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenakan/(Penurunan)	%
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	194.638.500,00	238.182.841,00	(43.544.341,00)	(18,28)
Jumlah	194.638.500,00	238.182.841,00	(43.544.341,00)	(18,28)

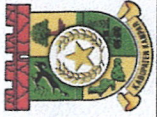
Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	12.430.000,00	12.430.000,00
Dinas Kesehatan	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	38.976.000,00	38.976.000,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0,00	0,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	0,00
Dinas Sosial	0,00	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	12.475.000,00	0,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	12.475.000,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	0,00	0,00
Dinas Perikanan	0,00	0,00
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	0,00	0,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	0,00	0,00
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	0,00	0,00
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	0,00	0,00
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	0,00	8.206.841,00
Sekretariat Daerah	52.882.500,00	52.882.500,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	44.825.000,00	80.162.500,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	0,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	33.050.000,00	33.050.000,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00
Inspektorat Kabupaten	0,00	0,00
Kecamatan Kampar Kiri	0,00	0,00
Kecamatan Tapung Hilir	0,00	0,00
Kecamatan Tapung Hulu	0,00	0,00
Kecamatan Tapung	0,00	0,00
Kecamatan Tambang	0,00	0,00
Kecamatan Kampar	0,00	0,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	0,00	0,00
Kecamatan Siak Hulu	0,00	0,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	0,00	0,00
Kecamatan Rumbio Jaya	0,00	0,00
Kecamatan Kampar Utara	0,00	0,00
Kecamatan Kampa	0,00	0,00
Kecamatan Salo	0,00	0,00
Kecamatan Bangkinang	0,00	0,00
Kecamatan Kuok	0,00	0,00
Kecamatan Bangkinang Kota	0,00	0,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	0,00	0,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	0,00	0,00
Kecamatan Gunung Sahilan	0,00	0,00
Kecamatan Perhentian Raja	0,00	0,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00
Jumlah	194.638.500,00	238.182.841,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

5.3.2.1.15 Beban Transfer

Beban Transfer atau beban bagi hasil digunakan untuk penganggaran yang bersumber dari Pendapatan Provinsi kepada Kabupaten/Kota atau pendapatan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa atau Pendapatan Pemerintah Daerah tertentu kepada Pemerintah Daerah lainnya.

Beban Transfer pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp379.598.382.063,00 sedangkan pada Tahun 2021 Beban Transfer adalah sebesar Rp351.699.759.695,00 dan terjadi kenaikan sebesar Rp27.898.622.368,00 atau 7,93% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.1.15 Beban Transfer

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Transfer	379.598.382.063,00	351.699.759.695,00	27.898.622.368,00	7,93
Jumlah	379.598.382.063,00	351.699.759.695,00	27.898.622.368,00	7,93

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2021
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	9.190.269.495,00	12.554.619.200,00
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Desa	1.233.516.252,00	1.380.795.856,00
Beban Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi	0,00	19.261.277,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	369.174.596.316,00	337.745.083.362,00
Jumlah	379.598.382.063,00	351.699.759.695,00

5.3.2.1.16 Beban Lain-Lain

Beban Lain-Lain terdiri dari belanja tidak terduga Tahun 2022 yaitu sebesar Rp846.120.950,00 sedangkan pada Tahun 2021 Beban Lain-Lain sebesar Rp2.699.583.032,00 dan terjadi penurunan sebesar -Rp1.853.462.082,00 atau -68,66% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.1.16 Beban Lain-Lain

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Lain-Lain	846.120.950,00	2.699.583.032,00	(1.853.462.082,00)	(68,66)
Jumlah	846.120.950,00	2.699.583.032,00	(1.853.462.082,00)	(68,66)

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2021
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga		0,00	0,00
Dinas Kesehatan		0,00	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang		0,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		0,00	0,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman		0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja		0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah		0,00	0,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan		0,00	0,00
Dinas Sosial		0,00	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan		0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup		0,00	0,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		0,00	0,00
Dinas Perhubungan		0,00	0,00
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian		0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		0,00	0,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan		0,00	0,00
Dinas Perikanan		0,00	0,00
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan		0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	0,00	0,00
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	0,00	0,00
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	0,00	0,00
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	0,00	0,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	846.120.950,00	2.699.583.032,00
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00
Inspektorat Kabupaten	0,00	0,00
Kecamatan Kampar Kiri	0,00	0,00
Kecamatan Tapung Hilir	0,00	0,00
Kecamatan Tapung Hulu	0,00	0,00
Kecamatan Tapung	0,00	0,00
Kecamatan Tambang	0,00	0,00
Kecamatan Kampar	0,00	0,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	0,00	0,00
Kecamatan Siak Hulu	0,00	0,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	0,00	0,00
Kecamatan Rumbio Jaya	0,00	0,00
Kecamatan Kampar Utara	0,00	0,00
Kecamatan Kampa	0,00	0,00
Kecamatan Salo	0,00	0,00
Kecamatan Bangkinang	0,00	0,00
Kecamatan Kuok	0,00	0,00
Kecamatan Bangkinang Kota	0,00	0,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	0,00	0,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	0,00	0,00
Kecamatan Gunung Sahilan	0,00	0,00
Kecamatan Perhentian Raja	0,00	0,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00
Jumlah	846.120.950,00	2.699.583.032,00

5.3.2.2 Surplus/Defisit - LO

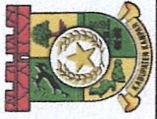
Surplus/Defisit - LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan pos luar biasa. Surplus/Defisit - LO pada Tahun 2022 yaitu sebesar - Rp29.113.662.361,48 sedangkan pada Tahun 2021 Surplus/Defisit -LO adalah sebesar - Rp93.011.065.787,69 dan terjadi penurunan sebesar Rp63.897.403.426,21 atau -68,70%.

Tabel 5.3.2.2 Surplus/Defisit - LO

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenakan/(Penurunan)	%
Surplus/Defisit - LO	(29.113.662.361,48)	(93.011.065.787,69)	63.897.403.426,21	(68,70)
Jumlah	(29.113.662.361,48)	(93.011.065.787,69)	63.897.403.426,21	(68,70)

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Pendapatan - LO	2.499.767.165.654,55	2.398.136.640.245,14
Beban	2.528.880.828.016,03	2.491.147.706.032,83
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00
Jumlah	(29.113.662.361,48)	(93.011.065.787,69)



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan penghubung antara laporan operasional dengan neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Terdapat dampak perubahan kebijakan/kesalahan mendasar karena perubahan basis akuntansi dengan rincian sebagai berikut.

5.4.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp4.431.693.225.708,45 sedangkan pada Tahun 2021 Ekuitas Awal adalah sebesar Rp4.518.882.670.881,64 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.1 Ekuitas Awal

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Ekuitas Awal	4.431.693.225.708,45	4.518.882.670.881,64	(87.189.445.173,19)	(1,93)
Jumlah	4.431.693.225.708,45	4.518.882.670.881,64	(87.189.445.173,19)	(1,93)

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Ekuitas Awal	4.431.693.225.708,45	4.518.882.670.881,64
Jumlah	4.431.693.225.708,45	4.518.882.670.881,64

5.4.2 Surplus / Defisit - LO

Surplus/Defisit - LO Tahun 2022 yaitu sebesar -Rp29.113.662.361,48 sedangkan pada Tahun 2021 Surplus/Defisit - LO adalah sebesar -Rp93.011.065.787,69 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.2 Surplus / Defisit - LO

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Surplus / Defisit - LO	(29.113.662.361,48)	(93.011.065.787,69)	63.897.403.426,21	(69)
Jumlah	(29.113.662.361,48)	(93.011.065.787,69)	63.897.403.426,21	(69)

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Surplus / Defisit - LO	(29.113.662.361)	(93.011.065.788)
Jumlah	(29.113.662.361)	(93.011.065.788)

5.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2022 yaitu sebesar Rp,00 sedangkan pada Tahun 2021 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar adalah sebesar Rp,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

5.4.4 Lain-Lain

Lain-lain pada Tahun 2022 yaitu sebesar -Rp1.737.357.057,48 sedangkan pada Tahun 2021 Lain-Lain adalah sebesar Rp5.821.620.614,50 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

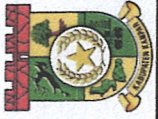
Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Koreksi Kelebihan Penetapan Pendapatan Tahun 2021 Diskominfo	(50.000,00)	0,00
Koreksi Nilai Aset Tanah Tahun 2022 Dinsos	1.491.698,00	0,00
Pelunasan dan Pemulihan Piutang PBB Bependa	(16.788.964.275,00)	(1.853.718.895,00)
Penyisihan Pelunasan dan Pemulihan Piutang PBB Bependa	12.530.171.977,76	963.336.823,99
Ansuran TGR yang telah disetor tahun sebelumnya	(4.990.002,00)	0,00
Penyesuaian Ekuitas BUMD Tahun 2022	(6.283.649.192,24)	7.916.482.007,51
Penjualan Aset BPKAD	(25.446.848,00)	0,00
Koreksi Kap Terkait Pengakuan Piutang Bpis Tahun 2020-2021	3.203.896.534,00	0,00
Koreksi Kap Terkait Pengakuan Piutang Jamkesda Tahun 2021	494.233.500,00	0,00
Koreksi Kap Terkait Pengakuan Piutang Covid 19 Tahun 2020-2021	5.138.219.950,00	0,00
Koreksi Aset Yang Merupakan Aset Ekstrakomtable Tahun Sebelumnya Disdik	(2.838.000,00)	0,00
Penyusutan Aset Yang Merupakan Aset Ekstrakomtable Tahun Sebelumnya	567.600,00	0,00
Pembayaran Piutang Tahun Sebelumnya Kominfo	0,00	(2.950.000,00)
Penyisihan Pembayaran Piutang Tahun Sebelumnya Kominfo	0,00	14.750,00
Aset Hibah dari pusat yang belum disajikan tahun sebelumnya Disdik	0,00	1.253.728.000,00
Peningkatan kualitas dari pemeliharaan aset tetap Dinkes	0,00	93.208.500,00
Penghapusan aset bangunan Gedung Dinkes	0,00	(2.913.207.000,00)
Adanya Penambahan Nilai Tanah Dengan Sertifikat Selda	0,00	636.199.138,00
Koreksi Silpa Bos Disdik yang bukan bagiankas bos tahun sebelumnya	0,00	(271.472.710,00)
Jumlah	(1.737.357.057,48)	5.821.620.614,50

5.4.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Tahun 2022 yaitu sebesar Rp4.400.842.206.289,49 sedangkan pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp4.431.693.225.708,45.

Tabel 5.4.5 Ekuitas Akhir

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Ekuitas Akhir	4.400.842.206.289,49	4.431.693.225.708,45	(30.851.019.418,96)	(1)
Jumlah	4.400.842.206.289,49	4.431.693.225.708,45	(30.851.019.418,96)	(1)



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

5.5 PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca terdiri dari Aset, Kewajiban dan Ekuitas, masing masing unsur dijelaskan sebagai berikut:

5.5.1 Aset

Aset pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp4.440.387.101.319,73 sedangkan pada Tahun 2021 jumlah Aset sebesar Rp4.457.284.018.394,64 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
A S E T	4.440.387.101.319,73	4.457.284.018.394,64
KEWAJIBAN	39.544.895.030,24	25.590.792.886,19
EKUITAS	4.400.842.206.289,49	4.431.693.225.708,45
JUMLAH KEWAJIBAN + EKUITAS	4.440.387.101.319,73	4.457.284.018.394,64

5.5.2 Kas di Kas Daerah

Jumlah saldo menurut Buku Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp15.895.443.741,75 dan jumlah saldo menurut Buku Bank sebesar Rp15.894.437.884,75 sedangkan Tahun 2021 jumlah saldo menurut buku Kas Daerah sebesar Rp67.899.957.481,24 dan saldo menurut buku bank sebesar Rp67.899.957.481,24.

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Saldo Bank Riau 109 - 02 - 15200	3.629.082.309,23	48.962.553.222,72
Saldo Bank BPR Sari Madu 00102702893	12.265.355.575,52	18.937.404.258,52
Jumlah saldo menurut bank	15.894.437.884,75	67.899.957.481,24
Jumlah saldo menurut buku Kas Daerah	15.895.443.741,75	67.899.957.481,24
Selisih buku bank dan buku Kasda	1.005.857,00	0,00

Selisih jumlah saldo menurut bank dengan jumlah saldo menurut buku kas daerah merupakan koreksi Bank BRK Syariah lebih posting sebesar Rp1.005.857,00 yang terdiri dari pajak tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp242.793,00, pajak tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp763.063,00 dan lebih posting bulan April 2022 sebesar Rp1,00.

5.5.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp2.615.000,00 sedangkan pada Tahun 2021 Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp136.227.723,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	135.644.961,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2.615.000,00	582.760,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	0,00	2,00
Jumlah	2.615.000,00	136.227.723,00

Penjelasan lebih lanjut menunjukkan bahwa sampai dengan 31 Desember 2022 masih terdapat Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp2.615.000,00 yang merupakan sisa Kas yang belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2022.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

5.5.4 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp0,00 sedangkan pada Tahun 2021 Kas di Bendahara Penerimaan adalah sebesar Rp1.671.500,00. Kas ini telah di akui sebagai penerimaan pada tahun sebelumnya dan tidak dicatat sebagai penerimaan di tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Dinas Perhubungan	0,00	1.671.500,00
Jumlah	0,00	1.671.500,00

5.5.5 Kas di Bendahara BLUD

Kas di Bendahara BLUD pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp5.868.742.544,21 sedangkan pada Tahun 2021 Kas di Bendahara BLUD adalah sebesar Rp6.801.310.047,97 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	4.825.520.898,08	5.176.001.839,32
Dinas Kesehatan	1.043.221.646,13	1.625.308.208,65
Jumlah	5.868.742.544,21	6.801.310.047,97

Penjelasan Kas BLUD RSUD Bangkinang:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	4.825.520.898,08	5.176.001.839,32
Yang terdiri dari :		
Bank Mandiri Syariah 1000020199	4.795.781.817,41	4.086.755.780,65
Uang Tunai Di Bendahara Pengeluaran	23.917,67	320.688.788,67
Uang Tunai Di Bendahara Penerima	29.715.163,00	4.496.128,00
Cek Batal Cair	0,00	764.061.142,00

Kas di BLUD RSUD Bangkinang dapat langsung digunakan untuk membiayai operasional di BLUD-RSUD tanpa harus disetor terlebih dahulu ke rekening Kas Bendahara umum Daerah sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 060/ORG/303/2011 tentang penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang sebagai Satuan Kerja Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh tanggal 19 Desember 2011.

Penjelasan Kas di Bendahara BLUD Dinas Kesehatan:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Puskesmas Salo	106.066.652,00	52.870.020,00
Puskesmas Kampar Utara	18.788.220,00	23.435.736,00
Puskesmas Tapung Perawatan	8.923.233,00	36.502.334,00
Puskesmas Tapung I	8.091.124,00	303,00
Puskesmas Tapung II	15.022.046,00	8.718.062,00
Puskesmas Kampar Kiri Hulu I	21.426.739,00	847.187,00
Puskesmas Kampar Kiri Hulu II	3.141.972,95	3.391.632,95
Puskesmas Gunung Sahilan I	6.027.555,00	522.397,00
Puskesmas Gunung Sahilan II	3.251.000,00	1.400,00
Puskesmas Siak Hulu I	8.913.000,00	3.651.968,00
Puskesmas Siak Hulu II	8.952.953,00	15.690.506,00
Puskesmas Siak Hulu III	8.629.259,00	12.697.939,00
Puskesmas Perhentian Raja	94.342.476,00	92.713.174,00
Puskesmas Tapung Hilir I	237.407.042,00	455.557.931,00
Puskesmas Tapung Hilir II	6.132.960,00	2.536.510,00
Puskesmas Tapung Hulu I	11.159.017,00	2.269.824,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Puskesmas Tapung Hulu II		6.256.994,00	2.146.422,00
Puskesmas Koto Kampar Hulu		22.347.800,00	37.813.654,00
Puskesmas Bangkinang Kota		6.082.002,00	100.970,00
Puskesmas Bangkinang		23.014.096,00	204.871.238,00
Puskesmas Kuok		6.582.238,00	14.893,00
Puskesmas Kampar		175.979.269,80	210.097.912,80
Puskesmas Rumbio Jaya		26.837.035,00	22.034.918,90
Puskesmas Kampar Timur		11.627.122,00	36.494.222,00
Puskesmas Kampar Kiri		3.662.327,00	230.191.466,00
Puskesmas XIII Koto Kampar I		45.892.054,38	11.390.545,00
Puskesmas XIII Koto Kampar II		44.819.979,00	2.340.121,00
Puskesmas XIII Koto Kampar III		5.573.654,00	0,00
Puskesmas Tambang		44.317.789,00	67.138.629,00
Puskesmas Kampar Kiri Tengah		44.532.557,00	83.799.066,00
Puskesmas Kampar Kiri Hilir		10.421.480,00	5.467.227,00
JUMLAH		1.043.221.646,13	1.625.308.208,65

5.5.6 Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp9.849.569,00 sedangkan pada Tahun 2021 Kas di Bendahara BOS adalah sebesar Rp20.596.060,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Kas di Bendahara Bos SD	8.496.459,00	15.412.897,00
Kas di Bendahara Bos SMP	1.353.110,00	5.183.163,00
Jumlah	9.849.569,00	20.596.060,00

5.5.7 Kas Lainnya

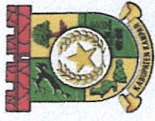
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp41.003.084,00 sedangkan pada Tahun 2021 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp59.411.227,67 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	23.483.994,00	36.185.072,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	23.226.155,67
Kecamatan Kampar Utara	17.453.888,00	0,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	65.202,00	0,00
Jumlah	41.003.084,00	59.411.227,67

Kas lainnya tersebut diatas dapat dijelaskan secara terperinci:

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

a. Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.674.501,00
b. Utang PPh 21	280.000,00
c. Utang PPh 23	526.000,00
d. Utang PPN Pusat	13.017.449,00
e. Pendapatan bunga bank atas Rekening Dana BOS	4.986.044,00
Kecamatan Kampar Utara :	
a. Utang PPh 22	1.188.959,00
b. Utang PPh 23	88.285,00
c. Utang PPN Pusat	9.240.244,00
d. Pajak Restoran	6.936.400,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik :	
a. Utang PPh 23	65.202,00
Jumlah	41.003.084,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

5.5.8 Piutang Pajak

Piutang Pajak pada Tahun 2022 merupakan piutang pajak PBB sebesar Rp191.638.594.152,00, sedangkan pada Tahun 2021 Piutang Pajak PBB adalah sebesar Rp192.464.771.827,00 dan terjadi Penurunan sebesar -Rp826.177.675,00 atau -0,43%.

Tabel 5.5.8 Piutang Pajak

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Pajak	191.638.594.152,00	192.464.771.827,00	(826.177.675,00)	(0,43)
Jumlah	191.638.594.152,00	192.464.771.827,00	(826.177.675,00)	(0,43)

Diantara saldo Piutang di atas terdapat Piutang PBB yang telah diserahterimakan dari pemerintah pusat ke Pemerintah Kabupaten Kampar tanggal 15 Januari 2013 dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor BA-019/WPJ.02/KP.12/2013. Saldo Piutang PBB pada saat serah terima sebesar Rp64.446.063.383,00.

5.5.9 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp408.612.900,00 sedangkan pada Tahun 2021 Piutang Retribusi adalah sebesar Rp1.595.912.900,00 dan terjadi penurunan sebesar - Rp1.187.300.000,00 atau -74,40%.

Tabel 5.5.9 Piutang Retribusi

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Retribusi	408.612.900,00	1.595.912.900,00	(1.187.300.000,00)	(74,40)
Jumlah	408.612.900,00	1.595.912.900,00	(1.187.300.000,00)	(74,40)

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Piutang Retribusi Kios Ramayana Dispeitndag Koperasi		0,00
Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian menara telekomuni Kasi Diskominfo		309.162.900,00
Piutang Retribusi Tempat Parkir Dinas Perhubungan		99.450.000,00
Jumlah	408.612.900,00	1.595.912.900,00

5.5.10 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah

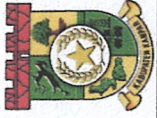
Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2022 yaitu sebesar Rp24.801.231.040,34 sedangkan pada Tahun 2021 Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp18.189.157.807,00 dan terjadi kenaikan sebesar Rp6.612.073.233,34 atau 36,35%.

Tabel 5.5.10 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	24.801.231.040,34	18.189.157.807,00	6.612.073.233,34	36,35
Jumlah	24.801.231.040,34	18.189.157.807,00	6.612.073.233,34	36,35

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah		0,00
Piutang Penempatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah (TDF)		14.040.078,34
Piutang Pendapatan BLUD		23.649.690.962,00
Piutang Hasil Kerjasama Daerah		1.137.500.000,00
Jumlah	24.801.231.040,34	18.189.157.807,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

5.5.11 Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Tahun 2022 yaitu sebesar Rp18.748.141.653,99 sedangkan pada Tahun 2021 Piutang Transfer penda lainnya sebesar Rp23.654.971.584,99 dan terjadi penurunan sebesar Rp4.906.829.931,00 atau 20,74%.

Tabel 5.5.11 Piutang Transfer Antar Daerah

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Transfer Antar Daerah	18.748.141.653,99	23.654.971.584,99	(4.906.829.931,00)	(20,74)
Jumlah	18.748.141.653,99	23.654.971.584,99	(4.906.829.931,00)	(20,74)

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2021
Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor		0,00	3.440.433.198,00
Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		6.052.135.058,00	3.017.639.793,00
Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		12.378.942.676,00	5.044.863.334,00
Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan		317.063.920,99	483.081.428,15
-		0,00	11.668.953.832,00
Jumlah		18.748.141.653,99	23.654.971.585,15

5.5.12 Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2022 yaitu sebesar Rp0,00 sedangkan pada Tahun 2021 Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp1.975.421.333,00.

Tabel 5.5.12 Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	1.975.421.333,00	(1.975.421.333,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	1.975.421.333,00	(1.975.421.333,00)	(100,00)

Dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	LHP	Tahun 2021	Tahun 2021
2022	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		1.975.421.333,00
Jumlah		0,00	1.975.421.333,00

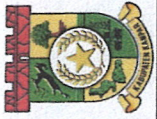
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2021 merupakan dana yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.975.421.333,00 telah disetor ke Kas Daerah dan Kas Negera di tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut: TGR Dana BTT 2020 sebesar Rp1.550.211.900,00 TGR PHR BTT 2022 sebesar Rp271.347.800,00 Pajak PPN sebesar Rp19.663.638,00 PPH Final Rp78.216,00 Pajak PPH 23 Rp96.720.688,00 PPH 22 Rp5.899.091,00 Pajak PPH 21 Rp31.500.000,00.

5.5.13 Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang pada Tahun 2022 yaitu sebesar -Rp149.844.806.314,01 sedangkan pada Tahun 2021 sebesar -Rp149.027.708.037,84 dan terjadi penurunan sebesar -Rp817.098.276,17 atau 0,55%.

Tabel 5.5.13 Penyisihan Piutang

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(148.871.556.024,01)	(148.284.819.023,34)	(586.737.000,67)	0,40
Penyisihan Piutang Retribusi	(973.250.290,00)	(742.889.014,50)	(230.361.275,50)	31,01
Jumlah	(149.844.806.314,01)	(149.027.708.037,84)	(817.098.276,17)	0,55



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pendapatan Daerah	(148.871.556,024,01)	(148.284.819,023,34)
Penyisihan Piutang Restribusi pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	(213.875.290,00)	(124.564,014,50)
Piutang Retribusi Kios Ramayana Disperindag Koperasi	(759.375.000,00)	(618.325.000,00)
Jumlah	(149.844.806.314,01)	(149.027.708.037,84)

5.5.14 Beban Dibayar Dimuka

Terdapat penyajian Beban Dibayar Dimuka pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp217.400.000,00 sedangkan pada Tahun 2021 sebesar Rp0,00 dan terjadi peningkatan sebesar Rp217.400.000,00 atau 100,00%.

Tabel 5.5.14 Beban Dibayar Dimuka

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Dibayar Dimuka	217.400.000,00	0,00	217.400.000,00	100,00
Jumlah	217.400.000,00	0,00	217.400.000,00	100,00

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Sekretariat Daerah Sewa Mes Mahasiswa	55.000.000,00	0,00
Dinas Kesehatan Sewa Rumah Singgah	162.400.000,00	0,00
Jumlah	217.400.000,00	0,00

5.5.15 Persediaan

Persediaan adalah Aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Jumlah Persediaan Tahun 2022 yaitu sebesar Rp31.813.823.630,50 sedangkan pada Tahun 2021 Persediaan sebesar Rp32.039.550.844,24 dan terjadi penurunan sebesar -Rp225.727.213,74 atau - 0,70%.

Tabel 5.5.15 Persediaan

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Persediaan	31.813.823.630,50	32.039.550.844,24	(225.727.213,74)	(0,70)
Jumlah	31.813.823.630,50	32.039.550.844,24	(225.727.213,74)	(0,70)

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Dinas Kesehatan	13.891.057.952,74	14.749.673.795,24
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	16.538.365.415,43	16.754.557.874,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	99.867.000,00	99.867.000,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	141.120,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	27.585.000,00
Dinas Sosial	854.000,00	1.520.500,00
Dinas Kelahanan Pangan	0,00	1.854.615,00
Dinas Lingkungan Hidup	600.300,00	1.524.120,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	970.932.073,33	203.265.960,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	280.000,00
Dinas Perhubungan	166.696.250,00	131.383.250,00
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	4.695.870,00	5.592.555,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.980.000,00	2.667.150,00
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	126.871.557,00	7.110.840,00
Sekretariat Daerah	0,00	34.365.528,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	5.366.617,00	2.721.910,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Badan Pendapatan Daerah		3.956.075,00	12.048.262,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		1.439.400,00	2.174.225,00
Inspektorat Kabupaten		0,00	1.368.260,00
Jumlah		31.813.823.630,50	32.039.550.844,24

Adapun rincian jenis barang persediaan adalah sebagai berikut:

Uraian Sisa Persediaan	Tahun 2022	Tahun 2021
Bahan Bangunan dan Konstruksi	21.281.800,00	0,00
Bahan Kimia	104.768.625,00	12.437.250,00
Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	58.530.675,00
Bahan/Bibit Tanaman	0,00	0,00
Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00
Isi Tabung Gas	0,00	0,00
Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	0,00
Bahan Lainnya	1.480.218.434,00	150.349.425,00
Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	0,00
Suku Cadang Alat Besar	0,00	0,00
Suku Cadang Alat Kedokteran	3.093.824.786,85	5.432.712.243,00
Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	0,00
Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	0,00
Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	0,00
Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	0,00
Suku Cadang Lainnya	7.840.000,00	0,00
Alat Tulis Kantor	0,00	0,00
Kertas dan Cover	759.465.878,33	198.204.538,00
Bahan Cetak	0,00	0,00
Benda Pos	425.321.555,00	390.686.636,00
Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	0,00
Bahan Komputer	0,00	0,00
Perabot Kantor	1.800.000,00	0,00
Alat Listrik	327.222.352,00	227.024.946,00
Perlengkapan Dinas	0,00	0,00
Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	0,00
Suvenir/Cendera Mata	0,00	20.817.500,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	726.614.287,00	997.550.475,00
Obat	13.195.044.403,06	13.488.645.855,96
Obat-obatan Lainnya	11.461.964.408,26	10.962.724.500,28
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	99.867.000,00	99.867.000,00
Natura	0,00	0,00
Natura dan Pakan Lainnya	0,00	0,00
Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	105.590.100,00	0,00
Jumlah	31.813.823.630,50	32.039.550.844,24

5.5.16 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp190.228.645.878,72 sedangkan pada Tahun 2021 Investasi Jangka Panjang sebesar Rp192.916.487.628,04 Sampai dengan Tahun 2022 tidak ada penambahan Investasi Jangka Panjang.

Tabel 5.5.16 Investasi Jangka Panjang

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Investasi Jangka Panjang	190.228.645.878,72	192.916.487.628,04	(2.687.841.749,32)	(1,39)
Jumlah	190.228.645.878,72	192.916.487.628,04	(2.687.841.749,32)	(1,39)



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	19.092.439.783,39	15.496.632.340,47
Investasi Jangka Panjang Permanen	171.136.206.095,33	177.419.855.287,57
Jumlah	190.228.645.878,72	192.916.487.628,04

5.5.16.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp19.092.439.783,39 sedangkan pada Tahun 2021 Investasi Jangka Panjang Non Permanen sebesar Rp15.496.632.340,47 Sampai dengan Tahun 2022 terjadi kenaikan Investasi Jangka Panjang Non Permanen sebesar Rp3.595.807.442,92.

Tabel 5.5.16.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	19.092.439.783,39	15.496.632.340,47	3.595.807.442,92	23,20
Jumlah	19.092.439.783,39	15.496.632.340,47	3.595.807.442,92	23,20

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Dana Bergulir		
Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih		
Jumlah		

5.5.16.1.1 Dana Bergulir

Dana Bergulir pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp169.150.000.000,00 sedangkan pada Tahun 2021 Dana Bergulir sebesar Rp169.150.000.000,00 Sampai dengan Tahun 2022 tidak ada penambahan Dana Bergulir.

Tabel 5.5.16.1.1 Dana Bergulir

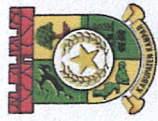
Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dana Bergulir	169.150.000.000,00	169.150.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah	169.150.000.000,00	169.150.000.000,00	0,00	0,00

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Bagian Perekonomian Seida Kampar		
Badan Penyuluhan Pertanian dan Kelahanan Pangan (BPPKP)		
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK		
Dinas Koperasi dan UKM		
Baitul Maal wa Tamwil (BMT)		
Jumlah		

Dana bergulir Kabupaten Kampar sebesar Rp169.150.000.000,00 terdiri dari:

1. Melalui kerja sama dengan PD. BPR Sarimadu yang disajikan Rp167.600.000.000,00
2. Dikelola sendiri oleh Dinas Koperasi dan UKM (tanpa kerjasama) Rp1.150.000.000,00
3. Terdapat penambahan atas reklasifikasi dari investasi permanen sebanyak 11 BMT sebesar Rp400.000.000,00 menjadi investasi non permanen dana bergulir.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

5.5.17 Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih

Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih pada Tahun 2022 yaitu sebesar -Rp150.057.560.216,61 sedangkan pada Tahun 2021 Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih sebesar -Rp153.653.367.659,53.

Tabel 5.5.17 Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Penyisihan dana bergulir tidak tertagih	(150.057.560.216,61)	(153.653.367.659,53)	3.595.807.442,92	(2,34)
Jumlah	(150.057.560.216,61)	(153.653.367.659,53)	3.595.807.442,92	(2,34)

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Penyisihan dana bergulir tidak tertagih	(150.057.560.216,61)	(153.653.367.659,53)
Jumlah	(150.057.560.216,61)	(153.653.367.659,53)

5.5.18 Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp171.136.206.095,33 sedangkan pada Tahun 2021 Investasi Jangka Panjang Permanen sebesar Rp177.419.855.287,57 Sampai dengan Tahun 2022 terjadi penurunan Investasi Jangka Panjang Permanen sebesar -Rp6.283.649.192,24 yang merupakan penyesuaian terhadap ekuitas kepemilikan pemerintah daerah sesuai laporan keuangan BUMD.

Tabel 5.5.18 Investasi Jangka Panjang Permanen

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Investasi Jangka Panjang Permanen	171.136.206.095,33	177.419.855.287,57	(6.283.649.192,24)	(3,54)
Jumlah	171.136.206.095,33	177.419.855.287,57	(6.283.649.192,24)	(3,54)

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Penyertaan Modal	170.336.206.095,33	176.619.855.287,57
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	800.000.000,00	800.000.000,00
Jumlah	171.136.206.095,33	177.419.855.287,57

5.5.18.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

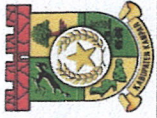
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2022 penyesuaian terhadap ekuitas laporan keuangan BUMD yaitu sebesar Rp170.336.206.095,33 sedangkan pada Tahun 2021 penyesuaian ekuitas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp176.619.855.287,57 dan terjadi penurunan terhadap penyesuaian modal sebesar -Rp6.283.649.192,25 atau -3,56%. Adapun penurunan atau peningkatan dipengaruhi laba/rugi dari laporan keuangan BUMD dan disesuaikan dengan persentase kepemilikan, dan penyajian berdasarkan laporan keuangan BUMD Audited dan Unaudited.

Tabel 5.5.18.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	170.336.206.095,33	176.619.855.287,57	(6.283.649.192,25)	(3,56)
Jumlah	170.336.206.095,33	176.619.855.287,57	(6.283.649.192,25)	(3,56)

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	NILAI DASAR HUKUM	Tahun 2022	Tahun 2021
PT. Bank Riau	105.181.200.000,00	105.181.200.000,00	105.181.200.000,00
PDAM Tirta Kampar	10.155.763.650,00	4.476.699.504,96	5.429.348.491,00
Riau Air Line	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
BPR Sari Madu	32.000.000.000,00	22.942.418.302,04	28.777.206.670,00
BPR Syariah Fadhillah, Air Tiris	3.400.000.000,00	6.232.908.224,51	5.197.015.853,75



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

PT. Kamparcom	10.225.000.000,00	6.302.043.576,82	6.302.043.576,82
PT. Bumi Siak Pusako	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
PD Kampar Aneka Karya	15.263.049.530,00	5.200.936.487,00	5.733.040.696,00
Jumlah	196.225.013.180,00	170.336.206.095,33	176.619.855.287,57

- **PT Bank Riau Kepri**

Saldo penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kampar pada PT Bank Riau Kepri per 31 Desember 2022 adalah senilai Rp105.181.200.000,00 dengan persentase kepemilikan senilai 9,71%. Dari hasil Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kampar pada PT Bank Riau Kepri untuk Tahun 2022, PT Bank Riau Kepri membagikan dividen tunai senilai Rp21.827.902.698,00.

- **PDAM Tirta Kampar**

Saldo penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kampar pada PDAM Tirta Kampar per 31 Desember 2022 adalah senilai Rp4.476.699.504,96 turun sebesar Rp952.648.986,04 yang diakibatkan adanya koreksi penyesuaian ekuitas PDAM Tirta Kampar. Penilaian penyertaan modal pada PDAM Tirta Kampar dengan menggunakan metode ekuitas. Pemerintah Kabupaten Kampar mengakui kepemilikan PDAM Tirta Kampar sebesar 100%. Berdasarkan laporan keuangan PDAM Tirta Kampar terdapat penyertaan modal pemerintah pusat sebesar Rp5.476.335.502,00 yang belum jelas statusnya, sehingga berdasarkan hasil perhitungan kepemilikan Pemerintah Kabupaten Kampar pada PDAM Tirta Kampar hanya sebesar 64,97%.

- **Riau Airline**

PT Riau Airlines (RAL) merupakan perusahaan penerbangan yang merupakan milik Pemerintah Daerah Provinsi Riau. RAL dibentuk melalui Peraturan Daerah (PERDA) No. 5 Lembaran Daerah No. 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan PT Riau Airlines oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau. Pada tanggal 12 Maret 2002, Riau Airlines resmi berdiri dengan ditandatanganinya akta pendirian No. 14 oleh Gubernur Riau. Pemerintah Kabupaten Kampar merupakan salah satu pemegang saham PT RAL dengan dengan nilai nominal Rp5.000.000.000,00 (6,23 %) pada Tahun 2007.

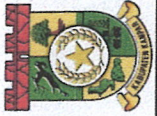
Terhitung sejak tanggal 5 April 2011 PT. Riau Airlines tidak beroperasi lagi dan menyatakan berhenti sementara dari kegiatan operasi penerbangan berdasarkan Surat Direktur Utama PT Riau Airlines tanggal 3 April 2011.

Izin terbang PT. Riau Airlines sudah dibekukan berdasarkan Surat Dirjen Perhubungan Udara Nomor AU.009/3/13.DRJU-2012 tanggal 16 April 2012 perihal Surat Izin Usaha Udara Angkutan Niaga PT. RAL yang menyatakan bahwa terhitung tanggal 7 April 2012 Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Nomor: SKEP/137/VII/2002 tanggal 10 Juli 2002 tidak berlaku dan tidak terdaftar lagi sebagai pemegang surat izin usaha angkutan udara niaga berjadwal sehingga Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tidak memberikan perpanjangan Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal PT RAL.

Bahwa sejak Tahun 2011 hingga saat ini PT RAL sudah tidak beroperasi, sedangkan hal-hal yang terkait dengan proses penanganan PT RAL hingga saat ini masih terus berjalan dan ditangani oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui Biro Perekonomian Setda Provinsi Riau.

- **BPR Sari Madu**

Saldo penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kampar pada BPR Sari Madu per 31 Desember 2022 adalah senilai Rp22.942.418.302,04 turun atau rugi senilai Rp5.834.788.367,96 dari Tahun 2021 senilai Rp28.777.206.670,00 berdasarkan laba/rugi dan ekuitas akhir laporan keuangan BUMD BPR Sari Madu. Persentase kepemilikan senilai 100% sehingga disajikan dengan metode ekuitas.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

- **BPR Syariah Fadhilah, Air Tiris**

Saldo penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kampar pada BPR Syariah Fadhilah, Air Tiris per 31 Desember 2022 adalah senilai Rp6.233.035.187,02 naik sebesar Rp1.035.892.370,76 yang merupakan laba. Penilaian penyertaan modal pada BPR Syariah Fadhilah, Air Tiris dengan menggunakan metode ekuitas dengan persentase kepemilikan senilai 76,41%. Dari hasil Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kampar pada untuk Tahun 2022, BPR Syariah Fadhilah Air Tiris membagikan dividen tunai senilai Rp67.492.342,00.

- **PT Kamparicom**

PT Kamparicom adalah perusahaan yang didirikan pada Tahun 2007, yang diawal dengan penandatanganan MOU Nomor 04/SKB/III/007, Nomor 18/HK/44/2007 dan Nomor 001/SKB-BC/BDKP/III/2007 Tanggal 21 Maret 2007 antara Pemerintah Kabupaten Kampar, Pemerintah Provinsi Riau dan PT Benecom Budidaya Kampar. Pada Bulan September 2007, MOU kerjasama ini ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama para pihak Nomor 180/HK/06/2007, Nomor 320/DU-SPR/XI/2007 dan Nomor 011/SKR-BC-BDKP/IX/2007 Tanggal 21 September 2007 dengan pokok kesepakatan untuk membangun Pabrik Pengolahan Ikan Patin Terpadu sepakat dilaksanakan oleh Perusahaan Konsersium.

Perusahaan PT Kamparicom dibentuk dengan Akta Notaris YARLINDA SALEH, SH Nomor 09

Terhitung sejak Tahun 2012 hingga saat ini PT Kamparicom sudah tidak beroperasi lagi, dan untuk membahas kelanjutan kerjasama tersebut direncanakan akan dilaksanakan pertemuan antara Pemda Kampar dengan pemegang saham lainnya untuk membahas dan menyepakati kelanjutan kerjasama PT Kamparicom.

- **PT Bumi Siak Pusako**

Saldo penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kampar pada PT Bumi Siak Pusako per 31 Desember 2022 adalah senilai Rp15.000.000.000,00. Dari hasil penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kampar pada PT Bumi Siak Pusako Tahun 2022 membagikan dividen tunai senilai Rp1.654.733.260,00 dengan persentase kepemilikan sebesar 6,02% PT Bumi Siak Pusako dalam penyajian dalam laporan keuangan pemerintah menggunakan metode biaya.

- **PD Kampar Aneka Karya**

Saldo penyertaan modal pada Pemerintah Kabupaten Kampar PD Kampar Aneka Karya per 31 Desember 2022 adalah senilai Rp5.200.936.487,00 atau rugi sebesar Rp532.104.209. Dengan kepemilikan saham 100% PD Kampar Aneka karya penyajiannya menggunakan metoda ekuitas yang disesuaikan dengan laporan keuangan BUMD yang telah di audit KAP terakhir Tahun 2013 dan baru ditahun 2021 PD Kampar Aneka Karya kembali menyampaikan Laporan Keuangan sehingga dilakukan penyesuaian Ekuitas Akhir di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

5.5.18.2 Investasi Permanen Lainnya

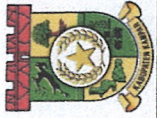
Investasi Permanen Lainnya Tahun 2022 yaitu sebesar Rp800.000.000,00, sedangkan pada Tahun 2021 investasi permanen lainnya pemerintah Daerah sebesar Rp800.000.000,00.

Tabel 5.5.18.2 Investasi Permanen Lainnya

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Investasi permanen lainnya	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Dinas Koperasi UKM	800.000.000,00	800.000.000,00
Jumlah	800.000.000,00	800.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Investasi Permanen Lainnya merupakan bentuk Investasi Permanen yang tidak dapat diklasifikasikan dalam penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara misalnya properti investasi yang tidak tercakup dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan ini.

5.5.19 Aset Tetap

Aset Tetap adalah Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp4.000.596.189.356,01 sedangkan pada Tahun 2021 Aset Tetap sebesar Rp4.018.260.426.705,11 dan terjadi penurunan sebesar -Rp17.664.237.349,10 atau -0,44%.

Tabel 5.5.19 Aset Tetap

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Tetap	4.000.596.189.356,01	4.018.260.426.705,11	(17.664.237.349,10)	(0,44)
Jumlah	4.000.596.189.356,01	4.018.260.426.705,11	(17.664.237.349,10)	(0,44)

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Tanah	492.502.693.398,60	491.637.180.708,60
Peralatan dan Mesin	1.137.307.671.422,96	1.013.967.959.074,14
Gedung dan Bangunan	1.958.197.419.026,03	1.888.418.752.518,37
Jalan, Jigasi dan Jaringan	5.709.461.513.019,48	5.584.848.648.616,49
Aset Tetap Lainnya	147.225.590.396,34	144.971.427.158,34
Konstruksi Dalam Pengerjaan	92.615.410.708,00	95.318.302.575,66
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(5.536.714.108.615,40)	(5.200.901.843.946,49)
Jumlah	4.000.596.189.356,01	4.018.260.426.705,11

5.5.19.1 Tanah

Aset Tetap Tanah pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp492.502.693.398,60 sedangkan pada Tahun 2021 Aset Tetap Tanah sebesar Rp491.637.180.708,60 dan terjadi kenaikan sebesar Rp865.512.690,00 atau 0,18%.

Tabel 5.5.19.1 Tanah

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Tanah	492.502.693.398,60	491.637.180.708,60	865.512.690,00	0,18
Jumlah	492.502.693.398,60	491.637.180.708,60	865.512.690,00	0,18

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	119.405.614.445,00	119.405.614.445,00
Dinas Kesehatan	16.190.014.237,00	16.190.014.237,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	12.434.776.130,00	12.434.776.130,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	187.783.372.711,60	187.278.254.215,60
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	2.044.149.000,00	2.044.149.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	36.830.000,00	36.830.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27.135.500,00	27.135.500,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	272.140.000,00	2,00
Dinas Sosial	1.235.228.700,00	1.193.737.002,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	0,00	0,00
Dinas Kelahanan Pangan	4.984.985.264,00	4.984.985.264,00
Dinas Lingkungan Hidup	4.239.300.000,00	4.239.300.000,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	48.375.000,00	48.375.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	700.000.000,00	700.000.000,00
Dinas Perhubungan	3.795.501.000,00	3.795.501.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	0,00	0,00

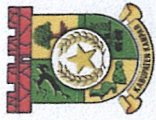


PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	240.600.000,00	240.600.000,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	664.000.000,00	664.000.000,00
Dinas Perikanan	3.495.200.000,00	3.495.200.000,00
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	206.762.500,00	160.000.002,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	280.630.000,00	280.630.000,00
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	3.143.530.000,00	3.143.530.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	2.421.402.335,00	2.421.402.335,00
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	2.918.068.000,00	2.918.068.000,00
Sekretariat Daerah	112.034.294.056,00	112.034.294.056,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.629.967.000,00	1.629.967.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	310.210.000,00	310.210.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	124.521.320,00	124.521.320,00
Badan Pendapatan Daerah	386.645.000,00	386.645.000,00
Badan Kepegawainan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	419.600.000,00	419.600.000,00
Inspektorat Kabupaten	220.400.000,00	220.400.000,00
Kecamatan Kampar Kiri	628.800.000,00	628.800.000,00
Kecamatan Tapung Hilir	170.200.000,00	170.200.000,00
Kecamatan Tapung Hulu	251.000.000,00	251.000.000,00
Kecamatan Tapung	295.000.000,00	295.000.000,00
Kecamatan Tambang	973.800.000,00	973.800.000,00
Kecamatan Kampar	135.430.000,00	135.430.000,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	631.300.000,00	631.300.000,00
Kecamatan Siak Hulu	4.054.835.000,00	4.054.835.000,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	273.001.200,00	273.001.200,00
Kecamatan Rumbio Jaya	80.000.000,00	80.000.000,00
Kecamatan Kampar Utara	200.000.000,00	200.000.000,00
Kecamatan Kampa	800.000.000,00	800.000.000,00
Kecamatan Salo	0,00	0,00
Kecamatan Bangkinang	0,00	0,00
Kecamatan Kuok	513.125.000,00	513.125.000,00
Kecamatan Bangkinang Kola	716.800.000,00	716.800.000,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	190.875.000,00	190.875.000,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	260.400.000,00	260.400.000,00
Kecamatan Gunung Sahilan	100.000.000,00	100.000.000,00
Kecamatan Perhentian Raja	465.000.000,00	465.000.000,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	59.875.000,00	59.875.000,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	10.000.000,00	10.000.000,00
Jumlah	492.502.693.398,60	491.637.180.708,60

Adapun penjelasan terhadap penambahan dan pengurangan terhadap Aset Tetap tanah pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH
Aset Tetap Tanah Tahun Berjalan (Neraca)	492.502.693.398,60
Aset Tetap Tanah 20NN - 1 (Neraca)	491.637.180.708,60
Selisih	865.512.690,00
Penjelasan terhadap selisih :	
Mutasi tambah	865.512.690,00
Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Berjalan (LRA)	505.118.496,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dari Hibah	272.139.998,00
Dinas Sosial dari Hibah	40.000.000,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dari Hibah	46.762.498,00
Dinas Sosial dari Aset Baru Dicatat	1.491.698,00
JUMLAH SELISIH	865.512.690,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Tahun sebelumnya Penetapan status penggunaan dan nilai perolehan tanah berdasarkan:

1. Keputusan Bupati Kampar Nomor 028/BPKAD-Aset/IV/437 tanggal 23 April 2021 tentang Penetapan Status dan Nilai Perolehan Tanah di Bawah Badan Jalan dan Tanah Bahu Jalan Pemerintah Kabupaten Kampar.
2. Keputusan Bupati Kampar Nomor 038/BPKAD-Aset/IV/438 tanggal 23 April 2021 tentang Penetapan Status Penggunaan dan Nilai Perolehan Tanah pada Sekretariat Daerah dan Dinas Pendidikan Kepulauan dan Olah Raga, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.
3. Keputusan Bupati Kampar Nomor 028/BPKAD-Aset/IV/439 tanggal 23 April 2021 tentang Penetapan Status Penggunaan dan Nilai Perolehan Tanah pada Sekretariat Daerah dan Dinas Pendidikan Kepulauan dan Olah Raga Kabupaten Kampar.

Pada nilai Aset Tetap Tanah sebesar Rp492.502.693.398,60, belum termasuk nilai tanah lima sekolah pada Dinas Pendidikan yang Berdiri di dalam kawasan HGU PT Subur Harum Makmur, PT Siwangai dan PT Arara Abadi dengan luas tanah 100.000 M2 Dengan nilai NJOP Rp2.000.000.000,00.

5.5.19.2 Peralatan dan Mesin

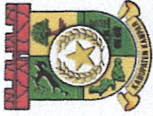
Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp1.137.307.671.422,96 sedangkan pada Tahun 2021 Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.013.967.959.074,14 dan terjadi kenaikan sebesar Rp123.339.712.348,82 atau 12,16%.

Tabel 5.5.19.2 Peralatan dan Mesin

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Peralatan dan Mesin	1.137.307.671.422,96	1.013.967.959.074,14	123.339.712.348,82	12,16
Jumlah	1.137.307.671.422,96	1.013.967.959.074,14	123.339.712.348,82	12,16

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	321.854.625.271,85	258.330.429.293,03
Dinas Kesehatan	127.154.030.895,00	117.318.890.562,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	186.555.659.028,00	173.158.059.567,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	27.024.655.693,00	26.001.037.093,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	6.841.519.086,00	6.975.215.086,00
Satuan Polisi Pamong Praja	7.010.846.099,00	6.678.188.599,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.292.679.304,00	6.067.640.135,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	799.093.000,00	662.720.000,00
Dinas Sosial	6.418.115.096,00	5.421.922.446,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	10.325.132.104,00	9.263.247.379,00
Dinas Kelahanan Pangan	8.439.587.469,42	8.370.536.469,42
Dinas Lingkungan Hidup	26.217.833.572,15	25.901.763.572,15
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.884.739.421,00	2.333.174.421,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.541.625.199,00	2.000.626.199,00
Dinas Perhubungan	40.135.225.047,59	36.888.010.047,59
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	6.925.370.463,00	6.476.569.813,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.256.019.415,65	8.249.934.915,65
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	5.780.446.218,00	5.645.808.668,00
Dinas Perikanan	17.210.689.724,00	16.867.760.924,00
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	3.393.383.027,55	3.386.001.027,55
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	10.220.292.385,00	9.991.311.957,00
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	12.717.621.277,00	11.924.734.977,00
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	5.767.606.184,00	4.108.196.166,00
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	4.889.639.168,00	4.216.557.018,00
Sekretariat Daerah	196.846.821.619,28	182.721.508.325,28



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	27.732.037.617,00	25.238.662.617,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13.436.260.817,78	11.727.683.693,78
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	5.181.843.911,00	3.854.435.551,00
Badan Pendapatan Daerah	13.033.475.094,00	12.248.185.594,00
Badan Kepegawainan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.725.036.235,69	3.655.236.235,69
Inspektorat Kabupaten	3.960.264.987,00	3.957.254.987,00
Kecamatan Kampar Kiri	697.819.106,00	619.486.806,00
Kecamatan Tapung Hilir	390.118.150,00	390.118.150,00
Kecamatan Tapung Hulu	519.536.042,00	442.663.042,00
Kecamatan Tapung	866.216.000,00	866.216.000,00
Kecamatan Tambang	353.318.914,00	308.844.914,00
Kecamatan Kampar	426.104.880,00	426.104.880,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	634.816.800,00	600.166.800,00
Kecamatan Siak Hulu	617.395.444,00	582.884.900,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	920.292.762,00	822.775.258,00
Kecamatan Rumbio Jaya	604.965.208,00	568.350.108,00
Kecamatan Kampar Utara	342.126.807,00	342.126.807,00
Kecamatan Kampar	342.812.035,00	335.567.035,00
Kecamatan Salo	781.429.716,00	731.354.506,00
Kecamatan Bangkinang	662.318.867,00	571.385.457,00
Kecamatan Kuok	907.232.389,00	884.292.389,00
Kecamatan Bangkinang Kota	941.722.690,00	907.961.890,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	613.254.075,00	594.133.075,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	703.954.050,00	695.621.250,00
Kecamatan Gunung Sahilan	406.625.000,00	318.385.000,00
Kecamatan Perhentian Raja	636.897.725,00	623.397.725,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	442.063.235,00	430.982.635,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.934.487.108,00	2.263.837.108,00
Jumlah	1.137.307.671.422,96	1.013.967.959.074,14

Adapun penjelasan terhadap penambahan dan pengurangan terhadap Aset Tetap peralatan dan mesin pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH
Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (Neraca)	1.137.307.671.422,96
Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2021-1 (Neraca)	1.013.967.959.074,14
Selisih	123.339.712.348,82
Penjelasan terhadap selisih :	
Mutasi tambah	126.250.589.552,82
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (LRA)	80.023.194.214,82
Reklas antar Aset Tetap Dinkes	153.083.888,00
Hibah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	1.454.280.000,00
Hibah Satuan Polisi Pamong Praja	16.320.000,00
Hibah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	190.000.000,00
Kapitalisasi Belanja Barang/Pemeliharaan 2022 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	40.964.924.000,00
Kapitalisasi Belanja Barang/Pemeliharaan 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	61.326.700,00
Kapitalisasi Belanja Barang/Pemeliharaan 2022 Dinas Sosial	58.500.000,00
Kapitalisasi Belanja Barang/Pemeliharaan 2022 Kecamatan Siak Hulu	4.000.000,00
Kapitalisasi Belanja Barang/Pemeliharaan 2022 Kecamatan XIII Koto Kampar	6.500.000,00
Reklas antar Aset Tetap Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	364.854.750,00
Reklas antar Aset Tetap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.979.000,00
Reklas antar Aset Tetap Dinas Perhubungan	1.849.299.000,00
Reklas antar Aset Tetap Kecamatan Kampar Kiri	15.150.000,00
Reklas dari Aset Lainnya Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	399.828.000,00
Mutasi Antar SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	673.350.000,00
Mutasi kurang	(2.910.877.204,00)
Tidak Masuk Klasifikasi Aset Dinkes (Ekstrakompetible)	(283.249.257,00)
Dimusnahkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	(432.000.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Reklas antar Aset Tetap Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	(165.045.800,00)
Reklas antar Aset Tetap Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(20.000.000,00)
Koreksi Aset yang merupakan aset Ekstrakomtable Tahun Sebelumnya Disdik	(6.034.800,00)
Reklas antar Aset Tetap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(10.000.000,00)
Reklas antar Aset Tetap Kecamatan Kampar Kiri Hilir	(40.000.000,00)
Mutasi Antar SKPD Badan Pendapatan Daerah	(673.350.000,00)
Penjualan Aset tetap BPKAD	(176.899.362,00)
Tidak Masuk Klasifikasi Aset Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	(504.288.500,00)
Tidak Masuk Klasifikasi Aset Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	(164.829.850,00)
Tidak Masuk Klasifikasi Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(7.000.000,00)
Tidak Masuk Klasifikasi Aset Dinas Sosial	(360.000,00)
Tidak Masuk Klasifikasi Aset Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(1.267.875,00)
Tidak Masuk Klasifikasi Aset Dinas Ketahanan Pangan	(53.573.500,00)
Tidak Masuk Klasifikasi Aset Dinas Perhubungan	(18.332.500,00)
Tidak Masuk Klasifikasi Aset Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	(56.462.000,00)
Tidak Masuk Klasifikasi Aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(1.300.000,00)
Tidak Masuk Klasifikasi Aset Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(9.300.000,00)
Tidak Masuk Klasifikasi Aset Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	(137.879.700,00)
Tidak Masuk Klasifikasi Aset Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	(16.150.500,00)
Tidak Masuk Klasifikasi Aset Sekretariat Daerah	(114.587.500,00)
Tidak Masuk Klasifikasi Aset Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(4.000.000,00)
Tidak Masuk Klasifikasi Aset Kecamatan Kampar Kiri Hulu	(6.183.450,00)
Tidak Masuk Klasifikasi Aset Kecamatan Siak Hulu	(901.000,00)
Tidak Masuk Klasifikasi Aset Kecamatan Kampar Uluara	(4.095.000,00)
Tidak Masuk Klasifikasi Aset Kecamatan Salo	(3.786.610,00)
JUMLAH SELISIH	123.339.712.348,92

5.5.19.3 Gedung dan Bangunan

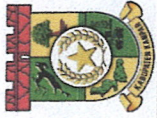
Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp1.958.197.419.026,03 sedangkan Tahun 2021 Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.888.418.752.518,37 dan terjadi kenaikan sebesar Rp69.778.666.507,66 atau 3,70%.

Tabel 5.5.19.3 Gedung dan Bangunan

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan(Penurunan)	%
Gedung dan Bangunan	1.958.197.419.026,03	1.888.418.752.518,37	69.778.666.507,66	3,70
Jumlah	1.958.197.419.026,03	1.888.418.752.518,37	69.778.666.507,66	3,70

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	754.907.778.815,80	721.694.359.150,80
Dinas Kesehatan	127.964.239.610,30	120.057.685.077,30
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	85.058.003.517,00	70.792.465.316,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	33.213.272.642,00	30.804.656.634,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	548.541.158.455,55	548.301.487.455,55
Satuan Polisi Pamong Praja	786.405.000,00	786.405.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.249.622.542,21	1.038.564.542,21
Dinas Penadarn Kebakaran Dan Penyelamatan	43.560.000,00	43.560.000,00
Dinas Sosial	7.603.609.905,00	7.408.981.304,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.945.190.000,00	1.945.190.000,00
Dinas Ketahanan Pangan	8.233.329.450,00	8.233.329.450,00
Dinas Lingkungan Hidup	50.220.603.772,89	43.751.596.293,23
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	220.642.480,00	220.642.480,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	584.081.100,00	534.754.100,00
Dinas Perhubungan	23.414.720.231,29	23.297.987.231,29
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.730.508.100,00	2.351.789.300,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	4.533.543.050,00	4.184.443.000,00



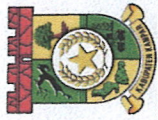
PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Dinas Perikanan	34.290.069.312,23	34.087.082.312,23
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	23.175.290.012,89	22.491.007.012,89
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	7.098.691.336,00	6.259.736.336,00
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	19.771.487.431,32	19.138.816.531,32
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	14.932.448.382,00	14.932.448.382,00
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	37.006.145.600,00	35.864.697.600,00
Sekretariat Daerah	114.201.602.106,39	114.176.663.736,39
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	6.207.405.883,00	6.207.405.883,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.064.396.009,00	3.064.396.009,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	1.378.607.000,00	1.368.607.000,00
Badan Pendapatan Daerah	5.410.000.626,00	5.153.696.626,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.857.510.000,00	2.857.510.000,00
Inspektorat Kabupaten	477.959.000,00	477.959.000,00
Kecamatan Kampar Kiri	6.338.074.740,00	6.338.074.740,00
Kecamatan Tapung Hilir	590.630.000,00	590.630.000,00
Kecamatan Tapung Hulu	2.488.031.000,00	2.488.031.000,00
Kecamatan Tapung	698.680.000,00	698.680.000,00
Kecamatan Tambang	1.097.300.000,00	1.097.300.000,00
Kecamatan Kampar	6.422.377.619,00	6.422.377.619,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	1.366.228.900,00	1.366.228.900,00
Kecamatan Siak Hulu	1.783.847.000,00	1.783.847.000,00
Kecamatan XII Koto Kampar	1.955.434.898,16	1.955.434.898,16
Kecamatan Rumbio Jaya	2.030.690.000,00	2.030.690.000,00
Kecamatan Kampar Utara	329.928.000,00	329.928.000,00
Kecamatan Kampa	1.119.587.543,00	1.119.587.543,00
Kecamatan Salo	569.794.000,00	569.794.000,00
Kecamatan Bangkinang	566.367.000,00	566.367.000,00
Kecamatan Kuok	2.382.151.000,00	2.382.151.000,00
Kecamatan Bangkinang Kota	2.217.519.855,00	2.042.803.955,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	671.198.900,00	671.198.900,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	1.018.975.200,00	1.018.975.200,00
Kecamatan Gunung Sahilan	2.277.144.000,00	2.277.144.000,00
Kecamatan Perhentian Raja	1.051.578.000,00	1.051.578.000,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	100.000.000,00	100.000.000,00
Jumlah	1.958.197.419.026,03	1.888.418.752.518,37

Pada nilai aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp1.958.197.419.026,03 pada Dinas Pendidikan terdapat dua Sekolah dengan nilai sebesar Rp852.481.000,00 yang Berdiri di dalam kawasan HGU PT Subur Harum Makmur dan PT Arara Abadi dengan luas tanah 40.000 M2 Dengan nilai NJOP Rp800.000.000,00

Adapun penjelasan terhadap penambahan dan pengurangan terhadap Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH
Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (Neraca)	1.958.197.419.026,03
Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 20NN-1 (Neraca)	1.888.418.752.518,37
Selisih	69.778.666.507,66
Penjelasan terhadap selisih :	
Mutasi Tambah	80.229.748.543,66
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (LRA)	64.626.802.305,00
Kapitalisasi Belanja Barang/Pemeliharaan 2022 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	6.484.551.050,00
Reklas antar Aset Tetap Dinkes	245.323.800,00
Kapitalisasi Belanja Barang/Pemeliharaan 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.373.676.008,00
Kapitalisasi Belanja Barang/Pemeliharaan 2022 Dinas Lingkungan Hidup	2.336.097.000,00
Kapitalisasi Belanja Barang/Pemeliharaan 2022 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	335.556.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Reklas KDP Dinas Lingkungan Hidup		3.453.700.479,66
Reklas antar Aset Tetap Dinas Sosial		194.628.601,00
Reklas antar Aset Tetap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		179.413.300,00
Mutasi Kurang		(10.451.082.036,00)
Reklas antar Aset Tetap Dinkes		(8.000.000,00)
Hibah dan Bantuan Sosial Hibah dan Bantuan Sosial Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		(4.336.830.591,00)
Reklas antar Aset Tetap Reklas antar Aset Tetap Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga		(1.473.472.000,00)
Reklas antar Aset Tetap Reklas antar Aset Tetap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		(15.979.000,00)
Reklas antar Aset Tetap Reklas antar Aset Tetap Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan		(24.818.000,00)
Reklas antar Aset Tetap Reklas antar Aset Tetap Dinas Perhubungan		(1.849.299.000,00)
Reklas antar Aset Tetap Reklas antar Aset Tetap Dinas Perikanan		(186.367.945,00)
Reklas antar Aset Tetap Reklas antar Aset Tetap Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		(143.988.000,00)
Reklas antar Aset Tetap Reklas antar Aset Tetap Badan Pendapatan Daerah		(208.307.500,00)
Tidak Masuk Klasifikasi Aset Tidak Masuk Klasifikasi Aset Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga		(2.204.040.000,00)
JUMLAH SELISIH		69.778.666.507,66

5.5.19.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp5.709.461.513.019,48 sedangkan pada Tahun 2021 Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp5.584.848.648.616,49 dan terjadi kenaikan sebesar Rp124.612.864.402,99 atau 2,23%.

Tabel 5.5.19.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Jalan, irigasi dan Jaringan	5.709.461.513.019,48	5.584.848.648.616,49	124.612.864.402,99	2,23
Jumlah	5.709.461.513.019,48	5.584.848.648.616,49	124.612.864.402,99	2,23

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	5.653.997.503,00	2.436.580.503,00
Dinas Kesehatan	6.540.259.240,00	6.540.259.240,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	243.357.500,00	243.357.500,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	5.306.755.081.737,18	5.213.601.180.262,19
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	232.947.717.259,47	207.481.760.259,47
Saluran Polisi Pamong Praja	49.900.000,00	49.900.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	21.234.585.357,79	20.967.885.357,79
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	0,00
Dinas Sosial	175.107.950,00	175.107.950,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	228.317.637,00	121.167.637,00
Dinas Kelautan Pangan	127.242.357,58	127.242.357,58
Dinas Lingkungan Hidup	32.575.965.642,86	32.575.965.642,86
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	41.524.780,00	41.524.780,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	23.039.255.353,30	23.039.255.353,30
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	62.500.000,00	62.500.000,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	25.861.206,02	25.861.206,02
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	2.257.650,00	2.257.650,00
Dinas Perikanan	35.514.320.329,95	35.301.463.384,95
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	2.646.698.200,00	2.472.273.200,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	16.456.839.950,00	16.456.839.950,00
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	4.206.963.044,33	4.031.096.544,33
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	4.899.513.800,00	4.899.513.800,00
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	7.781.577.200,00	7.584.059.200,00
Sekretariat Daerah	1.983.698.475,00	1.983.698.475,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	538.292.000,00	538.292.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	159.043.925,00	159.043.925,00
Badan Pendapatan Daerah	212.307.500,00	4.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	128.415.000,00	128.415.000,00
Inspektorat Kabupaten	198.200.000,00	198.200.000,00
Kecamatan Kampar Kiri	358.419.096,00	271.219.096,00
Kecamatan Tapung Hilir	6.950.000,00	6.950.000,00
Kecamatan Tapung Hulu	0,00	0,00
Kecamatan Tapung	0,00	0,00
Kecamatan Tambang	15.000.000,00	15.000.000,00
Kecamatan Kampar	899.314.796,00	692.593.400,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	0,00	0,00
Kecamatan Siak Hulu	0,00	0,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	1.232.173.258,00	1.064.209.578,00
Kecamatan Rumbio Jaya	4.500.000,00	4.500.000,00
Kecamatan Kampar Utara	18.000.000,00	18.000.000,00
Kecamatan Kampa	6.630.000,00	6.630.000,00
Kecamatan Salo	4.650.000,00	4.650.000,00
Kecamatan Bangkinang	1.054.053.863,00	509.697.305,00
Kecamatan Kuok	38.000.000,00	38.000.000,00
Kecamatan Bangkinang Kota	480.004.253,00	296.135.304,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	17.187.500,00	17.187.500,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	814.829.655,00	572.175.255,00
Kecamatan Gunung Sahilan	8.500.000,00	8.500.000,00
Kecamatan Perhentian Raja	0,00	0,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	74.500.000,00	74.500.000,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00
Jumlah	5.709.461.513.019,48	5.584.848.648.616,49

Adapun penjelasan terhadap penambahan dan pengurangan terhadap Aset Tetap jalan, irigasi dan jaringan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Berjalan (Neraca)	5.709.461.513.019,48
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 20NN-1 (Neraca)	5.584.848.648.616,49
Selisih	124.612.864.402,99
Penjelasan terhadap selisih:	
Mutasi Tambah	136.288.006.807,00
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (LRA)	127.694.277.285,00
Kapitalisasi Belanja Barang/Pemeliharaan 2022 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	174.425.000,00
Reklas antar Aset Tetap Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	1.473.472.000,00
Reklas antar Aset Tetap Dinas Perikanan	186.367.945,00
Reklas antar Aset Tetap Badan Pendapatan Daerah	208.307.500,00
Belanja Hibah yang merupakan aset tetap Dinas KB	82.332.000,00
Reklas dari Aset Lainnya Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	24.818.000,00
Penambahan Utang Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.444.007.077,00
Mutasi Kurang	(11.675.142.404,01)
Hibah dan Bantuan Sosial Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(11.147.773.803,01)
Reklas antar Aset Tetap Dinas Sosial	(194.628.601,00)
Reklas antar Aset Tetap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(12.000.000,00)
Reklas antar Aset Tetap Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	(101.755.000,00)
Tidak Masuk Klasifikasi Aset Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	(193.863.000,00)
Tidak Masuk Klasifikasi Aset Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	(25.122.000,00)
JUMLAH SELISIH	124.612.864.402,99



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

5.5.19.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp147.225.590.396,34 sedangkan pada Tahun 2021 Aset Tetap Lainnya sebesar Rp144.971.427.158,34 dan terjadi kenaikan sebesar Rp2.254.163.238,00 atau 1,55%.

Tabel 5.5.19.5 Aset Tetap Lainnya

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Tetap Lainnya	147.225.590.396,34	144.971.427.158,34	2.254.163.238,00	1,55
Jumlah	147.225.590.396,34	144.971.427.158,34	2.254.163.238,00	1,55

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2021
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga		120.600.400.157,00	118.695.470.157,00
Dinas Kesehatan		2.426.402.700,00	2.426.402.700,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang		10.093.400,00	10.093.400,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		14.633.500,00	14.633.500,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman		202.150.000,00	202.150.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja		35.440.000,00	35.440.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah		632.780.000,00	632.780.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan		0,00	0,00
Dinas Sosial		49.400.000,00	49.400.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		20.500.000,00	500.000,00
Dinas Kelangkaan Pangan		535.088.959,00	535.088.959,00
Dinas Lingkungan Hidup		10.995.664.466,29	10.995.664.466,29
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		119.402.000,00	119.402.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		10.840.000,00	10.840.000,00
Dinas Perhubungan		962.465.125,00	962.465.125,00
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian		194.555.000,00	194.555.000,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		121.398.333,33	99.398.333,33
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan		2.245.170.600,00	2.173.702.600,00
Dinas Perikanan		638.236.874,00	638.236.874,00
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan		427.143.250,00	427.143.250,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura		272.450.000,00	272.450.000,00
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan		4.218.687.000,00	4.218.687.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil		0,00	0,00
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja		20.019.500,00	8.949.500,00
Sekretariat Daerah		905.438.913,72	890.293.675,72
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		609.940.720,00	609.940.720,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		646.174.897,00	646.174.897,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah		196.050.000,00	26.500.000,00
Badan Pendapatan Daerah		0,00	0,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		3.000.000,00	3.000.000,00
Inspektorat Kabupaten		0,00	0,00
Kecamatan Kampar Kiri		0,00	0,00
Kecamatan Tapung Hilir		0,00	0,00
Kecamatan Tapung Hulu		0,00	0,00
Kecamatan Tapung		2.625.000,00	2.625.000,00
Kecamatan Tambang		5.550.000,00	5.550.000,00
Kecamatan Kampar		6.600.000,00	6.600.000,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu		0,00	0,00
Kecamatan Siak Hulu		3.700.000,00	3.700.000,00
Kecamatan XII Koto Kampar		0,00	0,00
Kecamatan Rumbio Jaya		0,00	0,00
Kecamatan Kampar Utara		0,00	0,00
Kecamatan Kampa		0,00	0,00
Kecamatan Salo		7.000.000,00	7.000.000,00
Kecamatan Bangkinang		400.000,00	400.000,00
Kecamatan Kuok		7.880.000,00	7.880.000,00
Kecamatan Bangkinang Kola		1.320.000,00	1.320.000,00
		0,00	0,00
		20.680.000,00	20.680.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Kecamatan Kampar Kiri Tengah		1.000.000,00	1.000.000,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir		40.000.000,00	0,00
Kecamatan Gunung Sahilan		3.740.000,00	3.740.000,00
Kecamatan Perhentian Raja		3.420.000,00	3.420.000,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu		6.850.001,00	6.850.001,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		1.300.000,00	1.300.000,00
Jumlah		147.225.590.396,34	144.971.427.158,34

Adapun penjelasan terhadap penambahan dan pengurangan terhadap Aset Tetap lainnya pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH
Aset Tetap Lainnya Tahun Berjalan (Neraca)	147.225.590.396,34
Aset Tetap Lainnya Tahun 20NN - 1 (Neraca)	144.971.427.158,34
Selisih	2.254.163.238,00
Penjelasan terhadap selisih :	
Mutasi Tambah	
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Berjalan (LRA)	8.742.421.281,00
Reklas antar Aset Tetap Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.660.421.281,00
Reklas antar Aset Tetap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20.000.000,00
Reklas antar Aset Tetap Kecamatan Kampar Kiri Hilir	22.000.000,00
Mutasi Kurang	
Reklas antar Aset Tetap Dinas Pendidikan dan Olah Raga	(6.488.258.043,00)
Reklas antar Aset Tetap Dinkes	(1.021.827.000,00)
Reklas antar Aset Tetap Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	(390.407.688,00)
Reklas antar Aset Tetap Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	(43.360.000,00)
Reklas antar Aset Tetap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(156.448.950,00)
Reklas antar Aset Tetap Kecamatan Kampar Kiri	(179.413.300,00)
Tidak Masuk Klasifikasi Aset Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	(15.150.000,00)
JUMLAH SELISIH	(4.681.651.105,00)
	2.254.163.238,00

Dari Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp147.225.590.396,34 terdapat di dalamnya Aset Tetap Dalam Renovasi sebesar Rp3.156.610.100,00 yang terdiri dari Dinas pendidikan Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp428.366.400,00 Dinas Kesehatan sebesar Rp2.378.773.700,00 Dinas Kominfo sebesar Rp179.920.000,00 dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp169.550.000,00.

5.5.19.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

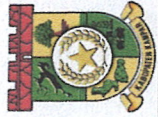
Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp92.615.410.708,00 sedangkan pada Tahun 2021 Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp95.318.302.576 dan terjadi penurunan sebesar - Rp2.702.891.867,66 atau -2,84%.

Tabel 5.5.19.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	92.615.410.708,00	95.318.302.575,66	(2.702.891.867,66)	(2,84)
Jumlah	92.615.410.708,00	95.318.302.575,66	(2.702.891.867,66)	(2,84)

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	392.547.350,00	392.547.350,00
Dinas Kesehatan	220.853.000,00	220.853.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	73.715.694.220,00	73.715.694.220,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	13.831.250.448,00	13.496.732.836,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	99.773.190,00	3.553.473.669,66
Dinas Perhubungan	9.994.000,00	9.994.000,00
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	4.345.298.500,00	3.929.007.500,00
Jumlah	92.615.410.708,00	95.318.302.575,66



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

5.5.19.7 Akumulasi Penyusutan

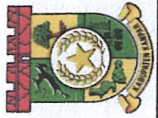
Akumulasi Penyusutan pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp5.536.714.108.615,40 sedangkan pada Tahun 2021 Akumulasi Penyusutan sebesar Rp5.200.901.843.946,49 dan terjadi kenaikan sebesar - Rp335.812.264.668,91 atau -6,46% yang disebabkan adanya mutasi Aset pada Aset lainnya.

Tabel 5.5.19.7 Akumulasi Penyusutan

Uraian	Tahun 2022 (5.536.714.108.615,40)	Tahun 2021 (5.200.901.843.946,49)	Kenaikan/(Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan			(335.812.264.668,91)	6,46
Jumlah	(5.536.714.108.615,40)	(5.200.901.843.946,49)	(335.812.264.668,91)	6,46

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Dinas Pendidikan Kemudaan Dan Olahragra	(441.524.536.913,83)	(383.381.516.654,84)
Dinas Kesehatan	(125.616.007.572,08)	(109.783.397.909,97)
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	(145.842.717.873,35)	(121.737.298.644,78)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	(3.989.139.453.635,77)	(3.826.548.832.740,03)
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	(279.670.543.875,82)	(249.760.894.523,14)
Soluan Polisi Pamong Praja	(6.423.813.177,57)	(5.935.070.571,22)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(12.329.295.466,59)	(10.398.946.946,42)
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	(300.742.050,00)	(136.565.057,14)
Dinas Sosial	(6.760.891.886,97)	(6.080.741.818,13)
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	(8.815.372.797,81)	(7.907.714.951,57)
Dinas Ketahanan Pangan	(10.254.677.584,13)	(9.901.991.114,95)
Dinas Lingkungan Hidup	(40.872.379.890,53)	(37.426.869.676,72)
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	(2.310.820.227,00)	(1.858.846.098,40)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	(1.553.666.351,91)	(1.259.599.661,29)
Dinas Perhubungan	(45.843.191.099,45)	(41.355.559.973,69)
Dinas Komunikasi, Informalika Dan Persandian	(5.328.908.789,59)	(4.241.886.763,44)
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(6.928.030.907,59)	(5.793.533.085,32)
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	(5.885.071.808,67)	(5.450.579.920,40)
Dinas Perikanan	(42.218.009.763,70)	(38.574.881.237,95)
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	(7.328.653.631,38)	(6.380.158.553,86)
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	(22.552.144.424,91)	(21.824.324.013,92)
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	(18.912.595.598,63)	(17.926.991.478,77)
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	(8.490.854.049,31)	(7.179.341.333,44)
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	(18.388.837.320,39)	(17.008.390.802,20)
Sekretariat Daerah	(196.252.422.190,52)	(185.751.527.630,08)
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	(23.078.430.942,53)	(20.402.565.757,79)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(12.041.322.685,50)	(11.045.572.111,99)
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	(3.893.917.630,88)	(2.710.622.605,63)
Badan Pendapatan Daerah	(11.775.889.867,27)	(11.187.112.652,33)
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(4.421.163.167,58)	(4.172.957.499,60)
Inspektorat Kabupaten	(3.765.904.479,55)	(3.473.413.718,16)
Kecamatan Kampar Kiri	(2.688.211.736,97)	(2.466.539.049,66)
Kecamatan Tapung Hilir	(581.319.283,33)	(568.455.016,67)
Kecamatan Tapung Hulu	(1.066.909.423,60)	(981.539.885,20)
Kecamatan Tapung	(1.136.580.540,00)	(1.121.824.280,00)
Kecamatan Tambang	(793.528.802,43)	(743.605.397,38)
Kecamatan Kampar	(2.839.466.787,18)	(2.640.634.090,85)
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	(991.399.032,00)	(915.438.574,00)



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Kecamatan Siak Hulu	(1.377.635.369,36)	(1.327.867.443,00)
Kecamatan XII Koto Kampar	(1.467.084.695,37)	(1.270.019.489,56)
Kecamatan Rumbio Jaya	(1.255.157.997,96)	(1.197.014.474,64)
Kecamatan Kampar Utara	(413.415.047,00)	(404.152.487,00)
Kecamatan Kampa	(698.028.634,87)	(661.587.761,50)
Kecamatan Salo	(914.363.840,68)	(879.374.725,51)
Kecamatan Bangkinang	(871.166.579,51)	(721.772.749,64)
Kecamatan Kuok	(1.621.395.980,11)	(1.568.960.482,33)
Kecamatan Bangkinang Kota	(1.681.646.495,10)	(1.583.428.773,56)
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	(809.587.641,80)	(777.206.524,34)
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	(1.045.502.458,17)	(909.935.614,46)
Kecamatan Gunung Sahilan	(1.064.301.300,57)	(999.005.308,72)
Kecamatan Perhentian Raja	(898.964.515,00)	(874.766.492,80)
Kecamatan Koto Kampar Hulu	(482.129.469,29)	(465.270.242,14)
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	(1.696.345.424,29)	(1.245.739.576,36)
Jumlah	(5.536.714.108.615,40)	(5.200.901.843.946,49)

5.5.20 Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah Aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan. Saldo Aset Lainnya Tahun 2022 yaitu sebesar Rp109.961.615.083,22 sedangkan pada Tahun 2021 Aset Lainnya sebesar Rp52.271.273.096,22 dan terjadi penurunan sebesar Rp57.690.341.987,00 atau 110,37%.

Tabel 5.5.20 Aset Lainnya

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Lainnya	109.961.615.083,22	52.271.273.096,22	57.690.341.987,00	110,37
Jumlah	109.961.615.083,22	52.271.273.096,22	57.690.341.987,00	110,37

Dengan rincian sebagai berikut:

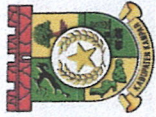
Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	3.965.044.393,14	3.970.034.395,14
Kerjasama Pemanfaatan	2.246.500.000,00	2.246.500.000,00
Aset Lain-lain	523.240.518.714,21	45.652.578.201,08
Aset Tidak Berwujud	3.320.786.195,00	3.320.786.195,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(3.113.264.195,00)	(2.918.625.695,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(477.587.940.513,13)	0,00
Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	57.889.970.489,00	0,00
Jumlah	109.961.615.083,22	52.271.273.096,22

5.5.20.1 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Jumlah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp3.965.044.393,14 Sedangkan pada Tahun 2021 sebesar Rp3.970.034.395,14 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.20.1 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	3.965.044.393,14	3.970.034.395,14	(4.990.002,00)	(0,13)
Jumlah	3.965.044.393,14	3.970.034.395,14	(4.990.002,00)	(0,13)



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

5.5.20.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan Kerjasama pemanfaatan dengan melakukan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan Aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Jumlah kerjasama pemanfaatan pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp2.246.500.000,00 sama dengan Tahun 2021 sebesar Rp2.246.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.20.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	2.246.500.000,00	2.246.500.000,00	0,00	0,00
Jumlah	2.246.500.000,00	2.246.500.000,00	0,00	0,00
Dengan rincian sebagai berikut:				
Uraian	Tahun 2022		Tahun 2021	
Kerjasama Bagunan Guna Serah Inpres Bangkinang	2.246.500.000,00		2.246.500.000,00	
Jumlah	2.246.500.000,00		2.246.500.000,00	

Nilai Aset yang dikendalikan bersama dengan menggunakan Aset atau Hak Usaha (Kemitraan dengan Pihak Ketiga) yang bersumber dari kerjasama Bangunan Guna Serah Inpres Bangkinang sebesar Rp2.246.500.000,00

Hak yang diperoleh oleh PT Makmur Permata Putra diantaranya sebagai berikut: Pihak kedua diperbolehkan menggunakan Hak Guna Bangunan (HGB) diatas tanah hak pengelolaan milik pertama selama jangka waktu berlakunya HGB, dapat mengalihkan sebagian HGB di atas tanah hak pengelolaan milik pihak pertama dan hak pemakaian atas unit toko, kios dan LOS kepada pihak ketiga, khusus untuk bangunan KANTO (Kantor Toko) pihak pertama memberikan izin pemecahan langsung HGB di atas tanah hak pengelolaan milik pihak pertama kepada pihak ketiga.

Kewajiban dari PT Makmur Permata Putra diantaranya: Berkewajiban memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Kampar selama pengelolaan pasar/pusat perbelanjaan dan fasilitasnya, pada tahun I sebesar Rp100.000.000,00, tahun II sebesar Rp100.000.000,00, tahun III sebesar Rp150.000.000,00, tahun IV sebesar Rp200.000.000,00, dan tahun V sebesar Rp200.000.000,00.

5.5.20.3 Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud adalah Aset non moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, mensyaratkan bahwa Aset Tidak Berwujud harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.

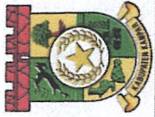
Aset Tidak Berwujud pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp3.320.786.195,00 sedangkan pada Tahun 2021 sebesar Rp3.320.786.195,00 dan terjadi kenaikan sebesar Rp,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.20.3 Aset Tidak Berwujud

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Tidak Berwujud	3.320.786.195,00	3.320.786.195,00	0,00	0,00
Jumlah	3.320.786.195,00	3.320.786.195,00	0,00	0,00

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	226.735.000,00	226.735.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	1.094.904.000,00	1.094.904.000,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pirlu	233.084.000,00	233.084.000,00
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	32.827.364,00	32.827.364,00
Sekretariat Daerah	518.253.331,00	518.253.331,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		320.650.000,00	320.650.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah		389.000.000,00	389.000.000,00
Badan Pendapatan Daerah		461.332.500,00	461.332.500,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		44.000.000,00	44.000.000,00
Jumlah		3.320.786.195,00	3.320.786.195,00

5.5.20.4 Aset Lain-lain

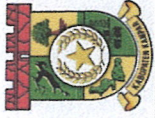
Aset Lain-lain dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah yang disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau Aset Tetap yang tidak digunakan, Aset Lain-lain pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp523.240.518.714,21 sedangkan pada Tahun 2021 sebesar Rp523.240.518.714,21 dan tidak ada kenaikan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.20.4 Aset Lain-lain

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Lain-lain	523.240.518.714,21	523.240.518.714,21	0,00	0,00
Jumlah	523.240.518.714,21	523.240.518.714,21	0,00	0,00

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Dinas Pendidikan Kemudahan Dan Olahraga	18.607.404.557,00	18.607.404.557,00
Dinas Kesehatan	2.621.851.903,00	2.621.851.903,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	568.717.531,00	568.717.531,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	405.878.936.877,46	405.878.936.877,46
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	42.289.323.727,00	42.289.323.727,00
Satuan Polisi Pamong Praja	483.158.607,00	483.158.607,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	719.967.749,00	719.967.749,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	0,00
Dinas Sosial	9.814.766.842,82	9.814.766.842,82
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	428.042.074,00	428.042.074,00
Dinas Kelautan Pangan	124.611.555,00	124.611.555,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.247.065.000,00	1.247.065.000,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3.613.128.016,00	3.613.128.016,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.263.654.002,00	1.263.654.002,00
Dinas Perhubungan	2.431.024.310,02	1.531.239.310,02
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	175.457.500,00	175.457.500,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	407.300.000,00	407.300.000,00
Dinas Perikanan	2.885.548.662,23	2.885.548.662,23
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	3.180.343.971,00	3.180.343.971,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	10.696.970.344,00	10.696.970.344,00
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	966.895.812,00	966.895.812,00
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	25.514.020,00	25.514.020,00
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	72.846.887,00	72.846.887,00
Sekretariat Daerah	4.582.254.849,00	4.582.254.849,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.404.023.936,91	1.404.023.936,91
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.714.963.267,00	1.714.963.267,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	0,00	899.785.000,00
Badan Pendapatan Daerah	1.264.866.772,00	1.264.866.772,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	940.752.844,77	940.752.844,77
Inspektorat Kabupaten	966.459.491,00	966.459.491,00
Kecamatan Kampar Kiri	112.795.156,00	112.795.156,00
Kecamatan Tapung Hilir	68.548.000,00	68.548.000,00
Kecamatan Tapung Hulu	191.542.500,00	191.542.500,00
Kecamatan Tapung	222.239.000,00	222.239.000,00
Kecamatan Tambang	729.479.166,00	729.479.166,00
Kecamatan Kampar	159.150.800,00	159.150.800,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Kecamatan Kampar Kiri Hulu	371.845.005,00	371.845.005,00
Kecamatan Siak Hulu	238.869.000,00	238.869.000,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	107.669.401,00	107.669.401,00
Kecamatan Rumbio Jaya	319.297.400,00	319.297.400,00
Kecamatan Kampar Utara	263.135.000,00	263.135.000,00
Kecamatan Kampa	173.605.065,00	173.605.065,00
Kecamatan Salo	23.418.000,00	23.418.000,00
Kecamatan Bangkinang	132.785.550,00	132.785.550,00
Kecamatan Kuok	212.535.162,00	212.535.162,00
Kecamatan Bangkinang Kota	73.000.000,00	73.000.000,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	111.175.901,00	111.175.901,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	59.265.000,00	59.265.000,00
Kecamatan Gunung Sahilan	184.200.000,00	184.200.000,00
Kecamatan Perhentian Raja	98.300.000,00	98.300.000,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	11.812.500,00	11.812.500,00
Jumlah	523.240.518.714,21	523.240.518.714,21

5.5.20.4.1 Aset lain-lain Peralatan dan Mesin

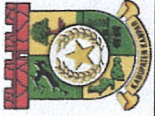
Aset Lain-lain Peralatan dan Mesin dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah yang disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau Aset Tetap yang tidak digunakan, Aset Lain-lain peralatan dan mesin pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp61.418.703.292,75 sedangkan pada Tahun 2021 sebesar Rp61.418.703.292,75 dan tidak ada kenaikan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.20.4.1 Aset lain-lain Peralatan dan Mesin

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset lain-lain Peralatan dan Mesin	61.418.703.292,75	61.418.703.292,75	0,00	0,00
Jumlah	61.418.703.292,75	61.418.703.292,75	0,00	0,00

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2021
Dinas Pendidikan Kemudaan Dan Olahraga	8.528.684.144,00	8.528.684.144,00	8.528.684.144,00
Dinas Kesehatan	2.621.851.903,00	2.621.851.903,00	2.621.851.903,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	568.717.531,00	568.717.531,00	568.717.531,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	5.862.102.747,00	5.862.102.747,00	5.862.102.747,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	483.158.607,00	483.158.607,00	483.158.607,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.364.296.691,82	1.364.296.691,82	1.364.296.691,82
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	124.611.555,00	124.611.555,00	124.611.555,00
Dinas Sosial	1.247.065.000,00	1.247.065.000,00	1.247.065.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	719.967.749,00	719.967.749,00	719.967.749,00
Dinas Kelautan Pangan	3.613.128.016,00	3.613.128.016,00	3.613.128.016,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.263.654.002,00	1.263.654.002,00	1.263.654.002,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	428.042.074,00	428.042.074,00	428.042.074,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.446.557.310,02	1.446.557.310,02	1.446.557.310,02
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	175.457.500,00	175.457.500,00	175.457.500,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	407.300.000,00	407.300.000,00	407.300.000,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	10.696.970.344,00	10.696.970.344,00	10.696.970.344,00
Dinas Perikanan	966.895.812,00	966.895.812,00	966.895.812,00
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	3.180.343.971,00	3.180.343.971,00	3.180.343.971,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	2.885.548.662,23	2.885.548.662,23	2.885.548.662,23
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	25.514.020,00	25.514.020,00	25.514.020,00
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	72.846.887,00	72.846.887,00	72.846.887,00
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	966.459.491,00	966.459.491,00	966.459.491,00
Sekretariat Daerah	1.714.963.267,00	1.714.963.267,00	1.714.963.267,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.264.866.772,00	1.264.866.772,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	940.752.844,77	940.752.844,77
Badan Pendapatan Daerah	4.582.254.849,00	4.582.254.849,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.404.023.936,91	1.404.023.936,91
Inspektorat Kabupaten	11.812.500,00	11.812.500,00
Kecamatan Kampar Kiri	112.795.156,00	112.795.156,00
Kecamatan Tapung Hilir	68.548.000,00	68.548.000,00
Kecamatan Tapung Hulu	191.542.500,00	191.542.500,00
Kecamatan Tapung	222.239.000,00	222.239.000,00
Kecamatan Tambang	729.479.166,00	729.479.166,00
Kecamatan Kampar	159.150.800,00	159.150.800,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	371.845.005,00	371.845.005,00
Kecamatan Siak Hulu	238.869.000,00	238.869.000,00
Kecamatan XII Koto Kampar	107.669.401,00	107.669.401,00
Kecamatan Rumbio Jaya	319.297.400,00	319.297.400,00
Kecamatan Kampar Utara	263.135.000,00	263.135.000,00
Kecamatan Kampa	173.605.065,00	173.605.065,00
Kecamatan Salo	23.418.000,00	23.418.000,00
Kecamatan Bangkinang	132.785.550,00	132.785.550,00
Kecamatan Kuok	212.535.162,00	212.535.162,00
Kecamatan Bangkinang Kota	73.000.000,00	73.000.000,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	111.175.901,00	111.175.901,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	59.265.000,00	59.265.000,00
Kecamatan Gunung Sahilan	184.200.000,00	184.200.000,00
Kecamatan Perhentian Raja	98.300.000,00	98.300.000,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00
Jumlah	61.418.703.292,75	61.418.703.292,75

5.5.20.4.2 Aset lain-lain Gedung dan Bangunan

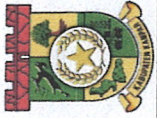
Aset Lain-lain Gedung dan Bangunan dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah yang disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau Aset Tetap yang tidak digunakan, Aset Lain-lain Gedung dan Bangunan pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp61.089.108.641,00 sedangkan pada Tahun 2021 sebesar Rp61.089.108.641,00 dan tidak ada kenaikan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.20.4.2 Aset lain-lain Gedung dan Bangunan

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset lain-lain Gedung dan Bangunan	61.089.108.641,00	61.089.108.641,00	0,00	0,00
Jumlah	61.089.108.641,00	61.089.108.641,00	0,00	0,00

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Dinas Pendidikan Kemudaan Dan Olahraga	10.080.720.413,00	10.080.720.413,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	439.299.000,00	439.299.000,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	42.289.323.727,00	42.289.323.727,00
Dinas Sosial	8.195.083.501,00	8.195.083.501,00
Dinas Perhubungan	84.682.000,00	84.682.000,00
Jumlah	61.089.108.641,00	61.089.108.641,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

5.5.20.4.3 Aset lain-lain Jalan Irigasi dan Jaringan

Aset Lain-lain Jalan Irigasi dan Jaringan dimaksudkan dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah yang disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau Aset Tetap yang tidak digunakan, Aset Lain-lain Jalan Irigasi dan Jaringan pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp399.577.535.130,46 sedangkan pada Tahun 2021 sebesar Rp399.577.535.130,46 dan tidak ada kenaikan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.20.4.3 Aset lain-lain Jalan Irigasi dan Jaringan

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset lain-lain Jalan Irigasi dan Jaringan	399.577.535.130,46	399.577.535.130,46	0,00	0,00
Jumlah	399.577.535.130,46	399.577.535.130,46	0,00	0,00

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	399.577.535.130,46	399.577.535.130,46
Jumlah	399.577.535.130,46	399.577.535.130,46

5.5.20.4.4 Aset lain-lain Aset Tetap Lainnya

Aset Lain-lain Aset Tetap Lainnya dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah yang disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau Aset Tetap yang tidak digunakan, Aset Lain-lain Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp255.386.650,00 sedangkan pada Tahun 2021 sebesar Rp255.386.650,00 dan tidak ada kenaikan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.20.4.4 Aset lain-lain Aset Tetap Lainnya

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset lain-lain Aset Tetap Lainnya	255.386.650,00	255.386.650,00	0,00	0,00
Jumlah	255.386.650,00	255.386.650,00	0,00	0,00

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Dinas Sosial	255.386.650,00	255.386.650,00
Jumlah	255.386.650,00	255.386.650,00

5.5.20.5 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2022 yaitu sebesar -Rp3.113.264.195,00 sedangkan pada Tahun 2021 sebesar -Rp2.918.625.695,00 dan terjadi kenaikan sebesar -Rp194.638.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.20.5 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.113.264.195,00)	(2.918.625.695,00)	(194.638.500,00)	6,67
Jumlah	(3.113.264.195,00)	(2.918.625.695,00)	(194.638.500,00)	6,67

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	(226.735.000,00)	(214.305.000,00)
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	(1.016.952.000,00)	(977.976.000,00)
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(233.084.000,00)	(220.609.000,00)
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	(32.827.364,00)	(32.827.364,00)
Sekretariat Daerah	(454.783.331,00)	(401.900.831,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(320.650.000,00)	(275.825.000,00)
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	(389.000.000,00)	(389.000.000,00)
Badan Pendapatan Daerah	(395.232.500,00)	(362.182.500,00)
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(44.000.000,00)	(44.000.000,00)
Jumlah	(3.113.264.195,00)	(2.918.625.695,00)



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

5.5.20.6 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

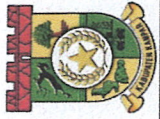
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Tahun 2022 yaitu sebesar -Rp477.587.940.513,13 sedangkan pada Tahun 2021 sebesar -Rp477.587.940.513,13 dan tidak ada terjadi kenaikan sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.20.6 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(477.587.940.513,13)	(477.587.940.513,13)	0,00	0,00
Jumlah	(477.587.940.513,13)	(477.587.940.513,13)	0,00	0,00

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	(18.604.504.557,00)	(18.604.504.557,00)
Dinas Kesehatan	(2.578.989.236,33)	(2.578.989.236,33)
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	(588.717.531,00)	(588.717.531,00)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	(403.428.750.512,18)	(403.428.750.512,18)
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	(9.582.252.083,60)	(9.582.252.083,60)
Satuan Polisi Pamong Praja	(468.458.607,00)	(468.458.607,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(713.067.749,00)	(713.067.749,00)
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	0,00
Dinas Sosial	(2.424.938.647,92)	(2.424.938.647,92)
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	(428.042.074,00)	(428.042.074,00)
Dinas Ketahanan Pangan	(124.611.555,00)	(124.611.555,00)
Dinas Lingkungan Hidup	(1.247.065.000,00)	(1.247.065.000,00)
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	(3.598.557.766,00)	(3.598.557.766,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	(1.141.400.075,57)	(1.141.400.075,57)
Dinas Perhubungan	(1.451.638.230,02)	(1.451.638.230,02)
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(175.457.500,00)	(175.457.500,00)
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	(407.300.000,00)	(407.300.000,00)
Dinas Perikanan	(2.882.820.662,23)	(2.882.820.662,23)
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	(1.297.216.856,60)	(1.297.216.856,60)
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	(10.695.220.344,00)	(10.695.220.344,00)
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	(966.895.812,00)	(966.895.812,00)
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	(25.514.020,00)	(25.514.020,00)
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	(72.846.887,00)	(72.846.887,00)
Sekretariat Daerah	(4.582.254.849,00)	(4.582.254.849,00)
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	(1.404.023.936,91)	(1.404.023.936,91)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(1.714.963.267,00)	(1.714.963.267,00)
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	0,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	(1.238.512.772,00)	(1.238.512.772,00)
Badan Kepegawalan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(940.752.844,77)	(940.752.844,77)
Inspektorat Kabupaten	(966.459.491,00)	(966.459.491,00)
Kecamatan Kampar Kiri	(112.795.156,00)	(112.795.156,00)
Kecamatan Tapung Hilir	(68.548.000,00)	(68.548.000,00)
Kecamatan Tapung Hulu	(191.542.500,00)	(191.542.500,00)
Kecamatan Tapung	(222.239.000,00)	(222.239.000,00)
Kecamatan Tambang	(728.579.166,00)	(728.579.166,00)
Kecamatan Kampar	(157.150.800,00)	(157.150.800,00)
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	(370.795.045,00)	(370.795.045,00)
Kecamatan Siak Hulu	(238.869.000,00)	(238.869.000,00)
Kecamatan Xlil Koto Kampar	(106.339.401,00)	(106.339.401,00)
Kecamatan Rumbio Jaya	(319.297.400,00)	(319.297.400,00)



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Kecamatan Kampar Utara	(263.135.000,00)	(263.135.000,00)
Kecamatan Kampa	(173.605.065,00)	(173.605.065,00)
Kecamatan Salo	(23.418.000,00)	(23.418.000,00)
Kecamatan Bangkinang	(132.785.550,00)	(132.785.550,00)
Kecamatan Kuok	(212.535.162,00)	(212.535.162,00)
Kecamatan Bangkinang Kota	(73.000.000,00)	(73.000.000,00)
Kecamatan Kampar Kini Tengah	(108.635.901,00)	(108.635.901,00)
Kecamatan Kampar Kini Hilir	(59.265.000,00)	(59.265.000,00)
Kecamatan Gunung Sahilan	(184.060.000,00)	(184.060.000,00)
Kecamatan Perhentian Raja	(98.300.000,00)	(98.300.000,00)
Kecamatan Koto Kampar Hulu	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	(11.812.500,00)	(11.812.500,00)
Jumlah	(477.587.940.513,13)	(477.587.940.513,13)

5.5.20.7 Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)

Penyaluran Remunerasi DBH dan/atau DAU secara Natural melalui *Facilities Treasury Deposit Facility* (TDF) berdasarkan PMK Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU. Tahun 2022 Jumlah kerjasama pemanfaatan pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp57.889.970.489,00 sedangkan pada Tahun 2021 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.20.7 Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kerja Sama Pemanfaatan (numpang satu	57.889.970.489,00	0,00	57.889.970.489,00	100,00
Jumlah	57.889.970.489,00	0,00	57.889.970.489,00	100,00

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
DBH PBB-LO	28.564.260.442,00	0,00
DBH PPh Pasal 21-LO	1.834.616.375,00	0,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	56.514.781,00	0,00
DBH CHT-LO	32.285,00	0,00
DBH SDA Minyak Bumi-LO	24.186.001.354,00	0,00
DBH SDA Gas Bumi-LO	1.571.626.357,00	0,00
DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	313.204.627,00	0,00
DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	1.151.961.057,00	0,00
DBH SDA Perikanan-LO	211.753.211,00	0,00
Jumlah	57.889.970.489,00	0,00

5.5.21 Kewajiban

Kewajiban adalah utang pemerintah daerah yang timbul dari transaksi pada waktu yang lalu dan harus dibayar dengan kas, barang, atau jasa, di masa akan datang. Jumlah kewajiban pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp39.544.895.030,24 Sedangkan pada Tahun 2021 sebesar Rp25.590.792.686,19 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.21 Kewajiban

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kewajiban	39.544.895.030,24	25.590.792.686,19	13.954.102.344,05	54,53
Jumlah	39.544.895.030,24	25.590.792.686,19	13.954.102.344,05	54,53

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Utang Perhitungan Fihak Ketiga	29.894.203,00	29.804.507,67
Pendapatan Diterima Dimuka	425.715.803,92	210.501.255,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Utang Belanja		39.089.285.023,32	25.331.225.646,52
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	19.261.277,00
Jumlah		39.544.895.030,24	25.590.792.686,19

5.5.21.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Utang Perhitungan Pihak Ketiga merupakan utang PFK yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran OPD dan BUD telah disetorkan ke Kas negara/Daerah. Utang PFK pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp29.894.203,00 Sedangkan pada Tahun 2021 sebesar Rp29.804.507,67 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.21.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	29.894.203,00	29.804.507,67	89.695,33	0,30
Jumlah	29.894.203,00	29.804.507,67	89.695,33	0,30

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2021
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga		13.823.449,00	6.578.352,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		0,00	23.226.155,67
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BUD)		5.488.064,00	0,00
Kecamatan Kampar Utara		10.517.488,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		65.202,00	0,00
Jumlah		29.894.203,00	29.804.507,67

5.5.21.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp425.715.803,92 sedangkan pada Tahun 2021 sebesar Rp210.501.255,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.21.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Diterima Dimuka	425.715.803,92	210.501.255,00	215.214.548,92	102,24
Jumlah	425.715.803,92	210.501.255,00	215.214.548,92	102,24

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2021
Pajak Reklame Badan Pendapatan Daerah		419.466.803,92	210.501.255,00
Sewa Mesin ATM Sekretariat Daerah		6.250.000,00	0,00
Jumlah		425.715.803,92	210.501.255,00

5.5.21.3 Utang Belanja

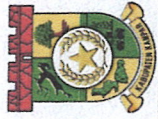
Utang Belanja pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp39.089.285.023,32 sedangkan pada Tahun 2021 sebesar Rp25.331.225.646,52 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.21.3 Utang Belanja

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja	39.089.285.023,32	25.331.225.646,52	13.758.059.376,80	54,31
Jumlah	39.089.285.023,32	25.331.225.646,52	13.758.059.376,80	54,31

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2021
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga		61.669.000,00	61.669.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang		27.538.127.553,00	21.768.033.800,20
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		9.470.990.637,32	1.653.540.209,32
Dinas Sosial		3.844.193,00	4.380.990,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Dinas Lingkungan Hidup		61.575.388,00	62.492.814,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		6.237.179,00	6.735.189,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		6.849.789,00	4.782.568,00
Dinas Perhubungan		1.092.510.889,00	949.702.581,00
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian		16.289.701,00	19.404.855,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		9.077.225,00	9.582.479,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan		0,00	5.901.597,00
Dinas Perikanan		18.601.477,00	9.751.102,00
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan		2.774.200,00	2.423.402,00
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil		517.864.129,00	517.864.129,00
Sekretariat Daerah		269.080.417,00	235.319.812,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		5.459.994,00	0,00
Inspektorat Kabupaten		0,00	7.215.830,00
Kecamatan Tapung Hilir		413.000,00	683.868,00
Kecamatan Tapung Hulu		1.806.901,00	1.125.421,00
Kecamatan Tapung		0,00	972.854,00
Kecamatan Tambang		2.133.711,00	1.732.195,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu		0,00	673.411,00
Kecamatan XIII Koto Kampar		0,00	1.216.800,00
Kecamatan Rumbio Jaya		699.767,00	680.687,00
Kecamatan Bangkinang		0,00	239.720,00
Kecamatan Kuok		1.085.605,00	1.121.198,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah		537.772,00	473.212,00
Kecamatan Gunung Sahilan		963.104,00	735.000,00
Kecamatan Perhentian Raja		693.372,00	1.299.740,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu		0,00	1.471.393,00
Jumlah		39.085.285.023,32	25.331.225.646,52

5.5.21.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp,00 sedangkan pada Tahun 2021 sebesar Rp19.261.277,00.

Tabel 5.5.21.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	19.261.277,00	(19.261.277,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	19.261.277,00	(19.261.277,00)	(100,00)

Dengan rincian sebagai berikut:

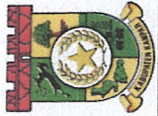
Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	0,00	19.261.277,00
Jumlah	0,00	19.261.277,00

5.5.22 Ekuitas

Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara jumlah Aset dan jumlah Kewajiban pemerintah untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Ekuitas pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp4.400.842.206.289,49 sedangkan pada Tahun 2021 sebesar Rp4.431.693.225.708,46 dan terjadi penurunan sebesar -Rp30.851.019.418,96 atau 0,70%.

Tabel 5.5.22 Ekuitas

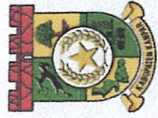
Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
Ekuitas	4.400.842.206.289,49	4.431.693.225.708,46	(30.851.019.418,96)	(0,70)
Jumlah	4.400.842.206.289,49	4.431.693.225.708,46	(30.851.019.418,96)	(0,70)



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	881.251.167.742,82	837.577.348.023,99
Dinas Kesehatan	170.019.334.375,76	169.388.551.576,89
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	233.030.945.263,80	228.213.015.494,98
Dinas Pekerjaan Umum Dan Pendaan Ruang	1.572.561.875.823,97	1.645.544.174.956,72
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	543.613.362.688,60	547.950.938.921,28
Satuan Polisi Pamong Praja	1.510.307.921,43	1.693.978.027,78
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.114.407.237,41	20.317.379.921,58
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	814.050.950,00	569.714.944,86
Dinas Sosial	16.107.607.765,93	15.555.374.588,77
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3.703.766.943,19	3.422.390.064,43
Dinas Kelangkaan Pangan	12.065.555.915,87	12.351.046.000,05
Dinas Lingkungan Hidup	83.415.785.665,66	83.529.924.273,47
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.983.128.598,33	1.251.018.564,60
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.398.284.074,52	2.104.371.996,14
Dinas Perhubungan	45.663.991.088,73	45.900.606.032,49
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	1.937.310.452,41	2.886.764.635,06
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.440.258.922,41	5.179.610.340,68
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	7.340.345.709,33	7.213.730.400,60
Dinas Perikanan	48.914.632.399,48	51.807.849.155,23
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	28.746.274.773,46	28.365.977.150,98
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	11.778.509.246,09	11.438.394.229,08
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	25.272.564.711,02	24.536.984.413,88
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	19.390.377.522,69	19.108.530.220,56
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	34.226.612.147,61	33.583.940.515,80
Sekretariat Daerah	227.562.572.562,87	225.970.328.854,31
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	13.641.827.277,47	13.822.285.222,21
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.415.719.138,28	4.747.717.487,79
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	289.031.135.693,42	267.943.096.629,14
Badan Pendapatan Daerah	49.710.520.751,80	74.050.325.042,33
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.708.377.474,11	2.892.977.961,09
Inspektorat Kabupaten	1.090.909.507,45	1.374.552.698,84
Kecamatan Kampar Kiri	5.334.901.205,03	5.391.041.592,34
Kecamatan Tapung Hilir	576.165.866,67	588.759.275,33
Kecamatan Tapung Hulu	2.192.475.717,40	2.201.653.735,80
Kecamatan Tapung	728.865.460,00	742.649.066,00
Kecamatan Tambang	1.651.256.400,57	1.657.107.321,62
Kecamatan Kampar	5.045.760.507,82	5.037.871.806,15
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	1.645.696.628,00	1.686.333.675,00
Kecamatan Siak Hulu	5.078.442.074,64	5.093.699.457,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	2.915.147.422,79	2.845.514.644,60
Kecamatan Rumbio Jaya	1.464.297.443,04	1.485.844.946,36
Kecamatan Kampar Utara	490.576.160,00	492.902.320,00
Kecamatan Kampa	1.571.400.943,13	1.600.596.816,50
Kecamatan Salo	449.389.875,32	434.303.780,49
Kecamatan Bangkinang	1.402.893.140,49	926.757.292,36
Kecamatan Kuok	2.218.026.803,89	2.247.486.708,67
Kecamatan Bangkinang Kola	2.695.080.302,90	2.420.952.375,44
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	686.930.061,20	699.254.738,66
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	1.792.656.446,83	1.637.236.090,54
Kecamatan Gunung Sahilan	1.730.884.595,43	1.708.168.691,28
Kecamatan Perhentian Raja	1.257.237.838,00	1.267.329.492,20
Kecamatan Koto Kampar Hulu	101.156.766,71	105.466.002,86
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.349.441.683,71	1.129.397.531,64
Jumlah	4.400.842.206.289,49	4.431.693.225.708,46



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

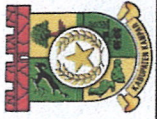
5.6 LAPORAN ARUS KAS

Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah. Laporan Arus Kas meliputi arus kas dari Aktivitas Operasi, arus kas dari Aktivitas Investasi (Investasi Non Keuangan), arus kas dari Aktivitas Pendanaan (Pembiayaan), dan arus kas dari Aktivitas Transitoris (Non Anggaran) dengan rincian sebagai berikut:

5.6.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Jumlah arus kas bersih dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp228.421.213.560,57 meliputi arus kas masuk sebesar Rp2.427.503.585.552,71 dikurangi arus kas keluar sebesar Rp2.199.082.371.992,14 sedangkan pada Tahun 2021 arus kas bersih sebesar Rp292.366.710.978,40 meliputi arus kas masuk sebesar Rp2.480.892.607.820,76 dikurangi arus kas keluar sebesar Rp2.181.713.259.559,14 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Arus Kas Masuk:	2.427.503.585.552,71	2.480.892.607.820,76
Penerimaan Pajak Daerah	142.366.052.600,00	146.101.632.400,00
Penerimaan Retribusi Daerah	8.892.742.152,31	12.847.571.260,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.550.128.300,00	27.916.502.794,00
Penerimaan Lain - lain PAD yang Sah	85.607.125.390,40	80.806.258.622,34
Penerimaan Dana Bagi Hasil	574.829.219.552,00	549.759.520.633,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	763.880.955.365,00	761.740.206.903,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	126.047.411.232,00	126.136.423.620,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	300.170.075.716,00	222.609.079.055,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah	5.205.152.000,00	50.290.844.000,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
Penerimaan Dana Keistimewaan	0,00	0,00
Penerimaan Dana Desa	215.093.518.324,00	216.741.840.600,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	153.007.050.247,00	141.209.168.186,42
Penerimaan Bantuan Keuangan	27.688.875.000,00	30.827.999.747,00
Penerimaan Hibah	1.165.279.674,00	1.034.000.000,00
Penerimaan Dana Darurat	0,00	0,00
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	0,00	117.347.226.876,00
Arus Kas Keluar:	2.199.082.371.992,14	2.181.713.259.559,14
Pembayaran Pegawai	963.391.408.176,00	980.262.571.587,00
Pembayaran Barang dan Jasa	787.240.777.384,22	763.565.154.437,14
Pembayaran Bunga	0,00	0,00
Pembayaran Subsidi	436.450.000,00	0,00
Pembayaran Belanja Hibah	47.872.967.141,92	74.248.252.085,00
Pembayaran belanja Bantuan Sosial	19.677.015.000,00	18.574.500.000,00
Pembayaran Tak Terduga	846.120.950,00	3.392.283.032,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	379.617.643.340,00	351.680.498.418,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan ke Daerah Provinsi	0,00	0,00
Pembayaran Belanja bantuan Keuangan kepada Jasa	0,00	0,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	228.421.213.560,57	292.366.710.978,40



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

5.6.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

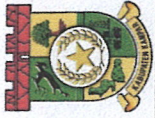
Aktivitas Investasi (Investasi non keuangan) adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset non keuangan lainnya. Jumlah arus kas bersih dari Aktivitas investasi (Investasi non keuangan) per 31 Desember 2022 sebesar Rp281.509.813.581,82 meliputi arus kas masuk sebesar Rp0,00 dikurangi arus kas keluar sebesar Rp281.509.813.581,82 sedangkan pada Tahun 2021 arus kas bersih sebesar Rp320.291.159.917,00 meliputi arus kas masuk sebesar Rp,00 dikurangi arus kas keluar sebesar Rp320.291.159.917,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Arus Masuk Kas:	0,00	0,00
Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap	0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Arus Keluar Kas	281.509.813.581,82	320.291.159.917,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Perolehan Tanah	505.118.496,00	1.125.952.960,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	80.023.194.214,82	106.004.696.908,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	64.626.802.305,00	51.494.311.363,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	127.694.277.285,00	145.332.172.309,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	8.660.421.281,00	16.334.026.377,00
Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIFITAS OPERASI	(281.509.813.581,82)	(320.291.159.917,00)

5.6.3 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Aktivitas Pendanaan (Pembiayaan) adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi Investasi Jangka Panjang, Piutang Jangka Panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit dan penggunaan surplus anggaran. Jumlah arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan (Pembiayaan) per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 meliputi arus kas masuk sebesar Rp0,00 dikurangi arus kas keluar sebesar Rp0,00 sedangkan pada Tahun 2021 arus kas bersih sebesar Rp0,00 meliputi arus kas masuk sebesar Rp0,00 dikurangi arus kas keluar sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Arus Masuk Kas:	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Pencatran Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00
Arus Keluar Kas	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman DN - Pemerintah Pusat	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Pembayaran Pokok Pinjaman DN - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman DN - Lainnya	0,00	0,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyeritaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	0,00	0,00

5.5.4 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

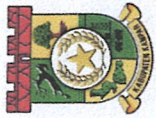
Aktivitas Transitoris (non anggaran) adalah aktivitas penerimaan kas dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah. Jumlah arus kas bersih dari Aktivitas Transitoris (non anggaran) per 31 Desember 2022 sebesar (-Rp5.488.064,00) meliputi arus kas masuk sebesar Rp142.335.345.719,00 dikurangi arus kas keluar sebesar Rp142.329.857.655,00 sedangkan pada Tahun 2021 arus kas bersih sebesar Rp271.472.710,00 meliputi arus kas masuk sebesar Rp143.855.575.039,59 dikurangi arus kas keluar sebesar Rp144.127.047.749,59 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Arus Masuk Kas:	142.335.345.719,00	143.855.575.039,59
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	142.335.345.719,00	143.855.575.039,59
Koreksi SILPA	0,00	0,00
Arus Keluar Kas	142.329.857.655,00	144.127.047.749,59
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	142.329.857.655,00	143.855.575.039,59
Koreksi SILPA	0,00	271.472.710,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.488.064,00	(271.472.710,00)

5.5.5 SALDO AKHIR KAS

Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp21.776.650.854,96 terdiri dari kenaikan/penurunan Kas sebesar (Rp53.083.111.957,25) ditambah saldo awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp74.859.762.812,21. Sedangkan Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp74.859.762.812,21 terdiri dari kenaikan/penurunan Kas sebesar (Rp21.383.284.365,38) ditambah saldo awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp96.243.047.177,59 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Kenaikan/Penurunan Kas	(53.083.111.957,25)	(21.383.284.365,38)
Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	74.859.762.812,21	96.243.047.177,59
Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	21.776.650.854,96	74.858.091.312,21
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	1.671.500,00
SALDO AKHIR KAS	21.776.650.854,96	74.859.762.812,21



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

BAB – VI

PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

Beberapa hal lain yang perlu diungkap dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Kampar untuk Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022 belum Optimal

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022 sudah berdasarkan hasil kompilasi laporan realisasi keuangan dari masing-masing OPD yang ada di Kabupaten Kampar, namun masih terdapat beberapa kendala, seperti :

- a. Masih banyak OPD yang belum mampu membuat laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- b. Kekurangan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kecakapan di bidang Keuangan khususnya akuntansi pada setiap OPD, sehingga menyulitkan saat melakukan penjurualan terhadap koreksi-koreksi dan pemahaman dalam pengungkapan informasi dalam laporan keuangan.

Kondisi tersebut membawa konsekuensi adanya proses adaptasi dan pembelajaran yang harus dilakukan oleh semua jajaran aparatur di Pemerintah Kabupaten Kampar dalam menyusun Laporan Keuangan agar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

2. Pemerintah Kabupaten Kampar Telah Memberlakukan Kebijakan Akuntansi yang Bersifat Formal dan Baku

Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2021 ini telah mengacu dan berpedoman kepada kebijakan akuntansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan praktik-praktik yang selama ini dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022 sudah mengacu pada kebijakan tersebut dan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai dasar penerapan akuntansi bagi seluruh SKPD yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

3. Penjelasan Tambahan atas Penyajian Nilai Aset Tetap

Penyajian nilai aset tetap dalam Laporan Keuangan Tahun 2022 merupakan prolehan aset tetap yang berasal dari APBD Kabupaten Kampar dan penerimaan hibah Tahun Anggaran 2022. Sedangkan untuk aset yang berada dalam pengelolaan Pemerintah Kabupaten Kampar yang perolehannya mulai Tahun Anggaran 2022 dan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kampar membukukan aset sesuai dengan data yang tercantum dalam daftar inventaris aset pada Bidang Aset BPKAD Kabupaten Kampar.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

BAB – VI

PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

Beberapa hal lain yang perlu diungkap dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Kampar untuk Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022 belum Optimal

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022 sudah berdasarkan hasil kompilasi laporan realisasi keuangan dari masing-masing OPD yang ada di Kabupaten Kampar, namun masih terdapat beberapa kendala, seperti :

- a. Masih banyak OPD yang belum mampu membuat laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- b. Kekurangan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kecakapan di bidang Keuangan khususnya akuntansi pada setiap OPD, sehingga menyulitkan saat melakukan penjumlahan terhadap koreksi-koreksi dan pemahaman dalam pengungkapan informasi dalam laporan keuangan.

Kondisi tersebut membawa konsekuensi adanya proses adaptasi dan pembelajaran yang harus dilakukan oleh semua jajaran aparatur di Pemerintah Kabupaten Kampar dalam menyusun Laporan Keuangan agar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

2. Pemerintah Kabupaten Kampar Telah Memberlakukan Kebijakan Akuntansi yang Bersifat Formal dan Baku

Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2021 ini telah mengacu dan berpedoman kepada kebijakan akuntansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan praktik-praktik yang selama ini dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022 sudah mengacu pada kebijakan tersebut dan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai dasar penerapan akuntansi bagi seluruh SKPD yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

3. Penjelasan Tambahan atas Penyajian Nilai Aset Tetap

Penyajian nilai aset tetap dalam Laporan Keuangan Tahun 2022 merupakan prolehan aset tetap yang berasal dari APBD Kabupaten Kampar dan penerimaan hibah Tahun Anggaran 2022. Sedangkan untuk aset yang berada dalam pengelolaan Pemerintah Kabupaten Kampar yang perolehannya mulai Tahun Anggaran 2022 dan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kampar membukukan aset sesuai dengan data yang tercantum dalam daftar inventaris aset pada Bidang Aset BPKAD Kabupaten Kampar.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

BAB – VII

PENUTUP

Pemerintah Kabupaten Kampar telah berusaha melaporkan seluruh kegiatan dan program yang telah dilaksanakan sebagaimana direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2022, dan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022 dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022.

Segala upaya yang telah dilakukan selama ini oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kampar terangkum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar, yang dapat dijadikan barometer untuk senantiasa meningkatkan pelayanan kepada seluruh komponen masyarakat dalam rangka mewujudkan Kabupaten Kampar sebagai negeri berbudaya, berdaya dalam lingkungan masyarakat. Kinerja Pemerintah Kabupaten Kampar dapat dilihat dari laporan keuangannya, seberapa besar kontribusi setiap pelaksanaan kegiatan guna mendukung pencapaian kinerja sasaran stategis Kabupaten Kampar sekaligus dapat meningkatkan kinerja makro.

Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2022, kinerja Pemerintah Kabupaten Kampar mengalami peningkatan. Indikator-indikator yang menggambarkan kualitas pembangunan manusia Kabupaten Kampar seperti derajat kesehatan masyarakat dan tingkat pendidikan dinilai mengalami kenaikan yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil di kedua bidang tersebut telah mampu menggerakkan sebagian besar sistem kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Kampar. Ini juga tidak terlepas dari koordinasi yang terus menerus dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Kampar, masyarakat luas, dan dunia usaha.

Sementara itu, penurunan yang terjadi pada beberapa indikator tidak menyurutkan semangat Pemerintah Kabupaten Kampar untuk terus-menerus memperbaiki kinerjanya. Disadari bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar tidak mungkin dapat bekerja sendiri. Karena itu dalam masa ke depan akan dilakukan koordinasi yang lebih intensif dengan seluruh komponen masyarakat Kampar.

Pj. BUPATI KAMPAR

MHD. FIRDAUS